

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 4

TAHUN : 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten...

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dengan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

31. Peraturan...

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 88);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dengan

BUPATI BOGOR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

10. Permasalahan...

10. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD berkedudukan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan perencanaan perangkat daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bab ini juga menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis yang paling prioritas.

BAB V...

- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, bab ini memuat penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah memuat program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX : PENUTUP

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V...

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2019 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (4/105/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADE JAYA MUNADI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196606021997031001



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-27
2.1.4 Kondisi Umum Demografi	II-31
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-52
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-73
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-76
2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar	II-76
2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-90
2.4.3 Layanan Urusan Pilihan	II-96
2.5 Pencapaian Sasaran Perubahan RPJMD 2013-2018.....	II-132
2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	II-148
2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II-165
2.8 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-170
2.9 Pencapaian Kerjasama Daerah	II-175
 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2 Neraca Daerah	III-23
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-28
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-34
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-39
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-44
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-44
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-54
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-1



4.1.2 Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-3
4.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	IV-3
4.2 Isu-Isu Strategis.....	IV-15
4.2.1 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.....	IV-16
4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 2023.....	IV-18
4.2.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar.....	IV-28
4.2.4 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-53
4.2.5 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor.....	1V-55
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi.....	V-1
5.2 Misi.....	V-3
5.3 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN.....	V-5
5.4 Tujuan dan Sasaran.....	V-7
5.5 Program Pembangunan daerah	V-11
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif.....	VI-1
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial.....	VI-7
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah.....	VI-43
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait BUMD	VI-44
6.5 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023.....	VI-44
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..	VIII-1
BAB IX PENUTUP	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng.....	II-3
Tabel 2.2	Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2016.....	II-4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Sungai dan DAS.....	II-6
Tabel 2.4	Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor..	II-7
Tabel 2.5	Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor....	II-7
Tabel 2.6	Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor	II-9
Tabel 2.7	Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018	II-15
Tabel 2.8	Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor	II-19
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2018 (Juta Rupiah).....	II-24
Tabel 2.10	Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha, Tahun 2018**)	II-25
Tabel 2.11	Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan	II-26
Tabel 2.12	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 2018.....	II-28
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018	II-32
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018	II-39
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan, Tahun 2018.....	II-41
Tabel 2.16	Perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan sawah di Kabupaten Bogor	II-42
Tabel 2.17	Daya dukung pangan beras Kabupaten Bogor tahun 2018.....	II-42
Tabel 2.18	Daya Dukung Pangan (beras) Kabupaten Bogor tahun 2023.....	II-43



Tabel 2.19	Ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air bersih per kecamatan di Kabupaten Bogor	II-48
Tabel 2.20	Kualitas Air Sungai Berdasarkan Parameter Fisika dan Biologi di Kabupaten Bogor Tahun 2016	II-51
Tabel 2.21	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Konstan (Triliun)	II-52
Tabel 2.22	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun)	II-54
Tabel 2.23	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2018.....	II-55
Tabel 2.24	Inflasi Kabupaten Bogor dan Gabungan 7 Kota Jawa Barat periode Januari – September Tahun 2018 (2012=100)	II-60
Tabel 2.25	PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-58
Tabel 2.26	Indeks Gini Di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-59
Tabel 2.27	Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-64
Tabel 2.28	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-66
Tabel 2.29	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-70
Tabel 2.30	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-70
Tabel 2.31	Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-71
Tabel 2.32	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-72
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-72
Tabel 2.34	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-73
Tabel 2.35	Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapitadi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-74



Tabel 2.36	Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor	
	Tahun 2013-2018	II-74
Tabel 2.37	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bogor	
	Tahun 2013-2018	II-75
Tabel 2.38	Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor	
	Tahun 2013-2018	II-77
Tabel 2.39	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-77
Tabel 2.40	Persentase Sekolah Pendidikan Dalam Kondisi Baik	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-78
Tabel 2.41	Rasio Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-78
Tabel 2.42	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Penduduk	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-79
Tabel 2.43	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000)	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-80
Tabel 2.44	Jumlah Tenaga Medis dan Penduduk di Kabupaten Bogor	
	Tahun 2013-2018	II-80
Tabel 2.45	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-82
Tabel 2.46	Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan	
	Umum di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-83
Tabel 2.47	Rasio Jaringan Irigasi	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-84
Tabel 2.48	Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun	
	2013-2018	II-84
Tabel 2.49	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber	
	HPL/HGB di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-85
Tabel 2.50	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-86
Tabel 2.51	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-86
Tabel 2.52	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
	di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-87
Tabel 2.53	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bogor Tahun	
	2013- 2018	II-88



Tabel 2.54	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-88
Tabel 2.55	Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-88
Tabel 2.56	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-89
Tabel 2.57	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-90
Tabel 2.58	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-91
Tabel 2.59	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-91
Tabel 2.60	Rasio Penduduk ber-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-92
Tabel 2.61	Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-92
Tabel 2.62	Jumlah nilai investasi berskala nasional (trilyun) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-93
Tabel 2.63	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-94
Tabel 2.64	Kebudayaan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-94
Tabel 2.65	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-95
Tabel 2.66	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-96
Tabel 2.67	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-96
Tabel 2.68	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-97
Tabel 2.69	Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-98
Tabel 2.70	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-99
Tabel 2.71	Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-99



Tabel 2.72	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-100
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-101
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.....	II-134
Tabel 2.75	Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018 .	II-149
Tabel 2.76	Profil BUMD Kabupaten Bogor	II-166
Tabel 2.77	Komposisi Saham PT. BPR LPK Parungpajang.....	II-169
Tabel 2.78	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-171
Tabel 2.79	Rekapitulasi kerjasama Daerah Tahun 2014-2018.....	II-176
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2013-2018.....	III- 5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	III- 18
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	III-22
Tabel 3.4	Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	III-24
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018	III-35
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018.....	III-37
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018	III-39
Tabel 3.8	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	III-41
Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018.....	III-43
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	III-44
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	III-55
Tabel 3.12	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	III-55



Tabel 3.13	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor untuk Pendanaan Pembangunan Daerah pada Kurun Tahun 2019-2023.....	III-56
Tabel 3.14	Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2019-2023.....	III-58
Tabel 5.1	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023.....	V-9
Tabel 6.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.....	VI-3
Tabel 6.2	Pembagian Wilayah Pengembangan	VI-13
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019.....	VI-45
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023.....	VI-49
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023.....	VI-83
Tabel 6.6	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.....	VI-106
Tabel 6.7	Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	VI-110
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019.....	VII-5
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023.....	VII-42
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023	VIII-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023	VIII-5





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I-9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor	II-1
Gambar 2.2	Peta Morfologi Kabupaten Bogor	II-3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor	II-4
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor	II-5
Gambar 2.5	Peta DAS di Kabupaten Bogor	II-6
Gambar 2.6	Peta Geologi Kabupaten Bogor	II-8
Gambar 2.7	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor	II-8
Gambar 2.8	Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil	II-26
Gambar 2.9	Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bogor Berdasarkan BPBD dan BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014	II-27
Gambar 2.10	Peta Kawasan Banjir Kabupaten Bogor	II-29
Gambar 2.11	Peta Keretakan Tanah Kabupaten Bogor	II-30
Gambar 2.12	Peta Kawasan Peka Erosi Kabupaten Bogor	II-31
Gambar 2.13	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2017-2018	II-33
Gambar 2.14	Sex ratio Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-35
Gambar 2.15	Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Tahun 2017	II-36
Gambar 2.16	Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2018	II-37
Gambar 2.17	Kepadatan Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2017	II-37
Gambar 2.18	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor, Tahun 2017	II-38
Gambar 2.19	Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2018	II-40
Gambar 2.20	Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017	II-45



Gambar 2.21	Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017	II-46
Gambar 2.22	Peta selisih ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor.....	II-47
Gambar 2.23	Pola spasial sebaran ambang batas daya dukung air Kabupaten Bogor tahun 2017	II-47
Gambar 2.24	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2018 (%)	II-56
Gambar 2.25	Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018	II-57
Gambar 2.26	PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Juta).....	II-58
Gambar 2.27	Gini ratio menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	II-60
Gambar 2.28	Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2013-2017.....	II-61
Gambar 2.29	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018.....	II-63
Gambar 2.30	IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017.....	II-65
Gambar 2.31	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2013-2018*	II-66
Gambar 2.32	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2013-2018*	II-67
Gambar 2.33	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2013-2018	II-68
Gambar 2.34	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2012-2018	II-69
Gambar 3.1	Rata-rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018.....	III-5
Gambar 3.2	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018	III-8
Gambar 3.3	Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Bogor Tahun 2014-2018.....	III-14
Gambar 3.4	Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014-2018.....	III-15
Gambar 3.5	Rata-Rata Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2018	III-19



Gambar 3.6	Rata-Rata Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2013-2018.....	III-20
Gambar 5.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat	V-5
Gambar 5.2	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan	V-6
Gambar 5.3	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan tema rancangan teknokratik RPJMN	V-7
Gambar 6.1	Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD	VI-2
Gambar 6.2	Peta Wilayah Pengembangan	VI-14
Gambar 6.3	Peta Rencana Struktur Ruang.....	VI-17
Gambar 6.4	Peta Jaringan Prasarana Wilayah.....	VI-30
Gambar 6.5	Peta Rencana Pola Ruang.....	VI-42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten Bogor memasuki tahapan ke empat untuk periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023, sekaligus merupakan tahapan penghujung berakhirnya periode perencanaan jangka panjang tahun 2025. Tahapan keempat ini difokuskan pada optimalisasi seluruh urusan pemerintahan daerah.

Merujuk pada proses pemilihan kepala daerah, pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Bogor melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada tersebut, telah ditetapkan pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan KPU Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018. Adapun pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7435 tanggal 25 September 2018.

Bupati dan wakil bupati terpilih yang telah dilantik berkewajiban menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sesuai periode masa bhakti sebagaimana ketentuan pasal 1 nomor 26 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, serta berkewajiban menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut agar daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, RPJMD menjadi representasi adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan pada aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan *antardaerah*, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Disamping itu, RPJMD juga merupakan representasi dari pengaturan yang bersifat afirmatif, dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan daerah yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Di sisi lain, RPJMD juga menggambarkan adanya hubungan sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam upaya mencapai visi, melalui pelaksanaan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan tahun demi tahun berdasarkan kewenangan urusan konkuren daerah. Dengan demikian dibutuhkan adanya perencanaan yang baik dan berkualitas serta bersinergi dengan perencanaan pusat dan daerah, agar menghasilkan *output, outcome, impact dan benefit* bagi masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Dengan adanya Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut, diharapkan RPJMD dapat disusun dengan mempertimbangkan perencanaan teknokratik, sesuai dengan kewenangan konkuren daerah, yang terintegrasi dengan perencanaan politis kepala daerah dalam visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.

Berdasarkan pentahapan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-

2025, substansi arah pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **mengoptimalkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan.** Hal ini menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan, dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dapat memayungi seluruh upaya pencapaian target kinerja daerah yang terinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan perencanaan tahunan perangkat daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) hingga tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta daerah kabupaten/kota yang berbatasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan terkait hubungan antar dokumen perencanaan adalah Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD, RTRW dan RPJMN**.

Di sisi lain, hubungan antar dokumen tersebut merupakan bentuk dari sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 159-160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan substansi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilaksanakan diantaranya dalam penyusunan RPJMD.
2. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor,

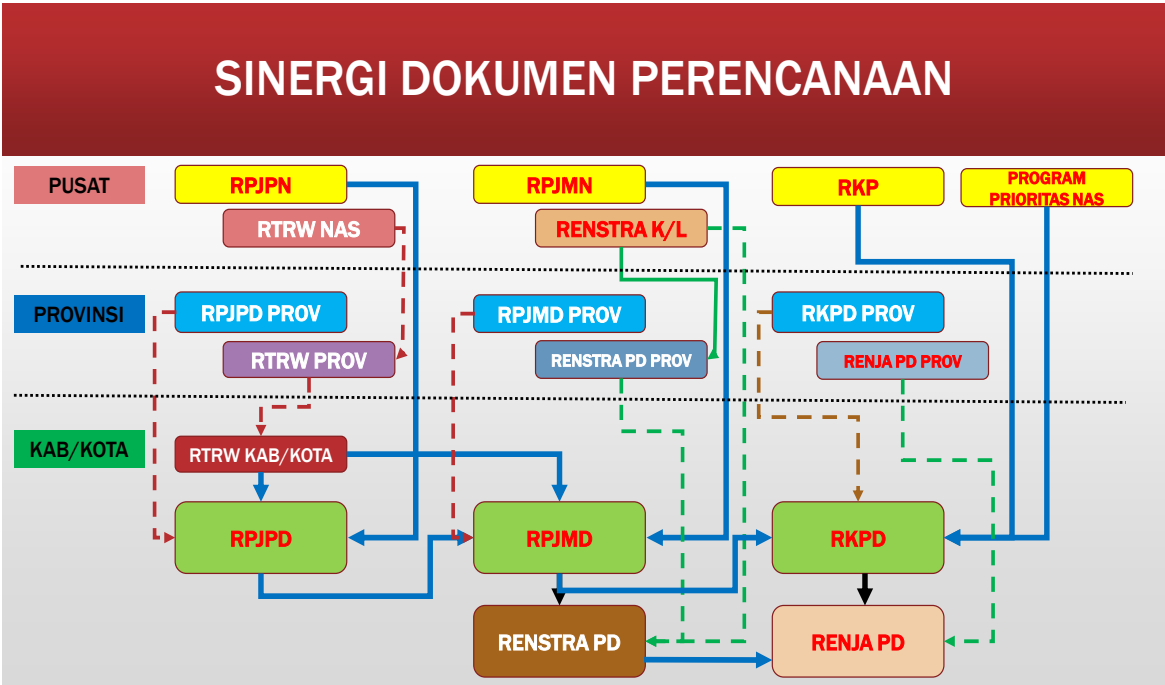
serta pembangunan antar daerah.

3. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.
4. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan menelaah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berdampak dan harus dipedomani oleh Kabupaten Bogor.
5. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.
6. Mempedomani RTRW sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 dalam penyusunan RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.
7. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
8. Mempedomani RPJM Nasional yaitu Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
9. Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor dengan arah serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

10. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya.

Hubungan antar dokumen disajikan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah :

1. sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023;

2. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini juga menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis yang paling prioritas.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, bab ini memuat penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah memuat program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

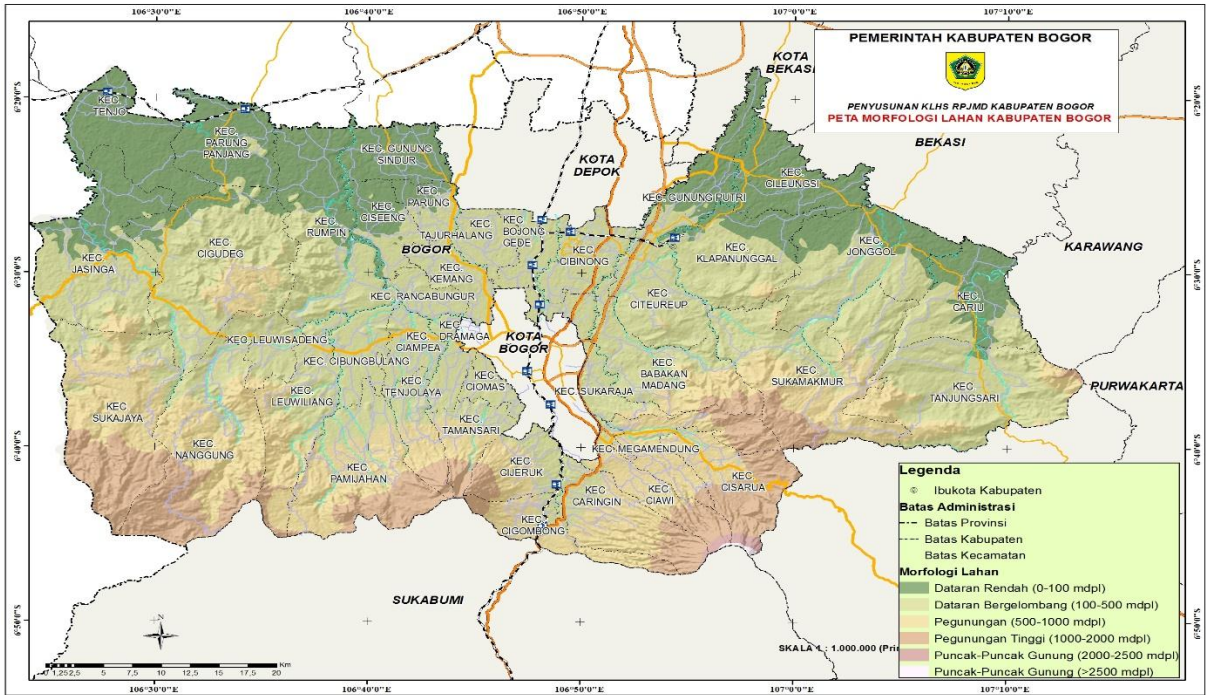
- sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor.

2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.2
Peta Morfologi Kabupaten Bogor

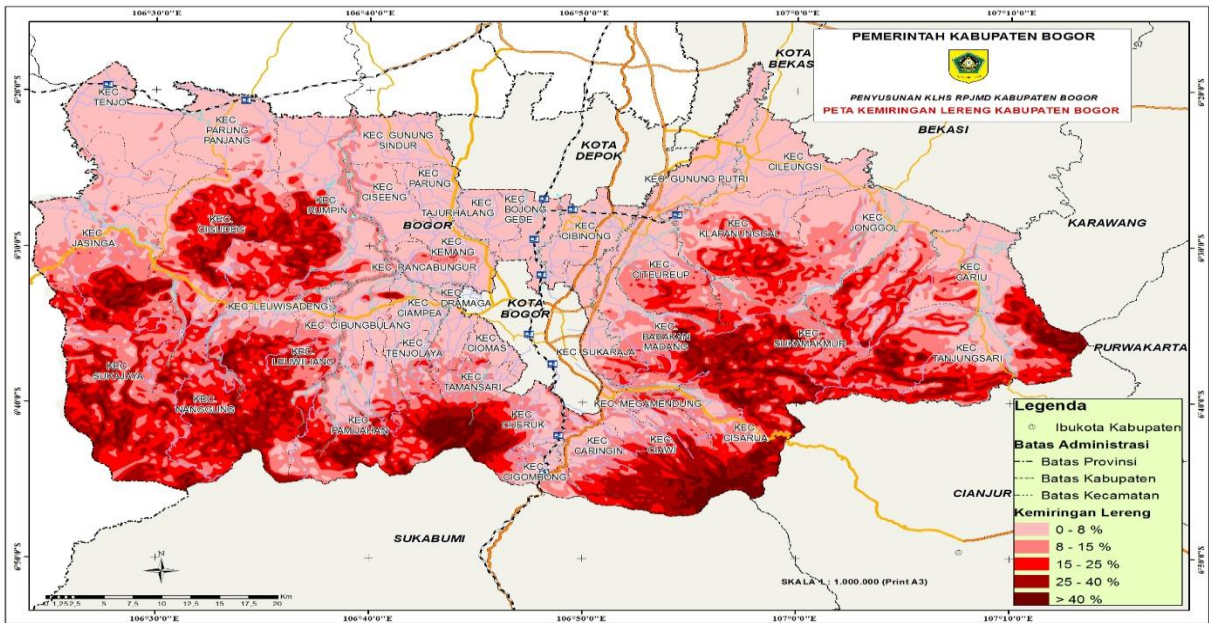
b. Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8% hingga >40%. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8% merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,76 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng >40% yakni seluas 9.800,52 Ha. Secara lebih lengkap, data luas Kabupaten Bogor berdasarkan Kemiringan Lereng disajikan pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.1
Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Kelas Lereng (%)	Persentase	Luas (Ha)
1	0 – 8	43,64%	130.320,76
2	8-15	23,38%	69.806,34
3	15-25	17,94%	53.580,79
4	25-40	11,76%	35.113,54
5	> 40	3,28%	9.800,52
Total		100%	298.620,26

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor

c. Klimatologi

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata- rata sebesar 146,2 mm/bulan

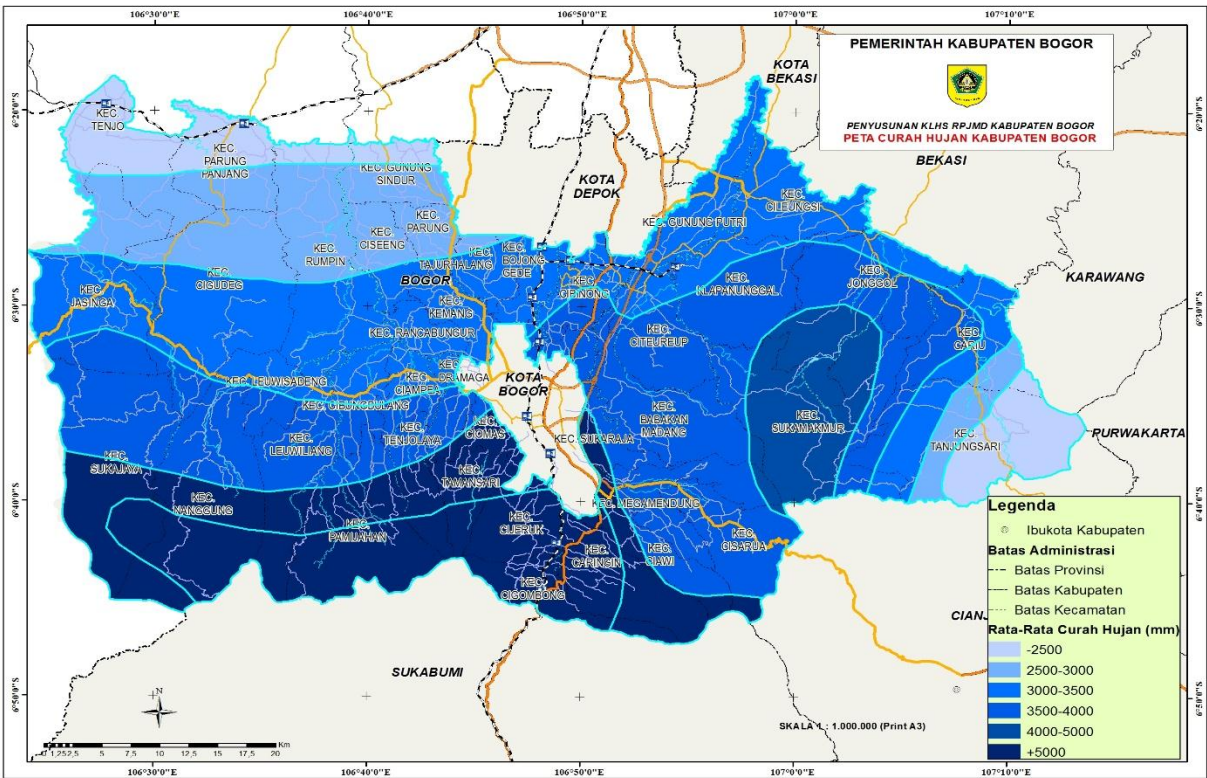
Tabel 2.2
Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2016

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara			Curah Hujan	Hari Hujan
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata		
Januari	26,4	32,1	23,7	53	98	86	462	23
Februari	25, 7	30,8	23,3	64	98	89	507	26
Maret	26,5	32	23,7	55	98	86	450	24
April	26,7	32,7	24	55	98	85	558	26
Mei	27,1	32,6	24,1	50	97	84	330	16
Juni	26,2	31,9	23,1	50	99	84	373	30



Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara			Curah Hujan	Hari Hujan
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata		
Juli	26,1	32	22,8	52	97	83	293	29
Agustus	26,1	32,2	22,7	40	97	82	316	26
September	26,2	31,8	23,2	53	97	83	439	28
Oktober	26	31,1	23	54	98	86	398	29
November	26	31,5	23,3	58	98	87	355	30
Desember	26	30,9	23	55	97	82	117	27
Rata-rata	24,4	29,6	21,8	50	91	79	462	23

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka tahun 2017



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor

d. Hidrologi

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 9 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cikarang; (7) DAS Cibeet; (8) DAS Ciberang; (9) DAS Ciberureum. Data mengenai luas wilayah sungai dan DAS disajikan pada tabel berikut.

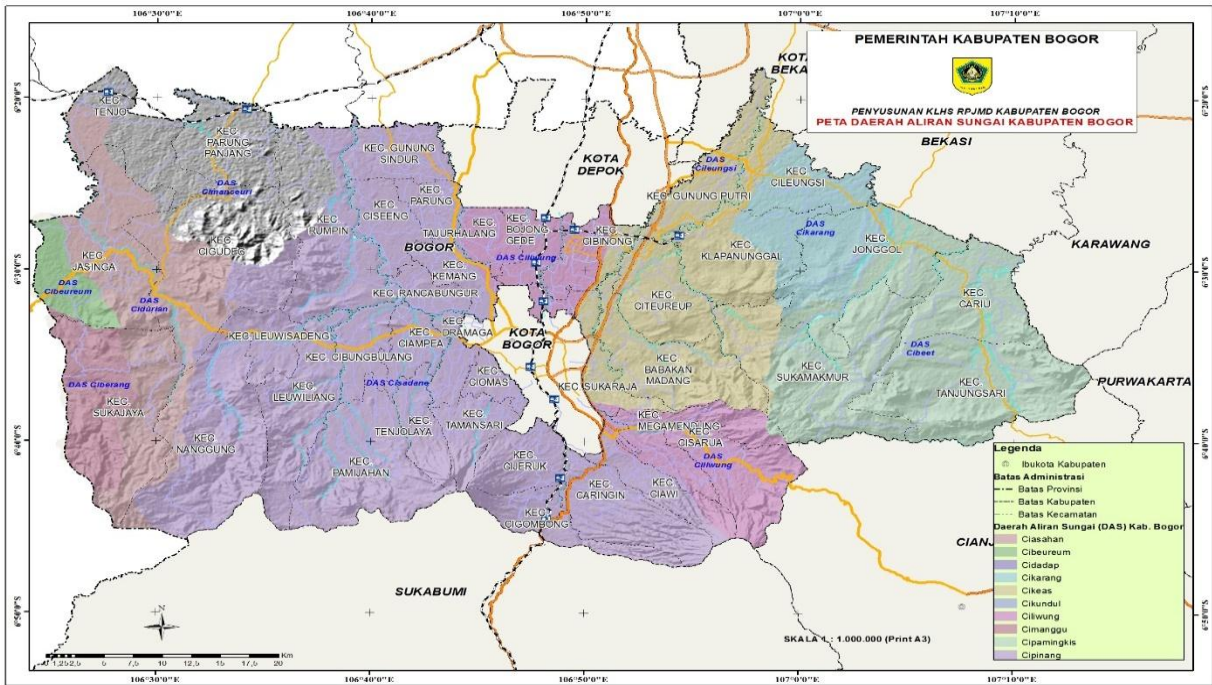


Tabel 2.3
Luas Wilayah Sungai dan DAS

No	Wilayah Sungai Dan DAS	Persentase (%)	Luas (ha)
1	WS Cidanau - Ciujung - Cidurian	13,90%	41.505,98
	DAS Cibeureum	1,41%	4.207,46
	DAS Ciberang	2,99%	8.938,77
	DAS Cidurian	9,50%	28.359,75
2	WS Ciliwung – Cisadane	66,16%	197.572,13
	DAS Cileungsi	12,75%	38.069,83
	DAS Ciliwung	8,67%	25.899,88
	DAS Cimanceuri	8,47%	25.293,48
	DAS Cisadane	36,27%	108.308,94
3	WS Citarum	19,94%	59.542,14
	DAS Cibeet	14,86%	44.377,92
	DAS Cikarang	5,08%	15.164,23
Total		100,00%	298.620,26

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor

Daerah aliran sungai terluas adalah DAS Cisadane dengan luas 108.308,94 Ha, kemudian disusul oleh DAS Cibeet dengan luas 44.377,92 Ha.



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.5
Peta DAS di Kabupaten Bogor

e. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, batuan intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Jenis batuan gunung api muda merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Tabel 2.4

Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor

No	Jenis Batuan	Persentase (%)	Luas (ha)
1	Batu Gamping	2,42%	7.223,40
2	Batuan Intrusi	2,89%	8.615,26
3	Batuan Tersier	6,67%	19.925,32
4	Endapan Permukaan	24,08%	71.906,73
5	Gunung Api Muda	47,55%	141.980,41
6	Gunung Api Tua	16,40%	48.969,15
Total		100,00%	298.620,26

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor

Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdapat 16 jenis yang tersebar di seluruh wilayah. Asosiasi Latosol merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,47 Ha mendominasi jenis tanah di bagian utara. Luasan jenis tanah di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

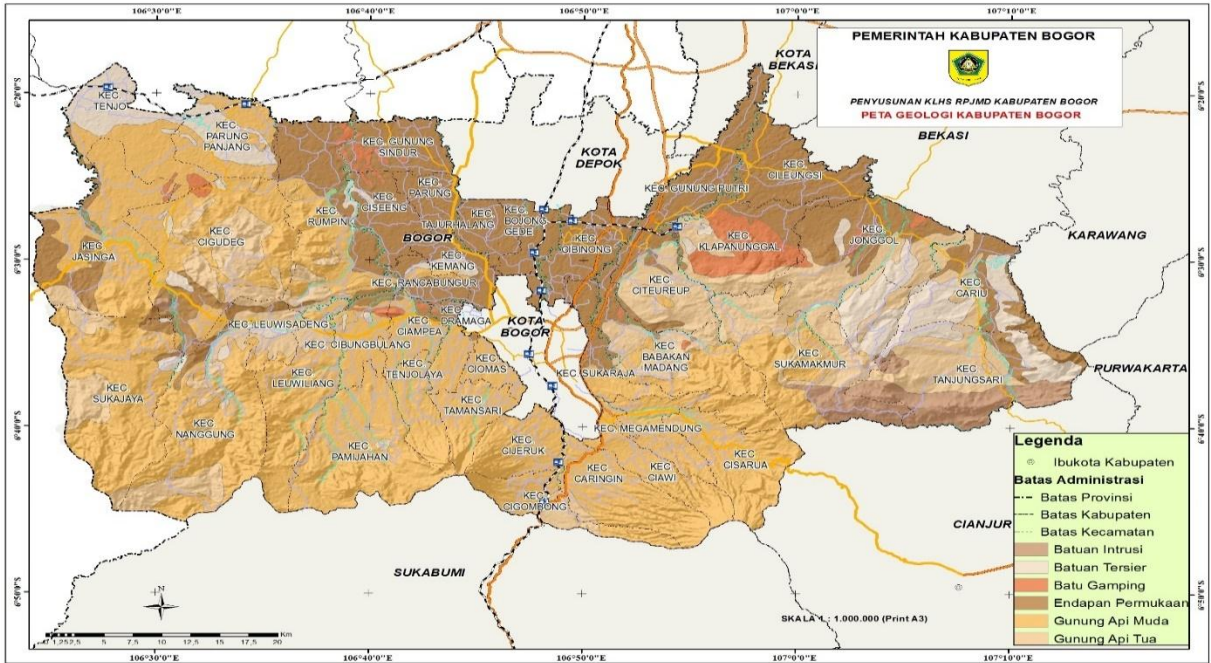
Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor

No	Jenis Tanah	Persentase (%)	Luas (ha)
1	Aluvial	9,35%	27.915,97
2	Andosol	1,07%	3.188,24
3	Asso Lat mrh lat clk kemrh	24,94%	74.488,47
4	Asso andosol regosol	1,31%	3.914,10
5	Asso Lat clk lat kekuningan	3,05%	9.116,70
6	asso Lat clk lat kemerahan	7,43%	22.175,73
7	asso Lat clk regosol	7,47%	22.311,77
8	Asso podsolik kng hidromof kelabu	0,63%	1.890,28
9	Gromosol	5,19%	15.503,31
10	Komp Lat red kekng lat ckl kmrh dan lits	15,17%	45.310,18
11	Komp red merah kekng pod merah kekng	3,14%	9.385,37
12	Pod merah kekuningan	10,71%	31.993,87
13	Podsolik kekuningan	3,85%	11.506,28
14	Podsolik merah	3,31%	9.890,23
15	Regosol	2,68%	7.999,74



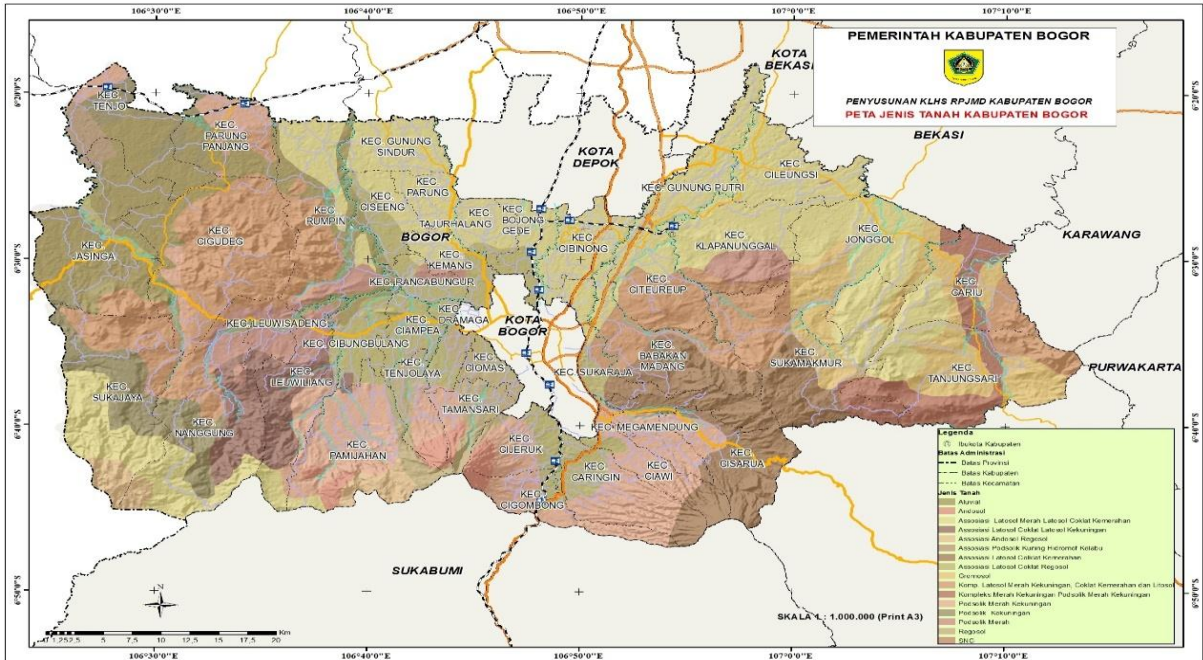
No	Jenis Tanah	Persentase (%)	Luas (ha)
16	SNG	0,68%	2.030,02
Total		100%	298.620,26

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.6
Peta Geologi Kabupaten Bogor



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.7
Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi perlu dikembangkan adalah pertanian dengan luas lahan 39.000 Ha atau 13,06 % dari luas Kabupaten Bogor. Selain potensi produksi tanaman pangan tanaman, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa Zona sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.6
Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor

Zona	Kecamatan	Arah Pengembangan
1.	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	Agrosilvopastoral , yaitu pengembangan <i>agroforestry</i> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan
2.	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan
3.	Ciampea, Tenjojaya, Dramaga, Ciomas	Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan
4.	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur	Industri perdesaan dan pengembangan UMKM , yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan
5.	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	Diversifikasi pertanian dan agroekowisata
6.	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7.	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	Pertanian perkotaan dan industri . Pengembangan <i>urban agriculture</i> bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya
8.	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol	Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2018

Selain meningkatkan produksi tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Periode tahun 2018 – 2023 ke depan setiap kecamatan didorong untuk mengembangkan satu komoditi unggulan primer (pertanian, peternakan dan perikanan), satu komoditi unggulan sekunder (UKM pengolahan) dan satu komoditi unggulan tersier (jasa pariwisata).

1. Pertanian Tanaman Pangan

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Pengembangan Talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Produksi Talas tahun 2018 mencapai 12.690 ton, sentra komoditi unggulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Dramaga, Caringin, Cibungbulang dan Pamijahan. Sedangkan produksi ubi kayu pada tahun 2018 mencapai 101.276 ton, sentra komoditi terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup dan Sukamakmur. Varietas yang telah dikembangkan adalah Varietas bentul, bulkok, hijau dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50-100 ton/ha dengan kadar pati 25-31%, sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20 - 25 ton/ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi cukup tinggi. Komoditi unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng, dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Produksi ubi jalar yang

dihasilkan selama tahun 2018 sebanyak 52.839 ton, hal ini dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas. Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan bantuan alat pengolahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani.

2. Pertanian Hortikultura

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan hortikultura, antara lain : Jambu Biji, Pepaya, Rambutan, Manggis, Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Nanas. Produksi Jambu Biji Kristal tahun 2018 mencapai 5.217 ton, dengan sentra komoditi unggulan diarahkan ke Kecamatan Rancabungur dan Dramaga, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Jasinga, Cigombong, Cigudeg dan Pamijahan. Sentra komoditi unggulan tanaman Pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur, sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Caringin, Jasinga, Cigudeg dan Tenjo, dengan produksi mencapai 6.140 ton pada tahun 2018. Komoditas Rambutan banyak dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo dan Rumpin, dengan produksi mencapai 17.376 ton pada tahun 2018. Komoditas Manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan ke negara-negara Timur Tengah. Pengembangan Manggis telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Good Agricultural Practices* dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditi unggulan manggis terdapat di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg Sukamakmur dan Jasinga wilayah pengembangannya di Kecamatan Nanggung, dengan produksi mencapai 6.543 ton pada tahun 2018. Sentra komoditi unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah

pengembangan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo, Ciseeng, Nanggung dan Gunung Sindur. Sentra komoditi unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari dengan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Megamendung, Gunung Sindur dan Ciseeng.

3. Perkebunan

Komoditi unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala dan cengkeh. Produksi kopi pada tahun 2018 sebanyak 3.210 ton. Sentra komoditi unggulan kopi ada di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung dan Cariu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun. Pada tahun 2018 produksi karet rakyat sebesar 109 ton. Sentra komoditi unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, wilayah pengembangannya terdapat di Kecamatan Tanjungsari. Sentra komoditi unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Leuwisadeng, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk dan Tamansari. Produksi pala pada tahun 2018 sebesar 366 ton, daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Sentra komoditi unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cijeruk adapun produksi cengkeh tahun 2018 sebesar 168 ton. Sentra komoditi cengkeh yaitu di Kecamatan Caringin, Cariu, Cigudeg, Cijeruk, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Pamijahan.

4. Perikanan

Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018 produksi ikan konsumsi sebanyak 122.131 ton dan Benih ikan konsumsi sebanyak 5.545.494 RE,

dengan komoditi unggulan ikan lele, ikan gurame dan ikan mas. Komoditas lele dikembangkan di Kecamatan Ciseeng, Parung dan Kemang. Komoditas gurame merupakan unggulan yang dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede. Selain itu, daerah potensial lainnya adalah Parung. Sedangkan komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Komoditas unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 283.469 RE. Sentra komoditi unggulannya diarahkan di Kecamatan Ciampea dan Cibinong, dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Parung.

5. Peternakan

Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2018 antara lain sapi perah yang mencapai populasi sebanyak 8.269 ekor, dengan produksi susu Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar 18.014.842 liter atau 132,78% dari target sebesar 13.567.384 liter. Sentra komoditi unggulannya terdapat di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Cijeruk. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk, yaitu selain susu juga yoghurt dan bahan makanan lainnya. Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2018 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 18.853 ekor. Sentra komoditi unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari. Konsumsi protein hewani asal ternak Kabupaten Bogor sebesar 6,29 gram/kapita/hari. Konsumsi protein hewani salah satunya didukung oleh produksi daging, susu dan produksi telur. Mengenai komoditi telur yang dominan didukung oleh produksi dari ayam ras petelur dengan populasi ayam ras petelur pada tahun 2018 sebanyak 4.823.943 ekor. Adapun produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 47.405.812 kg.

6. Pariwisata

Daya tarik wisata Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat, kebudayaan dan keurbakalaan.

Kawasan Puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bogor-Halimun dan sekitarnya dengan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Gunung Gede-Pangrango dan KSPN Gunung Halimun Salak, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN Bogor-Ciawi dan KPPN Alam Perkotaan Bogor-Depok. Dalam konteks perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu KPPP alam perkotaan Bogor Depok dan sekitarnya, serta KPPP Ekowisata Gunung Halimun Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor yang disusun pada tahun 2014, pengembangan pariwisata diarahkan menjadi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Kabupaten, 8 (delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan 15 (lima belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagai berikut :

- 1) **Destinasi wisata perkotaan**, terdiri dari KSP Cibinong, KSP Sentul dan KSP Minapolitan serta KPP Parung, KPP Cibinong, dan KPP Sentul. Daya tarik unggulannya adalah Fasilitas perkotaan, Taman Budaya Sentul, Sentul City, Sirkuit Sentul, Jungle Land, Wana Wisata Gunung Pancar, Giri Tirta Kawah Hitam, Air Panas Tirta Sanita dan Kawasan Minapolitan;
- 2) **Destinasi wisata MICE dan rekreasi**, terdiri dari KSP Puncak, KSP Tamansari dan KSP Lido, serta KPP Puncak, KPP Tamansari dan KPP Lido. Daya tarik unggulannya adalah Wana Wisata Curug Panjang, Curug Cilember, Taman Wisata Riung Gunung, Agrowisata Gunung Mas, PTPN Ciliwung, Curug Kembar, Wana Wisata Citamiang, Telaga Warna, Curug Tujuh Cilember, Kopo, Tugu Utara, Tugu Selatan, Curug Nangka, Curug Sawyer, Setu

Tamansari, Bumi Perkemahan Sukamantri, Tirta Zamzam, PPKA Bodogol, Curug Jingkrak, Telaga Malingping, Lido, Pancawati, Curug dan Cikaracak;

- 3) **Destinasi wisata warisan budaya dan pendidikan**, terdiri dari KSP Ciaruteun serta KPP Jasinga, KPP Parungpanjang, KPP Batutulis dan KPP Dramaga. Daya tarik unggulannya adalah Batutulis Ciaruteun, Pasir Angin Cibungbulang, Situs Kampung Muara dan Situs Kerajaan Horotan;
- 4) **Destinasi wisata kreatif**, terdiri dari KPP Gunungputri, KPP Tanjungsari dan KPP Sukamakmur. Daya tarik unggulannya adalah Setu Gunungputri, Outbond Cioray, Tebing Cagak, Goa Landak, Goa Bajing, Goa Gajah, Goa Sangiang, Goa Lalai, Karst Tajur dan Air Panas Cigekbrong;
- 5) **Destinasi wisata ekowisata**, terdiri dari KSP Gunung Salak Endah serta KPP Halimun dan KPP Gunung Salak Endah. Daya tarik unggulannya adalah PTPN Cianten/Puraseda, Air Panas GSE Lokapurna, Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Ngumpet, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Air Panas Ciparay dan Curug Luhur.

Pada Tabel 2.5. di bawah ini dijelaskan secara rinci jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 baik wisatawan yang berasal dari dalam negeri (domestik), maupun wisatawan yang berasal dari luar negeri (mancanegara) berdasarkan masing-masing Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.7
Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah
Kunjungan Wisatawan Tahun 2018

No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	Kecamatan Caringin			
	Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Bodogol/ TNGGP	730	-	730
1	Konservasi Alam Bodogol Caringin	-	-	-
2	Curug Cisuren	-	-	-
3	Curug Cipadaranten	-	-	-
4	Curug Cikaweni	-	-	-



No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
5	Curug Santa Monika	-	-	-
6	Wisata Arum Jeram	17.563	1.432	18.995
	- RPTN Cimande (TNGGP)	291	-	291
7	Curug Cikaracak	-	-	-
B	Kecamatan Megamendung			
	- RPTN Tapos	-	-	-
8	Curug Naga	-	-	-
9	Wana Wisata Curug Panjang (Perum Perhutani KPH Bogor)	37.295	211	37.506
10	Taman Wisata Matahari (Swasta)	1.170.441	24.635	1.195.076
C	Kecamatan Cisarua			
	- RPTN Cisarua	893	-	893
11	Curug Beret	-	-	-
12	Boru Bolang	-	-	-
13	Baru Jeruk	979	-	979
14	Bumi Perkemahan Citamiang	1.141	-	1.141
15	Curug Kembar Batu Layang (Perhutani)	587	-	587
16	Trek Sepeda Puncak Kondang (Perhutani)	1.740	-	1.740
17	Taman Safari Indonesia	1.740.861	151.259	1.892.120
18	Telaga Warna	48.784	3.412	52.196
19	Wisata Agro Gunung Mas	441.568	-	441.568
20	Taman Wisata Riung Gunung	-	-	-
21	Curug Cilember	235.224	41.947	277.171
22	Taman Melrimba	30.600	12.300	42.900
23	Wisata Alam Gunung Kencana (Perhutani)	6.770	-	6.770
D	Kecamatan Babakan Madang			
24	Curug Barong Lewihejo (Perhutani dan LMDH)	25.786	41	25.827
25	Curug Putri Kencana (Perhutani dan LMDH)	6.838	5	6.843
26	Sirkuit Sentul	-	-	-
27	TWA Gunung Pancar	78.370	82	78.452
28	Sentul Eco Edu Tourism Forest	16.758	-	16.758
29	Alam Fantasi/ Taman Budaya	46.641	-	46.641
30	JungleLand	498.319	7.520	505.839
31	Agrowisata Bukit Hambalang	80.816	-	80.816
32	Air panas Gunung Pancar	-	-	-
E	Kecamatan Sukamakmur			
33	Curug Arca	-	-	-
34	Curug Ciherang	58.857	26.892	85.749
35	Curug Cipamingkis	30.415	403	30.818
36	Curug Cibereum	508	-	508
F	Kecamatan Tenjolaya			
37	Aldepos	18.749	-	18.749
G	Kecamatan Tamansari			
38	Curug Luhur	-	-	-
39	Curug Nangka	-	-	-



No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
H	Kecamatan Pamijahan			
40	Pemandiaan Air Panas GSE	29.506	18	29.524
41	Curug Cigamea	15.934	9	15.943
42	Curug Seribu	12.068	225	12.293
43	Curug Ngumpet	22.601	59	22.660
44	Wana Wisata Buper Gunung Bunder	196	-	196
45	Ekowisata Kawah Ratu	-	-	-
46	Curug Batu ampar	-	-	-
47	Curug Ciparay	-	-	-
48	Wisata Alam Mustika Manik	20.410	19	20.429
49	Curug Cihurang	-	-	-
50	Curug Pangeran	82.558	123	82.681
51	Wisata Alam Ranggon Hills	35.926	38	35.964
52	Cipanas Karang Endah	4.000	-	4.000
53	Curug Gua Lumut	6.660	-	6.660
54	Curug Balong Endah	11.718	5	11.723
I	Kecamatan Ciampea			
55	Kampung wisata Cinangneng	-	-	-
56	Gunung Kapur Ciampea	4.000	-	4.000
57	Kampung Wisata Rumah Joglo	-	-	-
J	Kecamatan Cigudeg			
58	Goa Gudawang	7.100	-	7.100
K	Kecamatan Leuwiliang			
59	Panorama Pabangbon	95.494	-	95.494
60	Curug Cikuluwung	500	-	500
61	Bukit Bintang	28.661	-	28.661
62	Bakukung	775.495	-	775.495
L	Kecamatan Cibungbulang			
63	Curug Lembah Pelangi	-	-	-
64	Taman Air Gunung Handeleum	-	-	-
M	Kecamatan Rumpin			
65	Gunung Munara	500	20	520
N	Kecamatan Parung			
66	Pemandian Air Tirta Sayaga	142.415	936	143.351
O	Kecamatan Cileungsi			
67	Taman Wisata Mekarsari	206.352	15.016	221.368
P	Kecamatan Cijeruk			
68	Cibalung Happyland	75.651	-	75.651
69	Warso Farm	-	-	-
Q	Kecamatan Cigombong			
70	Telaga Malimping	667	-	667
71	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	1.151	-	1.151
72	Rekreasi Lido	-	-	-
R	Kecamatan Citeureup			
73	Kebun Wisata Pasir Mukti	44.244	-	44.244



No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
74	Goa Garunggang	20	-	20
75	Goa cikekenceng	324	-	324
S	Kecamatan Klapanunggal			
76	Goa Cidomba	94	-	94
77	Goa Ciasem	87	-	87
78	Goa Cikarae	141	-	141
T	Kecamatan Tanjungsari			
79	Penangkaran Rusa/ WW Giri Jaya	819	-	819
U	Kecamatan Cariu			
80	Curug Green Canyon Cariu	10.000	60	10.060
81	Curug Cilalay	3.500	20	3.520
V	RHU (REKREASI HIBURAN UMUM)	-	-	-
	Gunung Geulis Golf	11.291	22.123	33.414
	PSP Golf	46.040	4.596	50.636
	Palm Hills Golf	35.486	19.325	54.811
	Lido Golf (renovasi rumput)	-	-	-
	Water Kingdom	141.142	-	141.142
	Villa Khayangan	237.071	-	237.071
	Gelanggang Olah raga (Kolam Renang)	134.168	640	134.808
	Gelanggang Olah raga (Arena Futsal)	38.098	-	38.098
	Gelanggang Olah raga (Fitness)	7.076	-	7.076
	Arena Bernyanyi (Karaoke)	5.730	-	5.730
	Refleksi	170.711	2.000	172.711
	Desa Wisata (25 Desa wisata)	110.149	4.560	114.709
TOTAL		7.173.278	339.931	7.513.209

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, tahun 2018

7. Pengembangan Geopark

Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang sederhana dan relatif mudah, murah, fleksibel & efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan bumi yang sekaligus dapat mensejahterakan rakyat. Sejak Tahun 2015 Konsep Geopark sudah menjadi program Unesco, melalui Jejaring Internasional Unesco Global Geopark. Dalam membangun Geopark suatu kawasan memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (outstanding), didalamnya termasuk mempunyai nilai arkeologi, ekologi (biodivessity) dan budaya (cultural), pada pengelolaannya masyarakat lokal dan otoritas setempat bekerjasama melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniakan kekhasan secara Geografis. Terdapat empat gunung yang mengelilingi Kabupaten Bogor yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun. Selain itu Kabupaten Bogor berada tidak jauh dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Berdasarkan posisi geografis ini Kabupaten Bogor mempunyai fungsi penting secara regional yaitu : (a) Merupakan salah satu kantung permukiman penduduk Jabodetabek (15% penduduk tinggal di Kab. Bogor); (b) Penyediaan Lahan Pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (39 rb. ha lahan pertanian) dan (c) Perlindungan tata air untuk wilayah sekitarnya.

Hal ini tentunya berdampak pada konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor, pada satu sisi terjadi tarik menarik kepentingan pemanfaat wilayah untuk kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat di sisi lain ada kewajiban mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan tata air yang berarti terbatasnya ruang untuk berusaha. Konsep Geopark diharapkan dapat menjawab berbagai rencana pengembangan kawasan yang dapat mengenerate pendapatan daerah tanpa harus kehilangan fungsi perlindungan tata air.

Potensi *geo diversity*, *bio diversity* dan *cultural diversity* yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan calon pengembangan kawasan geopark tersaji pada table 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
1	CIAMPEA	3.304,42	Gunung Kapur Ciampea		Kampung wisata Cinangneng
					Kampung Wisata Rumah Joglo
					Cakrawala Nuansa Nirwana
2	JASINGA	14.340,74	Curug Idas	Panorama Pabangbon	Situs Garisul (makam raja-raja Islam)
			Setu Kadongdong	KK Dungus Iwul	Makam Mbah Muhyidin
			Curug Bandung	KK Yan Lapa	Situs Mbah Sohib



NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
			Pangradin		
			Setu Jantungeun	KDHTK Haur Bentes	Situs Gedong Sawah, ds Pamagersari
			Curug Perang Jugalayaja	Perkebunan Sawit	
			Sungan Cidurian	Perkebunan Karet	
3	LEUWILIANG	9.103,30	Curug Lontar	Bukit Bintang	Trek Motorcross
			Curug Cipuraseda	Perkebunan Manggis Rakyat	Situs PLTA Karacak
			Curug Cikoneng/Muara Tilu	PTPN VIII Cianten	Arung Jeram Cianten
			Curug Lontar	Camping Ground Cianten	Situs Waduk Gunung Bubut
			Curug Cicandra		Situs Bendung Cianten
			Curug Cibeureum		
			Air Panas Cipanas		
4	LEUWISADENG	3.539,12	Kawasan Gunung Api Purba	Perkebunan Manggis	Situs Moseleum Van Motman
5	NANGGUNG	16.369,12	Eks Pertambangan bawah tanah Antam	Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Pengamatan elang, Pengamatan Oa, Habitat Anggrek Raksasa, Hutan Hujan Tropis, Aneka fauna)	Pendopo Bupati
			Curug Sawyer	Perkebunan The Nirmala (Sinan Mas)	Situs Pasir Jambu
			Leuwi Bongbang	Nirmala Rose	Situs Kramat Mbah Kudung
			Setu Nirmala	Agromedika	Situs Kramat Mbah Langgar
			Curug Macan	Persawahan dengan terasering	Kampung Malasari
					Kampung Malani (Pencak silat, Pertanian)
					Desa Wisata Malasari
6	PAMIJAHAN	12.486,01	Pemandiaan Air Panas GSE, Kp Ciparay	Wana Wisata Buper Gunung Bunder	Desa Wisata Ciasihan
			Curug Cigamea, Kp Rawa Bogo ds Gunung Sari	Wisata Alam Mustika Manik	Desa Wisata Gunungsari
			Curug Seribu, Kp Rawa lega ds Gunungsari	Wisata Alam Ranggon Hills	Situs Pancuran Tujuh



NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
			Curug Ngumpet, Kp Cimudal ds Gunungsari		Situs Kuta Gegelang
			Ekowisata Kawah Ratu		Tugu Eyang Cakrabuana
			Curug Batu ampar		Desa Wisata Ciasmara
			Curug Ciparay		
			Curug Batu Kursi		
			Curug Saderi		
			Curug Cihurang		
			Curug Pangeran		
			Curug Gua Lumut		
			Sumber air panas Cipanas Karang		
			Gunung Menir		
7	TENJO	8.321,53			DW Dodol
8	TENJOLAYA	3.681,50	Curug Ciampea (<i>Green Lagoon</i>)	Wisata Edukasi dan Konservasi Tanaman Obat Lokal	Aldepos
			Curug Segitiga		Desa Wisata Tapos 1
			Curug Dua		Desa Wisata Gunung Malang
			Curug Gendang		Kawasan Situs Cibalay (Situs Endong Kasang, Balai Kambang, Kebon Kopi, Jami Picing, Batu Bergores, Cipangantehan, Pasir Manggis dan Arca Domas)
			Curug Goong		
			Curug Sawyer		
			Curug Cipeteuy		
9	TAMANSARI	3.885,69	Curug Luhur	Rumah Ulat Sutra	Kampung Budaya Sindang Barang
			Curug Nangka	Taman Kupu-kupu	Pura Jagatkarta
				Tanaman Hias	Viara SNI
					Desa Wisata Tamansari
					Desa Wisata Pasir Eurih
					Desa Wisata Sukajadi
					Highland Park Resort
					Situs Pasir Kramat Calobak
					Situs Batu Tapak
10	SUKAJAYA	16.090,48	Kampung Teletubies, kiara pandak	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampung Adat Urug, desa kiara pandak

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
			Curug Ciaspa, kiara pandak	Pemandangan Persawahan	Batu Tapak, kiara pandak
			Curug Kembang, Pasir madang	Pemandangan Sungai Cibadak	Desa Wisata Kiara Sari
					Pembuatan Gula Kawung
					Pembuatan Sapu Awis
11	RUMPIN	13.696,17		Gunung Munara	Desa Wisata Gobang
					Kampung Rol Panongan
12	CISEENG	4.129,07		Minapolitan	Desa wisata Ciseeng
13	CUGUDEG	17.771,23	Goa Gudawang	Pemandangan Persawahan	Situs Batu Tapak tenjoleat
			Curug Rahong	Pemandangan Perkebunan Sawit, ds cigudeg	Batu Dakon Sumur Tujuh
			Curug Sigeulis, ds wargajaya	Pemandangan Perkebunan Karet, ds cigudeg	Batu Tapak
			Kawasan pertambangan (karst)		DPW Cipining Angklung Gubrag
			Setu Cinyiru		
			Danau Quarry		
14	CIBUNGBULANG	3.845,42	Curug Lembah Pelangi		Taman Air Gunung Handeleum
					Prasasti Ciaruteun
					Situs Museum Pasir Angin
15	PARUNG		Pemandian Air Panas Tirta Sanita		

Sumber : Dokumen Pengusulan Geopark Pongkor, 2018

Didasarkan pada semangat yang tinggi dari berbagai pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah strategis untuk menghadirkan konsep Geopark di Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 556/177/kpts/perUU/2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Pongkor pada tanggal 26 Maret 2018. Kemudian setelah melalui berbagai penilaian persyaratan, maka pada tanggal 30 November 2018 Geopark Pongkor ditetapkan sebagai Geopark Nasional bersama dengan 8 (delapan) kawasan Geopark Nasional lainnya, yaitu Geopark Silokek, Geopark Sianok, Geopark Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat, Geopark Natuna di Kepulauan Riau, Geopark Pongkor di Jawa Barat, Geopark Karangsambung dan Geopark

Karangbolong di Jawa Tengah, Geopark Banyuwangi di Jawa Timur dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan.

Lebih istimewanya lagi, Kabupaten Bogor dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyampaian sertifikat tersebut yang disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Penunjukkan geopark Pongkor sebagai tuan rumah menunjukkan bahwa Geopark Pongkor memiliki nilai terbaik diantara 8 (delapan) geopark nasional lainnya. Target berikutnya dari Geopark Pongkor adalah mendapatkan sertifikat Unesco Global Geopark (UGG), menyusul empat Geopark lain yang sudah lebih dulu berstatus UGG, yaitu Geopark Gunung Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh dan Geopark Gunung Rinjani.

8. Pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor

Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan berkesinambungan. Menurut World Bank, sumber penghidupan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sektor UMKM. UMKM ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Kontribusi sektor UMKM dalam PDRB Kabupaten Bogor pada 2018 yaitu sebesar 28,45%. Sektor usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Bogor, karena dengan sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dengan majunya sektor usaha UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Sejalan dengan langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat, keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitas UMKM harus terus dikembangkan disamping Usaha Besar. Tantangan persaingan yang ketat dalam hal mutu/kualitas maupun jumlah produksi UMKM dibanding dengan barang-barang lain termasuk produk impor/luar kabupaten Bogor, masih menjadi prioritas dalam memperluas akses pasar di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 2018 peranan UMKM dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp 63,03 triliun atau berkontribusi sebesar 28,45 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor yang terdiri atas usaha mikro sebesar Rp 17,09 triliun (7,72 %), usaha kecil sebesar Rp 20,77 triliun (9,38 %) dan menengah sebesar Rp 25,16 triliun (11,36 %).

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2018)**
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	UMKM
I	SEKTOR PRIMER	4.275.581	3.759.318	3.890.772	5.628.689	17.554.359	11.925.671
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.044.977	3.181.401	2.921.501	1.259.776	11.407.655	10.147.879
B	Pertambangan dan Penggalian	230.604	577.917	969.271	4.368.913	6.146.704	1.777.792
II	SEKTOR SEKUNDER	3.093.338	6.868.215	13.641.548	116.913.143	140.516.243	23.603.100
C	Industri Pengolahan	2.565.204	4.096.163	8.453.742	102.870.525	117.985.635	15.115.110
D	Pengadaan Listrik dan Gas	458	7.410	9.662	263.930	281.460	17.530
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	245	7.342	23.597	207.741	238.926	31.185
F	Konstruksi	527.430	2.757.299	5.154.546	13.570.947	22.010.223	8.439.276
III	SEKTOR TERSIER	9.725.168	10.144.845	7.627.083	35.979.754	63.476.850	27.497.096
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.213.186	3.185.229	4.460.770	18.862.716	29.721.902	10.859.185
H	Transportasi dan Pergudangan	3.646.028	2.756.682	686.657	1.301.810	8.391.177	7.089.366
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	701.435	618.962	984.417	3.490.151	5.794.965	2.304.814
J	Informasi dan Komunikasi	1.756.895	1.426.266	309.850	563.910	4.056.922	3.493.012
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.756	22.936	46.413	1.060.905	1.147.010	86.105
L	Real Estat	144.712	138.755	68.880	1.324.383	1.676.730	352.346
M,N	Jasa Perusahaan	6.689	8.444	17.083	396.766	428.982	32.216
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	40.001	485.801	238.070	2.887.053	3.650.926	763.873
P	Jasa Pendidikan	59.306	732.850	402.020	2.690.030	3.884.207	1.194.177
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22.685	89.123	73.764	874.304	1.059.876	185.572
R,S,T, U	Jasa lainnya	117.473	679.796	339.160	2.527.724	3.664.154	1.136.430
Produk Domestik Regional Bruto		17.094.087	20.772.377	25.159.403	158.521.586	221.547.453	63.025.867
Persentase		7,72	9,38	11,36	71,55	100,00	28,45

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Ket: **) Angka Sangat Sementara

Dari total 63,03 triliun kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor, sebesar Rp 11,93 triliun merupakan kontribusi dari sektor

primer. Kontribusi UMKM pada sektor sekunder sebesar Rp 23,60 triliun. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap nilai tambah sektor tersier adalah sebesar 27,50 triliun. Dengan demikian, berdasarkan distribusi persentasenya, peran UMKM terlihat menonjol pada sektor tersier, yaitu sebesar 43,63 persen dari total PDRB UMKM Rp 63,03 triliun.

Banyaknya unit UMKM menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan peluang ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran sekaligus sebagai upaya peningkatan roda pembangunan ekonomi.

Tabel 2.10
Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha
dan Lapangan Usaha, Tahun 2018)**

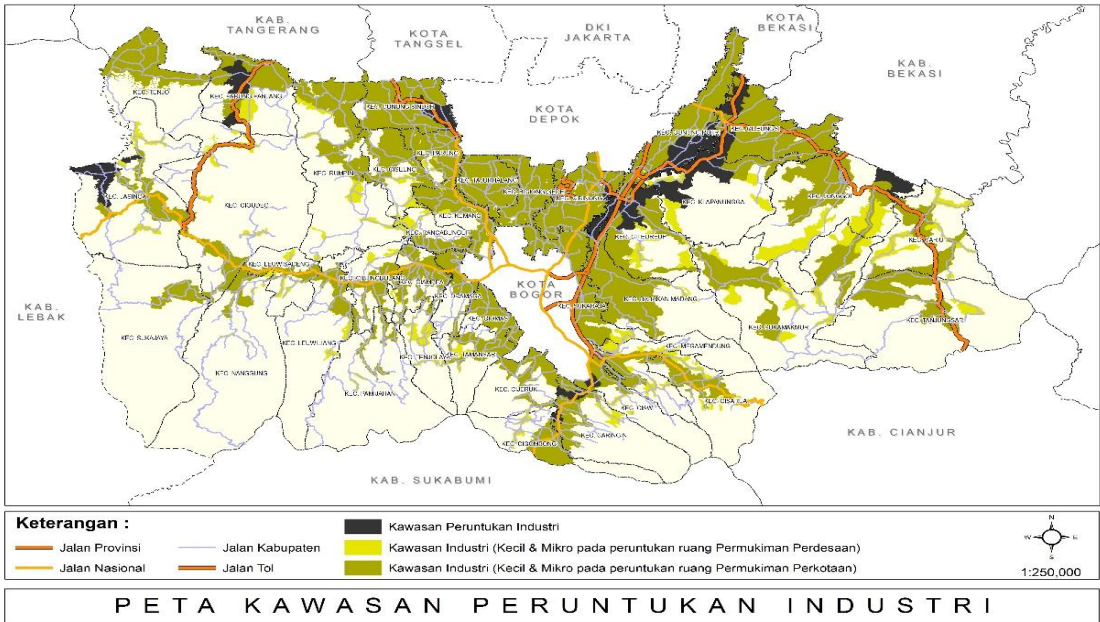
Lapangan Usaha		Mikro 2018	Kecil 2018	Menengah 2018	Besar 2018	Jumlah 2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.658	1.944	191	11	133.804
B	Pertambangan dan Penggalian	820	49	9	55	933
C	Industri Pengolahan	23.655	3.492	1.605	308	29.059
D	Pengadaan Listrik dan Gas	167	68	7	10	253
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	656	77	44	5	782
F	Konstruksi	17.657	2.739	1.252	150	21.798
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.753	9.565	1.028	198	141.544
H	Transportasi dan Pergudangan	58.453	3.159	38	14	61.665
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.546	2.837	610	76	61.069
J	Informasi dan Komunikasi	222.162	11.766	315	8	234.251
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.020	164	67	66	1.316
L	Real Estat	13.849	1.506	238	91	15.683
M,N	Jasa Perusahaan	3.205	527	186	205	4.122
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.598	997	107	12	8.714
P	Jasa Pendidikan	5.066	638	166	56	5.926
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.297	179	19	19	1.515
R,S,T,U	Jasa lainnya	13.539	1.634	111	55	15.339
Produk Domestik Regional Bruto		689.101	41.341	5.993	1.339	737.773

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Ket: **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, sebagaimana terlihat dalam gambar peta bahwa Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil

tersebar pada Zonasi Peruntukan Ruang Perdesaan (PD) dan Peruntukan Ruang Perkotaan (PP) sebagai berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Gambar 2.8
Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil

Berdasarkan Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan Tahun 2014 dan 2015, bahwa rencana pengembangan UMK unggulan dengan 1). Meningkatkan pengembangan produk UMK, 2). Meningkatkan SDM dan kelembagaan, 3). Meningkatkan pemasaran dan kemitraan dan 4). Meningkatkan sarana dan prasarana UMK.

Tabel 2.11
Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan

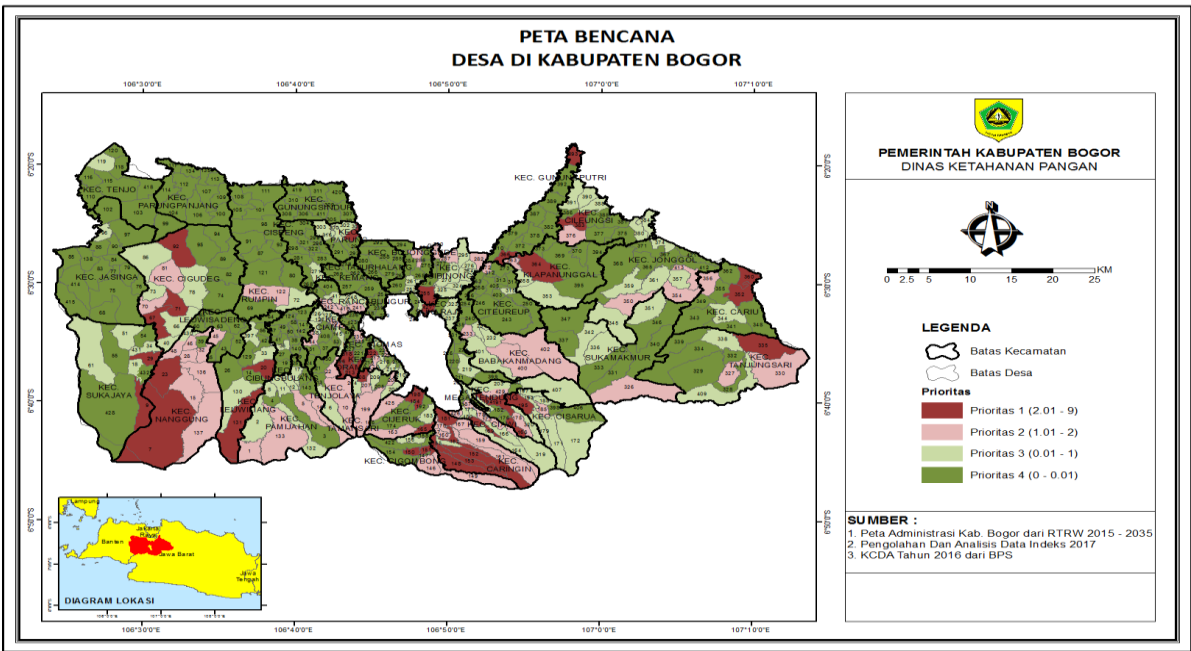
No.	Kecamatan	Kluster Komoditas Unggulan Sekunder (UMK)
1	Pamijahan, Tenjolaya, Ciawi, Cisarua, Sukaraja, Megamendung, Cigombong, Cigudeg, Tajurhalang, Tenjo, Rumpin, Gunung Sindur, Jonggol, Cariu, Parung, Parung Panjang, Rancabungur.	Aneka Makanan
2	Bojonggede, Cibinong, Dramaga, Cileungsi, Sukamakmur, Babakan Madang	Aneka Minuman
3	Caringin, Cijeruk, Kemang, Ciomas dan Tamansari, Cibungbulang	Alas Kaki
4	Klapanunggal	Kerajinan/Boneka
5	Gunung Putri	Kerajinan/Sangkar Burung
6	Ciampea	Kerajinan/Tas
7	Citeureup	Kerajinan/Logam

8	Jasinga, Tanjungsari	Kerajinan/Kayu
9	Ciseeng, Nanggung	Kerajinan/Logam
10	Sukajaya	Konveksi
11	Leuwisadeng dan Leuwiliang	Bata Merah

Sumber : Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan, Bappeda Tahun 2014 dan 2015

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bogor ini cukup luas, selain itu, letak geografi dan topografi lahannya yang labil sehingga rawan terjadi bencana seperti longsor, angin kencang atau angin ribut (puting beliung), banjir dan bencana lainnya. Berdasarkan data indeks risiko bencana Indonesia 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan wilayah Kabupaten Bogor urutan no. 281 dari 496 Kabupaten/Kota atau tingkat kerentanan tinggi daerah rawah bencana di Indonesia (Gambar 2.2).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.9
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bogor Berdasarkan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2017

Kabupaten Bogor berada di peringkat kelima setelah Bogor sebagai daerah rawan bencana di Indonesia. Sementara, total kejadian bencana di wilayah Bogor sepanjang tahun 2018 sebanyak 634 kejadian bencana, dengan rincian 39 bencana banjir, 156 bencana longsor, 188 bencana puting beliung, 232 kebakaran, dan 251 bencana lainnya. Kejadian bencana tersebut tersebar di 40 kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.12
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 2018

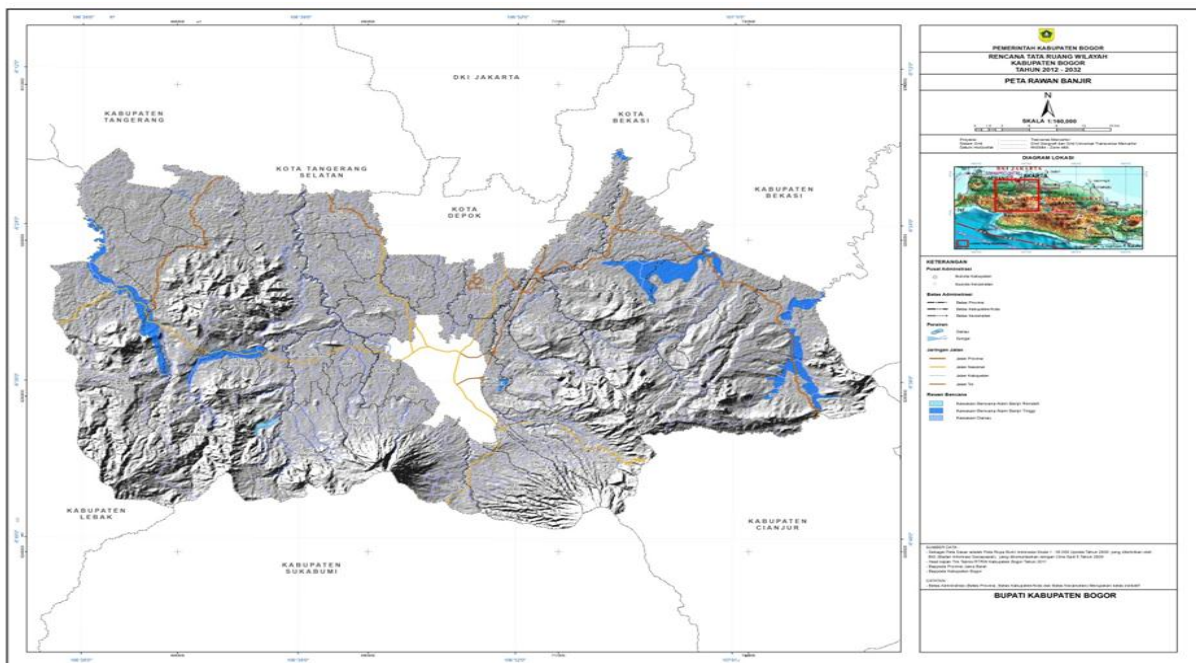
No	Kecamatan	Bencana Alam					Kategori
		Lonsor	Banjir	DLL	P.Beliung	Total	
10	Nanggung	4	0	10	0	14	Agak Rawan
20	Leuwiliang	2	0	3	0	5	Rawan
21	Leuwisadeng	2	0	1	3	6	Cukup
30	Pamijahan	12	0	5	12	29	Tahan
40	Cibungbulang	0	1	8	5	14	Tahan
50	Ciampea	2	0	8	10	20	Cukup
51	Tenjolaya	0	0	0	2	2	Cukup
60	Dramaga	9	0	1	5	15	Cukup
70	Ciomas	13	3	4	19	39	Rawan
71	Tamansari	2	0	2	7	11	Agak Rawan
80	Cijeruk	12	0	10	15	37	Sangat Rawan
81	Cigombong	9	1	7	12	29	Sangat Rawan
90	Caringin	15	1	11	20	47	Sangat Rawan
100	Ciawi	14	6	4	7	31	Rawan
110	Cisarua	12	6	8	4	30	Cukup
120	Megamendung	15	2	11	10	38	Sangat Rawan
130	Sukaraja	5	4	3	3	15	Cukup
140	Babakan Madang	4	0	16	9	29	Tahan
150	Sukamakmur	2	1	9	0	12	Tahan
160	Cariu	0	0	4	1	5	Cukup
161	Tanjungsari	0	0	2	3	5	Cukup
170	Jonggol	0	0	3	1	4	Cukup
180	Cileungsi	0	0	2	0	0	Cukup
181	Klapanunggal	2	0	10	2	14	Tahan
190	Gunung Putri	0	0	13	2	15	Tahan
200	Citeureup	2	0	8	4	14	Rawan
210	Cibinong	1	4	13	4	22	Rawan
220	Bojong Gede	4	1	3	4	12	Cukup
221	Tajur Halang	0	0	3	0	3	Cukup
230	Kemang	3	0	3	4	10	Cukup
231	Rancabungur	3	1	7	3	14	Cukup
240	Parung	0	0	1	1	2	Cukup
241	Ciseeng	0	0	3	0	3	Cukup
250	Gunung Sindur	0	0	2	0	2	Cukup
260	Rumpin	0	0	8	1	9	Cukup
270	Cigudeg	2	1	7	7	17	Tahan
271	Sukajaya	2	0	15	3	20	Rawan
280	Jasinga	3	7	16	2	28	Tahan
290	Tenjo	0	0	7	1	8	Tahan
300	Parung Panjang	0	0	0	1	1	Cukup

Sumber: BPBD Kabupaten Bogor Tahun 2018

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa daerah yang rawan bencana dalam kategori sangat rawan adalah Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, dan Megamendung. Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, dan Megamendung rawan angin puting beliung. Kecamatan Leuwiliang, Ciomas, Ciawi, Citeureup, Cibinong dan Sukajaya masuk dalam kategori rawan dengan penyebab longsor dan angin puting beliung. Kecamatan Nanggung

dan Tamansari masuk dalam kategori agak rawan dengan penyebab longsor dan angin puting beliung.

Kawasan rawan banjir, berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Dari peta di bawah, dapat dilihat, daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.

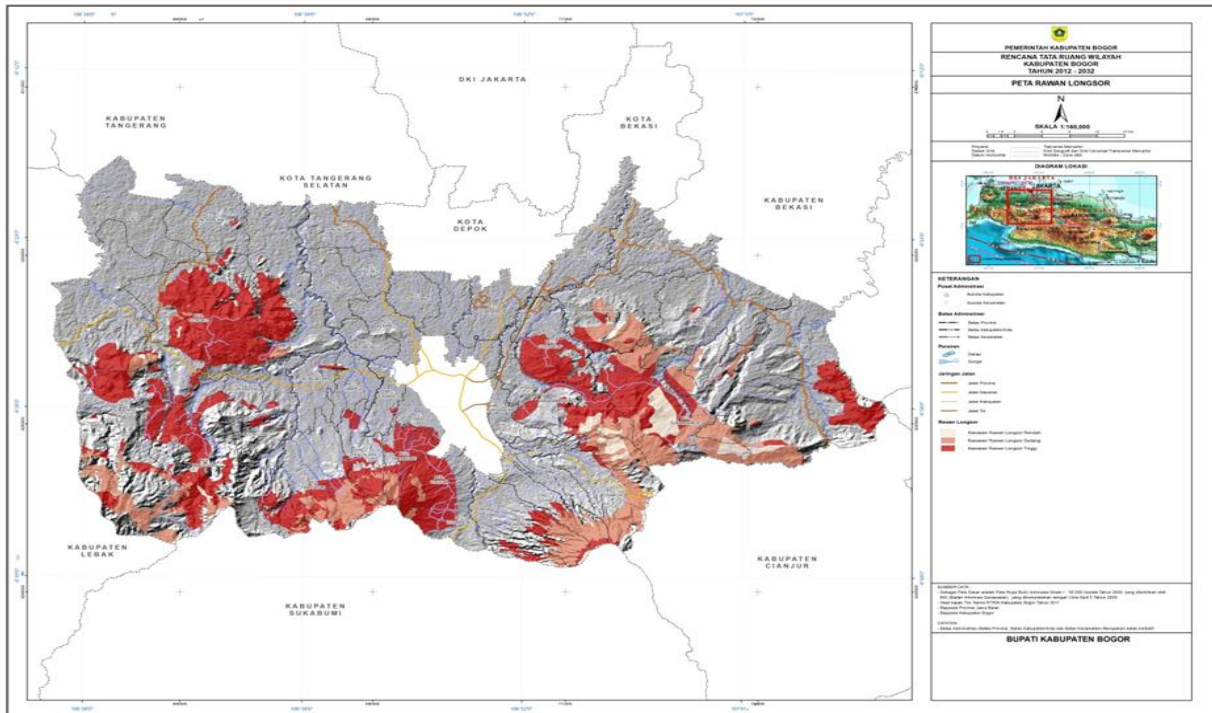


Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036

Gambar 2.10
Peta Kawasan Banjir Kabupaten Bogor

Kawasan rawan gempa, Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, dan

Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah. Selengkapnya karakteristik kerentanan gerakan tanah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036

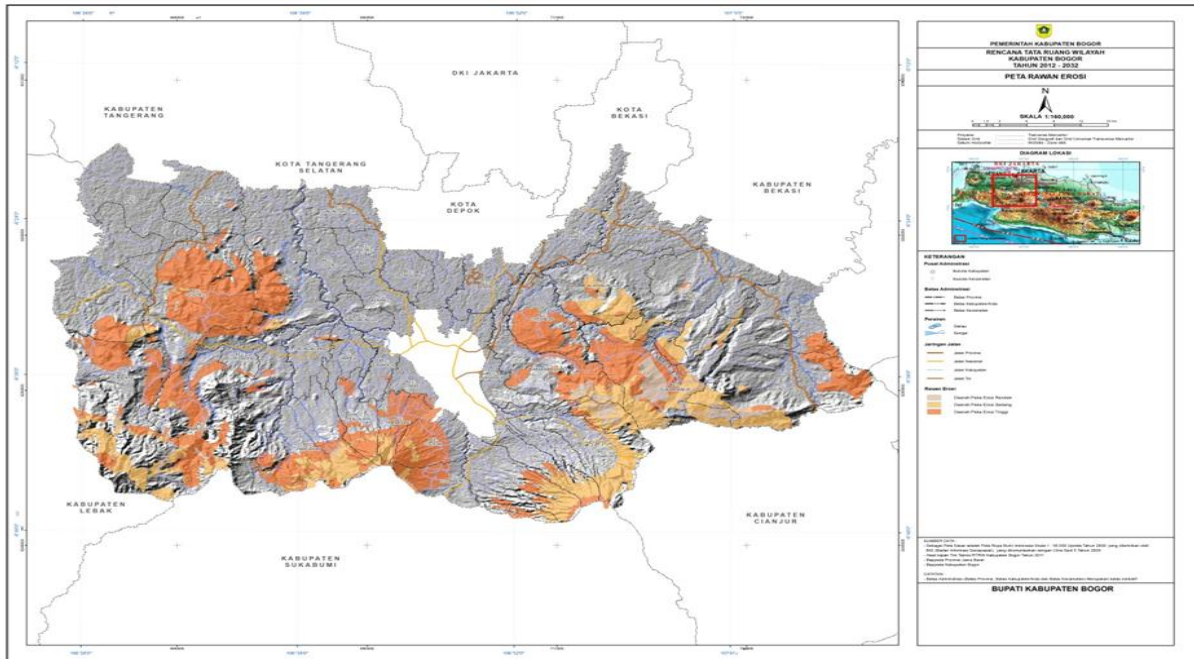
Gambar 2.11
Peta Keretakan Tanah Kabupaten Bogor

Kawasan rawan letusan gunung berapi, terletak di :

1. Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;
2. Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
3. Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.

Kawasan rawan gerakan tanah, Bencana longsor, adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Jika dianalisis lebih jauh, tingginya frekuensi kejadian longsor salah satunya diakibatkan oleh topografi lahan di Kabupaten Bogor yang berbukit-bukit, serta rusaknya kawasan perbukitan saat ini karena telah banyak menjadi kawasan terbangun dan pembangunan akses (Jalan-jalan arteri), seperti di daerah Ciawi, Cisarua, dan Megamendung. Selain itu, banyaknya kawasan tambang di kecamatan tertentu menjadi pemicu lain terjadinya longsor. Pengaruh kawasan tambang ini lebih besar terhadap kejadian erosi, sehingga

kebanyakan di kawasan tambang seperti di Kecamatan Cigudeg dan Citeureup menjadi daerah peka erosi tinggi. Potensi bencana longsor dapat terlihat salah satunya dari peta peka erosi berikut.



Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036

Gambar 2.12
Peta Kawasan Peka Erosi Kabupaten Bogor

2.1.4. Kondisi Umum Demografi

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,20 persen. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan membawa ke arah kemajuan pembangunan, sebaliknya penduduk yang tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Pertumbuhan Penduduk 2018

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	
	2.018	2.018	2.018	
Nanggung	45.080	42.220	87.300	0,09
Leuwiliang	63.508	59.635	123.143	0,65
Leuwisadeng	38.965	35.953	74.918	0,31
Pamijahan	73.047	69.422	142.469	0,38
Cibungbulang	69.156	65.365	134.521	0,51
Ciampea	83.031	78.716	161.747	0,79
Tenjolaya	30.328	29.089	59.417	0,59
Dramaga	56.546	55.628	112.174	0,95
Ciomas	94.305	90.642	184.947	2,28
Tamansari	54.876	51.520	106.396	1,41
Cijeruk	46.481	42.515	88.996	1,14
Cigombong	53.868	51.714	105.582	1,82
Caringin	64.989	61.866	126.855	0,91
Ciawi	61.453	57.629	119.082	1,41
Cisarua	65.061	60.777	125.838	0,98
Megamendung	56.724	52.072	108.796	1,05
Sukaraja	107.104	102.562	209.666	1,98
Babakan Madang	65.576	61.959	127.535	2,26
Sukamakmur	41.177	38.744	79.921	0,47
Cariu	22.905	22.781	45.686	0,51
Tanjungsari	26.298	25.581	51.879	0,07
Jonggol	74.593	72.365	146.958	1,85
Cileungsi	183.421	179.490	362.911	4,46
Kelapa Nunggal	64.039	60.829	124.868	3,01
Gunung Putri	235.316	241.096	476.412	5,01
Citeureup	120.013	115.503	235.516	1,74
Cibinong	223.770	217.627	441.397	3,37
Bojong Gede	179.357	172.655	352.012	4,60
Tajur Halang	64.750	62.121	126.871	2,92
Kemang	58.319	55.714	114.033	2,22
Ranca Bungur	28.187	26.452	54.639	0,70
Parung	75.871	71.560	147.431	2,97
Ciseeng	59.944	56.181	116.125	1,69
Gunung Sindur	69.515	66.356	135.871	3,06
Rumpin	73.440	68.070	141.510	0,74
Cigudeg	66.106	60.588	126.694	0,57
Sukajaya	30.065	27.816	57.881	0,10
Jasinga	49.847	46.852	96.699	0,09
Tenjo	37.170	35.037	72.207	0,71
Parung Panjang	69.077	64.927	134.004	2,06
Kabupaten Bogor	2.983.278	2.857.629	5.840.907	2,20

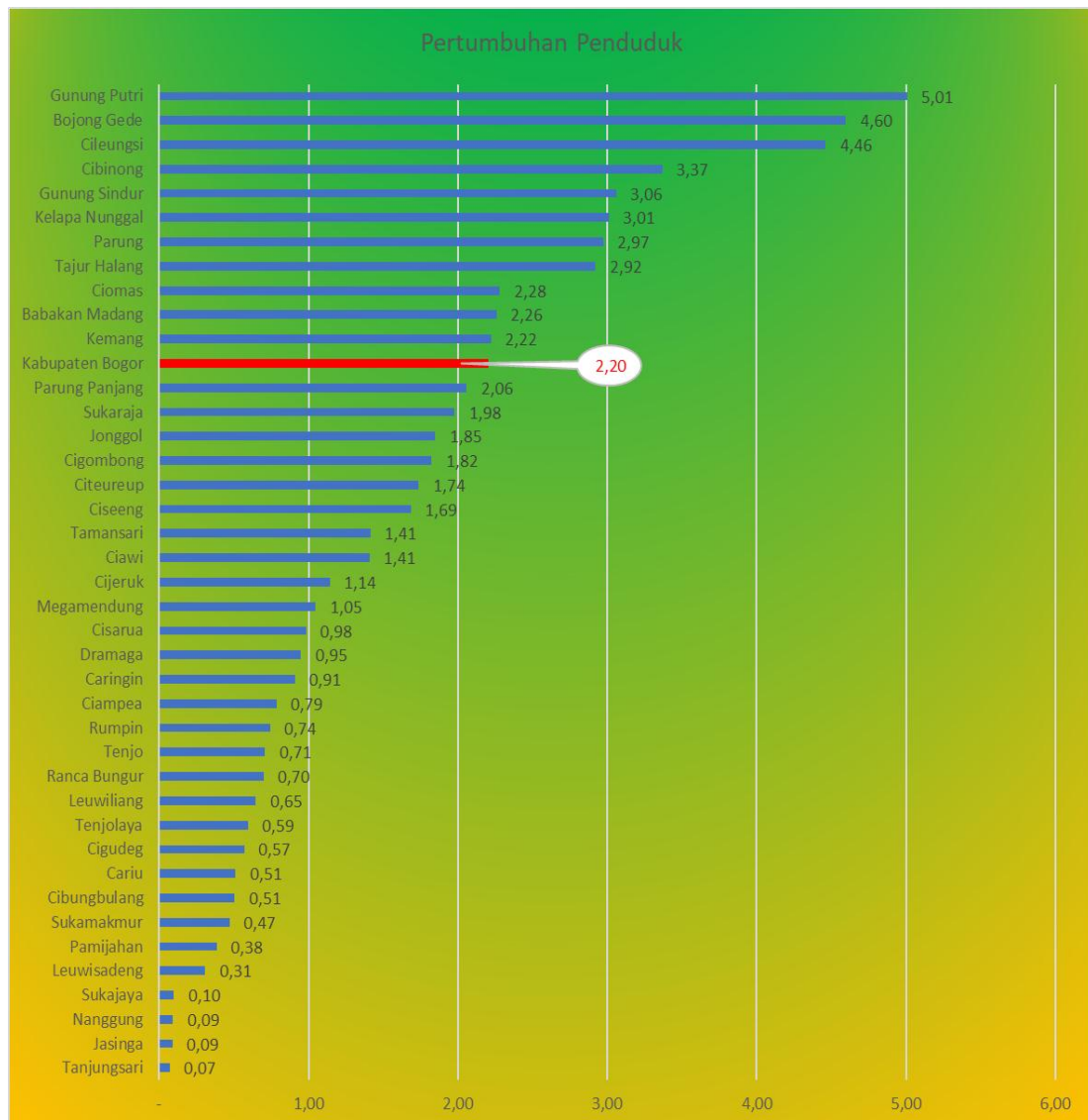
Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa di Kecamatan Gunung Putri memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 476.412 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 5,01% dari total penduduk Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 441.397 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,37%. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Cariu dengan jumlah penduduk 45.686 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,51% dari total penduduk Kabupaten

Bogor. Kecamatan Tanjungsari menempati urutan terendah kedua dengan jumlah penduduk 51.879 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,07%.

➤ **Pertumbuhan Penduduk**

Perubahan jumlah penduduk antar tahun menggambarkan angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,20 persen (Gambar 2.13).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.13
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2017-2018

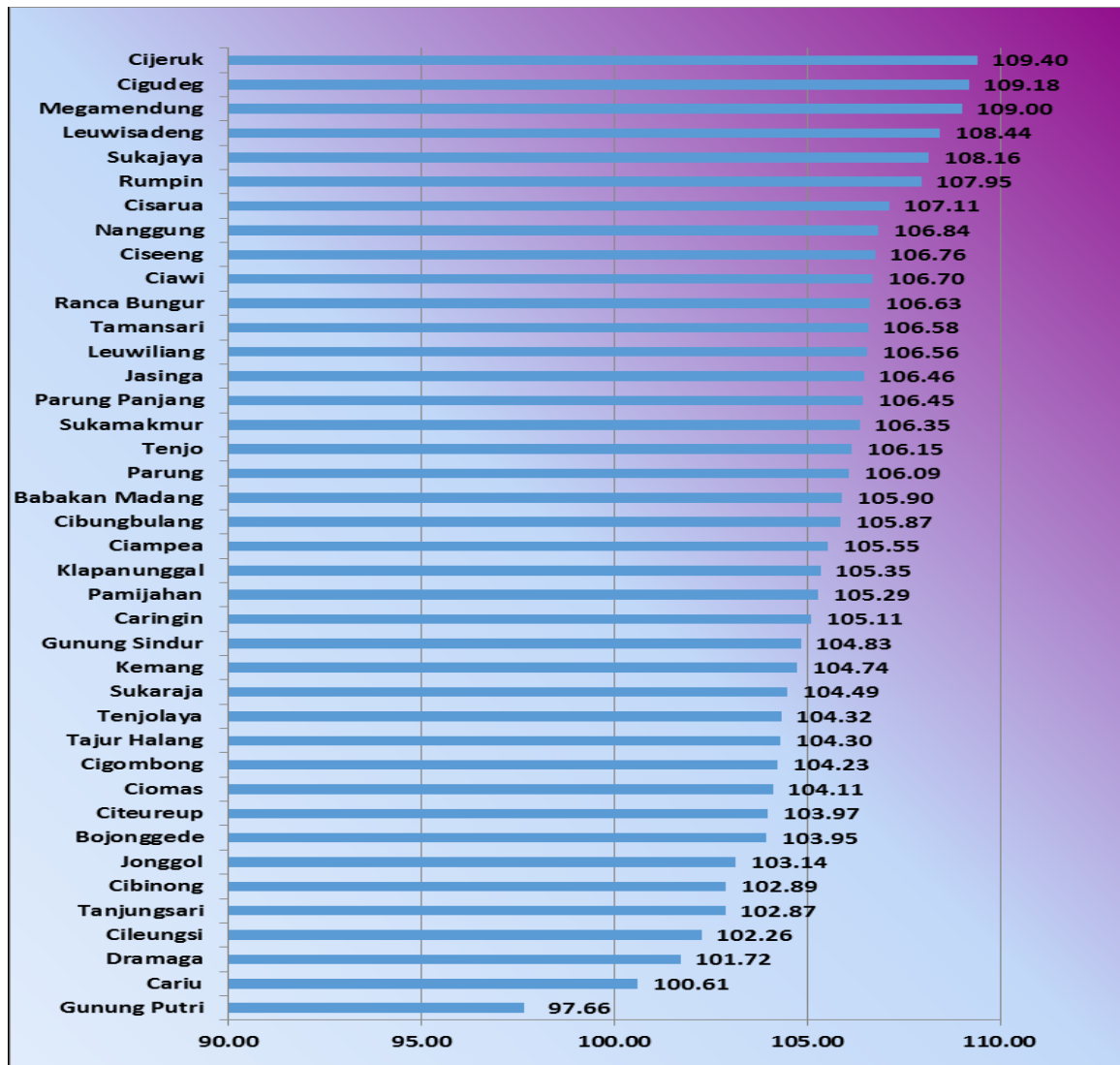
Kecamatan Cibinong, sebagai ibukota Kabupaten Bogor, pertumbuhan penduduk mencapai 3,37 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Bojonggede dan Cileungsi masing-masing sebesar 5,01 persen, 4,60 persen dan 4,46 persen. Keempat kecamatan

tersebut memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Bogor (2,20%).

Secara keseluruhan ada 11 kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas pertumbuhan rata-rata kabupaten Bogor (2,28%) diantaranya Kecamatan Gunung Putri (5,01%), Bojonggede (4,60%), Cileungsi (4,46%), Cibinong (3,37%), Gunung Sindur (3,06%), Klapanunggal (3,01%), Parung (2,97%), Tajur Halang (2,92%), Ciomas (2,28%), Babakan Madang (2,26%) dan Kemang (2,22%). Dari gambar di atas juga memperlihatkan bahwa Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Tanjungsari memiliki pertumbuhan yang relatif kecil, justru Kecamatan Cariu memperlihatkan pertumbuhan negatif.

➤ **Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)**

Indikator Demografi selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, hal yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. *Sex ratio* Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sebesar 104, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki *sex ratio* di atas 100, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Namun ada satu kecamatan yang nilai *sex ratio*-nya kurang dari 100 yaitu sebesar 97,66 terjadi di Kecamatan Gunung Putri (Gambar 2.14).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

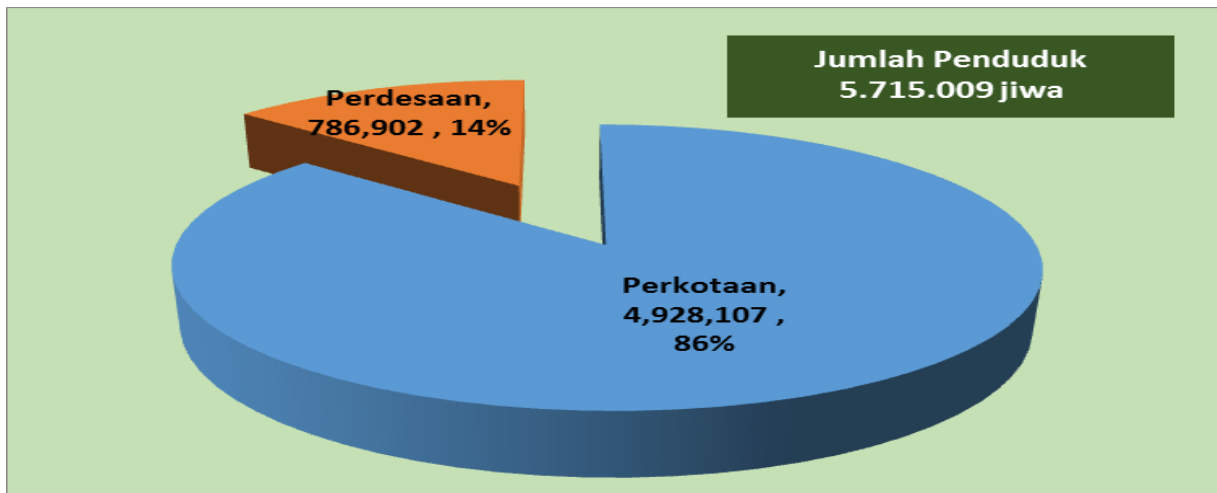
Gambar 2.14

Sex ratio Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2017

➤ **Distribusi Penduduk**

Distribusi penduduk dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses suatu wilayah. Jika dilihat menurut tipe daerah, daerah dibagi menjadi 2 tipe, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Menurut Peraturan Kepala BPS Nomor 37 tahun 2010, *Daerah Perkotaan* didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang *memenuhi persyaratan* tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan *daerah perdesaan* didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang *belum memenuhi persyaratan* tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga

pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum dan sebagainya (Gambar 2.8).



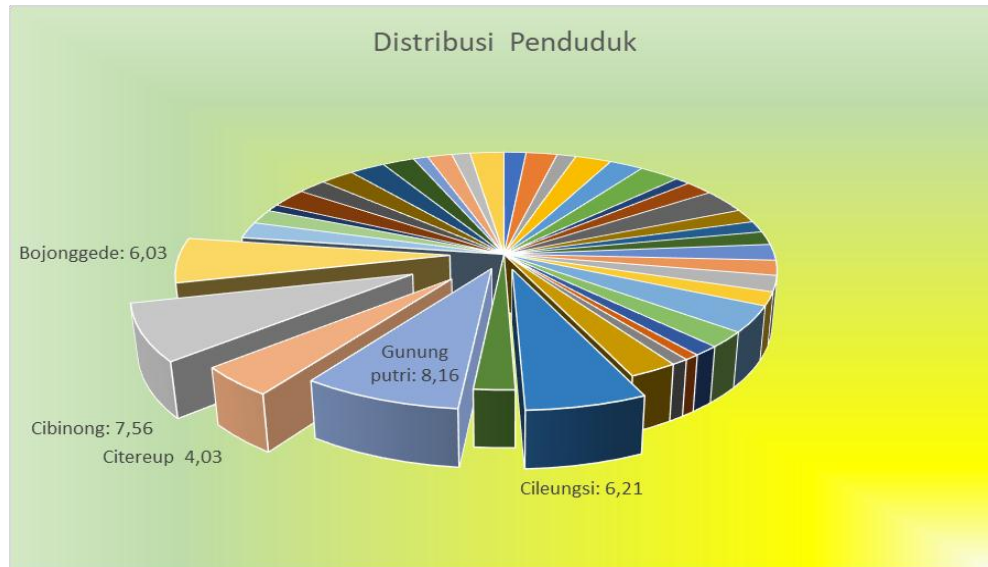
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.15
Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Tahun 2017

Gambar di atas memperlihatkan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor untuk daerah perkotaan sebanyak 4.928.107 jiwa atau 86 persen jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah perdesaan yang hanya sebanyak 786.902 jiwa (14%).

Pada tahun 2016, distribusi penduduk terbesar berada di Kecamatan Gunung Putri sebesar 7,94 persen, kemudian Kecamatan Cibinong sebesar 7,47 persen. Ini memberi petunjuk bahwa Kecamatan Gunung Putri masih menjadi tujuan sebagai kawasan industri sekaligus tujuan tempat pemukiman dan Kecamatan Cibinong memiliki daya tarik karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

Distribusi penduduk dapat kita lihat pada Gambar 2.16 dimana ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri, Cibinong, Cileungsi Bojonggede dan Citereup dengan distribusi penduduk di atas 4,06 persen penduduk Kabupaten Bogor. Kemudian Ada 4 (empat) kecamatan dengan distribusi penduduk terendah dengan distribusi penduduk kurang dari 1 persen penduduk Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cariu, Tanjungsari, Rancabungur, dan Sukajaya.

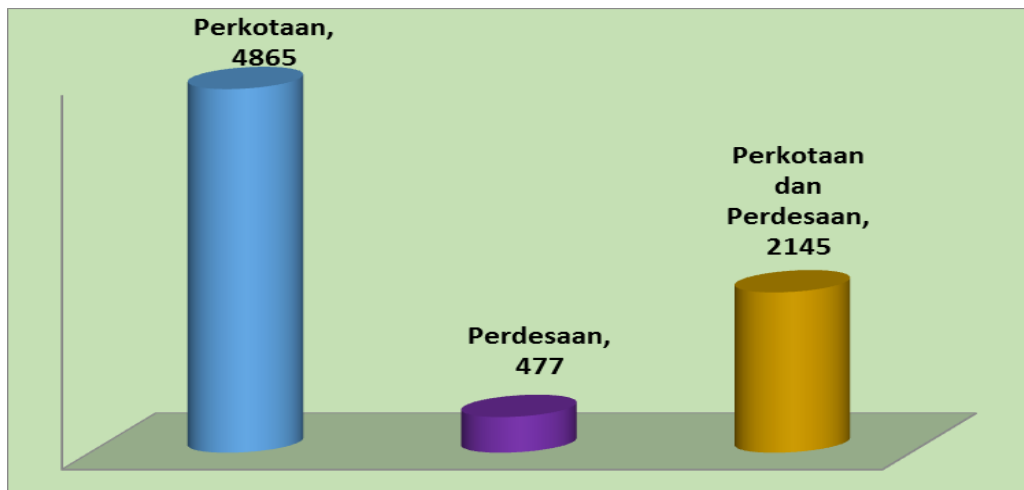


Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.16
Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2018

➤ **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk mencerminkan banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah dalam km^2 . Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah yang dimungkinkan penduduk bermukim atau hanya luas daratan tidak termasuk laut ataupun perairan seperti sungai, waduk atau setu. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu :

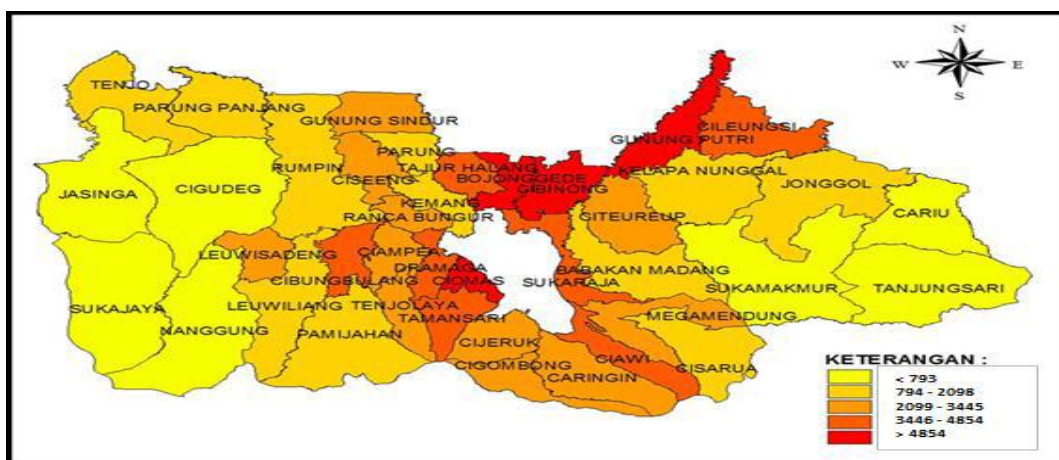


Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.17
Kepadatan Penduduk menurut Tipe Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

- 1) memperberat beban penduduk pada lahan;
- 2) menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran;
- 3) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat.

Gambar 2.17 menggambarkan kepadatan penduduk menurut daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pada gambar tersebut terlihat kepadatan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada tahun 2017 kepadatan penduduk di daerah perkotaan mencapai 4.865 jiwa/km², sedangkan di daerah perdesaan 477 jiwa/km² atau dengan komposisi perkotaan dan perdesaan 10:1. Peta kepadatan penduduk disajikan pada Gambar 2.18. Jika diperhatikan peta kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan sedang hingga tinggi berada di kecamatan yang terletak di sekitar Kota Bogor sehingga membentuk seperti cincin. Kepadatan penduduk ini jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jhingan (2008) mengemukakan pengaruh buruk kepadatan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.



Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.18
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor, Tahun 2017

Pada Tabel 2.14 juga dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bojonggede dengan tingkat kepadatan 12.419 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Ciomas dengan tingkat kepadatan 9.916 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tanjungsari dengan tingkat kepadatan 327 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukajaya dengan tingkat kepadatan 371 jiwa/km².

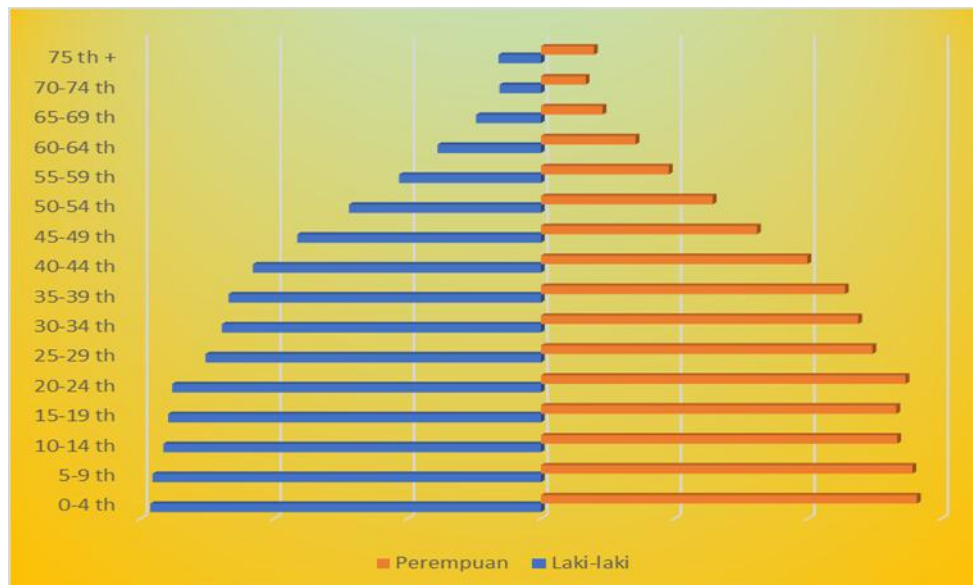
Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk	No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk
1	Nanggung	548	21	Tanjungsari	327
2	Leuwiliang	1.353	22	Jonggol	1.102
3	Leuwisadeng	2.117	23	Cileungsi	5.143
4	Pamijahan	1.141	24	Kelapa Nunggal	1.300
5	Cibungbulang	3.498	25	Gunung Putri	7.826
6	Ciampea	4.895	26	Citeureup	3.423
7	Tenjolaya	1.437	27	Cibinong	9.468
8	Dramaga	4.436	28	Bojong Gede	12.419
9	Ciomas	9.916	29	Tajur Halang	4.122
10	Tamansari	3.100	30	Kemang	3.392
11	Cijeruk	1.857	31	Ranca Bungur	2.411
12	Cigombong	2.239	32	Parung	5.728
13	Caringin	1.636	33	Ciseeng	2.812
14	Ciawi	2.530	34	Gunung Sindur	2.751
15	Cisarua	1.701	35	Rumpin	1.034
16	Megamendung	1.743	36	Cigudeg	713
17	Sukaraja	4.791	37	Sukajaya	371
18	Babakan Madang	1.381	38	Jasinga	669
19	Sukamakmur	470	39	Tenjo	868
20	Cariu	535	40	Parung Panjang	1.878

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

➤ **Piramida Penduduk**

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat disajikan dalam bentuk piramida penduduk seperti terlihat pada Gambar 2.12. Piramida Penduduk Kabupaten Bogor tergolong penduduk muda (*expansive*) menuju “transisi”. Adapun ciri-ciri Piramida *Expansive* adalah: (1) Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, (2) Kelompok usia tua jumlahnya sedikit, (3) Tingkat kelahiran bayi tinggi, (4) Pertumbuhan penduduk tinggi.



Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.19
Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur,
Tahun 2018

Piramida Kabupaten Bogor gemuk di tengah menunjukkan penduduk Kabupaten Bogor tergolong penduduk usia produktif dan jika dilihat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 60 persen (66,81%). Hal ini sekaligus menunjukkan angka beban tanggungan tergolong rendah (Gambar 2.19).

➤ **Dependency Ratio**

Penyajian data penduduk menurut kelompok umur seringkali disederhanakan menjadi tiga kelompok, yaitu kurang dari 15 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun atau lebih. Penggolongan seperti ini antara lain untuk melihat struktur penduduk “tua” atau “muda”. Penduduk dikatakan “muda” apabila proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun sekitar 40 persen atau lebih, sebaliknya dikatakan “tua” apabila proporsi penduduk pada usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk.

Implikasi tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*Burden of Dependency Ratio*). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun).

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok Umur dan
Angka Ketergantungan, Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah	Distribusi (%)	Angka Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14 tahun	1,671,644	29.25	43.69
15-64 tahun	3,826,113	66.95	
65+ tahun	217,252	3.80	5.68
Total	5,715,009	100.00	49.37

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Rasio ketergantungan anak merupakan perbandingan anak (penduduk usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan lanjut usia merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio beban ketergantungan Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.14. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2017 sebesar 43,69 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,68 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 49,37 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 50 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

2.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui.

Perhitungan data dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi dalam BPS Kabupaten Bogor. Total produksi padi 2017 mencapai **547.233 Ton**, dengan

konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar 62,74% maka diperkirakan produksi beras mencapai **336.262 ton**. Sedangkan angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 86,23 maka kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Barat adalah **697.809 ton**. Dengan demikian Kabupaten Bogor memiliki nilai daya dukung pangan sebesar **0,70** atau mengalami defisit beras sebesar **361.557 ton**. Informasi ini menjadi perhatian karena pertumbuhan penduduk memberikan tekanan terhadap konversi lahan pertanian.

Tabel 2.16
Perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan sawah di Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Luas Lahan sawah (Ha)
2010	4.340.060	48.484
2015	5.331.149	45.799
2016	5.459.668	44.547
2017	5.715.009	47.154
Proyeksi 2023	6.918.277	42.394

Sumber : Data Dinas Pertanian dan kehutanan, Data BPS

Prediksi daya dukung pangan di Kabupaten Bogor tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangan proyeksi jumlah penduduk serta laju konversi lahan pangan. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2023 diperkirakan mencapai 6.918.277 jiwa sedangkan luas lahan sawah dengan laju konversi lahan pangan rata-rata sebesar 3,9%, maka luas lahan sawah pada tahun 2023 diperkirakan menjadi 42.394 Ha. Berdasarkan asumsi tersebut maka daya dukung pangan tiap kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2023 dapat diprediksi sebagai berikut.

Tabel 2.17
Daya dukung pangan beras Kabupaten Bogor tahun 2017

No	Kecamatan	Produksi beras (ton)	Penduduk (jiwa)	Konsumsi beras (ton)	DDL Pangan	Status
1	Nanggung	15.691	87.207	7.520	2,09	Suplus
2	Leuwiliang	16.055	121.597	10.485	1,53	Suplus
3	Leuwisadeng	9.859	74.504	6.424	1,53	Suplus
4	Pamijahan	26.524	141.443	12.197	2,17	Suplus
5	Cibungbulang	8.141	133.222	11.488	0,71	Defisit
6	Ciampea	4.618	159.258	13.733	0,34	Defisit



No	Kecamatan	Produksi beras (ton)	Penduduk (jiwa)	Konsumsi beras (ton)	DDL Pangan	Status
7	Tenjolaya	10.935	58.739	5.065	2,16	Suplus
8	Dramaga	1.613	110.068	9.491	0,17	Defisit
9	Ciomas	2.538	176.599	15.228	0,17	Defisit
10	Tamansari	4.335	103.409	8.917	0,49	Defisit
11	Cijeruk	4.808	86.982	7.500	0,64	Defisit
12	Cigombong	4.842	101.757	8.775	0,55	Defisit
13	Caringin	8.092	124.584	10.743	0,75	Defisit
14	Ciawi	5.727	115.749	9.981	0,57	Defisit
15	Cisarua	1.626	123.397	10.641	0,15	Defisit
16	Megamendung	4.297	106.544	9.187	0,47	Defisit
17	Sukaraja	219	201.435	17.370	0,01	Defisit
18	Babakan Madang	1.131	121.831	10.505	0,11	Defisit
19	Sukamakmur	29.352	79.210	6.830	4,3	Suplus
20	Cariu	20.544	46.216	3.985	5,16	Suplus
21	Tanjungsari	22.084	51.844	4.471	4,94	Suplus
22	Jonggol	28.908	141.569	12.207	2,37	Suplus
23	Cileungsi	4.145	331.605	28.594	0,14	Defisit
24	Klapanunggal	7.727	117.470	10.129	0,76	Defisit
25	Gunungputri	356	430.592	37.130	0,01	Defisit
26	Citeureup	1.525	227.375	19.607	0,08	Defisit
27	Cibinong	544	412.256	35.549	0,02	Defisit
28	Bojonggede	203	320.800	27.663	0,01	Defisit
29	Tajurhalang	549	119.583	10.312	0,05	Defisit
30	Kemang	1.040	109.013	9.400	0,11	Defisit
31	Rancabungur	984	53.891	4.647	0,21	Defisit
32	Parung	302	138.807	11.969	0,03	Defisit
33	Ciseeng	1.602	112.237	9.678	0,17	Defisit
34	Gunungsindur	1.466	127.699	11.011	0,13	Defisit
35	Rumpin	16.431	139.452	12.025	1,37	Suplus
36	Cigudeg	18.896	125.305	10.805	1,75	Suplus
37	Sukajaya	11.873	57.805	4.985	2,38	Suplus
38	Jasinga	16.014	96.595	8.329	1,92	Suplus
39	Tenjo	12.623	71.211	6.141	2,06	Suplus
40	Parungpanjang	12.833	128.530	11.083	1,16	Suplus

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka, 2017 dan diolah

Tabel 2.18
Daya Dukung Pangan (beras) Kabupaten Bogor tahun 2023

Kecamatan	Produksi beras (Ton)	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi beras (Ton)	DDL Pangan 2023	Status
Nanggung	14.577	93.131	10.617	1,37	Surplus
Leuwiliang	14.915	127.521	14.537	1,03	Surplus
Leuwisadeng	9.159	80.428	9.169	1,00	Surplus
Pamijahan	24.641	147.367	16.800	1,47	Surplus
Cibungbulang	7.563	139.146	15.863	0,48	Defisit
Ciampea	4.290	165.182	18.831	0,23	Defisit
Tenjolaya	10.159	64.663	7.372	1,38	Surplus
Dramaga	1.498	115.992	13.223	0,11	Defisit
Ciomas	2.358	182.523	20.808	0,11	Defisit
Tamansari	4.027	109.333	12.464	0,32	Defisit
Cijeruk	4.467	92.906	10.591	0,42	Defisit
Cigombong	4.498	107.681	12.276	0,37	Defisit

Kecamatan	Produksi beras (Ton)	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi beras (Ton)	DDL Pangan 2023	Status
Caringin	7.517	130.508	14.878	0,51	Defisit
Ciawi	5.320	121.673	13.871	0,38	Defisit
Cisarua	1.511	129.321	14.743	0,10	Defisit
Megamendung	3.992	112.468	12.821	0,31	Defisit
Sukaraja	203.451	207.359	23.639	0,01	Defisit
Babakanmadang	1.051	127.755	14.564	0,07	Defisit
Sukamakmur	27.268	85.134	9.705	2,81	Surplus
Cariu	19.085	52.140	5.944	3,21	Surplus
Tanjungsari	20.516	57.768	6.586	3,12	Surplus
Jonggol	26.856	147.493	16.814	1,60	Surplus
Cileungsi	3.851	337.529	38.478	0,10	Defisit
Klapanunggal	7.178	123.394	14.067	0,51	Defisit
Gunungputri	330.724	436.516	49.763	0,01	Defisit
Citeureup	1.417	233.299	26.596	0,05	Defisit
Cibinong	505.376	418.180	47.673	0,01	Defisit
Bojonggede	188.587	326.724	37.247	0,01	Defisit
Tajurhalang	510.021	125.507	14.308	0,04	Defisit
Kemang	966	114.937	13.103	0,07	Defisit
Rancabungur	914.136	59.815	6.819	0,13	Defisit
Parung	280.558	144.731	16.499	0,02	Defisit
Ciseeng	1.488	118.161	13.470	0,11	Defisit
Gunungsindur	1.362	133.623	15.233	0,09	Defisit
Rumpin	15.264	145.376	16.573	0,92	Defisit
Cigudeg	17.554	131.229	14.960	1,17	Surplus
Sukajaya	11.030	63.729	7.265	1,52	Surplus
Jasinga	14.877	102.519	11.687	1,27	Surplus
Tenjo	11.727	77.135	8.793	1,33	Surplus
Parungpanjang	11.922	134.454	15.328	0,78	Defisit

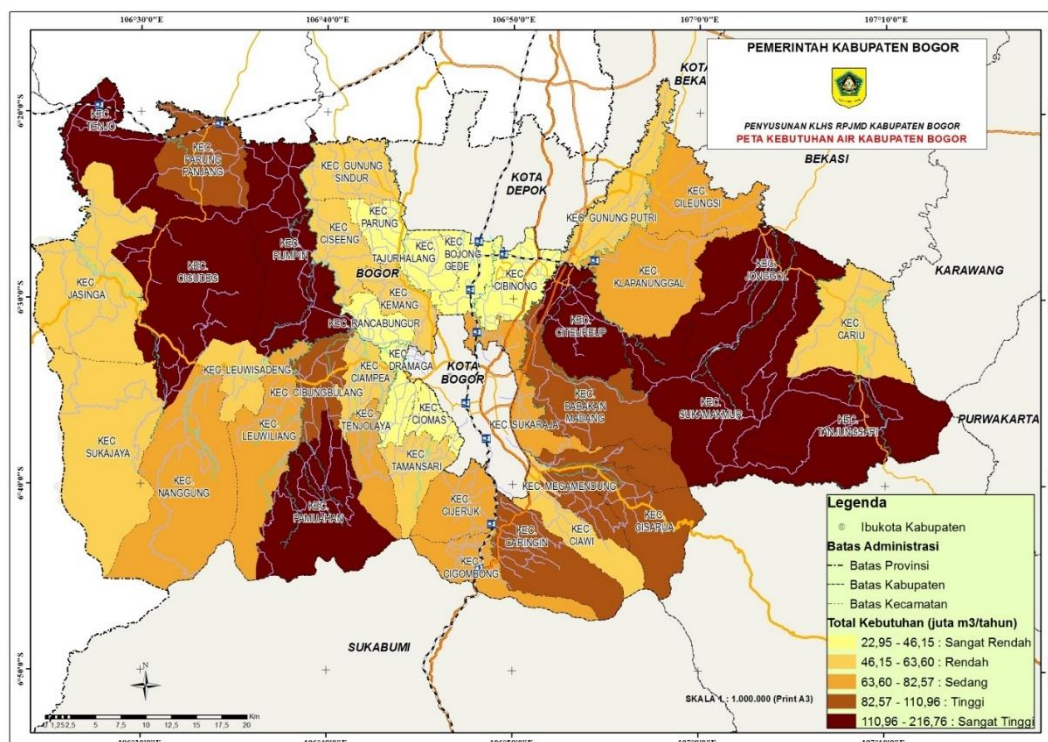
Sumber : Hasil Analisis, 2018

Wilayah kecamatan yang memiliki basis kegiatan ekonomi industri, perdagangan dan jasa mengalami defisit pangan seperti Kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Gunungputri, Bojonggede dan Parung. Sementara 9 kecamatan dengan surplus daya dukung pangan besar dengan nilai di atas 2 meliputi kecamatan Nanggung, Pamijahan, Tenjolaya, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Sukajaya dan Tenjo. Wilayah kecamatan lain yang daya dukung pangannya surplus dengan angka antara 1 – 2, meliputi Leuwiliang, Leuwisadeng, Rumpin, Cigudeg, Jasinga dan Parungpanjang. Sementara berdasarkan hasil analisis daya dukung tahun 2023, terjadi penambahan jumlah kecamatan yang mengalami defisit pangan yaitu Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parungpanjang.

b. Daya Dukung Penyedia Air

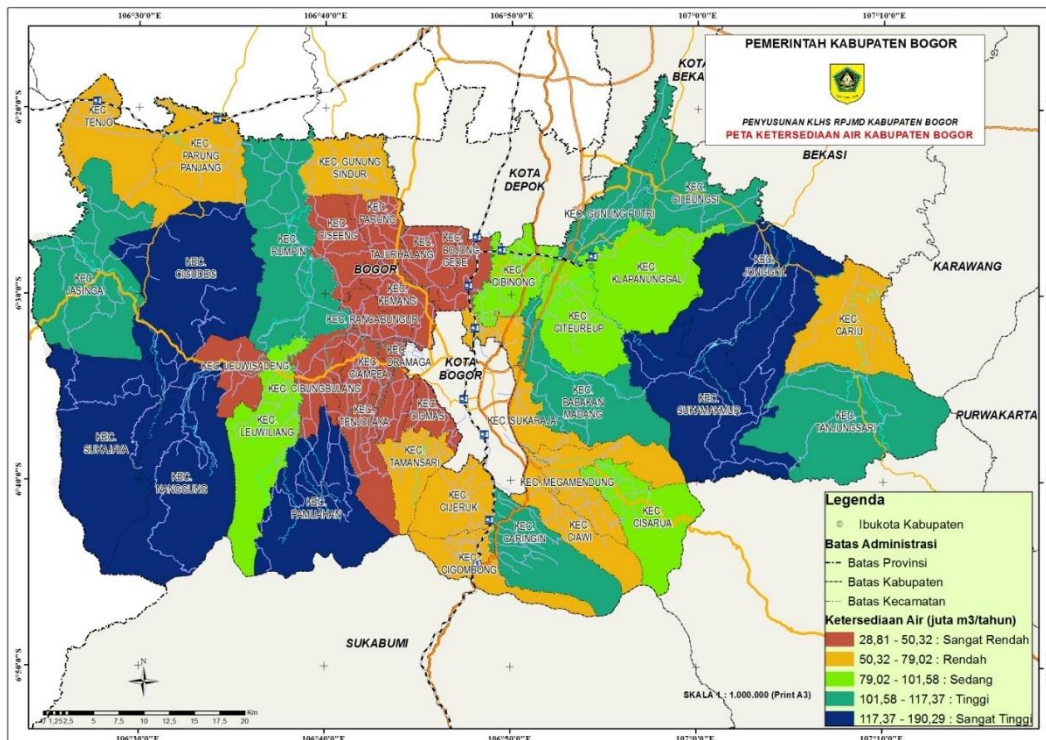
Perhitungan serta analisis daya dukung lingkungan dan ambang batas jasa ekosistem penyedia air, didahului dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan jasa ekosistem penyedia air. Sumber daya

air yang digunakan berasal dari air permukaan. Setelah itu, kebutuhan air yang diperhitungkan adalah kebutuhan air domestik oleh penduduk, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian tertentu, dan kebutuhan air untuk industri. Pola spasial kebutuhan air total di Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Gambar 2.20, dapat dilihat bahwa kebutuhan paling besar tersebar di sebagian besar wilayah perkabupatenan Kabupaten Bogor yaitu pada Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Jonggol.



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

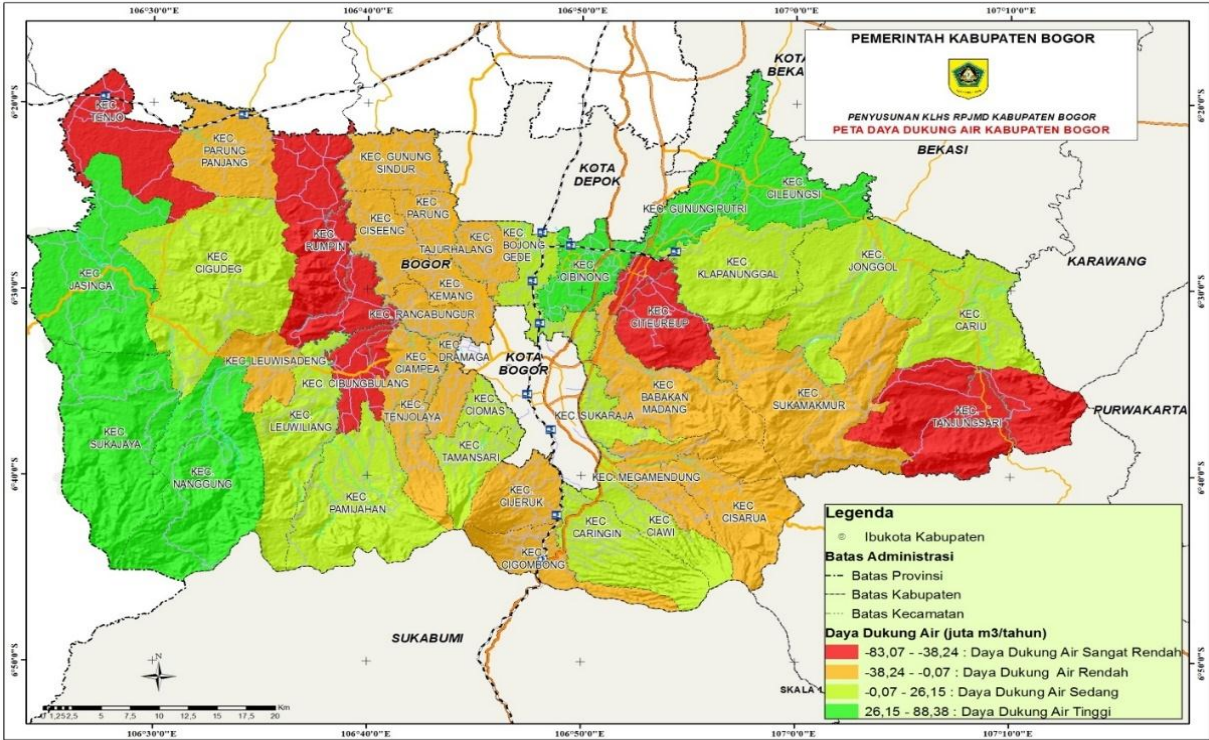
Gambar 2.20
Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

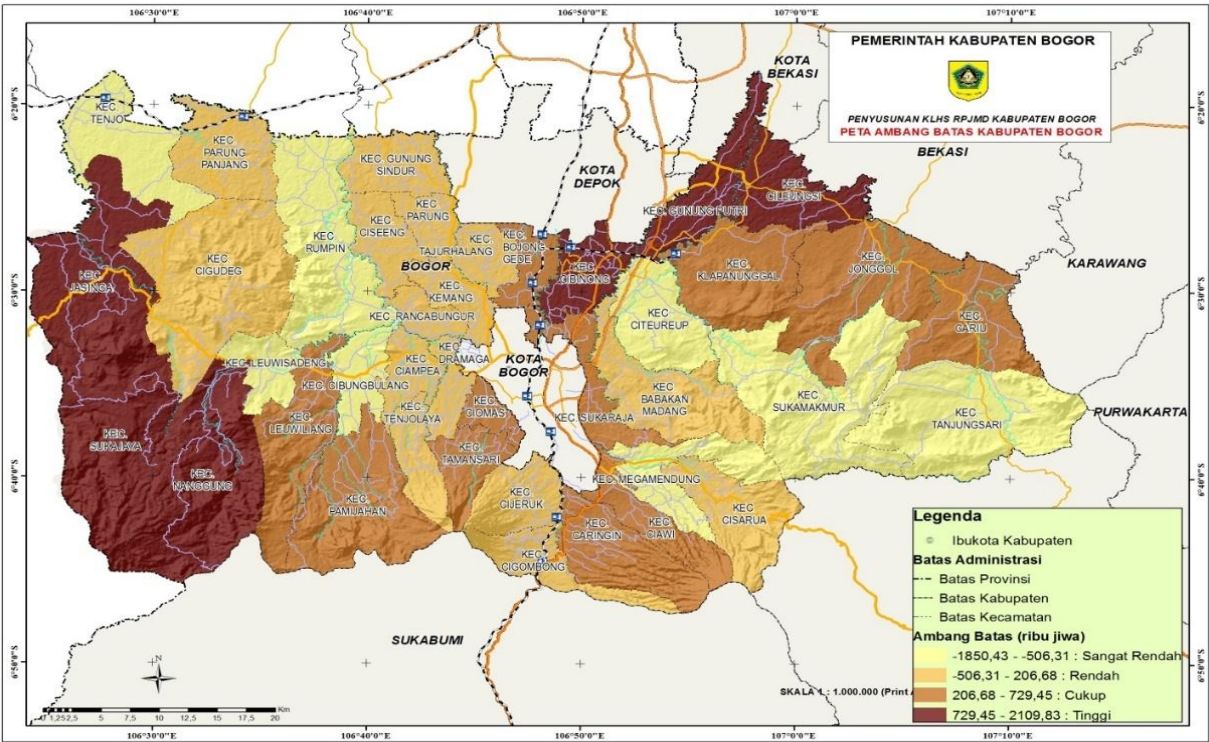
Gambar 2.21
Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017

Selisih ketersediaan air dapat bernilai negatif maupun positif, dengan ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya sehingga lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Secara visual, selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor bernilai positif yang hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor mampu mendukung kebutuhan penduduk Kabupaten Bogor akan air bersih seperti yang ditunjukkan pada Gambar .. dan Tabel ... Namun, sebagian kecil wilayah pada Kecamatan Lembursitu dan sebagian besar wilayah Kecamatan Citamiang memiliki selisih ketersediaan bernilai negatif.



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.22
Peta selisih ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor Tahun



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.23
Pola Spasial Sebaran Ambang Batas Daya Dukung Air
Kabupaten Bogor tahun 2017.

Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki ambang batas tinggi berada di wilayah



kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, dan Kecamatan Cibinong. Sedangkan ambang batas terendah tersebar di wilayah Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Tanjungsari. Daerah dengan ambang batas rendah rentan terhadap kelangkaan air dimasa mendatang khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang signifikan serta adanya dampak perubahan iklim.

Tabel 2.19
Ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air bersih per kecamatan di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Lahan (m ³ /tahun)	Kebutuhan Industri (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)
1	Nanggung	165.095.636,31	3.820.236,00	70.026.454,96	3.924.344,07	87.324.601,29
2	Leuwiliang	93.745.026,00	5.359.017,60	62.228.394,59	4.116,45	26.153.497,36
3	Leuwisadeng	37.857.784,80	3.271.290,60	58.818.120,57	912.491,22	-25.144.117,59
4	Pamijahan	151.185.029,27	6.216.227,40	134.205.467,14	396.232,27	10.367.102,46
5	Cibungbulang	48.877.349,54	5.862.411,00	84.205.695,18	38.199,04	-41.228.955,68
6	Ciampea	46.101.765,38	7.029.330,60	54.998.974,23	1.338.642,36	-17.265.181,81
7	Tenjolaya	47.583.636,28	2.587.090,80	60.890.762,99	3.939.453,24	-19.833.670,74
8	Dramaga	38.182.135,75	4.867.012,20	41.221.847,77	38.157,65	-7.944.881,87
9	Ciomas	43.270.787,49	7.920.047,40	14.275.980,75	763.669,31	20.311.090,03
10	Tamansari	64.388.177,14	4.595.145,60	45.188.302,39	884.547,13	13.720.182,02
11	Cijeruk	75.386.742,30	3.853.918,20	72.963.041,39	309.224,81	-1.739.442,10
12	Cigombong	73.616.444,18	4.541.622,00	61.729.901,32	9.423.984,03	-2.079.063,17
13	Caringin	113.752.763,95	5.506.185,60	85.159.824,11	132.111,13	22.954.643,10
14	Ciawi	65.319.079,43	5.143.302,60	47.986.559,16	26.310,15	12.162.907,52
15	Cisarua	89.478.102,51	5.458.093,20	84.069.870,79	59.218,29	-109.079,77
16	Megamendung	69.469.685,98	4.715.858,40	82.604.355,09	12.743.450,75	-30.593.978,27
17	Sukaraja	76.582.363,50	9.005.236,20	61.332.918,90	24.325,17	6.219.883,23
18	Babakan Madang	108.676.720,10	5.462.692,20	96.044.155,49	9.461.654,81	-2.291.782,40
19	Sukamakmur	190.297.411,83	3.484.158,60	211.667.463,93	1.612.107,86	-26.466.318,56
20	Cariu	79.023.907,57	2.011.339,80	58.875.550,05	148.897,05	17.988.120,68
21	Tanjungsari	112.946.016,83	2.270.679,60	177.751.772,79	60.909,89	-67.137.345,46
22	Jonggol	174.271.438,00	6.319.945,80	155.711.941,52	622.687,73	11.616.862,96
23	Cileungsi	117.377.611,75	15.216.733,20	49.191.559,12	7.883.984,85	45.085.334,57
24	Klapanunggal	101.580.567,02	5.309.348,40	77.225.948,38	35.007,82	19.010.262,41
25	Gunungputri	108.848.571,37	19.871.884,80	40.192.507,50	340.167,22	48.444.011,85
26	Citeureup	91.761.785,80	10.139.349,60	125.231.234,25	414.789,32	-44.023.587,37
27	Cibinong	92.677.419,51	18.703.213,20	18.849.076,16	254.780,94	54.870.349,21
28	Bojonggede	50.325.884,13	14.740.758,60	23.623.166,67	6.158,38	11.955.800,47
29	Tajurhalang	42.957.682,97	5.399.313,60	40.739.643,22	17.826,63	-3.199.100,48
30	Kemang	44.865.450,19	4.886.065,20	51.231.571,78	2.424.065,33	-13.676.252,11
31	Rancabungur	28.815.212,82	2.376.588,00	35.179.055,50	218.499,84	-8.958.930,52
32	Parung	37.410.320,37	6.271.021,20	28.673.740,57	4.346.647,30	-1.881.088,70
33	Ciseeng	45.137.540,55	5.001.916,20	45.901.724,01	60.381,65	-5.826.481,31
34	Gunungsindur	61.663.084,38	5.774.504,40	55.899.923,47	62.080,41	-73.423,90
35	Rumpin	113.028.075,97	6.152.367,00	143.557.269,70	1.560.077,12	-38.241.637,85
36	Cigudeg	143.562.782,57	5.517.792,60	134.559.252,68	74.870,54	3.410.866,76
37	Sukajaya	148.687.972,74	2.532.691,20	57.166.220,10	608.717,41	88.380.344,02
38	Jasinga	108.918.690,65	4.231.649,40	59.068.381,43	303.954,22	45.314.705,59
39	Tenjo	60.119.583,89	3.140.372,40	139.845.639,20	212.773,58	-83.079.201,29
40	Parungpanjang	72.306.613,46	5.750.983,80	84.090.396,76	939,98	-17.535.707,08
Total		3.435.152.854,271	250.317.394,20	3.032.183.665,61	65.690.456,95	86.961.337,51

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Daya Tampung Beban Pencemar

Wilayah Kabupaten Bogor terbagi dalam lima DAS terpanjang di Kabupaten Bogor yaitu DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Cidurian, DAS Cikeas dan DAS Cileungsi. Sungai-sungai utama di Kabupaten Bogor yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai

Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis dan Sungai Cibeet. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai penyuplai air untuk keperluan irigasi. Selain itu, digunakan sebagai sumber air bersih untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci dan mandi.

Akumulasi bahan pencemar pada DAS Ciliwung dan DAS Cisadane mengubah kondisi fisik maupun kimia dari air sungai sehingga kehidupan dalam air tergantung pada kondisi dasar aliran. Hal tersebut berdampak pada keanekaragaman ekosistem air berkurang, dan terjadi ketidakseimbangan ekologi lingkungan karena tidak semua spesies toleran dengan perubahan lingkungan.

Pemantauan kualitas air sungai dapat diketahui dari beberapa parameter, diantaranya parameter BOD, COD, DO, total fosfat, fecal coliform, TSS, dan lain-lain.

Beberapa parameter seperti BOD, H₂S, *Chlorin bebas*, COD nilainya telah melampaui baku mutu artinya beban limbah domestik dan industri cukup tinggi terhadap pencemaran air sungai. Perubahan nilai parameter kualitas air sungai pada tahun 2015 dan nilai parameter air sungai pada tahun 2016 cenderung sama, artinya beberapa parameter kunci telah melampaui baku mutu dan parameter lainnya masih di bawah baku mutu.

Aktivitas domestik dan industri disepanjang sungai serta adanya dinamika aliran menimbulkan perubahan kualitas dan kuantitas sungai secara signifikan. Semakin tinggi aktivitas domestik dan industri disepanjang sungai, maka perubahan kualitas air akan semakin signifikan.

Sejalan dengan kegunaan dan fungsi sungai sebagai sumber air baku air bersih, obyek wisata, saluran drainase makro perkotaan dan sebagai ekosistem yang harus dilestarikan, maka diperlukan upaya untuk menjaga kuantitas, kontinuitas, dan kualitas, sehingga dilakukan pemantauan sungai di Kabupaten Bogor secara periodik. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada beberapa sungai di Kabupaten Bogor menunjukkan *trend* peningkatan beberapa parameter fisik maupun kimia air.

Parameter TSS yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Cikaniki, dan Sungai Cipamingkis. Parameter Sulfida yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, dan Sungai Cibeet. Parameter

Klorin Bebas yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Cikaniki, dan Sungai Cibeet.

Parameter Nitrit yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Ciluar, dan Sungai Kali Angke. Parameter Oksigen Terlarut (DO) yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet.

Parameter Tembaga yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas. Parameter BOD yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter COD yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter Detergen yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Kali Baru, dan Sungai Cibeet.

Parameter Minyak dan Lemak yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cileungsi. Parameter Seng yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Ciluar. Parameter Phenol yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Kali Angke dan Sungai Cipamingkis. Parameter Kromium Heksa yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cileungsi.

Parameter Mercury yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikaniki. Parameter Sianida yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cipamingkis. Parameter Total Coliform yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Kali Baru. Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat parameter fisika dan biologi kualitas air sungai di Kabupaten Bogor, sebagai berikut.



Tabel 2.20

Kualitas Air Sungai Berdasarkan Parameter Fisika dan Biologi di Kabupaten Bogor Tahun 2016

No	Parameter	Nama Sungai									
		Cikeas	Cipaeh	Cileungsi	Cijere	Ciluar	Kali Angke	Kali Baru	Cikaniki	Cipamingkis	Cibeet
	Fisika										
1	TSS	***	***	***	***				***	***	
2	Sulfida	***	***								***
3	Klorin Bebas	***		***	***	***			***		
4	Nitrit	***	***	***		***	***				
5	Oksigen terlarut (DO)	***	***	***		***		***	***		***
6	Tembaga	***									
7	BOD	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	COD	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	Deterjen		***	***				***			
10	Minyak dan Lemak			***							
11	Seng										
12	Phenol						***				
13	Kromium Heksa										
14	Mercury										
15	Sianida										
16	Sulfida										
	Biologi										
17	Total Coliform							***			

Keterangan :*** = tidak sesuai baku mutu.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, sehingga data yang disajikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum akan sama dengan yang dikelola dalam SIPD.

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan di Kabupaten Bogor adalah melalui pengukuran pencapaian indikator-indikator yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017. Komponen-komponen indikator tersebut yaitu:

➤ **Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 148,96 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen dari tahun sebelumnya. Nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, untuk melihat perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB periode tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.15.

Dari tabel 2.21. dapat dijelaskan bahwa PDRB Kabupaten Bogor atas harga konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu Rp. 110,68 triliun pada tahun 2013, Rp. 117,34 triliun pada tahun 2014, Rp. 124,48 triliun pada tahun 2015, Rp. 132,08 triliun pada tahun 2016, Rp. 140,25 triliun pada tahun 2017, terus meningkat menjadi Rp 148,96 triliun pada tahun 2018.

Tabel 2.21
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Konstan (Triliun)

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,00	5,43	6,15	5,24	6,40	5,14	6,80	5,15	7,12	5,07	7,35	4,93
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,50	3,16	3,60	3,07	3,60	2,89	3,52	2,66	3,60	2,57	3,66	2,46
3.	Industri	61,61	55,6	64,79	55,22	68,24	54,82	71,93	54,46	75,97	54,17	80,13	53,79



No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pengolahan												
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,19	0,22	0,19	0,21	0,17	0,197	0,15	0,198	0,14	0,20	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,13	0,11	0,14	0,11	0,15	0,11	0,16	0,11	0,17	0,11
6.	Konstruksi	9,22	8,33	10,22	8,71	11,17	8,98	12,26	9,29	13,20	9,42	14,49	9,73
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,41	13,02	15,14	12,90	15,88	12,76	17,08	12,93	18,30	13,05	19,62	13,17
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,20	2,90	3,47	2,95	3,81	3,06	4,09	3,10	4,45	3,17	4,18	3,23
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	2,41	2,81	2,40	3,04	2,44	3,29	2,49	3,55	2,53	3,79	2,55
10.	Informasi dan Komunikasi	2,02	1,83	2,39	2,04	2,80	2,25	3,05	2,31	3,35	2,39	3,70	2,48
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,51	0,59	0,50	0,63	0,51	0,66	0,50	0,70	0,50	0,75	0,50
12.	Real Estate	0,91	0,82	0,98	0,83	1,04	0,84	1,11	0,84	1,15	0,82	1,18	0,79
13.	Jasa Perusahaan	0,22	0,19	0,23	0,20	0,25	0,20	0,27	0,20	0,29	0,20	0,31	0,21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,92	1,74	1,93	1,64	2,05	1,65	2,14	1,62	2,23	1,59	2,35	1,58
15.	Jasa Pendidikan	1,82	1,64	2,14	1,82	2,37	1,90	2,46	1,87	2,69	1,92	2,89	1,94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,46	0,42	0,56	0,48	0,65	0,53	0,70	0,53	0,74	0,52	0,79	0,53
17.	Jasa lainnya	1,82	1,65	1,99	1,70	2,18	1,76	2,36	1,78	2,55	1,82	2,77	1,86
	PDRB	110,68		117,34		124,48		132,08		140,25		148,96	

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Secara umum kontribusi sektor dalam PDRB harga konstan relatif tetap atau tidak berubah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Beberapa sektor yang tumbuh sepanjang tahun adalah sektor konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa lainnya. Sementara itu sektor yang relatif turun sepanjang tahun adalah sektor Pertambangan dan Penggalan serta sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan tahun 2013 untuk tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 53,79 persen, sedangkan yang terkecil kontribusi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp. 221,55 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,72 persen dari tahun sebelumnya (Tabel 2.22)

Tabel 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun)

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,46	5,49	8,15	5,39	9,09	5,41	9,95	5,39	9,09	5,28	11,41	5,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,11	3,02	4,53	2,99	4,71	2,80	5,18	2,80	5,65	2,80	6,15	2,77
3.	Industri Pengolahan	75,30	55,41	83,23	55,02	92,00	54,73	99,94	54,12	108,43	53,70	117,99	53,26
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,14	0,21	0,14	0,23	0,14	0,24	0,13	0,26	0,13	0,28	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,10	0,15	0,10	0,17	0,10	0,19	0,10	0,21	0,10	0,24	0,11
6.	Konstruksi	11,59	8,53	13,86	9,16	15,47	9,20	17,63	9,55	19,39	9,60	22,01	9,93
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,79	13,83	20,16	13,33	21,88	13,01	24,18	13,09	26,83	13,29	29,72	13,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,09	3,01	4,80	3,17	6,01	3,58	6,86	3,71	7,56	3,74	8,39	3,79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,40	2,50	3,81	2,52	4,29	2,55	4,79	2,59	5,30	2,63	5,79	2,62
10.	Informasi dan Komunikasi	2,02	1,49	2,38	1,57	2,79	1,66	3,08	1,67	3,55	1,76	4,06	1,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	0,49	0,72	0,48	0,81	0,48	0,93	0,50	1,04	0,52	1,15	0,52
12.	Real Estate	1,10	0,81	1,21	0,80	1,32	0,79	1,44	0,78	1,57	0,78	1,68	0,76
13.	Jasa Perusahaan	0,24	0,18	0,27	0,18	0,31	0,18	0,34	0,19	0,38	0,19	0,43	0,19
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,21	1,62	2,35	1,55	2,72	1,62	2,99	1,62	3,31	1,64	3,65	1,65
15.	Jasa Pendidikan	2,02	1,48	2,48	1,64	2,86	1,70	3,11	1,68	3,47	1,72	3,88	1,75
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,38	0,62	0,41	0,79	0,47	0,89	0,48	0,98	0,49	1,06	0,48
17.	Jasa lainnya	2,07	1,52	2,35	1,55	2,65	1,57	2,95	1,60	3,33	1,65	3,66	1,65
	PDRB	135,88		151,28		168,09		184,68		201,93		221,55	

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Dari Tabel 2.22 sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar pada tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 117,99 triliun atau memiliki andil sebesar 53,26 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.29,72 triliun (13,42 persen). Sedangkan sektor yang memiliki peranan relatif kecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 0,24 triliun (0,11 persen).



Secara keseluruhan kontribusi semua sektor dalam PDRB harga berlaku terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2018

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,76	6,62	9,33	2,40	11,46	4,09	9,50	6,26	7,15	4,59	6.97	3.27
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,83	2,88	10,26	2,88	3,8	-0,03	10,01	-2,38	9,07	2,45	8.85	1.55
3.	Industri Pengolahan	9,31	4,36	10,54	5,17	10,53	5,32	8,64	5,41	8,49	2,45	8.81	5.48
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,77	3,92	14,40	5,73	9,58	-5,17	4,12	-4,19	10,23	0,48	6.55	0.97
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,91	3,75	4,12	3,25	15,59	9,88	11,42	7,36	12,00	6,61	13.51	5.65
6.	Konstruksi	21,32	10,85	19,57	10,94	11,64	9,29	13,96	9,76	9,99	7,66	13.51	9.71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,93	9,94	7,32	5,04	8,50	4,91	10,51	7,57	10,97	7,15	10.78	7.20
8.	Transportasi dan Pergudangan	24,1	10,80	17,32	8,17	25,25	9,84	14,09	7,44	10,17	8,81	11.04	8.11
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,70	9,50	12,24	5,49	12,65	8,20	11,50	8,20	10,80	7,78	9.25	6.99
10.	Informasi dan Komunikasi	10,64	9,57	17,91	18,38	17,08	17,21	10,51	8,86	15,12	9,87	14.42	10.28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,55	10,54	9,20	3,74	12,84	7,60	14,17	4,84	12,22	5,14	10.21	6.61
12.	Real Estate	15,24	5,83	9,75	7,32	9,73	6,48	8,98	6,42	8,47	3,65	7.02	3.04
13.	Jasa Perusahaan	12,46	8,08	10,78	6,58	13,96	8,15	11,53	7,55	12,20	7,45	11.72	8.39
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	-2,12	6,41	0,19	15,97	6,46	9,73	4,23	10,71	4,31	10.34	5.46
15.	Jasa Pendidikan	17,55	10,35	22,86	17,81	15,47	10,66	8,55	4,08	11,76	9,34	11.87	7.24
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,62	6,68	21,12	20,15	25,96	17,35	13,05	6,40	10,01	5,70	8.18	7.72
17.	Jasa lainnya	10,59	8,03	13,50	9,35	12,77	9,55	11,53	7,83	12,79	8,32	10.02	8.36
PDRB		12,93	6,14	11,33	6,01	11,11	6,09	9,87	6,10	9,34	6,19	9.72	6.21

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Sektor usaha yang memiliki proporsi laju pertumbuhan terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Bogor tahun 2018 (berdasarkan harga konstan) adalah sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Kontruksi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa lainnya, sektor Transportasi dan Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat

Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor sekunder dan tersier seperti sektor Informasi dan Komunikasi, yang mencapai pertumbuhan 9,57 persen pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 18,38 persen, 17,21 persen pada tahun 2015, tahun 2016 sebesar 8,86, 9,87 persen pada tahun 2017 serta pada tahun 2018 sebesar 10,28 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan time series dari tahun 2012-2018, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6 persen. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 6.14%, atau meningkat 0,13% dari Tahun 2012 sebesar 6,01%. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih terpaut 0,19% di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sebesar 6,33% dan terpaut 0,43% diatas LPE Nasional sebesar 5,71%. Untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 LPE Kabupaten Bogor diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional. Kemudian pada Tahun 2018 capaian LPE Kabupaten Bogor sebesar 6,21% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.24.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2018 (%)

➤ **Laju Inflasi**

Pada tahun 2013 terjadi inflasi Kabupaten Bogor sebesar 8,51 persen, naik dari inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 2,99 persen, walaupun meningkat namun nilai ini masih digolongkan sebagai inflasi ringan (di

bawah 10 persen per tahun). Pada tahun 2014 inflasi kembali turun menjadi 7,04 persen dan pada tahun 2015 turun lagi menjadi 2,89 persen, sedangkan mulai tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 3,02 persen dan 4,26 persen serta untuk tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,35. (Gambar 2.25).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.25
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018

Inflasi Kalender Januari-September 2018 di Kabupaten Bogor hanya sebesar 2,58 persen hampir sama dengan inflasi Gabungan 7 (tujuh) kota Jawa Barat yang sebesar 2,30 persen. Inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,83 persen sedangkan gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat tertinggi terjadi di bulan Januari juga yaitu sebesar 0,83 persen.

Tabel 2.24
Inflasi Kabupaten Bogor dan Gabungan 7 Kota Jawa Barat periode Januari – September Tahun 2018 (2012=100)

Kab/Kota	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Jan-Sept 2018	Jan-Sept 2017
Kab. Bogor	0,83	0,18	0,15	0,00	0,66	0,24	0,56	-0,13	-0,28	2,58	2,04
Gab Jawa Barat	0,83	0,36	0,29	-0,04	0,28	0,47	0,37	-0,01	-0,18	2,30	-1,04

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Inflasi terendah di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan September yaitu deflasi sebesar -0,28 persen sedangkan Gabungan 7 (Tujuh) kota di Jawa Barat terendah terjadi di bulan September yaitu deflasi sebesar -0,18 persen.

➤ PDRB per Kapita

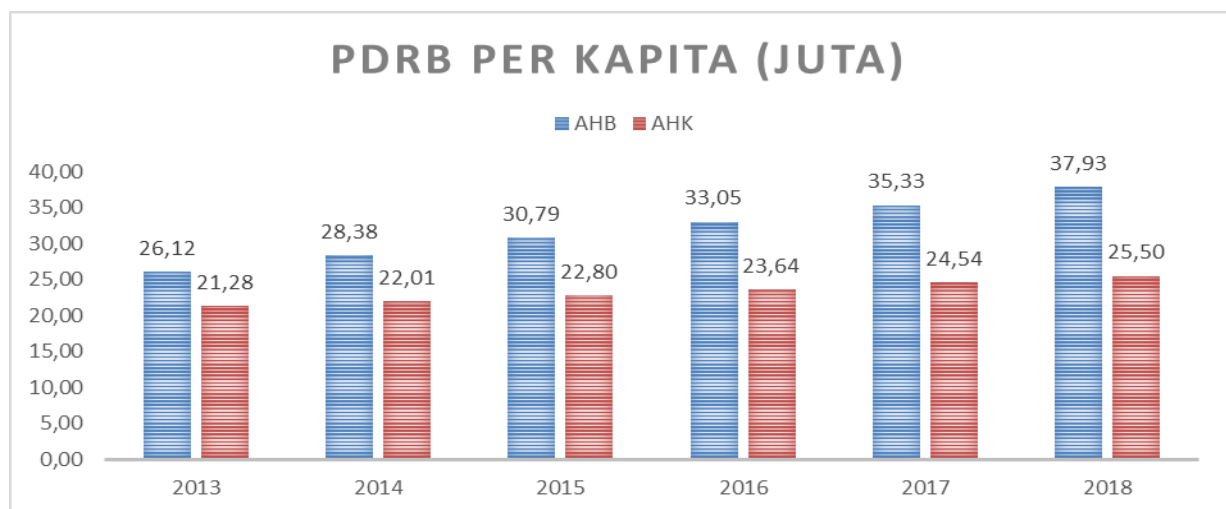
Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita.

Tabel 2.25
PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

PDRB/ kapita	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AHB	26.120.667,39	28.376.717,64	30.788.546,18	33.053.641,24	35.332.605,13	37.930.316,78
AHK	21.277.049,58	22.009.450,25	22.799.997,60	23.638.204,41	24.540.831,98	25.502.783,26

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

PDRB per kapita Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu tumbuh sebesar 45,21 persen dalam kurun waktu enam tahun dimana pada tahun 2018 diprediksi mencapai 37,93 juta rupiah. Gambar 2.14. memperlihatkan PDRB per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan harga konstan.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.26
PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Juta)

Namun tidak demikian dengan tingkat pertumbuhan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Bogor, dimana tingkat pertumbuhannya termasuk kecil yaitu hanya sekitar 19,86 persen dalam kurun waktu enam tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 25,50 juta rupiah.

➤ Indeks Gini

Rasio Rasio Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rasio Gini diukur pada skala 0-1 dimana 0 menunjukkan tidak ada kesenjangan sosial dan angka 1 dimana tingkat kesenjangan sosial mencapai titik maksimal. Rasio Gini Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dengan nilai 0,38 dan menurun pada tahun 2018 dengan nilai 0,34 (Tabel 2.26).

Tabel 2.26
Indeks Gini Di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

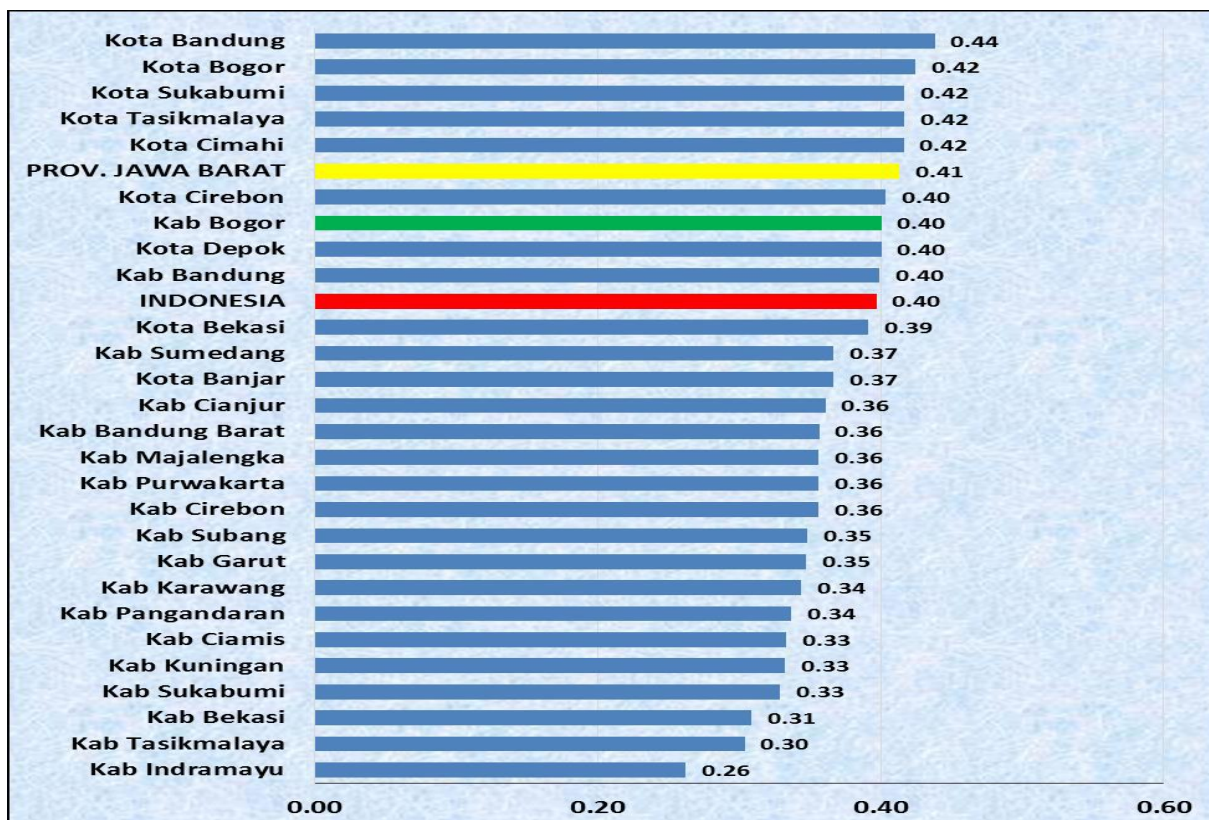
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Gini	0,38	0,39	0,42	0,40	0,40	0,34

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Indeks Gini dengan nilai 0,40 sudah mendekati titik rawan, karena jika sudah berada pada level 0,5 gini ratio ini akan menimbulkan banyak kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan bisa berpotensi terjadinya kerusuhan yang artinya ada ketidakstabilan politik dan imbasnya ke ekonomi. Indikator *Gini Ratio* tidak bisa ditetapkan menjadi target tahunan, sebab akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah koefisien *gini ratio*. Karena itu persentase penduduk di atas garis kemiskinan menjadi indikator yang bisa ditetapkan setiap tahun.

Gambar 2.27 menunjukkan sebaran gini rasio kabupaten/kota se Jawa Barat tahun 2016. Jika dilihat sebarannya se Jawa Barat, pada tahun 2016 angka gini ratio tertinggi terdapat di Kota Bandung (0,44), kemudian Kota Bogor (0,42) dan Kota Sukabumi 0,42. Sedangkan angka gini rasio terkecil terdapat di Kabupaten Indramayu (0,26), Kabupaten Tasikmalaya (0,30), Kabupaten Bekasi (0,31), Kabupaten Sukabumi (0,33) dan Kabupaten Kuningan (0,33).

Gini ratio Kabupaten Bogor (0,40) berada di atas Indonesia (0,40) dan dibawah Provinsi Jawa Barat (0,41).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

Gambar 2.27

Gini ratio menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

➤ Indeks Ketimpangan Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

Rumus indeks Williamson adalah:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$$

Dimana:

I_w = nilai indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita Kecamatan-i

\bar{y} = PDRB per kapita Kabupaten

f_i = Jumlah Penduduk Kecamatan-i

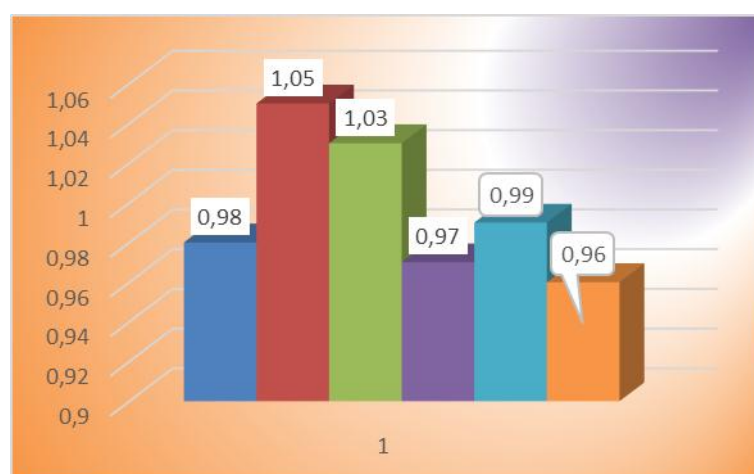
n = Jumlah Penduduk Kabupaten

$i = 1,2,3,...,x$

Kriteria penilainnya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai I_w menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin besar (kemerataan antar kecamatan semakin memburuk)
2. Jika nilai I_w mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin kecil (kemerataan antar kecamatan semakin membaik)

Hasil penghitungan Indeks Williamson Kabupaten Bogor.



Sumber: Buku Saku Final Bappedalitbang Tahun 2018

Gambar 2.28
Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2013-2018

Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil dari indeks Williamson dari tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan angka sekitar 1. Hal ini menandakan tingginya ketidakmerataan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Nilai indeks Williamson yang melebihi nilai maksimum menurut teorinya ini, disebabkan adanya beberapa daerah yang memiliki *hyper* PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Kabupaten Bogor dibandingkan daerah lainnya. Beberapa daerah ini adalah Kecamatan Klapanunggal, Cileungsi dan Citeureup. Tingginya PDRB per kapita yang sangat mencolok pada ketiga kecamatan ini, disebabkan sumbangan sektor-sektor dalam PDRB yang bersifat padat modal. Kategori padat modal tersebut adalah Kategori industri pengolahan. Hal ini terlihat pada tahun 2018, kategori industri pengolahan menyumbang sebesar 85,16 % dari total PDRB Kecamatan Klapanunggal. Sedangkan untuk Kecamatan Cileungsi pada tahun 2018, industri pengolahan menyumbang 77,65 % dari total PDRB Kecamatan Cileungsi dan kategori industri pengolahan, Kecamatan

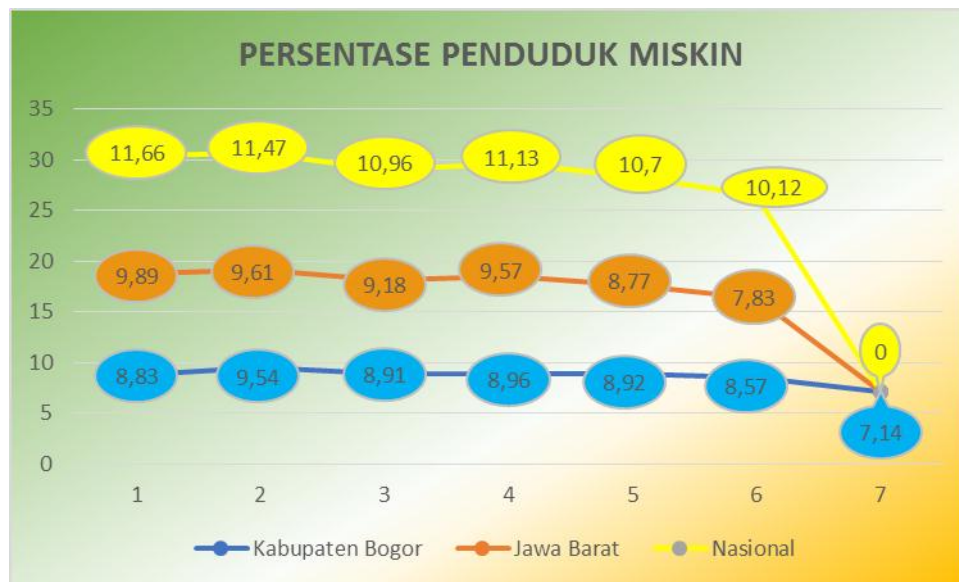
Citeureup memberikan kontribusi sebesar 75,70 % dari total PDRB Kecamatan Citeureup.

Secara makro, sumbangan sektor industri di Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama dalam PDRB 2018, dengan nilai sebesar 53,70%. Sumbangan PDRB yang sangat besar di sektor industri ini, ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Dalam sektor industri hanya mampu menyerap 19,39% tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Tingginya sumbangsih sektor padat modal (sektor industri) dengan sedikitnya menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain yang padat karya, menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan pendapatan/disparitas pendapatan di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan sektor padat modal hanya terjadi di kecamatan tertentu, yang mampu menghasilkan PDRB per kapita yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedangkan kecamatan lain lebih ke arah sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja meskipun menyumbangkan nilai PDRB daerah yang kecil.

Dengan nilai PDRB yang tidak terlalu besar pada sektor ini, menyebabkan PDRB per kapita yang didapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, tidak sebesar yang didapat pada kecamatan dengan sektor industri yang lebih berperan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antarkecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi antardaerah. Dalam pandangan lain, nilai dari Indeks Williamson yang melebihi angka 1 ini, disebabkan ketidaksempurnaan suatu metode perhitungan dari indeks Williamson ini. Tidak adanya asumsi yang menyertai dalam suatu rumusan perhitungan indeks Williamson ini, menyebabkan indeks yang dihasilkan tidak bisa menghasilkan nilai antara 0 sampai 1.

➤ **Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan pada periode 2013-2018 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.29
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor masih berada di atas Provinsi Jawa Barat, namun berada di bawah Nasional. Jika dilihat dari perubahan penurunan persentase jumlah penduduk miskin antara tahun 2016-2017, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor menurun sebesar 0,35 persen. Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 0,94 persen, dan nasional menurun sebesar 0,58 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,35 persen, namun penurunan ini masih di bawah besarnya angka penurunan provinsi Jawa Barat dan Nasional.

➤ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2013-2018 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kabupaten Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor mencapai 69,69 poin pada

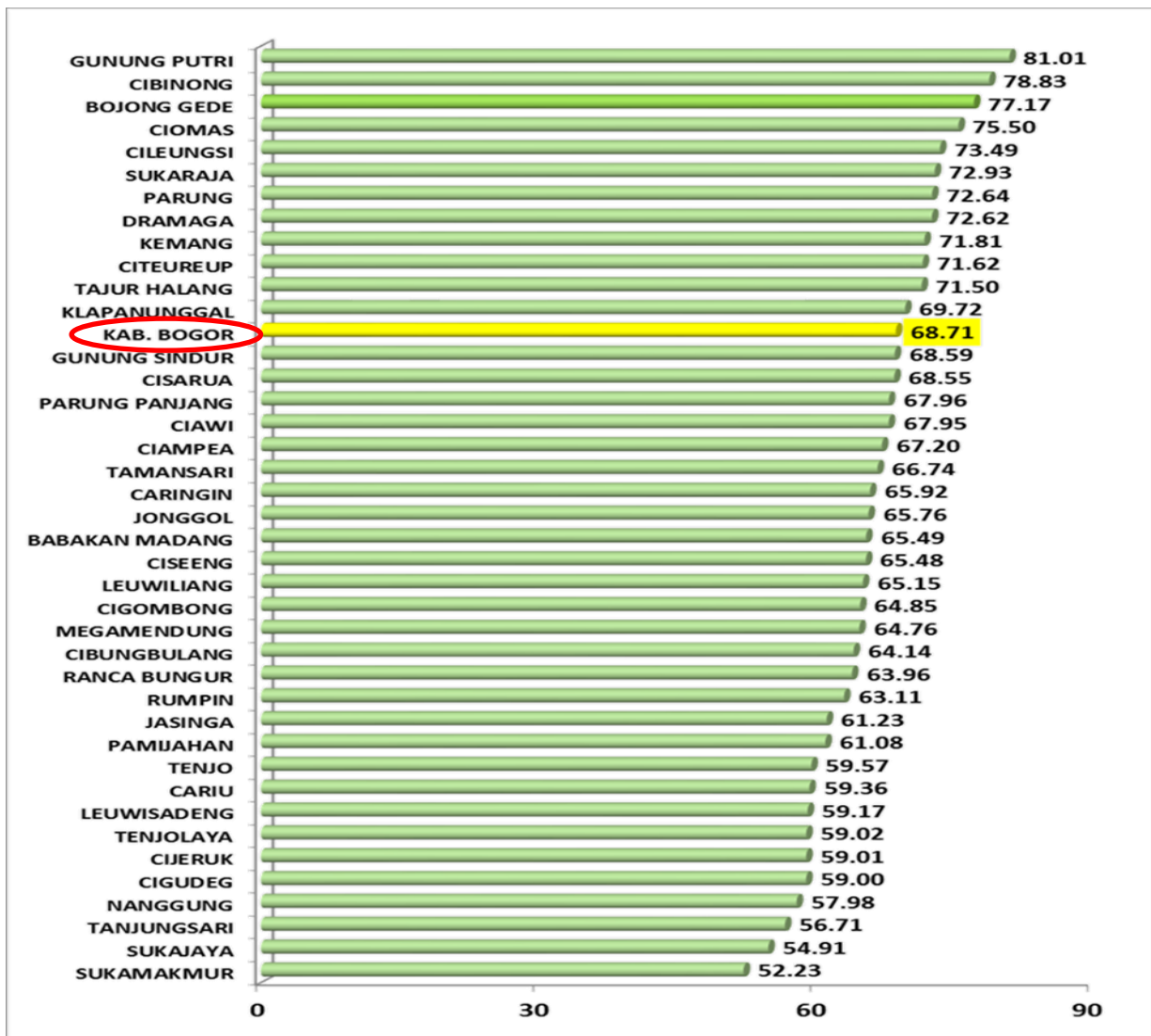
tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 66,74. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Angka IPM sebesar 69,69 di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera sedang/menengah. Realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan data BPS yaitu (Tabel 2.21) :

Tabel 2.27
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Indikator	Realisasi Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	66,74	67,36	67,77	68,32	69,13	69,69
	Komponen IPM terdiri dari;						
	a Angka Harapan Hidup (AHH)	70,47	70,49	70,59	70,65	70,70	70,86
	b Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th +	11,68	11,81	11,83	12,05	12,43	12,44
	c Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th +	7,40	7,74	7,75	7,83	7,84	7,88
	d Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	9.041	9.066	9.368	9.537	9.901	10.323

Sumber : IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2017, IPM tertinggi dicapai oleh Kecamatan Gunung Putri yaitu 81,01 poin, di atas IPM Kabupaten Bogor. Adapun kecamatan dengan capaian IPM terendah adalah Kecamatan Sukamakmur yaitu 52,23 poin. Capaian IPM tahun 2017 pada masing-masing kecamatan disajikan pada Gambar 2.30.



Sumber : IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.30
IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017

➤ **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

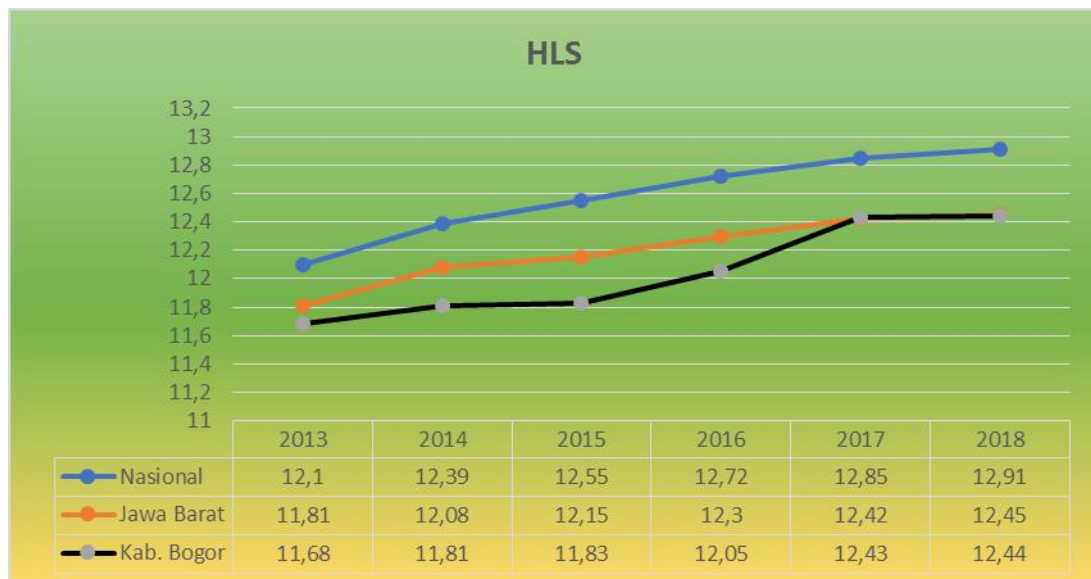
Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tabel 2.28
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,68	11,81	11,83	12,05	12,43	12,44

Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2017

Tabel 2.22 menunjukkan HLS Kabupaten Bogor pada periode tahun 2013-2018 secara perlahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti selama kurun 2013 hingga 2018 Kabupaten Bogor mampu meningkatkan HLS sebesar 0,87 tahun atau rata-rata per tahun sebanyak 0,15 tahun. Sementara itu, tren peningkatan HLS dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.31
Perbandingan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional

Berdasarkan data yang ada di dalam gambar 2.31 diketahui bahwa Capaian HLS penduduk usia 7 tahun ke atas tahun 2013 sebesar 11,68 tahun. Artinya, pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Bogor berumur 7 tahun yang memasuki sekolah berpeluang harapan lama bersekolah mencapai 10,28 tahun atau setara SMA kelas 10. Pada tahun 2017 HLS Kabupaten Bogor mencapai 12,43 tahun. Meskipun setiap tahun HLS terus meningkat, namun HLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah HLS Provinsi dan Nasional, kecuali tahun 2017 HLS Kabupaten Bogor lebih tinggi dari Provinsi. Selanjutnya pada Tahun 2018 capaian HLS Kabupaten Bogor sebesar 12,44 dengan posisi di bawah capaian Provinsi dan Nasional.

➤ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Komponen pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). Pada penghitungan IPM metode baru cakupan usia untuk RLS mengalami pergeseran dari 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas, tentunya ini mempengaruhi nilai IPM yang dihasilkan. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu, tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate).



Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.32

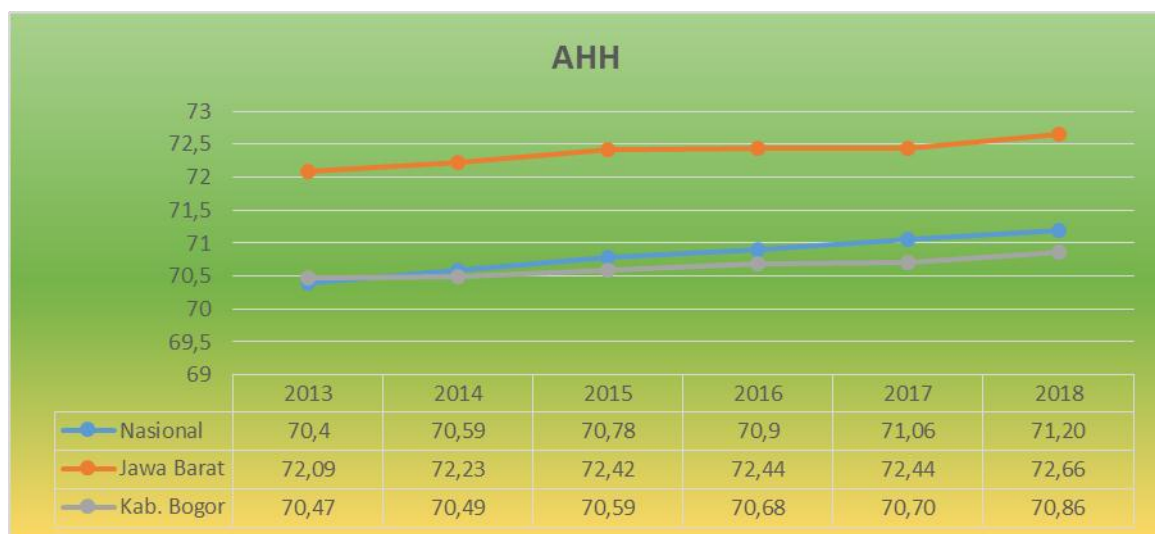
RLS KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012-2018

Berdasarkan data pada Gambar 2.32 ditunjukkan bahwa RLS Kabupaten Bogor tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, RLS di Kabupaten Bogor hanya mencapai 7,27 tahun. Kemudian terus meningkat hingga mencapai 7,85 tahun pada tahun 2017. RLS kabupaten Bogor masih dibawah RLS Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 RLS Provinsi Jawa Barat sebesar 8,14 tahun.

Target rata-rata lama sekolah 2017 sebesar 7,80 sementara dengan realisasi 7,84, menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor telah melebihi target yang telah direncanakan sebesar 0,04. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata lama sekolah, dengan RLS 2016 sebesar 7,83 dan RLS 2017 sebesar 7,84 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan sebesar 0,13 artinya telah terjadi pertumbuhan RLS di Kabupaten Bogor >0 .

➤ **Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup Saat Lahir (e_0) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan komponen-komponen IPM selama periode 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. AHH Kabupaten Bogor pada tahun 2012 mencapai 70,34 tahun, kemudian terus meningkat secara perlahan hingga pada tahun 2017 mencapai 70,68 tahun. Pertumbuhan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bogor sebesar 0,36, artinya telah terjadi pertumbuhan > 0 . Sementara jika dibandingkan dengan target AHH tahun 2017 sebesar 70,94 sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 70,70 artinya, realisasi lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Meskipun AHH setiap tahunnya terus meningkat AHH Kabupaten Bogor masih berada dibawah AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pertumbuhan AHH Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.33.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, 2018

Gambar 2.33
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2013-2018

➤ **Persentase Balita Gizi Buruk**

Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan layanan urusan bidang kesehatan salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan balita gizi buruk. Hingga tahun 2017, jumlah balita gizi buruk sebanyak 0,0138 persen. Kemudian pada tahun 2018, jumlah balita gizi buruk sebesar 0,0185. Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2012-2018 disajikan dalam Gambar 2.34.



Sumber : LKPJ Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.34
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2012-2018

➤ **Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.29
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,60	61,86	60,14	59,75	64,07	62,71
2.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,87	7,65	7,48	9,62	9,55	9,75

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bogor relatif fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai TPAK Kabupaten Bogor 63,60 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 61,86 persen. Pada tahun 2015 nilai TPAK menjadi 60,14 persen. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 59,75 persen serta di tahun 2017 kembali naik menjadi 64,07 persen, dan pada tahun 2018 menjadi 62,71 persen..

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka 7,87 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 7,65 persen. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 7,48 persen. Sedangkan tahun 2016 naik menjadi 9,62 persen serta di tahun 2017 turun kembali menjadi 9,55 persen dan pada tahun 2018 menjadi 9.08.

➤ **Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**

Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor.

Tabel 2.30
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65
		ADH Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3.54	3.43

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan,

perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 4,10 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 4,54 persen.

➤ **Kontribusi Produksi Kelompok Petani**

Persentase kontribusi produksi kelompok petani mengikuti pola persentase kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan). Hal ini disebabkan karena kelompok petani lebih banyak bergerak dibidang tanaman pangan dan palawija.

Tabel 2.31
Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	2,54	2,1	3,73	3,82	3.74	3,65
		ADH Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3.54	3.43

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 2,54 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 2,66 persen.

➤ **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam peningkatan kunjungan wisatawan dari rencana 7.100.000 orang, terealisasi 7.300.134 orang atau 102,82% disebabkan oleh bertambahnya objek wisata yang ada di

Kabupaten Bogor. Kondisi ini mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.32
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	3,13	3,30	3,30	4,79	4,79	4,84
		ADH Konstan	3,24	3,24	3,24	3,29	3,29	3,32

Sumber : Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Pada tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 3,13 persen, dan meningkat pada tahun 2018 angka kontribusinya menjadi 4,84. Sementara itu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan relatif sama sepanjang tahun 2013-2018 dengan kontribusi sebesar 3,24-3,32 persen.

➤ **Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 29,72 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 19,62 triliun. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bogor tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 221,55 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 148,96 triliun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2018 sebesar 13,42 persen berdasarkan harga berlaku dan 13,17 persen berdasarkan harga konstan.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (%)	13,83	13,33	13,01	13,09	13,29	13,42
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan (%)	13,02	12,90	12,76	12,93	13,05	13,17

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

➤ **Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB**

Sektor perindustrian di Kabupaten Bogor berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 53,26 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 53,79 persen. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.34
Kontribusi Sektor Industri terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	55,41	55,02	54,73	54,12	53,70	53,26
		ADH Konstan	55,66	55,22	54,82	54,46	54,17	53,79

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2017

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2017) persentase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2013-2017 berdasarkan harga berlaku masing-masing sebesar 55,41%, 55,02%, 54,73, 54,12% dan 53,70% serta berdasarkan harga konstan mencapai 55,66%, 55,22%, 54,82%, 54,46% dan 54,17%.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

➤ **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan

ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Total pengeluaran konsumsi RT per kapita sebulan (rupiah)	822.801	924.109	1.263.655	1.369.902	1.435.960

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bogor setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mencapai Rp 822.801, sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 613.158 menjadi Rp. 1.435.960.

➤ **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.36
Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nilai tukar petani (%)	101,37	99,60	101,17	101,32	100,10	103,18

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Nilai tukar petani (NTP) pada tahun 2013-2018 sangat fluktuatif di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2013 NTP sebesar 101,37 persen dan turun pada tahun 2014 dengan nilai 99,6 persen dan naik lagi pada tahun 2015 menjadi 101,17 persen dan 2016 101,32 persen, pada tahun 2017 sebesar 100,10 persen, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 103,18 persen.

➤ Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.37
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio ketergantungan (%)	56,73	56,57	53,66	51,78	49,37	50,39

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor kurun waktu 2013-2018 berkisar antara 49,37 s/d 56,73. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan total sebesar 56,73 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 56,73 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 51,89, dan rasio

ketergantungan penduduk tua sebesar 4,84. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk usia kerja di Indonesia masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari :

A. Pendidikan (SD/SMP)

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka pendidikan anak usia dini adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari tabel 2.33 dapat dilihat bahwa angka pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor terus mengalami relatif naik, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Berikut disajikan perkembangan angka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bogor. Persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2013 sebesar 31,10%. Persentasenya terus naik di tahun 2014 dan 2015 berturut-turut sebesar 37,69% dan 41,42%. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 38,51% serta naik menjadi 42,85%

di tahun 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 43,28% atau sebesar 0,43 dari tahun 2017.

Tabel 2.38
Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	31,10	37,69	41,42	38,51	42,85	43,28

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kabupaten Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa, angka melanjutkan dan angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.39
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	68,86	71,54	71,49	85,63	80,63	82,97

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Sekolah Dengan Kondisi Bangunan Baik**

Ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018, ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 1,53% dan 2,26% dibandingkan tahun 2017. Berikut secara lengkap

disajikan data ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.40
Persentase Sekolah Pendidikan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	57,05	59,43	62,38	86,21	87,42	88,95
2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	63,98	65,46	67,95	87,68	89,87	92,13

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Rasio Guru/Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio guru/murid di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.41
Rasio Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Guru/Murid SD/MI	380,61	396,00	397,51	408	412	413
2	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	370,54	373,08	365,93	418	500	512

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Selama kurun waktu tahun 2013-2018 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bogor per 10.000 untuk SD/MI mengalami kenaikan sedangkan untuk SMP/MTs mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Bogor adalah 380,61. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak $380,61 \approx 381$ atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) $26,27 \approx 26$ murid SD. Pada tahun yang sama, rasio guru terhadap murid SMP/MTs di Kabupaten Bogor adalah 370,54. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak $370,54 \approx 371$ atau

1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 26,99 \approx 27 murid SMP. Sedangkan di tahun 2018 rasio guru terhadap murid SD/MI adalah 413. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 413 atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 24,21 \approx 24 murid SD. Pada tahun yang sama, rasio guru terhadap murid SMP/MTs adalah 512. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 512 atau 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 19 murid SMP.

B. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.42
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Penduduk
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk	1 : 9.718	1 : 9.383	1 : 13.847	1 : 15.266	1 : 16.053	1 : 16.053

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Rasio puskesmas, poliklinik dan Pustu per satuan penduduk menunjukkan penurunan yang relatif tinggi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 memiliki rasio 1 : 9.718 dan pada tahun 2018 hanya memiliki rasio 1 : 13.808. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah poliklinik yang sangat signifikan juga pertambahan penduduk.

➤ Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.43
Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000)
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 3.923	1 : 4.016	1 : 4.760	1 : 3.869	1 : 3.737	1 : 3.820

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah dokter di Kabupaten Bogor relatif stabil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2013 rasio dokter per satuan penduduk dengan nilai 1 : 3.923, artinya 1 dokter menangani 3.923 penduduk. Pada tahun 2016 rasio naik menjadi 1 : 3.869 yang artinya satu dokter melayani 3.869 penduduk. Kemudian pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami trend yang menunjukkan hasil yang positif dari tahun-tahun sebelumnya, dengan masing-masing capaian pertahun 1 : 3.737 dan 1 : 3.820. Walaupun capaian tersebut masih jauh dari standar pelayanan terpadu dengan perbandingan satu dokter melayani 2.500 penduduk.

➤ **Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.44
Jumlah Tenaga Medis dan Penduduk di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1 : 2.667	1 : 2.730	1 : 4.063	1 : 3.352	1 : 2508	1 : 2563

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Bogor sangat fluktuatif mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Adapun secara berturut-turut capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Bogor pada Tahun 2014 sebesar 1 : 2.730. Kemudian pada Tahun 2015 sebesar 1 : 4.063, lalu pada Tahun 2016 mencapai perbandingan 1 : 3.352. Selanjutnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami trend dengan menunjukkan hasil yang lebih positif dari tahun-tahun sebelumnya, dengan masing-masing capaian pertahun 1 : 2.508 dan 1 : 2.563.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10%). Kerusakan

yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas.

- c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10% s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16% s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadang kala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Tabel 2.45
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Proporsi Kondisi Jalan dalam keadaan Baik	0,7626	0,7140	0,7443	0,7397	0,8488	0,8641

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Proporsi kondisi jaringan jalan baik tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai 0,7626, kemudian menurun di tahun 2014 dengan nilai 0,714. Pada tahun 2015 proporsi jaringan jalan baik naik kembali menjadi 0,7443. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 0,7397. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,8488 dan tahun 2018 menjadi 0,8641 meningkat dari tahun sebelumnya.

➤ **Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum**

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kabupaten Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	76,26	71,40	74,43	73,97	84,88	86,41
2.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	31,38	21,03	21,67	23,79	30,00	30,00
3.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	2,23	2,80	2,80	3,13	2,80	2,80
4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	4,50	4,50	4,50	4,50	22,47	N/A
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	39,09	37,76	37,76	36,24	36,52	36,52
6.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	84,90	69,40	69,40	76,10	82,09	N/A
7.	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	63,50	47,35	37,19	58,12	63,57	67,74

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Rasio Jaringan Irigasi**

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan

pelengkapannya. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kabupaten Bogor tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.47
Rasio Jaringan Irigasi
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Irigasi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Jaringan Irigasi	0,4434	0,049	0,050	0,046	0,0491	0,049

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya relatif berfluktuatif sepanjang tahun. Pada tahun 2013 rasio panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya sebesar 0,4434 dan di tahun 2018 menurun menjadi 0,049.

➤ **Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 2.48
Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio pemakaman umum per satuan penduduk	219	214	209	204	273

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2013 di Kabupaten Bogor bernilai 219 per 1000 penduduk yang artinya setiap satu unit lahan pemakaman berbanding dengan 4 orang penduduk. Kondisi ini naik sampai dengan tahun 2017 dengan rasio 273 per 1000 penduduk yang

artinya satu unit lahan pemakaman nantinya berbanding 4 orang penduduk.

➤ **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria :

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Tabel 2.49
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,2640	0,2716	0,2976	0,2604	0,2831	0,3594

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bogor berfluktuasi sepanjang tahun 2013-2017. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPG/HGB pada tahun 2013 sebesar 0,264, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 0,2716 dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 0,2976. Tetapi pada tahun 2016 menurun menjadi 0,2604 sedangkan di tahun 2017 naik lagi menjadi 0,2831 dan di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 0,3594.

➤ **Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 2.50
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	0,2180	0,2382	0,2639	0,3115	0,3351

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Bogor meningkat terus sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 nilai rasio 0,2180 yang artinya dari 100 unit rumah di Kabupaten Bogor hanya 21 unit yang ber-IMB. Pada tahun 2017 rasio meningkat menjadi 0,3351 yang artinya dari 100 unit rumah di Kabupaten Bogor hanya 33 unit yang ber-IMB.

➤ **Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya**

Ruang publik yang berubah peruntukannya adalah jumlah ruang publik yang berubah fungsi. Berikut disajikan persentase ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Bogor mulai dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.51
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	5,00	5,00	4,50	4,50	4,50

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Pada tahun 2017 ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Bogor mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2017 persentasenya 4,50% yang artinya dari total ruang publik yang ada, sekitar 4,50 % berubah peruntukannya.

➤ **Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Tabel 2.52
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	84,13	86,65	86,50	87,50	70,00	81,40

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait luas tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya di Kabupaten Bogor.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

➤ Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni terus meningkat namun kecil dalam kurun waktu 2013-2018. Di tahun 2013 mencapai 0,2310 dan di tahun 2018

sebesar 0,2523, artinya dari tahun 2013-2018 terdapat 15,62%-24,73% rumah yang layak huni di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.53
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio rumah layak huni	0,2310	0,2326	0,2370	0,2403	0,2473	0,2523

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Secara bertahap persentase lingkungan pemukiman kumuh terus berkurang dimulai tahun 2013 sebesar 0,32% dan diakhir tahun 2018 sebesar 0,23%.

Tabel 2.54
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,32	0,281	0,258	0,295	0,290	0,230

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

➤ **Penanganan Bencana**

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bogor tahun 2013-2017 baru mencapai angka 89% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit dan 20,27 menit untuk tahun 2018 (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.55
Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	88%	88%	89%	89%	89%	89%
2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	45	44	36	35,25	18,6	20,27
3.	Persentase gedung yang sudah dilengkapi alat pemadam kebakaran					80%	90%
4.	Persentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran					82%	46%
5.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		80%	85%	80%	80%	

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

F. Sosial

➤ Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial masih terlihat rendah akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penanganan dan bantuan terhadap PMKS tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel 2.56
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	0,26	0,25	0,37	0,39	0,42	0,47

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat sepanjang tahun yaitu 0,26 persen tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,37 persen. Pada tahun 2018 naik menjadi 0,47 persen.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.57
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio KDRT (%)	0,00004	0,000039	0,000038	0,000037	0,000036	0,000035

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor relatif sangat kecil. Tahun 2013 persentase kekerasan dalam rumah tangga hanya 0,00004 persen, dan tahun 2014 turun menjadi 0,000039 persen, tahun 2015 hanya 0,000038 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 0,000037 persen, di tahun 2017 turun sebesar 0,000036 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0,000035 persen.

B. Pangan

➤ Ketersediaan Pangan Utama

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 (digambarkan oleh Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih Sereal), terdapat sebanyak 25 Kecamatan belum swasembada, hanya 15 Kecamatan yang termasuk swasembada pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Bogor sebagai pedoman tata laksana

keamanan, mutu dan gizi pangan serta ketersediaan pangan utama dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.58
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan pangan utama (%)	87,44	60,33	57,00	87,44	61,75	63,00

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

C. Lingkungan Hidup

➤ Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.127.

Tabel 2.59
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	39,05	58,92	61,37	60,77	64,56	65,05

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2013 persentase jumlah sampah yang ditangani 39,05 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 65,05 persen.

D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

➤ Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat

dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2013-2018), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah) selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.60
Rasio Penduduk ber-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	0,724	0,7241	0,7244	0,7248	0,850	1,000
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	0,62	0,615	0,615	0,615	1,14	1,25
3	Rasio pasangan ber-akte nikah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

➤ Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Tabel 2.61
Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase koperasi aktif (%)	67,64	69,44	71,65	69,9	74,75	31,61

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Bogor pada Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Persentase koperasi aktif pada tahun 2013 sebesar 67,64 persen dan

meningkat pada tahun 2015 menjadi 71,65 persen, tetapi di tahun 2016 turun menjadi 69,9 persen dan naik lagi di tahun 2017 menjadi 74,75 persen. Dan pada tahun 2018 menjadi 31,61 persen.

F. Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

➤ Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai investasi yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.62
Jumlah nilai investasi berskala nasional (trilyun) di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (triliun)	8,2	13	13,8	11,1	7,2	8,69
2.	PMA (triliun)	5,3	3,3	4,9	1,5	2,5	5,05
3.	PMDN (triliun)	2,9	9,7	8,9	9,6	1,8	3,64

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Nilai investasi di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai realisasi investasi berskala nasional sebesar 8,2 trilyun, hasil dari kontribusi PMA sebesar 5,3 trilyun dan 2,9 trilyun PMDN, mengalami kenaikan cukup signifikan hingga tahun 2015 sebesar 13,8 trilyun investasi berskala nasional hasil dari kontribusi PMA sebesar 4,9 trilyun dan 8,9 trilyun PMDN. Terjadi penurunan lagi hingga 2017 yaitu menjadi 7,2 trilyun untuk skala nasional, akan tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 8,69 trilyun. Kenaikan dan penurunan yang signifikan ini berkaitan erat dengan masuknya investor baru dengan jumlah nilai investasi

yang sangat besar atau perpanjangan investasi yang nilainya relatif lebih kecil.

G. Pemuda dan Olahraga

➤ Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud pada bagian ini adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.63
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	28,57	88,75	88,75	90	85,71	85,71

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Pada tahun 2013, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Bogor adalah 28,57%, angka ini mengalami peningkatan sampai 4 tahun sesudahnya, yaitu 88,75% di tahun 2014, 88,75% di tahun 2015, 90% di tahun 2016, serta 85,71% di tahun 2017 dan tahun 2018.

H. Kebudayaan

Indikator kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.64
Kebudayaan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	31	45	50	50	35	35

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait dengan urusan kebudayaan yang lainnya adalah dapat dilihat dari indikator kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 hanya 35 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Sebelum dilakukan revitalisasi dan pelestarian situs serta kawasan cagar budaya, harus dilakukan penetapan sebagai situs dan kawasan cagar Kabupaten dan Nasional. Sosialisasi atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Bogor.

I. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

➤ Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Tabel 2.65
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,00675	0,00763	0,01505	0,01519	0,01307	0,0129

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bogor berfluktuasi dari tahun 2013-2017. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan 0,00675 artinya perbandingan jumlah kunjungan orang ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebesar 1:148, kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 0,00763. Tahun 2015 dan 2016 jumlah pengunjung naik menjadi 0,01505

dan 0,01519. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 jumlah pengunjung terus menurun menjadi 0,01307 sebesar 0,0129.

➤ **Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Bogor dapat digambarkan di bawah ini :

Tabel 2.66
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37,09	32,14	36,76	36,76	36,06	36,18

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui perkembangan jumlah koleksi buku yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bogor. Semakin banyak koleksi buku yang tersedia menggambarkan semakin baik dalam pembentukan SDM yang berkualitas di suatu daerah. Di tahun 2018 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 36,18 yang artinya berdasarkan data dari Dinas Arsip dan Perpustakaan bahwa ada 13.010 koleksi judul buku yang tersedia dibanding dengan 35.963 koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ **Kunjungan Wisata**

Kunjungan wisata di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.67
Jumlah Kunjungan Wisata
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan wisata (jiwa)	4.130.125	4.975.939	4.992.320	8.625.229	7.138.555	7.513.209

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bogor sejak tahun 2013-2018 sebanyak lebih kurang 46 obyek. Jumlah kunjungan ke-46 obyek wisata tersebut sebanyak 7.138.555 orang pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi 7.513.209 orang. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2016), di mana pada tahun 2014 jumlah yang berkunjung ke-46 obyek sebanyak 4.975.939 orang, pada tahun 2013 sebanyak 4.130.125 orang. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 845.814 orang pada tahun 2014, sebanyak 16.381 orang pada tahun 2015, sebanyak 3.632.909 orang pada tahun 2016 dan menurun sebanyak 1.486.674 orang di tahun 2017 dan naik pada tahun 2018.

B. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dihitung dari produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) dikali seratus persen. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung turun dari tahun ke tahun, selengkapnya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)						
	- Padi Sawah	60,41	63,94	63,66	64,25	60,33	63,25
	- Padi Gogo	33,87	33,82	32,69	33,36	34,82	32,58
	- Produktivitas palawija (ku/ha)	167,56	171,64	175,2	170,68	294,75	172,02
	- Produktivitas sayuran (ku/ha)	106,69	107,22	107,76	108,30	115,12	116,05

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Padi Sawah pada tahun 2013 mencapai 60,41 ton/ha. Produktivitas padi sawah ini cenderung naik sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 63,94 ton/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 63,26 ton/ha. Sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 64,25 ton/ha dan tahun 2017 turun menjadi 60,33 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 63,25 ton/ha
2. Padi Gogo pada tahun 2013 mencapai 33,87 ton/ha. Produktivitas padi gogo ini cenderung turun sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 33,82 ton/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 32,69 ton/ha. Sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 33,36 ton/ha dan tahun 2017 naik menjadi 34,82 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 32,58 ton/ha.
3. Produktivitas Palawija pada tahun 2013 mencapai 167,56 ku/ha. Produktivitas palawija ini cenderung naik sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 171,64 ku/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 175,2 ku/ha. Sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 170,68 ku/ha dan tahun 2017 naik lagi menjadi 294,75 ku/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 172,02 ton/ha.
4. Produktivitas Sayuran pada tahun 2013 mencapai 106,69 ku/ha. Produktivitas palawija ini cenderung naik sampai tahun 2018 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 107,22 ku/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 107,76 ku/ha, tahun 2016 sebesar 170,68 ku/ha, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 115,12 ku/ha, pada tahun 2018 juga naik menjadi 116,05 ku/ha.

➤ **Cakupan Binaan Kelompok Petani**

Cakupan bina kelompok tani adalah jumlah petani yang mendapatkan binaan/bantuan dari pemerintah daerah dibagikan dengan jumlah seluruh kelompok tani.

Tabel 2.69
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan bina kelompok petani (%)	2,69	3,34	2,63	3,10	3,34	3,40

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Cakupan binaan kelompok tani setiap tahunnya sangat berfluktuasi. Cakupan pada tahun 2013 sebesar 2,69 persen, pada tahun 2014 sebesar 3,34 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 2,63 persen, pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu : tahun 2016 menjadi 3,10 persen, di tahun 2017 menjadi 3,34 persen dan 2018 menjadi 3,40 persen.

C. Perdagangan

➤ Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 mencapai US\$ 1.091.075.555,67. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 mencapai US\$ 919.956.537,21 pada tahun 2014 menjadi US\$ 928.741.773,45. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2017.

Tabel 2.70
Ekspor Bersih Perdagangan (US\$) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	919.956.537,21	928.741.773,45	967.018.119,05	927.132.432	1.091.075.555,67

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dibagikan dengan total kelompok pedagang/usaha informal. Pada tahun 2017 cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Bogor mencapai 57,63%. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2017.

Tabel 2.71
Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	49,88	56,49	56,30	57,60	57,63

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2016) cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal mengalami fluktuatif. Persentase cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2013-2016 di Kabupaten Bogor masing-masing sebesar 49,88%, 56,49%, 56,30%, dan 57,60%.

D. Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kelautan dan perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

➤ Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan

Produksi perikanan merupakan hitungan dari jumlah produksi ikan (ton) dibagi dengan target daerah (ton). Di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 produksi perikanan mencapai 122.131 ton atau 100,24% dari target daerah yang ditetapkan sebesar 121.731 ton. produksi ini terus meningkat sejak tahun 2013-2017. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2018 mencapai 29,53 Kg/Kap/Thn atau 100,24% dari target daerah yang ditetapkan sebesar 29,46 Kg/Kap/Thn. konsumsi ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor, dimana pada tahun 2013 konsumsi ikan mencapai , pada tahun 2014 mencapai 25,18 Kg/Kap/Thn, tahun 2015 dan 2016 masing-masing 26,41 Kg/Kap/Thn dan 27,65 Kg/Kap/Thn. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 28,34 Kg/Kap/Thn dan 29,53 Kg/Kap/Thn.

Tabel 2.72
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan (%)	88.811	108.829	112.782	117.567	120.412	122.131
2.	Konsumsi ikan (%)	23,97	25,18	26,41	27,65	28,34	29,53

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Keseluruhan capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Pertumbuhan PDRB							
1	Pertumbuhan PDRB (AHB)	14,36	12,66	12,13	9,87	9,34	9,72	Bappedalitbang
2	Pertumbuhan PDRB (AHK)	6,04	6,01	5,93	6,10	6,19	6,21	Bappedalitbang
3	Laju inflasi	184,62	(17,27)	(75,28)	64,94	6,97	3,35	Bappedalitbang
	Inflasi	8,51	7,04	1,74	2,87	3,07	3,35	Bappedalitbang
	PDRB per Kapita							
4	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	26,12	28,38	30,79	33,05	35,33	37,93	Bappedalitbang
5	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)	21,28	22,01	22,8	23,64	24,54	25,50	Bappedalitbang
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (triliun)	135,89	151,28	168,09	184,68	201.900	221,547	Bappedalitbang
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan (triliun)	38,74	41,07	124,48	132,08	140,25	148,959	Bappedalitbang
6	Indeks Gini	0,38	0,39	0,42	0,4	0,4	0,34	Bappedalitbang
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,98	1,05	1,03	0,96	0,99	0,96	Bappedalitbang



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
8	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	9,54	8,91	8,96	8,83	8,57	7,14	Bappedalitbang
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,74	67,36	67,77	68,32	69,13	69,69	Bappedalitbang
10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th + (Angka Rata-rata Lama Sekolah)	7,4	7,74	7,75	7,83	7,84	7,88	Disdik
11	Angka Usia Harapan Hidup	70,47	70,49	70,59	70,65	70,7	70,96	Dinkes
12	Persentase balita gizi buruk	0,021	0,0202	0,019	0,017	0,0102	0,0185	Dinkes
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	51,80	60,14	63,36	67,97	73,73	100	Dinkes
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,60	61,86	60,14	59,75	64,07	62,71	Disnaker
15	Tingkat pengangguran terbuka	7,87	7,65	7,48	9,62	9,55	9,08	Disnaker
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	42,17	42,16	42,16	42,16	42,03	41,90	Dinsos
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,59	75,08	75,98	76,04	77,77	78,57	Setda
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	27,58	31,85	33,19	38,37	37,18	38,28	BAPPENDA
19	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
20	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,70	74,80	77,33	77,00	76,90	86,18	DKP
21	Penguatan Cadangan Pangan	NA	59,64	123,14	167,24	127,30	95,02	DKP
22	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65	Distanhorbun



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Harga Berlaku							
23	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Harga Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3.54	3.43	Distanhorbun
24	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Harga Berlaku	2,54	2,44	1,99	1,46	1.44	1.36	Distanhorbun
25	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Harga Konstan	2,66	2,68	2,08	1,23	1.25	1.20	Distanhorbun
26	Produksi sektor pertanian	970.540	945.421	837.904	825.416	987.181	974.929	Distanhorbun
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Harga Berlaku	0,42	0,29	0,26	0,22	0.22	0.21	Distanhorbun
28	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Harga Konstan	0,48	0,38	0,35	0,26	0.25	0.24	Distanhorbun
29	Produksi sektor perkebunan	32.253	32.898	36.119	32.241	46.995	38.934	Distanhorbun
30	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Harga Berlaku	2,54	2,10	3,73	3,82	3.74	3,65	Distanhorbun
31	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Harga Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3.54	3.43	Distanhorbun



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
32	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Distanhorbun
33	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Distanhorbun
34	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Harga Berlaku	1,53	1,54	1,7	2,80	2,80	2,80	Disperdagin
35	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Harga Konstan	1,1	1,08	1	2,66	2,57	2,57	Disperdagin
36	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	3,13	3,30	3,30	4,79	4,79	4,83	Disbudpar
37	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Konstan	3,24	3,24	3,24	3,29	3,29	3,32	Disbudpar
38	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Harga Berlaku			1,54	1,56	1,53	1,53	Diskanak
39	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Harga Konstan			1,55	1,57	1,53	1,53	Diskanak
40	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku	13,83	13,33	13,01	13,09	13,29	13,91	Disperdagin
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Konstan	13,02	12,90	12,76	12,93	13,05	53,79	Disperdagin



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Harga Berlaku	55,41	55,02	54,73	54,12	53,70	53,26	Disperdagin
44	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Harga Konstan	55,66	55,22	54,82	54,46	54,17	13,17	Disperdagin
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	822.801	924.109	1.263.655	1.369.902	1.435.960	1.664.919	Bappedalitbang
2	Nilai tukar petani	101,37	99,6	101,17	101,32	100,1	103,18	Distanhorbun
3	Produktivitas total daerah	63,9	NA	76,4	75,08	75,08	74,30	Distanhorbun
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	1,38	1,38	1,38	0,96	1,38	1,38	DPMD
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	8,03	7,98	7,48	7,13	7,02	6,98	Disperdagin
6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	2,97	4,92	3,40	3,36	1,96	1,41	Setda
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	1,24	1,36	1,33	1,15	0,98	0,94	Setda
8	Angka kriminalitas yang tertangani	3,70	4,25	4,89	5,63	5,71	5,93	Satpol PP
9	Rasio ketergantungan	56,73	56,57	53,66	51,78	49,37	50,39	Disnaker



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
	Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	31,10	37,69	41,42	38,51	42,85	43,28	Disdik
2	Angka partisipasi kasar							Disdik
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	31,10	37,69	41,42	38,51	42,85	43,33	Disdik
	SD/MI/PA	108,71	94,89	90,10	98,14	99,49	97,45	Disdik
	SMP/MTs/PB	95,43	90,20	88,12	94,26	93,24	92,69	Disdik
3	Angka pendidikan yang ditamatkan							
4	Angka Partisipasi Murni							Disdik
	SD/MI/PA	99,02	85,30	81,25	87,47	99,49	88,75	Disdik
	SMP/MTs/PB	85,53	78,91	77,08	72,23	93,24	83,21	Disdik
5	Angka Putus Sekolah							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,379	0,267	0,201	0,087	0,065	0,098	Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,954	0,932	0,640	0,113	0,210	0,273	Disdik
6	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,81	100	99,73	100	99,83	99,76	Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,99	98,93	100	100	100	99,04	Disdik
7	Angka Melanjutkan (AM):							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,38	101,2	98,54	98,84	98,17	110,41	Disdik
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	57,05	59,43	62,38	86,21	87,42	88,95	Disdik
	Sekolah pendidikan SMP/MTs/SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	63,98	65,46	67,95	87,68	89,87	92,13	Disdik
8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	68,86	71,54	71,49	85,63	80,63	82,97	Disdik
	Kesehatan							
1	Jumlah Kematian bayi dan neonatal	166	216	199	142	105	109	Dinkes
2	Jumlah Kematian balita	8	20	6	9	8	13	Dinkes
3	Jumlah kematian neonatal		180	169	126	97	105	Dinkes
4	Jumlah kematian ibu	60	71	69	58	59	55	Dinkes
5	Rasio posyandu per satuan balita	8,91	8,91	8,99	8,53	8,92	8,57	Dinkes
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : 9.718	1 : 9.383	1 : 13.847	1 : 15.266	1 : 16.053	1:13.808	Dinkes
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 232.353	1 : 193.836	1 : 197.450	1 : 206.940	1 : 204.108	1:200.781	Dinkes
8	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 3.923	1 : 4.016	1 : 4.760	1 : 3869	1 : 3.737	1 : 3.820	Dinkes



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 2667	1 : 2730	1 : 4063	1 : 3352	1 : 2.508	1 : 2.563	Dinkes
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	76,7	77,93	78,1	85,4	82,5	77,64	Dinkes
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,11	87,6	87,9	88,01	92,63	89,29	Dinkes
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,1	95,16	92,4	97,49	81,34	95,49	Dinkes
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Dinkes
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92,28	95,73	101,54	95,21	90,37	93,17	Dinkes
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,11	1,91	1,25	0,68	0,9	0,5	Dinkes
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	25,38	31,28	31	35,66	53,43	27,79	Dinkes
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	92,08	91,61	8360	83,61	91,66	97,66	Dinkes
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	157,61	151,38	176	166	196	232	Dinkes



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,5	0,6	0	0,9	1	1	Dinkes
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	75,53	72,32	72,96	68,8	73,88	63,34	Dinkes
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90	93	97	89	91	97,15	Dinkes
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	Dinkes
24	Penderita diare yang ditangani	13.467	163.904	159.407	159.405	130.488	159.500	Dinkes
25	Angka kejadian Malaria	0	0	0	0	0	0	Dinkes
26	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	Dinkes
26	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0	Dinkes
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0	Dinkes
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,001	0,018	0,019	0,021	0,025	0,025	Dinkes
29	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	0	0	Dinkes



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	20,82	100	100	100	3,45	80,7	Dinkes
31	Cakupan kunjungan bayi	94,36	96,03	96,1	96,21	95,85	94,16	Dinkes
32	Cakupan puskesmas	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	Dinkes
33	Cakupan pembantu puskesmas	30,18	30,18	30,18	35,02	28,05	30,05	Dinkes
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	84,51	86,8	93,54	102,33	98	99	Dinkes
35	Cakupan pelayanan nifas	87,47	88,73	88,1	97,83	94,4	98,3	Dinkes
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	46,23	41,49	42,08	43,33	50,08	64,89	Dinkes
37	Cakupan pelayanan anak balita	77,42	79,49	79,69	81,95	91,05	84:43:00	Dinkes
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	93,8	94,84	94,84	100	100	100	Dinkes
39	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	90,23	78,78	91	91	82,5	89,5	Dinkes
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55,15	66,09	70,09	88,47	88,47	89,67	Dinkes
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	Dinkes
42	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	100	100	100	100	100	100	Dinkes



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	epidemiologi < 24 jam							
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,7626	0,7140	0,7443	0,7397	0,8488	0,8641	DPUPR
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	76,26	71,4	74,43	73,97	84,88	86,41	DPUPR
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		0,00033	0,00031	0,00028	0,00027	0,00027	DPUPR
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	76,26	71,40	74,43	73,97	84,88	86,41	DPUPR
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	31,38	21,03	21,67	23,79	30,00	30,00	DPUPR
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2,23	2,80	2,88	3,13	2,80	2,80	DPUPR
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	68,00	72,58	68,15	64,65	69,83	68,53	DPUPR
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak	39,09	37,76	37,76	36,24	36,52	36,8	DPUPR



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	tersumbat							
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	63,50	47,35	37,19	58,12	63,57	67,74	DPUPR
10	Rasio Jaringan Irigasi	0,4434	0,4900	0,5001	0,4607	0,0491	0,0491	DPUPR
11	Persentase penduduk berakses air minum	4,19	44,19	44,1	47,8	51,5	57,3	DPUPR
12	Persentase areal kawasan kumuh	0,32	0,28	0,26	0,295	0,290	0,230	DPKPP
13	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	21,9	21,4	20,9	20,4	27,3	33,37	DPKPP
14	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,95	0,94	0,92	2,46	3,26	2,42	Setda
	Penataan Ruang:							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,264	0,2716	0,2976	0,2604	0,2831	0,3594	DPUPR
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,2180	0,2382	0,2639	0,3115	0,3351	0,3640	DPKPP
3	Ketaatan terhadap RTRW	84,13	86,65	86,50	87,50	70,00	70,00	DPUPR
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Rasio rumah layak huni	0,231	0,2326	0,237	0,2403	0,2473	0,2523	DPKPP
2	Rasio permukiman layak huni	0,9967	0,9971	0,9976	0,9957	0,9975	0,9983	DPKPP
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,29	95,87	96,83	97,57	99,30	99,08	DPKPP
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	29,32	37,30	49,51	67,66	88,21	88,92	DPKPP
5	Persentase pemukiman yang tertata	8,025	8,034	8,044	8,053	24,459	25,841	DPKPP
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,32	0,28	0,26	0,295	0,290	0,230	DPKPP
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	47,70%	53,69%	59,22%	60,14%	62,21%	62,67%	DPKPP
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	108,75	10	10	10	10	10	Satpol PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	15,37	74,83	86,22	90,06	93,89	97,73	Satpol PP
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	88%	88%	89%	89%	89%	89%	Damkar
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah	45	44	36	35,25	18,6	20,27	Damkar



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Manajemen Kebakaran (WMK)							
5	Persentase Penegakan PERDA	15,37	72,09	76,51	82,72	87,92	93,13	Satpol PP
	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,26	0,25	0,37	0,39	0,42	0,47	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	0,26	0,25	0,37	0,39	0,42	0,44	Dinsos
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,26	0,25	0,37	0,39	17,27	30,45	Dinsos
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	164,00	164,00	164,00	164,00	190,00	190,00	Dinsos
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0,24	4,94	8,73	9,73	4,73	4,73	Dinsos
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0,24	4,94	8,73	9,73	4,73	4,73	Dinsos



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0,26	0,25	0,37	0,39	17,27	30,45	Dinsos
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
	Tenaga Kerja							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	159	153	325	200	176	153	Disnaker
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	54	41	45	70	15	51	Disnaker
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	22,97	105,36	116,67	100	112	117,63	Disnaker
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	400	590	800	900	380	420	Disnaker
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	65	230	98	49	0	Disnaker
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	0	0	60	Disnaker
7	Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	190,84	198,18	205,52	198,18	198,18	198,18	Disnaker



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	16,4	16,86	17,33	17,82	7:26	18,83	DP3AP2KB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	DP3AP2KB
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	44,55	45,44	46,35	47,28	1157:16:48	49,2	DP3AP2KB
4	Rasio KDRT	0,00004	0,000039	0,000038	0,000037	0.00036	0,0035	DP3AP2KB
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	50,15	51,15	52,18	53,22	54,28	55,37	DP3AP2KB
	Pangan							
1	Ketersediaan pangan utama	NA	NA	57	87,44	61,75	63,00	DKP
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	NA	133,15	104,14	121,38	113,06	122,97	DKP
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	113,67	95,50	104,00	111,96	102,26	DKP
4	Ketersediaan protein perkapita	NA	152,63	112,78	138,75	114,16	143,68	DKP
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	54,84	90,91	87,5	NA	91	DKP
6	Rawan Ketersediaan Pangan	NA	5	25	26,7	32,5	37,5	DKP



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
7	Rawan Rumah Tangga Miskin	NA	10	22,5	24,48	27,5	30	DKP
8	Rawan Akses Jalan	NA	7,5	12,5	26,7	35	32,5	DKP
9	Rawan Akses Listrik	NA	2,5	2,5	6,68	5	7,5	DKP
10	Rawan Gizi Kurang	NA	10	25	28,93	30	37,5	DKP
11	Rawan Akses Air Bersih	NA	17,5	27,5	44,5	47,5	62,5	DKP
12	Rawan Akses Fasilitas Kesehatan	NA	2,5	7,5	8,9	10	12,5	DKP
13	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	NA	93,24	80,98	95,82	81,56	91	DKP
	Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	26,5	26,83	26,83	26,83	49,35	55,73%	DPKPP
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	0	0	0	0	DPKPP
3	Penyelesaian izin lokasi	69,75	65,89	64,79	62,58	41,34	60,1	DPMPTSP
	Lingkungan Hidup							
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	64,57	73,17	65	100	98	94,29	DLH
2	Penegakan hukum lingkungan	75,00	54,84	93,33	118,33	120	138,35	DLH
3	Pencemaran status mutu air	98,73	100	100	97,56	92,13	0	DLH



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
4	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan pengendalian pencemaran udara	100	100	100	98,68	92,31	93,41	DLH
5	Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk		23,16	23,53	23,89	68,24	66,77	DLH
6	Ratio Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk		5,89	6,13	2,38	3,42	4,46	DLH
7	Persentase Penanganan Sampah		58,92	61,37	60,77	64,56	65,05	DLH
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani	39,05	58,92	61,37	60,77	64,56	68,35	DLH
9	Tingkat Pengawasan Pencemaran Status Mutu Air	60	85	87	86,83	92,13	91,01	DLH
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,724	0,724	0,724	0,725	0,850	1,000	Disdukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,62	0,615	0,615	0,615	1	1	Disdukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Disdukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	Disdukcapil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	100	100	100	100	101	Disdukcapil



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	72,39	71,93	80,22	87,70	100,00	107,16	Disdukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	61,51	59,57	71,82	72,11	85,02	92,23	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				0,96	0,96	0,96	DPMD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	78,37	88,91	90,87	93,15	95,43	97,71	DPMD
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	112,47	112,47	112,47	112,47	112,47	112,47	DPMD
4	Persentase LSM aktif	25,25	26,57	31,42	32,96	33,12	34,24	Kesbangpol
5	Persentase LPM Berprestasi	6	6	6	4	4	4	DPMD
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	DPMD
7	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	DPMD
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	DPMD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,54	2,48	2,48	2,34	2,28	2,20	DP3AP2KB
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,44	2,44	2,61	2,61	2,61	2,61	DP3AP2KB



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,89	1,89	1,87	1,86	1,83	1,81	DP3AP2KB
4	Ratio Akseptor KB	0,7301	0,7310	0,7545	0,7334	0,7376	0,7378	DP3AP2KB
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,01	73,10	75,45	73,74	73,76	73,78	DP3AP2KB
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	4,87	4,81	4,2	4,05	1,81	1,88	DP3AP2KB
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	17,32	17,03	14,86	14,89	15,45	17,42	DP3AP2KB
8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9,18	9,58	13,43	14,26	14,14	10,41	DP3AP2KB
9	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	N/a	N/a	N/a	15,18	11,19	12,5	DP3AP2KB
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	79,01	79,23	79,52	80,63	80,69	77,84	DP3AP2KB
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	79,47	79,51	79,58	79,09	79,66	76,05	DP3AP2KB
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	76,33	76,41	76,53	72,24	74,85	76,12	DP3AP2KB



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	29,49	29,26	28,80	28,34	27,59	27,59	DP3AP2KB
14	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	82,37	82,43	82,35	84,2	85,9	72,76	DP3AP2KB
15	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	76,93	77,43	77,93	77,93	80,22	79,25	DP3AP2KB
18	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	melalui 8 fungsi keluarga							
	Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	52.633.046	53,948,872	55,297,594	60,471,360	58.097.035	62.065.440	Dishub
2	Rasio ijin trayek	0,002307	0.002320	0.002334	0.001282	0,001398	0,00123	Dishub
3	Jumlah uji kir angkutan umum	18.987	19.177	19.369	20.135	23,326	40.387	Dishub
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	1	0	0	5	1	Dishub
5	Persentase layanan angkutan darat	0,0748389	0,0553567	0,0390784	0,0326119	0,0407307	0,0528	Dishub
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	50,45	39.63%	31.13%	29.63%	22,33	19,62	Dishub
7	Pemasangan Rambu-rambu	44	20.00%	20.00%	45%	9,09	0,65	Dishub
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,001788	0.00163	0.00148	0.001353	0,00124	0,00112	Dishub
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	15.789.914	16,184,662	16,589,278	17,004,010	17.429.110	17.864.838	Dishub
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	558.450	564	570	575	581,125	586.937	Dishub
	Komunikasi dan Informatika							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	357	350	362	375	395	395	Diskominfo
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	78,93	78,93	78,93	78,93	78,93	78,93	Diskominfo
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	67,64%	69,44%	71,65%	69,85%	74,75%	31,61%	DiskopUKM
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	41,87%	49,07%	56,53%	75,49%	73,86%	75,08%	DiskopUKM
3	Persentase BPR/LKM aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Setda
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	87,77%	99,12%	99,12%	98,98%	98,97%	99,01%	DiskopUKM
	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	68	72	87	105	98	331	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2.9	9,72	8,92	9,68	1,84	3,64	DPMPTSP
3	Rasio daya serap tenaga kerja	19	28	33	61	77	77	DPMPTSP
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	363,12	234,76	-8,23	8,52	-81,03	98,40	DPMPTSP
	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang	28,57	35,71	42,86	50,00	85,71	85,71	Dispora



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	aktif							
2	Persentase wirausaha muda		17,39	17,39	21,74	21,74	21,74	Dispora
3	Cakupan pembinaan olahraga	71,667	75,00	75,00	75,00	100	100	Dispora
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	45,09	45,09	45,09	45,98	53,57	54,57	Dispora
5	Cakupan pembinaan atlet muda	2,31	2,51	2,70	2,89	2,89	2,89	Dispora
6	Jumlah atlet berprestasi	5	664	82	20	115	115	Dispora
7	Jumlah prestasi olahraga	1	2	9	2	7	7	Dispora
	Statistik							
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak ada	Bappedalitbang
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappedalitbang
	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
	Pariwisata							
1	Kunjungan wisata		4.975.939	4.992.320	8.625.229	6.944.804	7.173.278	Disbudpar
	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	9	8	9	7	9	Disbudpar
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	31	95	50	145	35	35	Disbudpar



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,00675	0,00763	0,01505	0,01519	0,01307	0,0129	DIAP
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37,09	32,14	36,76	36,76	36,18	36,18	DIAP
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	DIAP
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0,68	0,76	1,51	1,52	1,31	1,29	DIAP
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10.661	11.417	11.790	11.790	13.010	13.010	DIAP
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	2	2	2	4	DIAP
	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	92,31	91,03	100	100	100	100	DIAP
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	5	5	5	6	8	DIAP
	Pertanian							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65	Distanhorbun
	- Harga Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3.54	3.43	Distanhorbun
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	2,54	2,44	1,99	1,46	1.44	1,36	Distanhorbun
	- Harga Konstan	2,66	2,68	2,08	1,23	1.25	1,2	Distanhorbun
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	0,42	0,29	0,26	0,22	0.22	0.21	Distanhorbun
	- Harga Konstan	0,48	0,38	0,35	0,26	0.25	0,24	Distanhorbun
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	2,54	2,10	3,73	3,82	3.74	3,65	Distanhorbun
	- Harga Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3.54	3.43	Distanhorbun
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	- padi sawah	60,41	63,94	63,66	64,25	60	63,25	Distanhorbun
	- padi gogo	33,87	33,82	32,69	33,3	34,82	32,58	Distanhorbun
	- Produktivitas palawija (ku/ha)	167,56	171,64	175,2	170,68	294,75	172,02	Distanhorbun
	- Produktivitas sayuran (ku/ha)	106,69	107,22	107,76	108,30	115,12	116,05	Distanhorbun



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
6	Cakupan bina kelompok petani	2,686	3,34	2,63	3,10	3,57	4,04	Distanhorbun
	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	82,65	91,04	97,25	98,18	98,76	99,11	DPKPP
2	Rasio ketersediaan daya listrik	90,03	96,48	97,25	98,18	98,76	99,11	DPKPP
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan (USD)	919.956.537,21	928.741.773,45	967.018.119,05	927.132.432	1.040.253.730,70	1.518.619.551,65	Disperdagin
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	49,88	56,49	56,30	57,60	57,63	57, 68	Disperdagin
	Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	86,36	86,20	88,78	82,18	83,37	84,78	Disperdagin
	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	0	Disnaker
	Kelautan dan Perikanan							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Produksi perikanan	100,24	100,43	100,24	101,25	101,22	100,33	Diskanak
2	Konsumsi ikan	23,97	25,18	26,41	27,65	28,34	29,53	Diskanak
	PENUNJANG URUSAN							
	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Bappedalitbang
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Bappedalitbang
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappedalitbang
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Bappedalitbang
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100	100	100	100	100	Bappedalitbang
	KEUANGAN							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Persentase SILPA terhadap APBD						7,73	BPKAD



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
		13,48	11,29	16,27	19,29	9,32		
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3,83	5,25	4,84	2,60	0,86	-	BPKAD
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	32,92	33,20	29,97	25,43	26,59	29,16	BPKAD
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,55	14,29	16,69	18,48	18,52	16,52	BPKAD
6	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung							BPKAD
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1,62	1,69	1,44	1,57	1,82	1,77	BPKAD
8	Penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
		10 Januari 2013	8 Januari 2014	31 Desember 2014	31 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Des 2017	BPKAD
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	15	15	15	15	15	15	BKPP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,832366976	2,022949847	8,374384236	1,20792897	1,001924601	1,001924601	BKPP



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	5,75	6,74	4,89	6,49	6,23	6,23	BKPP
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	41	41	41	41	37	37	BKPP
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	6.744	7.549	7.376	7.286	5.565	5.565	BKPP
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	12.704	12.628	12.568	12.045	12.064	12.064	BKPP
	PENGAWASAN							
1	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
2	Persentase pelanggaran pegawai	28	10	43	43	37	-	Inspektorat
3	Jumlah temuan BPK	68,17	68,17	58,19	67,58	66,84	81,49	Inspektorat
	SEKRETARIAT DEWAN							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Setwan



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Setwan
3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Setwan

2.5 Pencapaian Sasaran Perubahan RPJMD 2013-2018

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dikatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: (1) penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (2) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap

hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan sebuah sarana publik untuk melakukan review atas akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sepanjang kurun waktu 5 tahun. Selain itu, laporan ini merupakan sebuah referensi kepemimpinan periode berikutnya guna meningkatkan maupun menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang telah berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, laporan ini merupakan perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas publik kepala daerah pada periode sebelumnya, dan bagi kepala daerah terpilih pada periode berikutnya merupakan sarana yang lebih obyektif untuk mengetahui tonggak keberhasilan yang akan dicapai, sehingga akan lebih meningkat lagi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten Bogor merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Berdasarkan data diatas, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bogor menunjukkan terdapat indikator yang tercapai, indikator yang tidak tercapai dan indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang. Lebih lanjut capaian indikator kinerja sasara RPJMD Kabupaten Bogor dijelaskan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat										
1	Indeks kualitas kehidupan beragama	100	%	100	100	100	100	100	71,43	92,31	Tidak Tercapai
2	Persentase Masjid Besar di setiap Kecamatan	22,5	%	22,5	22,5	22,5	72,5	100	50	97,5	Tidak Tercapai
3	Persentase penduduk miskin	9,54	%	9,11	9,07	8,92	8,90-6,00	8,00-5,00	8,57	7,14	Tercapai
4	Indeks Gini	0,38	%	0,39	0,42	0,42	0,34	0,34	0,38	0,34	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,92	Indeks	74,25	74,72	67,95	68,42	68,9	69,13	69,61	Tercapai
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,1	Indeks	86,41	87,13	87,59	88,05	88,51	87,13	88,69	Tercapai
7	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	9	Orang	33	15	130	13	44	100	850	Tercapai
8	Persentase pembangunan stadion olahraga berskala internasional	45,15	%	60,03	77,80	94,00	100	100	100	100	Tercapai
II	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan										



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata										
1	Persentase kebutuhan benih padi yang terpenuhi dari produk lokal	18,05	%	10,93	20,94	58,58	73,01	100,35	75,49	102,12	Tercapai
2	Produksi Pertanian dan Perikanan :										
	- Produksi padi dan palawija	791.770	ton	752.016	672.615	586.547	697.907	712.139	724.576	698.146	Tidak Tercapai
	- produksi hortikultura	146.517	ton	160.507	129.170	206.628	156.868	157.975	215.610	237.849	Tercapai
	- Produksi	3.760.948	tangkai	4.505.991	5.264.987	4.843.949	4.150.786	4.192.294	5.110.757	4.389.308	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tanaman hias										
		372.744	pohon	644.459	468.699	650.953	411.380	415.494	460.253	527.119	Tercapai
	- produksi perkebunan	32.253	ton	32.898	36.119	32.241	37.009	38.860	46.995	38.934	Tercapai
	- Daging	111.267	ton	118.563	119.112	130.605	131.123	134.178	180.725	182.181	Tercapai
	- Telur	47.706	ton	49.380	42.418	46.408	52.701	53.929	46.411	47.406	Tidak Tercapai
	- Susu	12.437	Ton	11.511	15.149	15.483	13.683	14.002	18.333	18.591	Tercapai
3	Produksi Hasil Peternakan	171.409,39	ton	179.454,13	176.679,25	192.496,28	197.507	202.109	245.469,57	248.177,00	Tercapai
4	Skor Pola Pangan Harapan	74,70	%	74,80	77,33	77,00	78,00	79,00	76,90	86,18	Tercapai
5	Produksi Hasil Perikanan	88.811	ton	125.983	136.556	147.581	133.914	137.33	141.181	143.456	Tercapai
6	Produksi benih ikan hias dan ikan konsumsi air tawar	2.974.520	Ribu Ekor	3.229.190	3.350.268	3.908.821	4.437.434	5.279.673	4.546.887	5.828.963	Tercapai
	- benih Ikan	2.750.464	Ribu Ekor	2.994.016	3.107.748	3.658.308	4.181.365	5.017.638	4.288.212	5.545.494	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ikan Hias	224.056	Ribu Ekor	235.174	242.520	250.513	256.069	262.035	258.675	283.469	Tercapai
7	Nilai Investasi	8.215	Milyar Rupiah	6.923	8.773	9.677	9.800	9.900	4.406	8.687	Tidak Tercapai
8	Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM dari total tenaga kerja	NA	%	85,6	86,09	87,63	88,13	88,67	87,50	87,67	Tidak Tercapai
9	persentase kecamatan yang mempunyai pasar	87,5	%	87,5	87,5	87,5	92,5	100	92,5	100	Tercapai
10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku	135,89	Triliun Rp.	151,28	168,09	184,68	191,52	214,97	201,93	221,55	Tercapai
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan	4.130.125	jiwa	5.014.475	5.082.838	8.791.300	7.100.000	7.500.000	7.300.134	7.513.209	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas harga berlaku	2,50	%	2,52	2,55	4,79	2,63	2,67	4,79	4,79	Tercapai
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,60	%	61,86	63,64	65,85	65,95	65,95	64,07	62,71	Tidak Tercapai
14	Tingkat pengangguran terbuka	7,87	%	7,65	10,01	8,26	7,58	7,58	9,55	9,75	Tidak Tercapai
III	Meningkatkan Integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup										



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang berkelanjutan										
1	Persentase luas pemukiman yang tertata	18,288	%	18,309	18,331	8,053	24,459	25,841	24,46	25,841	Tercapai
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB	0,2640	rasio	0,2716	0,2976	0,2604	0,2831	0,3189	0,2831	0,3594	Tercapai
3	Tingkat Pengawasan Pencemaran Status Mutu Air	60,00	%	85,00	87,00	86,83	91,00	93,00	92,13	91,01	Tidak Tercapai
4	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	24.623	unit	31.327	41.578	56.876	74.876	83.982	75.455	86.811	Tercapai
5	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran	31,38	%	21,03	21,67	23,79	22,73	23,18	30,00	23,18	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pembuangan air (minimal 1,5 m)										
6	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	0,7626	rasio	0,7140	0,7443	0,7397	0,8250	0,8422	0,8488	0,8641	Tercapai
7	Panjang jalan Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan Infrastruktur yang mantap	6,10	Km	0,80	15,40	27,00	18,80	1,20	0,50	0	Tidak Tercapai
8	Persentase keterpenuhan syarat Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	6,45	%	8,58	11,11	13,43	14,29	14,29	14,29	14,29	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Tingkat Kelaikan Sarana Angkutan Umum	74,05	%	75,79	76,27	77,09	78,56	80,05	76,43	44,39	Tidak Tercapai
10	Tidak ada daerah terisolir	0	Kp	0	0	0	13	26	15	39	Tercapai
11	persentase sarana angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah	63,11	%	64,42	65,87	65,97	66,92	67,87		55	Tidak Tercapai
12	Rasio Elektrifikasi (RE)	82,65	% RE	91,04	97,25	97,50	97,75	98,00	98,76	99,11	Tercapai
IV	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan										



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah masyarakat Buta Huruf yang diintervensi	3.067.907	Wajib Belajar	3.092.907	3.118.407	3.140.407	3.148.907	3.169.198	3.153.757	3.169.687	Tercapai
2	Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan:										
	- SD-MI-Paket A	99,81	%	100,00	99,73	100,00	100,00	100,00	99,83	99,81	Tidak Tercapai
	- SMP-MTs-Paket B	99,99	%	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Angka Partisipasi Murni:										
	- SD-MI-Paket A	99,02	%	85,30	81,25	87,47	99,80	100,00	88,17	90,00	Tidak Tercapai
	- SMP-MTs-Paket B	85,53	%	78,91	77,08	72,23	97,10	100,00	82,96	83,50	Tidak Tercapai
4	Angka Partisipasi Kasar:										



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- SD-MI-Paket A	108,71	%	94,89	90,10	98,14	109,51	109,71	99,49	97,45	Tidak Tercapai
	- SMP-MTs-Paket B	95,43	%	90,20	88,12	94,26	99,09	100	93,24	92,69	Tidak Tercapai
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,20	Tahun	70,35	70,61	70,68	70,94	71,20	70,70	70,86	Tidak Tercapai
6	Persentase RSUD dan UPT PUSKESMAS terakreditasi										
	- RSUD	75	%	75	75	100	100	100	100	100	Tercapai
	- UPT Puskesmas	-	%	-	-	15	50	100	72,50	100	Tercapai
7	Persentase Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan	39,40	%	40	55	70,00	72 - 80	80 - 100	74,15	80,70	Tercapai
V	Meningkatkan kinerja										



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antardaerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik										
1	Indeks kepuasan masyarakat	73,87	%	77,38	74,89	74,92	74,96	74,99	76,45	78,57	Tercapai
2	Persentase Layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD	12,82	%	48,72	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	0	Jaringan	31	80	80	80	80	80	80	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Indeks reformasi birokrasi	NA	Indeks	NA	NA	NA	40,00	45,00	59,25	40,50	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Perizinan berstandar ISO	19	Jenis Izin	28	33	61	68	77	77	77	Tercapai
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
7	Pendapatan Asli Daerah	1.261.034.564.12 1	Rp.	1.712.937.376.13 6	2.002.320.991.11 7	2.294.614.034.38 5	2.207.859.554.00 0	2.240.308.049.61 1	2.592.838.501.83 7	2.780.370.458.90 8	Tercapai
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	CC	Nilai	CC	CC	CC	CC	B	B	B	Tercapai
9	Persentase penduduk yang mempunyai KTP-el	72,95	%	71,93	80,22	87,70	100	100	100	100	Tercapai



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)		CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018
		BESARAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Persentase pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penyusunan RAD SDGs Kabupaten Bogor ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, dan arah kebijakan Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; (2) Sembilan prioritas pembangunan (*Nawacita*) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (3) Rancangan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023; dan (4) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebagai bahan acuan untuk RPJMD 2018-2023 setelah pelantikan Bupati Baru. Pelaksanaan RAD SDGs Kabupaten Bogor tahun 2018 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Jawa Barat tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.75
Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,57 % penduduk miskin
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	0,03%
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	87,73%
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	91,95%



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
				teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	703,061 (100%)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	70,70



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	73,96
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99,49
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	93,24



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	85,02
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	99,11 %
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	16,30%



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	12.448(2,16%)
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	32,90% (Hasil Riskesdas 2018)
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,88%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	6,7%



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	45,52%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Konsumsi Ikan 29,77 Kg/Kapita/Tahun
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	103.18%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian ibu	55 Kasus



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. *jumlah kematian balita	1 kasus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. *jumlah kematian Neonatal	94 kasus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian Bayi	15 kasus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	91,95



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,0097%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	232/ 100.000 penduduk
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	7 orang-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Filariasis : 145 orang Kusta : 385 orang
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	109.988 (12,10%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	11.699 (1,83%)



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	993.580 orang
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	696.704 (70,12%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	72.752 (10,44%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	29.089 orang (2,61%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.653.791 (total peserta JKN)



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	80,70 %
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	54 kasus tertangani 10%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	73,96



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	73,46
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas sanitasi dengan sabun dan air.	75 sekolah (45 sekolah di desa ODF, 30 sekolah di desa pamsimas)
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	73,96
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	22,61
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	10,34



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	ADA IPLT CIBINONG/ UPT SPALD (DPUPR)
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	23 GP3A
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	339.931
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	NA



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0.63 % (=165/26387)
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	21.400
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	9,08
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	4,79



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	339.931
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	7.173.278
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	23.231
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,4
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	64,56



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	90%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	61,37%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	48,31%



No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85,02%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	$= (7.3 \text{ T}/221.55\text{T}) \times 100\% = 37,18\% = 3.29\%$
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	68,89

Sumber : Rancangan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2018-2023

2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Menurut Peraturan Daerah Pendirian BUMD, bahwa secara umum tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian serta dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi pemda (APBD). Mengenai profil BUMD di Kabupaten Bogor dijelaskan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.76
Profil BUMD Kabupaten Bogor Tahun 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI	MODAL (Rp)	ASET (Rp)	KEWAJIBAN (Rp)	EKUITAS (Rp)	LABA (Rp)	RUGI (Rp)	PENYERTANAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (Rp)
1	PT. Prayoga Pertambangan & Energi	JAWA BARAT	164.625.000.000	117.253.651.480	33.240.455.762	84.013.195.718		26.566.327.092	164.000.000.000
2	PT. Sayaga Wisata	JAWA BARAT	79.684.000.000	71.003.861.372	225.937.727	70.777.923.645		2.729.600.310	79.544.000.000
3	PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	JAWA BARAT	19.809.449.250	25.124.028.301	14.926.702.188	10.197.028.301		947.460.994	14.300.000.000
4	PD. BPR LPK Pancoran Mas	JAWA BARAT	3.820.000.000	8.908.992.071	12.432.858.841	(3.523.866.771)		8.541.183.600	2.000.000.000
5	PD. BPR LPK Leuwiliang	JAWA BARAT	3.565.000.000	19.314.713.344	13.849.740.402	5.464.972.942	601.055.287		2.000.000.000
6	PD. BPR LPK Parung Panjang	JAWA BARAT	3.820.000.000	51.276.756.082	40.150.072.796	11.126.983.286	4.170.528.340		2.000.000.000
7	PD. BPR LPK Sawangan	JAWA BARAT	3.820.000.000	12.285.920.768	6.817.566.325	5.468.354.905	405.556.102		2.000.000.000
8	PD. BPR LPK Citeureup	JAWA BARAT	3.563.000.000	9.667.547.642	6.280.978.163	3.478.192.595	24.193.253		1.998.500.000



NO	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI	MODAL (Rp)	ASET (Rp)	KEWAJIBAN (Rp)	EKUITAS (Rp)	LABA (Rp)	RUGI (Rp)	PENYERTANAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (Rp)
9	PD. PASAR TOHAGA	JAWA BARAT	206.736.037.000	137.160.882.419	13.156.438.274	124.004.444.145	1.925.040.198		10.000.000.000
10	PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	JAWA BARAT	310.301.787.481	551.466.019.000	50.587.425.839	500.878.593.161	46.834.795.873		300.958.028.280
11	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	JAWA BARAT	21.432.000.000	29.845.062.119	11.610.943.427	18.234.118.691		1.060.500.770	21.000.000.000

Sumber : Memori Serah Terima Jabatan Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Dalam kurun waktu periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan BUMD sebagai berikut :

1. **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman Nomor 8 tanggal 12 November 2015 oleh Notaris Dedy Suwandi, SH.,MH. BUMD ini bergerak dalam bidang usaha Perbankan Syariah dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar) atau 98,00%, kemudian kepemilikan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman dan Saham Swasta sebesar Rp.432.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) atau 2,00%;
2. **PT. SAYAGA WISATA BOGOR**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sayaga Wisata Bogor Nomor 3 tanggal 22 Desember 2014 oleh Notaris Rickie Riyadi Sadikin, SH. BUMD ini bergerak dalam bidang usaha pariwisata dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.79.544.000.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) atau 99,81%, kemudian kepemilikan pada PT. Sayaga Wisata Bogor dan Saham Swasta sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 0,19%;
3. **PT. BPR LPK PARUNGPAJANG**, merupakan hasil penggabungan usaha atau merger dari 5 (lima) PD. BPR LPK di Kabupaten Bogor yang terdiri dari:
 - a. PD. BPR LPK PARUNGPAJANG;
 - b. PD BPR LPK PANCORAN MAS;
 - c. PD BPR LPK LEUWILIANG;
 - d. PD BPR LPK SAWANGAN; dan
 - e. PD BPR LPK CITEUREUP.

Pelaksanaan penggabungan usaha (merger) ini didasarkan pada :

- a. **BAP RUPS TAHUN 2015** tentang Pengesahan dan Persetujuan Merger, Perubahan Modal Dasar serta Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. menjadi PT. terhadap 5 (Lima) PD. BPR LPK di Kabupaten Bogor.
- b. **BAP RUPS TANGGAL 30 NOVEMBER 2017** tentang Penetapan Pengurus PD. BPR LPK Parungpanjang Hasil Merger.

c. **SURAT KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2017 NOMOR KEP-229 /D.03/2017**

tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Leuwiliang, PD. BPR LPK Sawangan, PD. BPR LPK Pancoran Mas dan PD. BPR LPK Citeureup ke dalam PD. BPR LPK Parungpanjang.

Adapun mengenai komposisi saham PT. BPR LPK Parungpanjang dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.77
Komposisi Saham PT. BPR LPK Parungpanjang

PEMEGANG SAHAM	KEWAJIBAN PENYERTAAN MODAL	%	REALISASI PENYERTAAN MODAL	%	KEKURANGAN
PROVINSI JAWA BARAT	36.720.000.000	51	7.000.000.000.	38	(29.720.000.000)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	20.880.000.000	29	9.998.500.000.	54	(10.881.500.000)
BANK JABAR BANTEN	14.400.000.000	20	1.590.000.000.	9	(12.810.000.000)
JUMLAH	72.000.000.000	100	18.588.500.000.	100	(53.411.500.000)

KPj AMJ Tahun 2013-2018

4. **PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BOGOR**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 tanggal 23 November 2015 oleh Notaris & PPAT Dedy Suwandy, SH.,MH. BUMD ini merupakan hasil penggabungan usaha atau merger dari 13 PD. PK menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bogor, yang bergerak dalam bidang usaha Keuangan Nonbank dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.14.300.000.000,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) atau 60% dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.5.509.449.250 (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 40%.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bogor pada periode sebelumnya telah mendirikan 3 (tiga) BUMD yang masih beroperasi hingga saat ini, yaitu :

1. **PT. PRAYOGA PERTAMBANGAN ENERGI (PT. PPE)**, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi. BUMD ini bergerak dalam bidang usaha pertambangan dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.200.000.000.000,00 (Dua Ratus Milyar

Rupiah) atau 99,54% dan saham Swasta sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) atau 0,46%;

2. **PD. PASAR TOHAGA**, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) atau 99,54%;
3. **PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR**, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 2 Maret 1981 dan 27 Juni 1991, yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan air minum dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor kepada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar Rp.350.653.099.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau sekitar 50% yang diberikan secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Adapun sisa penyertaan modal daerah yang belum direalisasikan adalah sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Rupiah).

Sampai dengan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki Penyertaan Modal sebesar Rp.599.800.528.280,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) pada BUMD. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.53.958.169.053,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 9% dari nilai penyertaan modal.

2.8 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kaabupaten, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.78
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor
Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	1 APM SD/MI	89,03%	Dinas Pendidikan
			2 APK SD/MI	97,46%	
			3 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	82,53%	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	4 APM SMP/MTs	83,54%	
			5 APK SMP/MTs	92,70%	
			6 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	74,21%	
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non-Formal	7 APM Paket A	89,03%	Dinas Pendidikan
			8 APM Paket B	83,54%	
			9 APK Paket A	97,46%	
			10 APK Paket B	92,70%	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11 APK PAUD	43,71%	Dinas Pendidikan



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	
4	Pelayanan kesehatan balita		4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		6 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		7 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8 Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		9 Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		10 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		11 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati	83%	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		12 Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV	55%	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	71%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah DOMESTIK	Program Pelayanan Air Limbah	2 Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Penataan Perumahan	1 Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		2 Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	
SPM TRANTIBUMLINMAS					



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	45,00%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	100%	Dinas Sosial

Sumber : Bappedalitbang Kab. Bogor 2019, diolah

2.9 Pencapaian Kerjasama Daerah

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu di perhatikan begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus di atasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini di perlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya dari pada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi.

Bentuk kerjasama daerah meliputi : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, serta koordinasi dengan instansi vertikal di daerah. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2014-2018 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.79
Rekapitulasi Kerjasama Daerah Tahun 2014-2018

NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2014					
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	119/25/XII/KB/KS/2014 dan 060/KK.24-Pem/2014	8 Desember 2014	1 Tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	<u>119/17/KB/KS/XII/2011</u> 100/PJ.37-Huk/2011	23 Desember 2011	3 Tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	119/23.1/XII/KB/KS/2014 dan 134.4/3048-bpmpd/2014	2 Desember 2014	-
4	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang	Pengembangan Kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan	556/490-Disbudpar dan 119/497-Disporabudpar	16 Juli 2012	5 Tahun
5	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang	Pengembangan Pertanian dan Kemitraan Usaha Komoditas Pertanian	520/3240 KS-Horti dan 119/3402-DPP	20 Juli 2012	5 Tahun
6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	<u>119/11/KB/KS/IX/2013</u> 134.43/1143-HUK/IX/2013	18 September 2013	1 Tahun
7	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan	Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	<u>300/1049-SatpolPP</u> <u>300/295/SatpolPP</u>	27 Maret 2014	3 Tahun
8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	<u>119/6/KB/KS/VII/2013</u> 100/9/HUK	22 Juli 2013	1 Tahun
9	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	119/26/XII/KB/KS/2014	8 Desember 2014	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
10	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Penyediaan dan Penggunaan Venue dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016	<u>4263/33/ Bangsos</u> <u>119/10/V/ KB/ KS/ 2014</u>	20 Mei 2014	-
11	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	<u>119/23.2.1/ XII/ KB/ KS/ 2014</u> <u>100/ Perj.151/ Adm.Pem-Um/ 2014</u>	4 Desember 2014	-
12	Perjanjian kerjasama antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLAAJ) Kabupaten Bogor dengan Dishubkominfo Kota Bogor	Penyelarasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Wilayah Perbatasan	551/1131 – DLAAJ dan 119/07- Dishubkominfo – 2010	13 Agustus 2010	4 Tahun
13	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Penyelenggaraan Penataan Ruang	650/752 - Bapp 119/09-Bappeda- 2010	8 November 2010	5 Tahun
14	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur	Pengembangan Promosi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan	556/464-Promosi 556/639/Disbudpar	26 November 2013	3 Tahun
15	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam	Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan	524/1950/Disnakan dan 03/PKS/HK/VI/2011	28 Juni 2011	3 Tahun
16	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor	Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	<u>6581/2/PRJNKS/2011</u> <u>6581/ Perj.199-DKP/ 2011</u>	16 Juni 2011	4 Tahun
17	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan	Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	<u>300/1049-satpolpp</u> <u>300/295/ satpolpp</u>	27 Maret 2014	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
18	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur	Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	<u>300/1506-satpolpp</u> <u>300/242/satpolpp</u>	14 Mei 2014	-
20	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok	Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok	658.1/71/Otdaksm, 119/6/VIII/PRJN/KS/2014, 658.Perj.519-DKP/2014, dan 050/104/PKS/Huk/2014	18 Agustus 2014	-
21	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi	Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	<u>300/2555-polpp</u> <u>300/1413-bpp/polpp</u>	15 September 2014	-
22	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor	Penanaman Modal	<u>130.22/4507-BPT</u> <u>570/Perj.679-BPPTPM/2014</u>	10 Desember 2014	-
23	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	<u>119/3336-polpp</u> <u>188/Perj.680-satpopp/2014</u>	10 Desember 2014	-
24	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	475.17/8729-Dinsosnakertrans	15 Desember 2014	-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2015					
25	Addendum atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	<u>119/17/KB/KS/XII/2011</u> <u>100/PJ.37-Huk/2011</u>	23 Desember 2011	3 Tahun
26	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan dan Olah	Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan	556/152-Disbudpar dan 556/219/Sekr	31 April 2013	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
	Raga Kabupaten Sukabumi				
27	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	119/23.1/XII/KB/KS/2014 dan 134.4/3048-bpmpd/2014	2 Desember 2014	-
28	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang	Pengembangan Kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan	556/490-Disbudpar dan 119/497-Disporabudpar	16 Juli 2012	5 Tahun
29	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang	Pengembangan Pertanian dan Kemitraan Usaha Komoditas Pertanian	520/3240 KS-Horti dan 119/3402-DPP	20 Juli 2012	5 Tahun
30	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	<u>119/11/KB/KS/IX/2013</u> <u>134.43/1143-HUK/IX/2013</u>	18 September 2013	-
31	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan	Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	<u>300/1049-SatpolPP</u> <u>300/295/SatpolPP</u>	27 Maret 2014	3 Tahun
32	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Penyediaan dan Penggunaan Venue dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 di Jawa Barat	<u>4263/33/Bangsos</u> <u>119/10/V/KB/KS/2014</u>	20 Mei 2014	-
33	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	119/25/XII/KB/KS/2014 dan 060/KK/.24-Pem/2014	8 Desember 2014	1 Tahun
34	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor	Penanaman Modal	130.22/4507-BPT dan 570/Perj.679-BPPTPM/2014	10 Desember 2014	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
35	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	119/3336-Pol.PP dan 188/Perj.680-Satpol.PP/2014	10 Desember 2014	3 Tahun
36	Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan dan Daerah	119/6/IV/PK/KS/2015 dan 360/Perj.8-BPBD/2015	14 April 2015	3 Tahun
37	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil & Menengah melalui Lembaga Koperasi	119/27.1/X/PK/KS/2015 dan 500/Perj.59-DiskUMKM/2015	22 Oktober 2015	-
38	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	119/26/XII/KB/KS/2014 dan 050/50/327/KB/HUK/2014	8 Desember 2014	1 Tahun
39	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	Pelayanan Publik Antar Daerah	119/23.2.1/XII/KB/KS/2014 dan 100/Perj.151/Adm.Pem-Um/2014	4 Desember 2014	1 Tahun
40	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Penyelenggaraan Penataan Ruang	650/752 - Bapp dan 119/09-Bappeda- 2010	18 November 2010	5 Tahun
41	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Batam	Pengembangan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	556/999-Disbudpar dan 556/375/XI/2010	5 November 2010	5 Tahun
42	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam	Kemitraan pemasaran hasil komoditas pertanian dan kehutanan	520/1795.PKS-Horti dan 04/PKS/HK/VI/2011	28 Juni 2011	5 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
43	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Pertukaran dan Penyebarluasan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Program Pembangunan	487/776-Diskominfo dan 05/PKS/HK/VI/2011	28 Juni 2011	5 Tahun
44	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	300/1506-PolPP dan 300/242/Satpol PP	14 Mei 2014	3 Tahun
45	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	Penyelenggaraan Ruas Jalan Daerah Perbatasan	621/424/Sekrt-U/2010 dan 119/1167-DBMP	6 Desember 2010	5 Tahun
46	Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	Pelayanan Air Minum	690/23 Perjn/Huk/VIII/2010 dan 690/SP-36PDAM/2010	13 Agustus 2010	5 Tahun
47	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian Kota Bogor	Pengembangan Bidang Pertanian dan Kehutanan	520/3590/Kjasm-Tanhut dan 119/08-Distani-2010	18 November 2010	5 Tahun
48	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor	Bidang Pelayanan Kesehatan	440/1963/Dinkes/2011 dan 119/02-Dinkes/2011	25 April 2011	5 Tahun
49	Perjanjian Kerjasama antara Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor dengan Dinsosnakertrans Kota Bogor	Penanganan Masalah di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor	30/4438.A/Disosnakertrans dan 400/Perj.539-Disnakersos/2013	14 Agustus 2013	2 Tahun
50	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bekasi	Pengembangan Promosi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan	119/03-Disbudpar dan 556/430-16/AKS/2012	23 Oktober 2012	3 Tahun
51	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	300/2555-PolPP dan 300/1413-bpp/PolPP	15 September 2014	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
52	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	300/703-Satpolpp dan 130/581/VIII/2013	2 Agustus 2013	3 Tahun
53	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	300/1049-SatpolPP dan 300/295/ SatpolPP	27 Maret 2014	3 Tahun
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2016					
54	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan	415.4/2609/436.2.3/2016 dan 119/12/KB/KS/V/2016	31 Mei 2016	1 Tahun
55	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Promosi Kebudayaan dan Pariwisata	415.4/11837/436.2.3/2016 dan 119/162/PKS/KS/XII/2016	28 Desember 2016	3 Tahun
56	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Pelayanan Publik Antar Daerah	119/20/KB/KS/VI/2016 dan 100/KS03/Adm.Pem-UM/2016	10 Juni 2016	1 Tahun
57	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	119/46/KB/KS/VII/2016 dan 100/SKB.377-Adpemum/2016	25 Juli 2016	1 Tahun
58	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Pelayanan Publik Antar Daerah	119/52/KB/KS/VIII/2016 dan 415.3/1827KHAL/2016	3 Agustus 2016	1 Tahun
59	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	119/88/KB/KS/IX/2016 dan 050/58/KB/Pem/Huk/ 2016	23 September 2016	1 Tahun
60	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	119/103/KB/KS/X/2016 dan 66/NKB.YK/2016	17 Oktober 2016	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
61	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor	Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	119/132/PKS/KS/XI/2016 dan 658.1/Perj.107-DKP/2016	15 November 2016	-
62	Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	119/06/PK/KS/ III/2016 dan 300/211/Tibumtranmas/2016	15 Maret 2016	3 Tahun
63	Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	119/135/PKS/KS/XI/2016 dan 188.34/701-SPP	17 November 2016	3 Tahun
64	Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak	Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	119/134/ PKS/KS/XII/2016 dan 134.5/KS-18/KSD/Satpol-PP 2016	18 November 2016	3 Tahun
65	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukabumi	Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan	556/152-Disbudpar dan 556/219/Sekr	31 April 2013	3 Tahun
66	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	-	119/23.1/XII/KB/KS/2014 dan 134.4/3048-bpmd/2014	2 Desember 2014	-
67	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar	420/2819/disdik/IX/PK/KS/2015 dan 119/26/IX/PK/KS/2015	22 September 2015	5 Tahun
68	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	119/11/KB/KS/IX/2013 dan 134.43/1143-HUK/IX/2013	18 September 2013	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
69	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan	Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	300/1049-SatpolPP dan 300/295/SatpolPP	27 Maret 2014	3 Tahun
70	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Penyediaan dan Penggunaan Venue dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 di Jawa Barat	4263/33/Bangsos dan 119/10/V/KB/KS/2014	20 Mei 2014	-
71	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	119/25/XII/KB/KS/2014 dan 060/KK/24-Pem/2014	8 Desember 2014	-
72	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor	Penerimaan Siswa Baru, Mutasi Siswa dan Pembinaan Kesiswaan serta Penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa	119/34/XII/PK/KS/2015 dan 119/Perj.82-Disdik/2015	18 Desember 2015	5 Tahun
73	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor	Pengembangan Promosi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan Bogor	119/7/IV/KS/2015 dan 556/Perj.9-Disbuparekraf/2015	14 April 2015	3 Tahun
74	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur	-	100/7/HUK/2015 dan 119/20/VIII/KB/KS/ 2015	3 Agustus 2015	1 Tahun
75	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Barat	119/II/KB/KS/2015	20 Januari 2015	3 Tahun
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2017					
76	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau	Kerjasama Antar Daerah	19/51/KB/KS/III/2017 dan 02/Mou/POD/III/2017	14 Maret 2017	1 Tahun
77	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Batam	Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	119/90/PKS/V/2017 dan 02/PKS/POD/V/2017	18 Mei 2017	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
78	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Pengembangan Bidang Peternakan	119/212/PKS/ KS/XI/2017 dan 53/PKS/POD-BTM/XI/2017	16 November 2017	3 Tahun
79	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	188/5/Huk/2017 dan 119/40/KB/KS/II/2017	27 Februari 2017	1 Tahun
80	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	119/118/KB/KS/VII/2017 dan 060/KK.20-Bag.Kerja Sama/2017	6 Juli 2017	2 Tahun
81	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Pelayanan Publik Antar Daerah	119/169/KB/KS/VIII/2017 dan 102/MOU-16/KSD/2017	28 Agustus 2017	2 Tahun
82	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lebak	Kerjasama Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan	119/101/PKS/KS/VI/2017 dan 050/KS-05/Bappeda/201	6 Juni 2017	5 Tahun
83	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	Peningkatan Obyek Daya Tarik Wisata dan Promosi Wisata Serta Kerja Sama Kemitraan antar Pelaku Usaha Kepariwisata	102.4/KS-16/KSD/2017 dan 119/189/PKS/KS/X/2017	18 Oktober 2017	5 Tahun
84	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor	Kerja Sama Promosi dan Investasi	102/KS-29/DPMPTSP/KSD/2017 dan 119/235/PKS/KS/XII/2017	18 Desember 2017	5 Tahun
85	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	415.4/3546/436.2.3/2017 dan 119/99/KB/KS/V/2017	31 Mei 2017	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
86	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Potensi Daerah	019.6/1.133 dan 119/74/KB/KS/IV/2017	20 April 2017	1 Tahun
87	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan Pariwisata	556/1425 dan 119/165/PKS/KS/IX/2017	13 September 2017	3 Tahun
88	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta	Pengembangan Industri Kreatif dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	019.6/293/IX/2017 dan 119/168/PKS/KS/IX/2017	18 September 2017	3 Tahun
89	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Kerjasama Antar Daerah	119/217/KB/KS/XI/2017 dan 119/3472-Bag. KS	1 November 2017	1 Tahun
90	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Bogor	130/1633-Diskominfo dan 119/201/PKS/KS/XI/2017	1 November 2017	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
91	Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah antara Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	Pendanaan Bersama Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Barat,	119/12/KB/KS/I/2017	17 Januari 2017	2 Tahun
92	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur	Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal	119/178/KB/KS/IX/2017, 557/KK.24-Disperindag/2017, 050/71/KB/Pemhuk/2017, 06/MoU/Ekbang&KD/2017, 510/Pj.49-Hukham/2017 dan 188/19/Huk/2017	6 September 2017	1 Tahun
93	Addendum atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok	Pelayanan TPPAS Regional Nambo untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok	658.1/131/PemKSM, 119/160/PKS/KS/IX/2017, 658.1/Perj.89-DLH/2017 dan 050/70/Add.PKS/Pem/Huk/2017	6 September 2017	selama masa operasional TPPAS Nambo sesuai dengan perundang-undangan



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
94	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang	Pengembangan Kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan	556/490-Disbudpar dan 119/497-Disporabudpar	16 Juli 2012	3 Tahun
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2018					
95	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur	Kerjasama Antar Daerah dalam pelayanan Publik	119/40/KB/KS/II/2018 dan 900/ 12/Huk/III/2018	27 Februari 2018	1 Tahun
96	Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur	Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Perbatasan	119/63/PKS/KS/III/2018, 300/128/Satpol PP dan damkar/2018	28 Maret 2018	5 Tahun
97	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kerjasama Daerah	119/52/KB/KS/III/2018 dan 06 Tahun 2018	-	-
98	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat	Pengembangan Pariwisata	119/61/PKS/KS/III/2018 dan 993/71/Dispar/2018	28 Maret 2018	-
99	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	415.4/4814/436.2.3/2018 dan 119/104/KB/KS/V/2018	-	3 Tahun
100	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik,	119/118/KB/KS/VII/2017 dan 060/KK.20-Bag.Kerjasama/2017	6 Juli 2017	-
101	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Perbatasan	118/63/PKS/KS/III/2018 dan 188/Perj.32-SatpolPP/2018	28 Maret 2018	3 Tahun
102	Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kabupaten Bogor dengan DPMPTSP Kota Bogor	Penanaman Modal	119/59/PKS/III/2018 dan 570/Perj. 30-DPMPTSP/2018	26 Maret 2018	5 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
103	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian Kota Bogor	Pengembangan Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan	119/70/PKS/KS/IV/2018 dan 119/Perj. 58-Distan/2018	9 April 2018	-
104	Perjanjian kerjasama antara Dinas Pemadam Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor	119/85/PKS/KS/IV/2018 dan 119/Per.60-SatPol PP/2018	30 April 2018	-
105	Perjanjian Kerjasama Antara DISBUDPAR Kab. Bogor dengan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat	Pengembangan Pariwisata	Nomor: 119/61/PKS/KS/III/2018 Nomor: 993/71/Dispar/2018	Tanggal: 28 Maret 2018	
106	Perjanjian Kerjasama Antara BPBD Kab. Tangerang Propinsi Banten Dengan Dinas Damkar Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat	Penanggulangan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan		Tahap Pengumpulan: 27 Agustus 2018 -Tahap Pembahasan: 29 Agustus 2018 -Tahap Revisi: 30 Agustus 2018	
107	Perjanjian Kerjasama Antara Disbudpar Kab. Bogor dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor	Pengembangan, Kepariwisataaan, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kesenian Bogor	Nomor: 119/163/PKS/KS/IX/2018 Nomor: 119/PERJ.136-Disparbud/2018	Tanggal 06 September 2018	
108	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Dengan Disbudpar Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Pariwisata.	Nomor: 119/220/PKS/KS/XI/2018	22 Nopember 2018	
109	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan Pariwisata	Nomor: 61/PERJ.YK/X/2018 Nomor: 119/184/PKS/KS/X/2018	Tanggal: 06 Oktober 2018	
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2014					
110	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Negeri Jakarta	Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Bogor	119/KB/KS/VI/2013 dan 1099/PL3/HK/2013	24 Juni 2013	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
111	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta	Pengembangan Sumber Daya, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Bogor	119/1.1/KB/KS/III/2013 KS/03/III/2013	11 Maret 2013	1 Tahun
112	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	119/1/KS/II/2013 02A/KS/LIPI/II/2013	1 Februari 2013	3 Tahun
113	Piagam Kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	-	1603/UNG.RKT/TU/2013 dan 119/2/KB/KS/III/2013	8 Maret 2013	5 Tahun
114	Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan RSUP dr. Hasan Sadikin, Bandung dan RSUD Ciawi	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-1) di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor	3695/UNG.C/KS/2013, HK.06.01/E013/7574/VII/2013, dan 445/1050/RSUD Ciawi/VII/2013	1 Juli 2013	3 Tahun
115	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan PT. Tirta Investama, Tbk	Peningkatan Struktur Ruas Jalan Kedep – Cileungsi (Sta. 2+056 – Sta. 2+206) di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor	620/397.6-DBMP	22 Mei 2013	terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan Berita Acara Serah Terima Jalan
116	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dengan PT. Bank BJB, Tbk	Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik untuk Layanan Transaksi Perbankan	<u>800/138-BKPP</u> <u>101/CBN-OPS/2013</u>	28 Januari 2013	2 Tahun
117	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Proda Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Tahun Anggaran 2013	119/482 - PT 51/KEP-32.01/II/2013	14 Februari 2013	1 Tahun
118	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN	181/03/PRJN/KS/V/2013 B-02/0.2.33/GS/05/2013	30 Mei 2013	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
119	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan PT. Astra Internasional, Tbk dan Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim	Pembangunan Unit Sekolah Baru Rintisan SMKN Leuwiliang dan Perbaikan Gedung SMPN 4 Leuwiliang	420/417-DISDIK 014/YPA-MDR/III/11	31 Maret 2011	3 Tahun
120	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. TASPEN (Persero)	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif	<u>119/685/DPKBD/032013</u> <u>1JAN-08/C.3.1/032013</u>	1 Maret 2013	-
121	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten	Praktek Kerja Lapangan (PBL) dan Penelitian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor	<u>421 / 3348 – Pr omkes .Sdk</u> <u>035 / MoU / StikesBanten / VI / 2013</u>	4 Juni 2013	-
122	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Cibinong	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bogor	<u>073 / 78–Dispenda</u> <u>130 / CBN–OPS / 2013</u>	1 Maret 2013	-
123	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Tahun Anggaran 2014	-	-	-
124	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan PRODA Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Tahun Anggaran 2014	-	-	-
125	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan pengukuran dan pemetaan rencana jalan Raya Bogor - GOR Pakansari – Jalan Raya Pemda Tahun Anggaran 2014	-	-	-
126	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Fakultas Teknik Universitas Pakuan	Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Subtansi Teknik RDTR dan Zoning Regulation Tahun Anggaran 2014	-	-	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
127	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor	pengelolaan sampah di lokasi Pasar Daerah di Kabupaten Bogor, yang secara administratif berada di wilayah kerja UPT Kebersihan dan Sanitasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor	-	1 Januari 2013	5 Tahun
128	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	<u>440/7470/Promkes-SDK</u> <u>350/KTR/V.02/1213</u>	-	-
129	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	kerjasama pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	605/KTR/IV-07/1214 dan 445/1895-RSUD-L	-	-
130	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	pelayanan jaminan sosial	-	-	-
131	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Bukaka Teknik Utama	Pelayanan Kesehatan karyawan PT. Bukaka Teknik Utama	446/057/PKS/2013	10 Desember 2013	2 Tahun
132	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Cahaya Medika Healthcare	pelayanan program jaminan pemeliharaan kesehatan	446/048/PKS/2013	1 November 2013	1 Tahun
133	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan Klinik Indosehat 3002	pelayanan kesehatan PT. Klinik Indosehat 3002	12/IKS/IS2013/DIR/XII/2013	1 Desember 2013	1 Tahun
134	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Citra Abadi Sejati	pelayanan kesehatan karyawan PT. Citra Abadi Sejati	446/036/KS/2013	21 Oktober 2013	1 Tahun
135	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	445/015.11-RSUD Ciawi/I/2014	6 Januari 2014	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
136	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor	tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Bogor	445/020.23/RSUD. Ciawi/II/2014	07 Januari 2014	-
137	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Fasilitas Rawat Inap Bagi Peserta Program Kesehatan	445/1862.2/RSUD Ciawi/XII/2014	Oktober 2014	-
138	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT. Cahaya Medika Health Care	Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	445/202.1/RSUD Ciawi/II/2014	08 Februari 2014,	-
139	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT. Hardlent Medika Husada	Pelayanan Jaminan Kesehatan Paket Plus	445/011.15/RSUD Ciawi/I/2014	02 Januari 2014	-
140	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT Wijaya Karya	Penanganan Kecelakaan Kerja dan Kesehatan para Staff Wijaya Karya dan Pekerja Proyek Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Kepelabuhan Pelindo	445/090.2/RSUD CIAWI/I/2014	Januari 2014	-
141	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT. Klinik Indosehat	Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan Pihak Indosehat	045/1439.1-RSUD Ciawi/IX/2014	01 Juni 2013	-
142	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK TEKNO MEDIKA PLUS	Praktek Kerja Lapangan	445/959.57/DIKLAT/VII/2013	1 Juli 2013	-
143	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK FARMASI IBNU AQIL	praktek kerja lapangan	445/2426/DIKLAT/II/2013	1 Februari 2014	-
144	Perjanjian antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK FARMASI PANDUTAMA	praktek kerja lapangan .	445/242.6/RSUD CIAWI/II/2013	01 Februari 2013	1 Tahun
145	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK FARMASI BOGOR	praktek kerja lapangan	445/995.14/DIKLAT/VII/2013	10 Juni 2013	1 Tahun
146	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Fakultas Kebidanan URINDO	praktek klinik kebidanan	445/429/DIKLAT/III/2013	05 Maret 2013	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
147	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Akademi Kebidanan Al-IKHLAS	tentang praktek klinik kebidanan	445/437.9/RSUD CIAWI/III/2013	06 Maret 2013	1 Tahun
148	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan RADIOGRAFER AL-ISLAM BANDUNG	praktek klinik kebidanan	445/429.7/RSUD CIAWI/III/2013	05 Maret 2013	1 Tahun
149	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan STIKES MITRA RIA HUSADA BOGOR	praktek klinik kebidanan	049/DIKLAT/I/2013	03 Januari 2013	1 Tahun
150	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID CITAMA DEPOK	praktek klinik kebidanan	445/1350.18/DIKLAT/VII/2013	30 Agustus 2013	1 Tahun
151	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKPER AL-IKHLAS	praktek kerja lapangan	445/974.7/RSUD CIAWI/VI/2013	05 Juni 2013	1 Tahun
152	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Fakultas Kedokteran UKRIDA	KEPANITRAAN KLINIK	420/529/RSUD CIAWI/V/2011	10 Mei 2011	3 Tahun
153	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Fakultas Kedokteran UNTAR	KEPANITRAAN KLINIK	420/RSUD CIAWI/2011	22 Juni 2013	1 Tahun
154	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID PRIMA HUSADA	praktek klinik kebidanan	445/DIKLAT/413.20/2013	01 Maret 2013	1 Tahun
155	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan POLITTEKES KEMENKES BANDUNG BOGOR	praktek klinik kebidanan	HK.06.01/1.6/1685/2013	19 April 2013	1 Tahun
156	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID BOGOR HUSADA	praktek klinik kebidanan	445/429.7/RSUD CIAWI/III/2013	05 Maret 2013	1 Tahun
157	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID WIJAYA HUSADA	praktek klinik kebidanan	445/243.6/RSUD CIAWI/II/2013	06 Mei 2013	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
158	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKPER WIJAYA HUSADA	praktek klinik kebidanan	445/244.6/RSUD CIAWI/II/2013	06 Mei 2013	1 Tahun
159	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan STIKES BANTEN	praktek klinik kebidanan	445/1925.5/RSUD CIAWI/XII/2013	05 Maret 2013	1 Tahun
160	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan DIII GIZI IPB	praktek kerja lapangan	073/138-69/DIKLAT/IX/2013	03 September 2013	1 Tahun
161	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Hemodialisa	pelayanan pasien cuci darah antara RSUD ciawi dengan PT. Mendjangan	445/1720/XII/12 dan 0388/MKSO/XII/12	02 November 2012	-
162	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Taspen (Persero)	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif	<u>Jan-08/C.3.1/032013</u> 119/685/DPKBD/032013	21 Maret 2013	4 Tahun
163	Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, IPB, PT. Holcim dan Damandiri	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Format Program GREEN POSDAYA yang berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan, lingkungan dan agama di 9 (sembilan) desa binaan	119/4/KB/KS/VI/2013, 34/IT3/KSM/ 2013, 020620/HIL/NAR/CR/2013 dan 053/Mou/YDESAM/VI/2013	20 Juni 2013	5 Tahun
164	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan Kelompok Tani Tirta Mekar	Pemasaran Buah dan Sayuran	MIDI-TIRTAMEKAR/KEMITRAAN/XI/2012/113 KELOMPOK TANI TIRTA MEKAR-25/2012	29 November 2012	3 Tahun
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2015					
165	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	119/1/KS/II/2013 02A/KS/LIPI/II/2013	1 Februari 2013	3 Tahun
166	Piagam Kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Pendidikan dan Penelitian	1603/UNG.RKT/TU/2013 dan 119/2/KB/KS/III/2013	18 Maret 2013	5 Tahun
167	Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan RSUP dr. Hasan Sadikin, Bandung dan RSUD Ciawir	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-1) di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor	3695/UNG.C/KS/2013,HK.06.01/E013/7574/VII/2013 dan Nomor 445/1050/RSUD Ciawi/VII/2013	1 Juli 2013	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
168	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dengan PT. Bank BJB, Tbk	Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik untuk Layanan Transaksi Perbankan	<u>800/138-BKPP</u> <u>101/CBN-OPS/2013</u>	28 Januari 2013	2 Tahun
169	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Cibinong	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bogo	<u>073 / 78-Dispenda</u> <u>130 / CBN -OPS / 2013</u>	1 Maret 2013	3 Tahun
170	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor	Pengelolaan Sampah	027/1422-DKP/2012 dan 539/13/PKS/PD.THG/2012	31 Desember 2012	5 Tahun
171	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan PT. Daya Mitra Telekomunikasi	penyelenggaraan beberapa lokasi Pembangunan Smart Pole Microcell	119/28.1/XI/PK/KS/2015 dan DMT.020/CLI/DBS-a1000000/XI/2015	02 November 2015	5 Tahun
172	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Bogor, Area Depok, Area Gunung Putri dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	0145.PJ/AGA/AREA BGR/2015, 0239/AGA.01.01/A.DPK/2015 dan 0135.Pj/AGA.01.01/A.PGPI/2015	-	1 Tahun
173	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	penerimaan pembayaran pajak daerah Kabupaten Bogor	119/34.1/XII/PK/KS/2015 dan B.379/KC-XIV/PEM/18/12/2015	06 Juli 2015	3 Tahun
174	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Utama	Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS	45/902/rsudciawi/V/2015	04 Mei 2015	-
175	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Inhealt	Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Inhealt	445/1299/rsudciawi/X/2013	01 Oktober 2015	-
176	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Asuransi MAG	Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi MAG	045/1862.2/rsudciawi/XI/2014	20 November 2015	-
177	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Waskita Wika KSO	Penanganan kecelakaan kerja dan kesehatan para staff Waskita Wika	445/1044.8/rsudciawi/VI/2015	11 Juni 2015	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
178	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Nusa Raya Cipta	Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. Nusa Raya Cipta	045/1672.1/rsudciawi/X/2014	20 Oktober 2015	-
179	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. AKSA	Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. AKSA	445/509/rsudciawi/III/2015	6 Maret 2015	-
180	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Metavisi Integra	Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. Metavisi Integra	445/902.6/rsudciawi/V/2015	14 Mei 2015	-
181	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan AKBID CITAMA DEPOK	praktek kerja lapangan	445/1567.20/RSUDCIAWI/X/2015	01 Oktober 2014	-
182	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan UPN Veteran Jakarta	ilmu gizi	445/1060.1.RSUDCIAWI/VI/2015	12 Juni 2015	-
183	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Puskesmas Poned Kabupaten Bogor	praktek kerja lapangan	445/1658.11/RSUDCIAWI/VII/2015	27 Agustus 2015	-
184	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan STIKES Ahmad Yani Cimahi	analisis	445/508/RSUDCIAWI/III/2015	-	-
185	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan UHAMKA	ilmu gizi	445/508/RSUDCIAWI/III/2015	-	-
186	Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)	penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor	119/1/1/PK/KS/2015 dan 04/KTR/IV-07/0115	02 Januari 2015	1 Tahun
187	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor	pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berkelanjutan, berbudaya, maju, sejahtera dan mandiri	119/23.1.A/XII/KB/KS/2014 dan 1056/K.12/UIKA/2014	1 Desember 2014	1 Tahun
188	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi	peningkatan potensi dan kepatuhan perpajakan di Kabupaten Bogor	970/283-DPKBD/2011, PRJ01/WPJ.22/KP.08/2011, PRJ-01/WPJ.22/KP.01/2011, dan PRJ-01/WPJ.22/KP.11/2011	12 Desember 2011	5 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
189	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Cibinong	penerimaan pembayaran dan pemindah bukuan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bogor	973/81-DISPENDA, dan B.1753/KW-XIV/RTL/03/2012	28 Februari 2012	3 Tahun
190	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan PT. Aneka Tambang, Tbk	Pengelolaan Kawasan Agromedika di Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	520/59.KS - Horti dan 059A/924/PUE/2011	18 Januari 2011	5 Tahun
191	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	pelayanan jaminan sosial	-	-	-
192	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Bukaka Teknik Utama	Pelayanan Kesehatan karyawan PT. Bukaka Teknik Utama	446/057/PKS/2013	10 Desember 2013	2 Tahun
193	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan	520/9/NK/HUK/2009 dan 06/134/KSM/2009	16 Maret 2009	5 Tahun
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2016					
194	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan	119/I/KB/KS/2016 dan 01/153/KsM/2016	5 Januari 2016	5 Tahun
195	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)	Data dan Informasi Geospasial	119/08/PK/KS/IV/2016 dan B-12.8/PPKS/PK/04/ 2016	12 April 2016	4 Tahun
196	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pusat Diseminasi dan Kemitraan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Demo Pemanfaatan Teknologi Nuklir Bidang Pertanian di Kabupaten Bogor	119/09/PK/KS/IV/2016 dan B-500/Batan/BGN/KS.0002/04/2016	15 April 2016	2 Tahun
197	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor	Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Bogor	410/674/Promkes-SDK	18 Januari 2016	-
198	Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Jasa Raharja	Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kecelakaan	445/2320/RSUDCIAWI/VII/2016	20 Juli 2016	
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2017					



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
199	Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/21/KB/KS/I/2017 dan 0824/KB/STIED/I/2017	30 Januari 2017	1 Tahun
200	Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	Jasa Layanan Perbankan di Kabupaten Bogor	119/41/KB/KS/II/2017 dan 194/CBN-OPS/2017	28 Februari 2017	1 Tahun
201	Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan Akademik Kebidanan Yaspem Tugu Ibu	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/52/KB/KS/II/2017 dan 018/MoU/AKB/YTI/III/2017	15 Maret 2017	1 Tahun
202	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/80/KB/KS/V/2017 dan 626/REK-UTA'45/MoU/V/2017	2 Mei 2017	1 Tahun
203	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Agama Islam Sahid Bogor	Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bogor	119/91/KB/KS/V/2017 dan 002/5/INAIS/KB/V/2017	18 Mei 2017	1 Tahun
204	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/95/KB/KS/V/2017 dan UN.01/R/OT.01.6/1431/2017	24 Mei 2017	1 Tahun
205	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor	Peningkatan Peran Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Bogor	119/109/KB/KS/VI/2017 dan 018/Org/Kpts/VI/2017	17 Juni 2017	2 Tahun
206	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian serta Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	119/138/KB/KS/VIII/2017 dan 31/KS/LIPI/ VIII/2017	18 Agustus 2017	3 Tahun
207	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Keislaman	119/176/KB/KS/IX/2017 dan 01/R-UMJ/IX/2017	4 September 2017	2 Tahun
208	Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan Akademik Kebidanan Pelita Ilmu	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/191/KB/KS/IX/2017 dan 006/AKBID-PI/MOU/DPK/IX/2017	26 September 2017	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
209	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademik Kebidanan Prima Husada Bogor	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/200/KB/KS/X/2017 dan Nomor 045/AKBID-PHB/X/2017	9 Oktober 2017	1 Tahun
210	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Yayasan Wijaya Husada	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/218/KB/KS/XI/2017 dan 28/YWH/XI/2017	2 November 2017	1 Tahun
211	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi	Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor	119/11/KB/KS/I/2017, MOU/01/01/2017 dan MOU/01/01/2017	17 Januari 2017	1 Tahun
212	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Kabupaten Bogor	119/36/KB/KS/II/2017 dan 06./NK/BPPT-Kab Bogor/02/2017	21 Februari 2017	2 Tahun
213	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/87/KB/KS/V/2017 dan 003/KB/STIE Tazkia/V/2017	12 Mei 2017	2 Tahun
214	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Sinergi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Teknologi di Kabupaten Bogor	119/64/KB/KS/IV/2017 dan 05/P2/KS/2017	5 April 2017	3 Tahun
215	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Esa Unggul	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/177/KB/KS/IX/2017 dan 18/MOU/R/IX/2017	28 Agustus 2017	1 Tahun
216	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan USAID Indonesia <i>Urban Water, Sanitation and Hygiene</i> penyehatan lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS)	Implementasi Program Indonesia <i>Urban Water, Sanitation and Hygiene</i> penyehatan lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS) di Kabupaten Bogor	119/182/KB/KS/IX/2017 dan 002/IUWASH PLUS-MoU/IX/2017	12 September 2017	5 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
217	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/231/KB/KS/XI/2017 dan 011/AKPER YJK/01/XI/2017	21 November 2017	1 Tahun
218	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Taspen (Persero) KC Bogor	Peningkatan Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bogor	119/237/KB/KS/2017 dan JAN-01/C.3.1/122017	30 November 2017	1 Tahun
219	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor	119/238/KB/KS/XII/2017, MOU/07/122017 dan MOU/02/12201	4 Desember 2017	1 Tahun
220	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII	penggunaan sebagian lahan HGU Kebun Gunung Mas PTPN VIII untuk relokasi pedagang kaki lima dan pengembangan Rest Area di kawasan puncak Kabupaten Bogor	119/236/KB/KS/XI/2017 dan III.2/1119/XI/2017	29 November 2017	2 Tahun
221	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor	Penyusunan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM)	119/74/PKS/KS/IV/2017 dan 1220/IT3.11/KS/2017	13 April 2017	8 Bulan
222	Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor	Penggunaan Lahan Hak Guna Kebun Gunung Mas untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Olahraga Paralayang dan Gantole	SP/III.2/333/IX/2017 dan 199/168/PKS/ KS/IX/2017	15 September 2017	5 Tahun
223	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Yaspem Tugu Ibu	Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan	119/102/PKS/KS/VI/2017 dan 021/MOU/AKB-YTI/VI/2017	7 Juni 2017	3 tahun
224	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk Bogor	Uji Coba Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Bogor	119/98/PKS/KS/V/2017 dan 332/LCA-DIR/V/2017	31 Mei 2017	1 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
225	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan	Pemberdayaan Pengrajin Sepatu Ciomas	119/112/PKS/KS/VI/2017 dan 900/K/STIEK/VI/2017	20 Juni 2017	1 tahun
226	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Cipta Daya Husada	tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	119/162/PKS/KS/IX/2017 dan 02/AKBID-CDH/KS/IX/2017	11 September 2017	2 tahun
227	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Pelita Ilmu	tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan	119/172/PKS/KS/IX/2017 dan 0015/AKBID-PI/DPK/PS/IX/2017	25 September 2017	3 tahun
228	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul	Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/169/PKS/KS/IX/2017 dan 05/DKN/FIKES/IX/2017	19 September 2017	2 tahun
229	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	tentang Pendayagunaan Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi di Lingkungan Puspitek untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Bogor	119/176/PKS/KS/IX/2017 dan 30/P2/KS/2017	29 September 2017	2 tahun
230	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Prima Husada	tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	119/192/PKS/KS/X/2017 dan 042/AKBID-PHB/X/2017	23 Oktober 2017	2 tahun
231	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Wijaya Husada Bogor	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/213/PKS/KS/XI/2017 dan 186/AKBID-YWH/XI/2017	17 November 2017	3 tahun
232	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Peningkatan Jalan Citeureup – Citaringgul di Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor	119/206/PKS/KS/XI/2017 dan 035/RSP-XI/2017	8 November 2017	2 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
233	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor di Kabupaten Bogor	119/227/PKS/KS/XII/2017 dan 6825/STIKes-WH/XII/2017	8 Desember 2017	3 tahun
234	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan PT. INDAC INT'L (Battery Component Indonesia)	Pembangunan Jembatan Wanaherang pada Ruas Jalan Lingkar Kantor Kecamatan Gunung Putri (Jalan Melati) Kabupaten Bogor	119/66/PKS/KS/IV/2017 dan 01/INDAC.BCI/ PKS/IV/2017	tanggal 3 April 2017	2 tahun
235	Perjanjian Kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat	Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	119/117/PKS/KS/VII/2017 dan LBH/03/ban/p.Kab.Bogor/VII/2017	4 Juli 2017	1 tahun
236	Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat	119/203/PKS/KS/X/2017 dan HK.201/2/10/STTD-2017	12 Oktober 2017	5 tahun
237	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara	Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik dalam Sistem Perizinan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor	199/199/PKS/KS/X/2017 dan PERJ.37/LSN/SU/KH.02.01/10/2017	31 Oktober 2017	4 tahun
238	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan PT. Pos Indonesia (Persero)	Jasa Pengiriman Surat dan Paket	199/200/PKS/KS/X/2017 dan PKS.2594/RegionallV/III/10/A/1017	31 Oktober 2017	1 tahun
239	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bogor	Pengembangan, Promosi dan Daya Saing Industri Pariwisata di Kabupaten Bogor	199/218/PKS/KS/XI/2017 dan 02/PKS/BPC-PHRI/Kab. BOGOR/XI-2017	24 November 2017	5 tahun
240	Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor	Penggunaan Lahan Hak Guna Usaha Kebun Gunung Mas PTPN VIII Seluas ± 1 HA Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor	III.2/1120/XI/2017 dan 119/221/PKS/KS/XI/2017	29 November 2017	5 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
24 1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi	Pelaksanaan Pelayanan Pengobatan dan Perawatan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	199/238/PKS/KS/XII/2017, PKS/8/122017 dan PER/38/122017	21 Desember 2017	1 tahun
24 2	Addendum Kedua atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Daihan Cipta Prima	Pembangunan Pertokoan Modern "Technoworld" beserta Fasilitas Penunjangnya	511.22/5/PRJN/KS/2011 dan 011/PKP/TW/DCP/DIR/XI/2011,	11 November 2011	7 tahun
243	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Astra International Tbk	Program bantuan Pendidikan di Kabupaten Bogor	119/22/X/KB/KS/2014	27 Oktober 2014	3 tahun
244	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Negeri Jakarta	Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Bogor	119/11/VI/KB/KS/2014 dan 1741/PL3/HK/2014	30 Juni 2014	5 tahun
24 5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pakuan	Pengembangan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi lokal Di Kabupaten Bogor	119/21/VIII/KB/KS/2014 dan Nomor KS/651/VIII/2014/UPNVJ	6 Oktober 2014	3 tahun
246	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN "Veteran" Jakarta	Praktek Klinik dan Komunitas di Wilayah Kerja Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor	421/01/Promkes.SDK/2014 dan PKS/002/II/2014/FIKES	28 Februari 2014	3 tahun
247	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Bogor dengan PT. Bank Syariah Mandiri	Pemanfaatan Jasa dan Pelayanan Perbankan	119/4/III/KB/KS/2015 dan 17/006-MOU/Dir	3 Maret 2015	3 tahun
24 8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor	Peningkatan Sumber Daya Manusia	119/7/III/KB/KS/2015 dan 320/K/STIE/III/2015	18 Maret 2015	3 tahun
24 9	Nota Kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Pembangunan dan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian Cigombong	483/HK.220/I/05/2015 dan 119/10/V/KB/KS/2015	7 Mei 2015	3 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
250	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abadi Negara	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bogor	119/11/V/KB/KS/2015 dan 012/KS/Ketua/STIP-AN/IV/2015	18 Mei 2015	5 tahun
251	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta	Praktek Belajar/Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/15/VI/KB/KS/2015 dan 017/MOU/KS/STIKes MRH/VI/2015	1 Juni 2015	3 tahun
252	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Informasi Geospasial		119/18/VII/KB/KS/2015 dan 8-10.1/KA/PK/07/2015	10 Juli 2015	3 tahun
253	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. ANTAM (Persero) Tbk. UBPE Pongkor	Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bogor	119/29/IX/KB/KS/2015 dan 656.a/7624/PUE/2015	18 September 2015	4 tahun
254	Kesepakatan Bersama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Bogor	Penelitian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Iptek Nuklir dalam Menunjang Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor	10171/BATAN/KS/0101/X/2015 dan 119/31/X/KB/KS/2015	8 Oktober 2015	3 tahun
255	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Nusa Bangsa	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kabupaten Bogor	119/33/XI/KB/KS/2015 dan 056/REK-UNB/F/XI/2015	12 November 2015	3 tahun
256	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Bio farma (persero)	Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bogor	119/38/XII/KB/KS/2015 dan 07535/DIR/XII/2015	1 Desember 2018	3 tahun
257	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA"	Media Luar Ruang (Videotron) Layanan Informasi Publik "Layar Indonesia Kabupaten Bogor Tegar Beriman"	119/23/VIII/PK/KS/2015 dan 094/PKS/DITKOMBUSDEP/VI II/2015	27 Agustus 2015	5 tahun
258	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YATSI Tangerang	Praktek Klinik Kebidanan dan Perawatan, Penelitian serta Pengabdian Masyarakat	119/5.1/IV/PK/KS/2015 dan 006/Yatsi/Mou/III/2015	13 April 2015	3 tahun
259	Perjanjian Kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten	Pembangunan dan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian Cigombong Kabupaten Bogor	3040/HK.220/I.1/II/2015 dan 119/29/XI/PK/KS/2015	9 November 2015	3 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
	Bogor				
260	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Nasional Jakarta	Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor	119/05/KB/KS/II/2016 dan 073/R/II/2016	23 Februari 2016	3 tahun
261	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta III	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)	119/04/KB/KS/II/2016 dan HK.01/I/1122/2016	22 Februari 2016	3 tahun
262	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	119/04/KB/KS/II/2016 dan HK.05.01/I/1005/2016	29 Februari 2019	1 tahun
263	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Rumah Sakit Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor	Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Bogor	119/07/KB/KS/IV/2016 dan HK.05.01/11.2/1317/2016	01 April 2016	1 tahun
264	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Kebidanan Bunda Auni	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	199/07.1/KB/KS/IV/2016 dan 127/MOU/BAAK-AKBA/IV/2016	20 April 2016	1 tahun
265	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/11/KB/KS/V/2016 dan D.2-500/STKIP-M/V/2016	12 Mei 2016	1 tahun
266	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Bogor dengan Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Bogor	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/19/KB/KS/VI/2016 dan 031/MOU/AKBID.BI/ VI/2016	9 Juni 2019	1 tahun
267	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bandung	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor	119/27/KB/KS/VI/2016 dan HK.05.01/1.6/2958/2016	21 Juni 2016	1 tahun
268	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk	Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Bogor	119/62/KB/KS/VIII/2016 dan 0218-AGMT/LCA-CEO/HIL/VIII/2016	16 Agustus 2016	1 tahun
269	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Keperawatan Al-Ikhlas	Penggunaan Lahan Praktik di Wilayah Kabupaten Bogor	119/70/KB/KS/VIII/2016 dan 114/C.01.02/2016	29 Agustus 2019	1 tahun
270	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan	Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	119/73/KB/KS/IX/2016 dan 59/NKB/R/UI/2016	1 September 2016,	1 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
	Universitas Indonesia				
27 1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan STIKES Banten	Praktek Belajar Lapangan dan Penelitian Mahasiswa STIKES Banten di Kabupaten Bogor	076/MOU/04321/IX/2016	19 September 2016	1 tahun
27 2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Kebidanan Al-Ikhlas	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/96/KB/KS/X/2016 dan 4055/C.0.02/X/2016	6 Oktober 2016	1 tahun
27 3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Kebidanan Cipta Daya Husada	Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan	119/130/KB/KS/XI/2016 dan 36/AKBID-CDH/XI/2016	23 November 2016	1 tahun
27 4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor	Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bogor	119/I/KB/KS/2016 dan 01/153/KsM/2016	5 Januari 2019	5 tahun
275	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor	Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bogor	119/I/KB/KS/2016 dan 01/153/KsM/2016	5 Januari 2016	5 tahun
27 6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk	Penyelenggaraan Pembangunan Microcell berikut Fasilitas Pendukungnya pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Bogor	119/03/KB/KS/II/2016 dan 048/BTS-DIR/I/2016	18 Februari 2016,	1 tahun
27 7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pertahanan	Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bogor	119/34/KB/KS/VI/2016 dan 22/KB/UNHAN/VI/2016	30 Juni 2016	3 tahun
278	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/92/KB/KS/IX/2016 dan 036/AKBID-PHB/IX/2016	30 September 2019	1 tahun
27 9	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	119/98/KB/KS/X0/2016 dan 02/YJK/X/2016	10 Oktober 2016	1 tahun
28 0	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Ibn Khaldun	Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berkelanjutan, Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Mandiri	119/127/KB/KS/XI/2016 dan 9464/K.12/UIKA/2016	18 November 2016	1 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
281	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan ORARI Daerah Jawa Barat Lokal Kabupaten Bogor	Pemanfaatan dan Dukungan Radio Komunikasi	119/131/KB/KS/XI/2016 dan 27/S-SKB/KBG/XI/2016	24 November 2019	2 tahun
282	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada Jakarta	Praktik Belajar Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	119/02/PK/KS/II/2016 dan 101/KS/STIKES MRH/II/2016	2 Februari 2016	3 tahun
283	Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan PT. Antam (persero) Tbk UPBE Pongkor	Penanganan Pasca Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Bogor	119/05/PK/KS/III/2016 dan 142/PUE/142/7624/PUE/2016	15 Maret 2016	4 tahun
284	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor dengan PT. Antam (Persero), Tbk UBPE Pongkor	Realisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berupa Pengadaan Kendaraan Siaga Desa Roda Empat di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	119/07/PK/KS/III/2016 dan 277/7624/PUE/2016	15 Maret 2016	1 tahun
285	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Rumah Sakit Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor	Penanganan Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Bogor	119/17/PK/KS/V/2016 dan HK.05.01/II.1/2630/2016	30 Mei 2016	1 tahun
286	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Bunda Auni	Praktik Belajar Lapangan, Penelitian dan Praktik Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa	119/27//PK/KS/VI/2016 dan 129/BAAK-AKBA/PKK/VI/2016	14 Juni 2016	5 tahun
287	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I	Pelaksanaan Praktik Klinik Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/38/PKS/KS/VI/2016 dan HK.05.01/I/3613/2016	29 Juni 2016	5 tahun
288	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Bhakti Indonesia Bogor	Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan dan Praktik Kebidanan Komunitas	119/49//PKS/KS/VII/2016 dan 090/MOU/AKBID.BI/VII/2016	21 Juli 2016	5 tahun
289	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan LP2M Universitas Pertahanan	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bogor	119.68/PKS/KS/VIII/2016 dan PKS/42/VIII/2016	18 Agustus 2016	3 tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
290	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Keperawatan Al-Ikhlas	Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	119/95/PKS/KS/IX/2016 dan 1181/C.01.02/2016	26 September 2019	3 tahun
291	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III	Pelaksanaan Praktik Klinik Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/99/PKS/KS/IX/2016 dan Hk.06.0.1/IX/1122/2016	30 September 2016	5 tahun
292	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk	Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Mikroseluler dan Jaringan Fiber Optik pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Bogor	119/110/PKS/KS/X/2016 dan 672/BTS-DIR/X/2016	17 Oktober 2016	5 tahun
293	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Yayasan Dharmais	Penyelenggaraan Program Terpadu Pesantren Singkat Pelatihan Usaha Produktif di Kabupaten Bogor	119/118/PKS/KS/X/2016 dan 30/SK/DHM/X/2016	27 Oktober 2016	3 tahun
294	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan PT. Gunung Suwarna Abadi	Penyediaan/Pembangunan Bukaan Gerbang Tol Jagorawi di KM 42,5 dan Akses Jalan Langsung di Kabupaten Bogor	119/01/PK/KS/I/2016 dan 011/GSA-PKS/I/2016	20 Januari 2016	2 tahun
295	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten	Praktek Belajar Lapangan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten di Kabupaten Bogor	119/100/PKS/KS/X/2016 dan 72/PKS/043231/X/2016	3 Oktober 2016	3 tahun
296	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Cabang Cibinong	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor	119/164/PKS/KS/XII/2016 425/KT/IV-07/2016	29 Desember 2016	1 tahun
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2018					
297	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dengan LPPM Institut Pertanian Bogor	Pelaksanaan Anugrah Paraita Ekapraya	119/24/PKS/KS/II2018 dan 0536/it.11/KS/2018	5 Februari 2018	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
298	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dengan LPPM Institut Pertanian Bogor	Penyusunan Gender	19/25/PKS/KS/II2018 dan 0536/it.11/KS/2018	5 Februari 2018	-
299	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Agama Cibinong dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor	Pelayanan Terpadu Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Hak Identitas Hukum Lainnya di Kabupaten Bogor	119/29/PKS/KS/II/2018, WII.UO/2031/Hk.02/II/2018, WIO.A20/1406/Hk.05/II/2018 dan 3256/KK.01.01/HM.00/II/2018	6 Februari 2018	-
300	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong	Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	119/107/PKS/KS/VI/2018 dan 355/KTR/IV-12/0618	-	-
301	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan Bandung	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	110/35/KB/KS/III/2018 dan HK 05.01/1.6I/0695/2018	20 Februari 2018	-
302	Kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan Stikes Pertamina Bina Medika Jakarta	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/37/KB/KS/II/2018 dan 0552/100000/II/2018	22 Februari 2018	-
303	Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akper Royhan Jakarta	Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/41/KB/KS/II/2018 dan 031/Dir-Ry/ II/2018	28 Februari 2018	-
304	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan Dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	119/59/KB/KS/II/2018 dan 3157/10/DJM.1/2018	23 Maret 2018	-
305	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan POLRES Bogor	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar	119/65/KB/KS/IV/2018 dan B/08/IV/2018/ Resor	3 April 2018	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
306	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institu Pemerintahan Dalam Negeri	Kerjasama Pendidikan dan Program Pendampingan	119/70/KB/KS/III/2018 dan 420/205/KB/KS/IV/2018	10 April 2021	-
307	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Respati Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/95/KB/KS/V/2018 dan UN.011/R/OT.01.6/1431/2018	2 Mei 2018	-
308	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Bogor	119/89/KB/KS/V/2018 dan 56/KOMINFO/HK.03.02/05/2018	8 Mei 2018	-
309	Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kabupaten Bogor	Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	119/97/ KB/KS/V/201	21 Mei 2018	-
310	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Trilogi Jakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat	119/113/KB/KS/VI/2018 dan 10/TRILOGI/Rektor/Mou/VI/2018	26 Juni 2018	-
311	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat	119/114/KB/KS/VI/2018 dan 25/NKB/ R/UI/V/2018	28 Juni 2018	-
312	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Prov. Jawa Barat Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta DI Yogyakarta	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Nomor: 119/135/KB/KS/VII/2018 Nomor: 20/NKB.YK/VII/2018	Tanggal: 27 Juli 2018	
313	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dengan Pemerintah Kab. Bukittinggi Prov. Sumatera Barat	Kerjasama Jaringan Lintas Daerah	Nomor: 119/143/KB/KS/VIII/2018 Nomor: 180/27/Huk-D/2018	Tanggal: 07 Agustus 2018	
314	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Bogor dengan Pemerintah Kab. Sukabumi	Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Nomor: 119/216/KB/KS/XI/2018 Nomor: 100/PJ 63.Hukham/2018	Tanggal: 05 Nopember 2018	
315	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor dengan Kantor Pertanahan Kab. Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak atas Tanah milik/dikuasai Pemerintah Kab. Bogor tahun anggaran 2018	Nomor : berbentuk draft		



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
316	Perjanjian Kerja sama Antara PT Taspen (persero) Kantor Cabang Bogor dengan Pemerintah Kab. Bogor	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif.	Nomor : berbentuk draft		
317	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor Dengan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kab. Bogor			
318	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kab. Bogor dengan FIKES Universitas Respati Indonesia	Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat	No 119/129/PKS/KS/VII/2018	Tanggal 18 Juli 2018	
319	Perjanjian kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Dengan Kantor Pertanahan Kab. Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Proses Pendaftaran Tanah Untuk Mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Kab. Bogor Tahun 2018	Nomor : 119/29/PKS/KS/II/2018	Tanggal 08 Februari 2018	
320	Perjanjian kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Dengan Kantor Pertanahan Kab. Bogor	Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luas Aset Pemerintah Kab. Bogor Tahun Anggaran 2018	Nomor : 119/30/PKS/KS/II/2018	Tanggal 08 Februari 2018	
321	Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kab. Bogor Dengan UIKA Bogor	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)	No. 119/105/pks/ks/V/2018 No. 220/K.9/FIKES-UIKA/2018	Tanggal 31 Mei 2018	
322	Perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Kab. Bogor Dengan PT BJB Cabang Cibinong		Nomor: 119/127/PKS/KS/VII/2018 Nomor: 819/cpn-kom/2018	Tanggal 16 Juli 2018	
323	Perjanjian Kerjasama Antara IPDN dengan Pemkab. Bogo	Penyelenggaraan Bhakti Karya Praja Bagi Praja Utama IPDN TA 2017/2018 di Pemerintahan Prov. Jawa Barat	Nomor: 420/ /IPDN Nomor: 119/71/PKS/KS/IV/2018	Tanggal 10 April 2018	
324	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan KPPKB	Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luas Aset Pemerintah Kab. Bogor.	Nomor: 119/30/PKS/KS/VII/2018 Nomor: 005/GSA-PKS/I/2018	Tanggal: 08 Februari 2018	
325	Perjanjian Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan IPB		Nomor: 119/116-Disdik Nomor: /IT3/KsP/2018	Tanggal 09 Juli 2018	



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
326	Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Sistem Penyediaan Air Minum Terletak di Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor Antara PT Putra Adhi Prima Dengan Pemerintah Kab. Bogor		Nomor: 003/C00/VIII/2018 Nomor: 119/01/BAST/KS/VIII/2018		
327	Perjanjian Kerjasama Antara DPMPTSP Kab. Bogor Dengan PT BPD Jabar dan Banten, TBK Cabang Cibinong	Fasilitas Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Kab. Bogor	Nomor: 119/127/PKS/KS/VII/2018 omor: 819/cbn-kom/2018	Tanggal 16 Juli 2018	
328	Perjanjian Kerjasama Antara Diskes Kab. Bogor dengan Polittkes Kemenkes Bandung	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	Nomor: 119/54/PKS/KS/III/2018 Nomor: HK.05.01/1.6/0939/2018		
329	Perjanjian Kerjasama Antara BKN Dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Sukabumi dan Pemerintah Kab. Bogor	Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 Dengan Metode Computer Assisted Test BKN		Tanggal 10 Oktober 2018	
330	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Poltekes Bandung	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Nomor : 110/35/KB/KS/II/2018 Nomor : HK.05.01/1.6/0695/2018	tanggal 20 Februari 2018	
331	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Stikes Pertamina Bina Medika Jakarta	Kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Nomor : 119/37/KB/KS/II/2018 Nomor : 0552/100000/II/2018	Tanggal 22 Februari 2018	
332	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Akper Royhan Jakarta	Kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Nomor : 119/41/KB/KS/II/2018 Nomor : 031/Dir-Ry/II/2018	Tanggal 28 Februari 2018	
333	Nota Kesepahaman Antara Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Pemerintah Kab. Bogor	penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di wilayah Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	Nomor : 119/59/KB/KS/III/2018 Nomor : 3157/10/DJM.I/2018	Tanggal 23 Maret 2018	
334	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan POLRES Bogor	Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar	Nomor : 119/65/KB/KS/IV/2018 Nomor : B/08/IV/2018/Resor	Tanggal 3 April 2018	
335	Kesepakatan Bersama Antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bogor	Kerjasama Pendidikan dan Program Pendampingan	Nomor : 420/205/KB/KS/IV/2018 Nomor : 119/70	tanggal 10 April 2018	



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
			/KB/KS/III/2018		
336	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor dengan Universitas Respati Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Nomor : 119/95/KB/KS/V/2018 Nomor : UN.01/R/OT.01.6/1431/2018	Tanggal 2 Mei 2018	
337	Nota Kesepahaman Antara Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO dengan Pemerintah Kab. Bogor	Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Bogor	Nomor : 56/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 Nomor : 119/89/KB/KS/V/2018.	tanggal 8 Mei 2018	
338	Kesepakatan Bersama antara Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah, Kementerian Agraria dan tata ruang/Bdan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Kab. Bogor	Penegakan hukum Bidang penataan ruang	Nomor : 119/97/KB/KS/V/2018	tanggal 21 Mei 2018	
339	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor dengan Universitas Trilogi Jakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Nomor : 119/113/KB/KS/VI/2018 Nomor : :10/TRILOGI/Rektor/MoU/VI/2018	tanggal 26 Juni 2018	
340	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Bogor dengan Universitas Indonesia	Pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat	Nomor : 119/114/KB/KS/VI/2018 Nomor : 25/NKB/R/UI/V/2018	tanggal 28 Juni 2018	
341	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor Dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor 119/124/KB/KS/VII/2018	Tanggal 12 Juli 2018	
342	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.			
343	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	No. 119/144/KB/KS/VIII/2018 No. 182/Rek-UTA'45/MoU/VIII/2018	Tanggal 08-08-2018	
345	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan STIE Dewantara	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor: 199/160/KB/KS/IX/2018 Nomor: 522a/STIED/KK/IX2018	Tanggal 03 September 2018	
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2014					
346	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama	Penyediaan Data Statistik Pemerintah Kabupaten Bogor	119/5IV/KB/KS/2014 dan 3201.0.082	14 April 2014	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
347	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor	Kerjasama di Bidang Pertanahan	119/1/I/KB/KS/2014 dan 2/SKB-32.01/II/2014	6 Februari 2014	-
348	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	119/07/PRJN/KS/VIII/2014 dan B-05/O.2.33/GS/08/2014	26 Agustus 2014	-
349	Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor-Kementerian Komunikasi dan Informasi RI	Penyebarluasan Informasi dan Inovasi Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terkini	B.16/RRI-BGR/01/2014	7 Januari 2014	-
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2015					
350	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik (BPS)	dalam hal menyusun data indikator makro maupun data-data statistik lainnya yang diperlukan	-	-	-
351	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor	dalam hal pembuatan sertifikasi aset-aset Pemerintah Kabupaten Bogor maupun tanah masyarakat	-	-	-
352	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong	penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	-	-	-
353	Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor-Kementerian Komunikasi dan Informasi RI	Penyebarluasan Informasi dan Inovasi Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terkini	523/24/BKP5K/I/2015	6 Januari 2015	-
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2016					
354	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik (BPS)	dalam hal menyusun data indikator makro maupun data-data statistik lainnya yang diperlukan	-	-	-
355	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor	dalam hal pembuatan sertifikasi aset-aset Pemerintah Kabupaten Bogor maupun tanah masyarakat	-	-	-



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
356	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong	penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	-	-	-
357	Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor-Kementerian Komunikasi dan Informasi RI	Penyebarluasan Informasi dan Inovasi Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terkini	482.1/II/BKP5K/I/2016	5 Januari 2016	-
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2017					
358	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	067/WPB.13/BD.03/2017 dan 119/61/KB/KS/III/2017,	29 Maret 2017	5 Tahun
359	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Bogor	119/26/KB/KS/II/2017 dan MoU-7/PW10/2017	8 Februari 2017	3 Tahun
360	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III	Koordinasi dan Harmonisasi dalam Rangka Penggalan Potensi dan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	119/235/KB/KS/XI/2017 dan KEP-524/ WPJ.33/2017	28 November 2017	1 Tahun
361	Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor	119/43/PKS/KS/II/2017 dan 4/SKB-32.01/I/2017	22 Februari 2017	1 Tahun
362	Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan PRODA Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat	119/52/PKS/KS/III/2017 dan 3/SKB-32.01/I/2017	7 Maret 2017	1 Tahun
363	Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikat Tanah Masyarakat Relokasi Bencana Alam	119/54/PKS/KS/III/2017 dan 5/SKB-32.01/I/2017	14 Maret 2017	1 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
364	Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	119/58/PKS/KS/III/2017 dan 6/SKB-32.01/I/2017	20 Maret 2017	1 Tahun
365	Addendum Perjanjian Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik	tentang Penyediaan Data Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bogor	073/318-PDE dan 3201.0.087	23 April 2014	
366	Perjanjian Kerjasama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pengendalian Validasi BPHTB Online serta Tukar Menukar Informasi Data Perolehan Hak Atas Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor	119/20/PKS/KS/I/2017 dan 45/Kep-32.01/I/2017	20 Maret 2017	1 Tahun
367	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	199/230/PKS/KS/XII/2017 dan B-12/0.2.33/ GS/12/2017	13 Desember 2017	1 Tahun
368	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Kerjasama di Bidang Pertanahan	119/1/II/KS/2014 dan 2/SKB-32.01/II/2014	6 Februari 2016	5 Tahun
369	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Narkotika Nasional	Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor	119/2/III/KB/KS/2014 dan NK/168/V/2014/BNN	10 Maret 2014	5 Tahun
370	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Badan Narkotika Nasional	Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Di Kabupaten Bogo	119/10/IX/PK/KS/2014 dan SP/178/IX/KA/HK 01.00/2014/BNN	22 September 2014	5 Tahun
371	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kodim 0621/ Kabupaten Bogor	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian	119/01/I/KB/KS/2015 dan B/90/I/2015	13 Januari 2015	3 Tahun
372	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Agama Cibinong, dan Kementerian Agama	Pelayanan Terpadu Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Identitas Hukum lainnya di Kabupaten Bogor	119/5/III/PK/KS/2015, WII-U20/1409/ KK.20/III/2015, W10-A20/667/HM.00/III/2015 dan k.d.10.01/I/HM.01/15172015	23 Maret 2015	3 Tahun



NO	KERJASAMA	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU
373	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga dalam Rangka Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Wilayah Kabupaten Bogor	119/31/XII/PK/KS/2015 dan 2369/IV-11/TU.2/2015	8 Desember 2015	3 Tahun
374	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Kerjasama di Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Luar Sekolah dan Keterampilan Kerja Bagi Tahanan dan Narapidana	119/08/KB/KS/IV/2016 dan WII.PAS.PAS.II.HM.05.02.367b	27 April 2016	1 Tahun
375	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Kerjasama di Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Luar Sekolah dan Keterampilan Kerja Bagi Tahanan dan Narapidana	119/09/KB/KS/IV/2016 dan WII.PAS.PAS.23.PK.01.08-211	27 April 2016	1 Tahun
376	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor	119/03/ PK/KS/II/ 2016 dan 522/SD-300.6/2016	12 Februari 2016	1 Tahun
377	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor N	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	119/150/PKS/KS/XII/2016 dan B.05/0.2.33/GS/12/2016	8 Desember 2016	1 Tahun
378	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Kegiatan Program Daerah Tanah Milik Masyarakat (PRODA) Tanah Milik Masyarakat	119/04/PK/KS/II/2016 dan 521/SD-300.6/2016	12 Februari 2016	1 Tahun

Sumber : Memori Sertija b Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, kinerja keuangan daerah memperlihatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan keuangan daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dimana pencapaian target-target tersebut sekaligus menunjukkan sejauhmana kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan beberapa hal, diantaranya :

1. kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan kinerja keuangan pada 5 (lima) tahun sebelumnya di periode pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dilihat berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang tersusun dari :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yang tersusun dari :
 - a. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang tersusun dari :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

b. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Langsung, yang tersusun atas :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal

2. Belanja Tidak Langsung, yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja bunga
 - c. Belanja subsidi
 - d. Belanja hibah
 - e. Belanja bantuan sosial
 - f. Belanja bagi hasil
 - g. Belanja bantuan keuangan
 - h. Belanja tidak terduga
- c. Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas :
 1. Penerimaan pembiayaan, yang tersusun atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - c. Pencairan dana cadangan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - e. Penerimaan piutang daerah
 2. Pengeluaran pembiayaan, yang tersusun atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

Komponen-komponen dalam masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dipergunakan sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan seluruhnya.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor pada periode perencanaan pembangunan tahap ketiga, yaitu tahun 2013-2018, digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Secara umum, kinerja APBD Tahun 2013-2018 disajikan sebagai berikut :

A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2013-2018, diarahkan pada “**Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif**

dan taat pada ketentuan yang berlaku,” yang dilakukan melalui langkah/ upaya pokok, sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah;
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah.

Perkembangan pendapatan daerah tahun 2013-2018 disajikan dalam Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

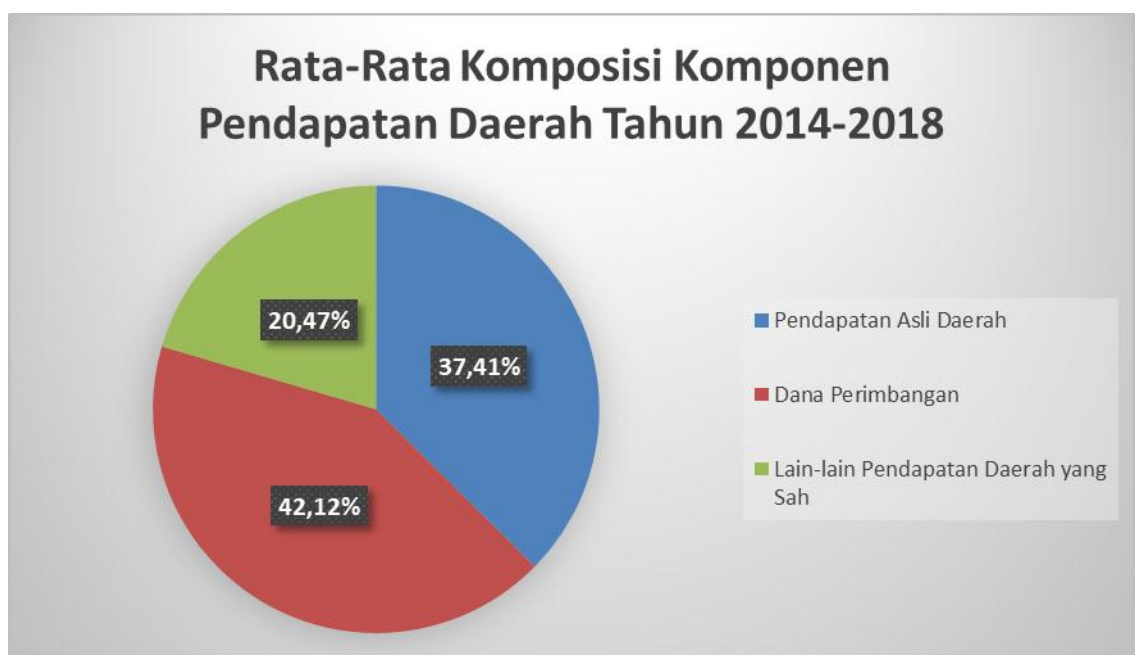
No	URAIAN PENDAPATAN DAERAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (un audited)	Rata-rata Pertumbuhan
	PENDAPATAN DAERAH	4.561.968.045.928	5.378.094.139.799	6.032.847.734.883	5.973.280.685.746	6.975.053.078.040	7.300.466.120.600	10,10%
1	Pendapatan Asli Daerah	1.261.034.564.121	1.712.937.376.136	2.002.209.819.262	2.292.175.674.801	3.041.872.447.905	2.794.723.739.852	18,36%
	1) Hasil Pajak Daerah	882.963.473.747	1.131.443.649.696	1.285.337.123.681	1.520.926.774.878	1.786.132.725.165	1.969.427.530.834	17,55%
	2) Hasil Retribusi Daerah	145.818.507.884	199.527.357.902	133.014.942.311	136.756.227.055	150.541.572.101	112.776.035.992	-1,74%
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	13.244.856.928	15.109.074.955	40.142.252.390	43.075.638.051	44.338.643.608	44.287.173.198	37,98%
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	219.007.725.562	366.857.293.583	543.715.500.880	591.417.034.817	1.060.859.507.031	668.232.999.828	33,37%
2	Dana Perimbangan	2.299.110.842.000	2.498.370.936.940	2.583.489.732.475	2.692.167.023.139	2.742.839.370.823	2.818.814.498.138	4,19%
	1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	194.646.010.000	252.428.405.040	221.902.320.475	267.917.072.219	269.361.187.649	262.173.257.266	7,24%
	2) Dana Alokasi Umum	1.887.770.112.000	2.055.944.991.900	2.163.439.062.000	1.917.780.234.000	1.902.004.175.000	1.919.023.527.000	0,57%
	3) Dana Alokasi Khusus	216.694.720.000	189.997.540.000	198.148.350.000	506.469.716.920	571.474.008.174	637.617.713.872	34,40%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.001.822.639.807	1.166.785.826.723	1.447.148.183.146	988.937.987.806	1.190.341.259.312	1.686.927.882.610	14,18%
	1) Pendapatan Hibah	3.674.920.160	5.703.611.550	275.592.750	2.943.000.000	5.498.942.371	445.115.600.000	1801,87%
	2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	356.484.217.678	524.442.825.444	628.311.022.786	577.023.348.996	659.561.474.226	707.218.738.134	16,06%
	3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	356.458.862.000	469.126.565.000	645.831.700.000	326.384.354.000	379.499.169.989	419.568.048.852	9,33%
	4) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	281.677.731.184	164.180.612.936	168.929.305.495	82.587.284.810	145.781.672.726	115.025.495.624	-6,90%
	5) Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	409.930.526	461.825.085	75.344.115				-35,51%
	6) Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	3.116.978.259	2.870.386.708	3.725.218.000				10,93%

Sumber : LPJP Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 3.1 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2018 meningkat sebesar 10,10 persen, dengan peningkatan pertumbuhan rata-rata tertinggi dikontribusi oleh pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 18,36 persen. Rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,18 persen, dan rata-rata pertumbuhan terendah berasal dari kontribusi dana perimbangan yang meningkat hanya 4,19 persen.

Pada komponen pendapatan asli daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, yaitu sebesar 37,98 persen, dan terkecil berasal dari hasil retribusi daerah dengan penurunan rata-rata sebesar 1,74 persen. Pada komponen dana perimbangan, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari dana alokasi khusus yaitu sebesar 34,4 persen. Adapun pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar dalam kurun waktu lima tahun dikontribusi oleh pendapatan hibah.

Pada Gambar 3.1 disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2014-2018.



Sumber : LPJP Tahun 2014-2018 (diolah)

Gambar 3.1
Rata-rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.1 dapat diketahui bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 42,12 persen, selanjutnya Pendapatan Pajak Asli Daerah sebesar 37,41 persen serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 20,47 persen dari seluruh total pendapatan. Perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, secara linier terus meningkat dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah, terutama dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan perincian sebagai berikut :

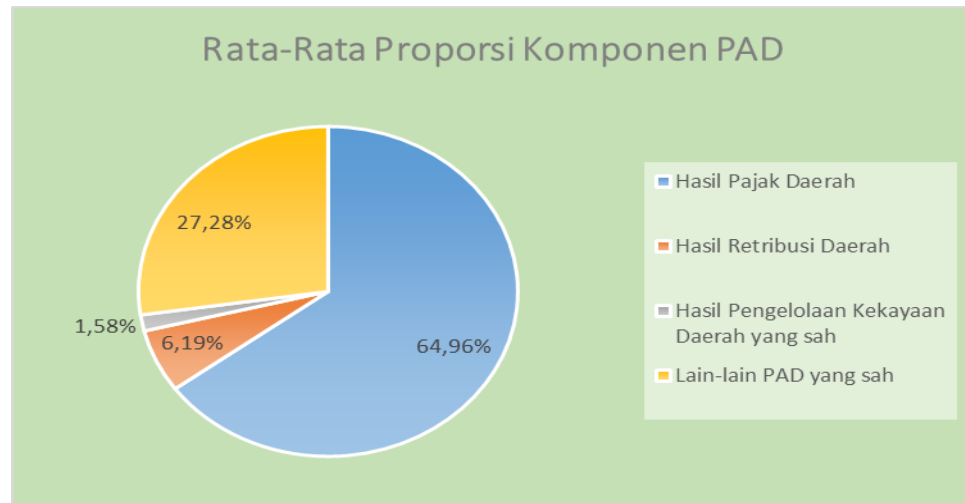
1. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: **(a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.** Realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan disebabkan hal sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi penagihan dan peningkatan frekuensi pemeriksaan Pajak Daerah;
- 2) Koordinasi dan sinergi dengan instansi vertikal serta OPD pengelola penerimaan pendapatan;
- 3) Sosialisasi terhadap wajib pajak antara lain melalui pelaksanaan Gebyar Pajak sebagai wujud apresiasi terhadap Wajib Pajak yang taat;
- 4) Peningkatan penyediaan sarana pendukung guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- 5) Peningkatan kemudahan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak melalui penyetoran lewat ATM;
- 6) Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sebagai dampak dari peningkatan nilai jual obyek pajak (NJOP) PBB dan BPHTB karena kegiatan analisa zona nilai tanah (ZNT).

Secara ringkas gambaran Rata-Rata Proporsi Komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor selama kurun waktu

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah)

Gambar 3.2
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014-2018

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 64,96 persen. Sisanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 27,28 persen, Hasil Retribusi Daerah sebesar 6,19 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,58 persen.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan baik itu intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah. Perincian realisasi dari kelompok PAD sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah bersumber dari 10 jenis Pajak Daerah, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang paling dominan, hal tersebut ditandai dengan realisasi rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yakni mencapai 64,96 persen. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu 2014-2018 sangat signifikan, semula pada tahun 2014 sebesar Rp 1.131.443.649.696,16 menjadi sebesar Rp 1.969.427.530.834,25 pada tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp 837.983.881.138,10 atau 74,06 persen, dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 17,55 persen.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai 6,70 persen. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya pengembangan penerimaan pendapatan daerah dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor (Retribusi Daerah) selama kurun waktu tahun 2014-2018 pun terdapat perkembangan yang positif, baik itu dari jenis retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha maupun dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Pada kurun waktu tahun 2014-2018 terdapat 16 (enam belas) jenis dari 3 (tiga) kategori retribusi yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- 1) Kategori Jasa Umum, terdiri dari 7 (tujuh) jenis retribusi, yaitu:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- f) Retribusi Penyedotan Kakus;
- g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Kategori Jasa Usaha, terdiri dari 5 (lima) jenis retribusi, yaitu:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Terminal Penumpang;
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 3) Kategori Perizinan Tertentu, terdiri dari 4 (empat) jenis retribusi, yaitu:
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Gangguan;
 - c) Retribusi Izin Trayek;
 - d) Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

Dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 secara keseluruhan Retribusi Daerah untuk Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi, semula pada tahun 2014 Rp 199.527.357.902,00 mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 133.014.942.310,88 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 136.756.227.055,00 sebesar Rp 150.541.572.101,00 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 112.776.035.992.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari deviden yang diperoleh dari hasil usaha daerah atas penyertaan modal terhadap perusahaan daerah (PDAM, PD. Pasar Tohaga, PT. Prayoga Pertambangan dan Energi, PT. Sayaga Wisata) maupun lembaga keuangan (Bank Jabar dan PD. BPR/PD. PK). BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur

melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya melalui pembinaan BUMD, yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Untuk memperbaiki kinerja usaha BUMD, Pemerintah Daerah mengambil strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pengusahaan Perusahaan, yang dapat dilakukan dengan langkah atau tindakan memperbaiki kinerja perusahaan, diantaranya dengan (a) Mengatasi kelemahan internal yang diantaranya melalui penetapan kembali *core business*, likuidasi unit bisnis yang selalu rugi, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi; (b) Memaksimalkan kekuatan internal, yang antara lain dengan cara mengkonsentrasikan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi, memperluas pasar dengan mempertahankan dan mencari pelanggan baru, serta mencari teknik produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha; (c) Mengatasi ancaman eksternal, yang diantaranya dengan cara memperbaiki mutu produk dan jasa, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kreativitas dan keaktifan tenaga pemasaran dalam mencari terobosan baru; dan (d) Memaksimalkan peluang eksternal, yang antara lain melalui upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang dalam keterkaitan. Dan kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk *joint venture*, BOT, BOO atau bentuk kerjasama lainnya.
2. Strategi Penumbuhan Perusahaan, adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. BUMD dikatakan tumbuh jika perusahaan daerah itu berhasil meningkatkan antara lain, volume penjualan, pangsa pasar, besarnya laba

dan aset perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar perusahaan terus tumbuh berkembang diantaranya adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representatif, melakukan perluasan pasar, pengembangan produk baru, dan integrasi horizontal dan/atau vertikal.

3. Strategi Penyehatan Perusahaan, yaitu yang dilakukan melalui pendekatan strategik dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategik, misalnya, jika terjadi kesalahan strategis seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan misinya, maka perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap bisnis yang dilakukan untuk perubahan dan penyempurnaannya. Sedangkan dengan pendekatan operasional ditujukan untuk melakukan perubahan operasi perusahaan tanpa merubah strategi bisnis. Dalam hubungan ini langkah-langkah yang biasa diambil oleh perusahaan dalam rangka penyehatan operasi diantaranya adalah: (a) Meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai teknik bisnis, misalnya pemotongan harga, peningkatan promosi, penambahan dan perbaikan pelayanan konsumen, memperbaiki saluran distribusi dan memperbaiki kualitas produk, dan (b) Melaksanakan pemotongan biaya (penghematan). Biaya-biaya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan operasional pokok perusahaan yang segera membentuk penghasilan, biasanya menjadi pilihan pertama untuk diturunkan, seperti misalnya biaya-biaya administrasi, penelitian dan pengembangan, dan pemasaran.

Berdasarkan tabel, selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 realisasi Rata-rata kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 1,53 persen. Peningkatan penerimaan Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan dalam kurun waktu 2014-2018 terus meningkat, semula pada tahun 2014 sebesar Rp 15.109.074.955,00 meningkat menjadi sebesar Rp 44.287.173.198,00 pada tahun 2018. Jika dilihat secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 2014-2018 yaitu sebesar 37,98 persen.

Sumber penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah berasal dari Perusahaan Daerah (PDAM) dan Lembaga Keuangan Daerah (Bank Jabar, PD, BPR dan PD/PK).

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Komponen penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah merupakan jenis penerimaan selain dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang terdiri dari 12 (dua belas) jenis penerimaan, yaitu : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Pendapatan Bunga Deposito; (4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; (5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah; (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah dan (8) Pendapatan dari pengembalian (9) Pendapatan BLUD, (10) Pendapatan Kontribusi (KSO) (11) Pendapatan FKTP JKN, dan (12) Pendapatan Lain-lain/ Penerimaan Lainnya.

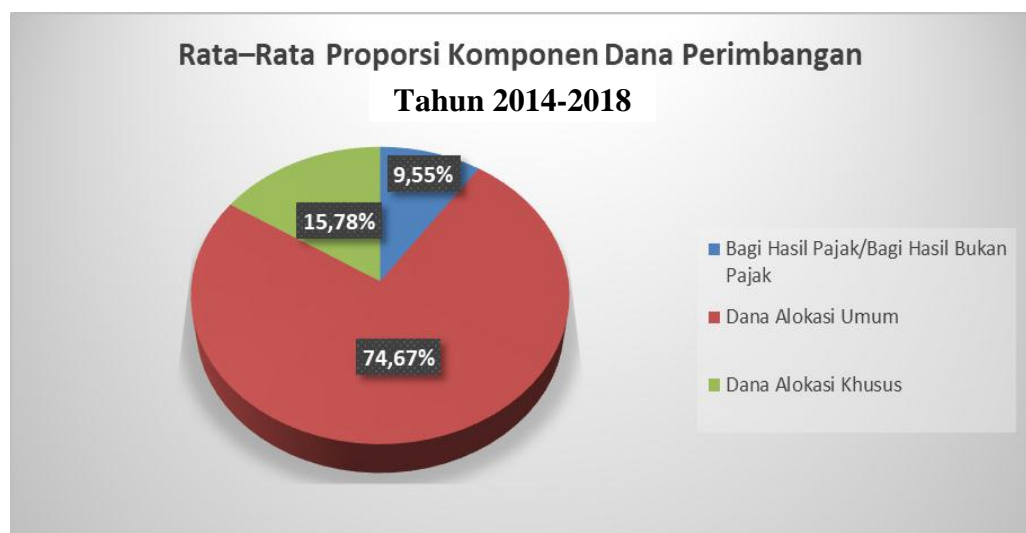
Selama kurun waktu 2014-2018, Komponen Lain-Lain PAD yang sah ini memberikan realisasi rata-rata kontribusi terbesar kedua terhadap Pendapatan Asli Daerah sekitar 27,28 persen. Setiap tahunnya dengan besaran nilainya terus meningkat secara signifikan, semula pada tahun 2014 sebesar Rp 366.857.293.583,00 meningkat menjadi Rp 668.232.999.827,93 pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,37 persen.

2. Dana Perimbangan

Penerimaan dari sektor Dana perimbangan, hampir di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia merupakan sektor

penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten/kota, begitu juga di Kabupaten Bogor, kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penerimaan dari Dana Perimbangan merupakan penerimaan terbesar dalam total pendapatan daerah, rata-rata hampir mencapai 43,16 persen. Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Agar dana perimbangan bisa mencapai target yang ditetapkan, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat serta Instansi vertikal yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Penyediaan data dasar perhitungan dana perimbangan.

Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2014-2018 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 15,78 persen dan Dana Alokasi Umum sebesar 74,67 persen, sedangkan sisanya sebesar 9,55 persen merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.



Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah)

Gambar 3.3
Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2014-2018

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan komponen ketiga dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Bogor, dalam pendapatan daerah Kabupaten Bogor

kurun waktu tahun 2014-2018 kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah rata-ratanya adalah sebesar 20,47 persen.

Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau.

Penyumbang terbesar dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 47,79 persen, sisanya sebesar 34,57 persen berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 10,44 persen, Pendapatan Hibah sebesar 7,09 persen, Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebesar 0,10 persen, serta Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 0,01 persen.



Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah)

Gambar 3.4
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014-2018

B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan anggaran belanja secara umum diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung, yang ditujukan untuk memenuhi : (1) belanja pegawai; (2) belanja bunga; (3) belanja subsidi; (4) belanja hibah; (5) belanja bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa; (7) belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, serta; (8) belanja tidak terduga yang jenis belanjanya meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan serta ditujukan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah;
2. Belanja langsung ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa

publik, fisik maupun non-fisik yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal,

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Besarnya realisasi belanja tiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 sebesar Rp 4.609.649.390.119,96 kemudian menjadi Rp 7.304.883.076.126 pada tahun 2018 atau naik sebesar 58,47 persen.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah dari tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2

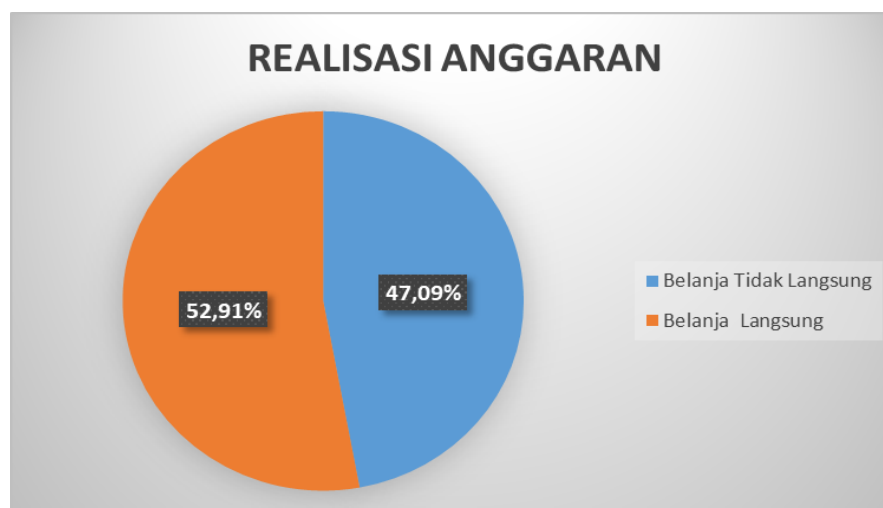
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN BELANJA DAERAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (un audited)	Rata-rata Pertumbuhan
	BELANJA DAERAH	4.609.649.390.119	4.899.883.275.105	5.638.198.865.486	6.465.300.553.876	6.875.742.319.986	7.304.883.076.126	9,72%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.073.707.659.388	2.236.881.395.671	2.556.263.551.684	3.083.375.228.502	3.135.997.525.254	3.672.519.416.778	12,32%
1	Belanja Pegawai	1.543.098.411.184	1.792.660.858.984	1.874.387.373.342	2.045.082.450.917	1.895.900.242.332	2.219.154.498.361	7,92%
2	Belanja Hibah	186.754.695.800	90.667.749.388	64.372.714.150	108.858.733.000	221.563.642.076	518.180.271.989	45,21%
3	Belanja Bantuan Sosial	9.981.000.000	11.942.385.000	3.570.135.000	43.245.630.000	34.614.400.000	22.264.100.000	201,04%
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	78.923.678.703	95.088.516.722	86.715.113.223	109.557.277.652	135.194.512.293	158.976.844.270	15,80%
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa Dan Lainnya	251.549.301.484	234.081.035.020	514.490.606.673	763.780.203.283	834.111.180.226	738.976.413.927	31,82%
6	Belanja Tidak Terduga	3.400.572.217	12.440.850.557	12.727.609.296	12.850.933.650	14.613.548.327	14.967.288.231	57,05%
II	BELANJA LANGSUNG	2.535.941.730.731	2.663.001.879.434	3.081.935.313.802	3.381.925.325.374	3.739.744.794.732	3.632.363.659.348	7,64%
1	Belanja Pegawai	264.251.887.300	340.586.340.900	392.323.950.778	485.321.060.230	536.961.880.170	371.467.760.613	9,52%
2	Belanja Barang dan Jasa	952.415.585.566	1.090.165.857.161	1.229.964.063.386	1.354.774.042.566	1.677.630.861.939	1.946.974.872.017	15,46%
3	Belanja Modal	1.319.274.257.865	1.232.249.681.373	1.459.647.299.638	1.541.830.222.578	1.525.152.052.623	1.313.921.026.718	0,51%

Sumber : LPJP Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode Tahun 2013-2018 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,72 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,32 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja sosial, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 201,04 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2015 – 2016, yaitu dari Rp 3.570.135.000 menjadi Rp 43.245.630.000 dikarenakan adanya program pembangunan daerah untuk menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat korban bencana dengan cara diberikan lahan dan tempat tinggal baru yang jauh dari tempat/daerah yang rawan bencana melalui pemberian bantuan sosial. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh bahwa terjadi kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 7,64 persen. Komponen Belanja Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja barang dan jasa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,46 persen.

Sedangkan Proporsi Rata-Rata Realisasi Anggaran Belanja Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 adalah belanja tidak langsung yaitu sebesar 47,09 persen dan untuk belanja langsung sebesar 52,91 persen.



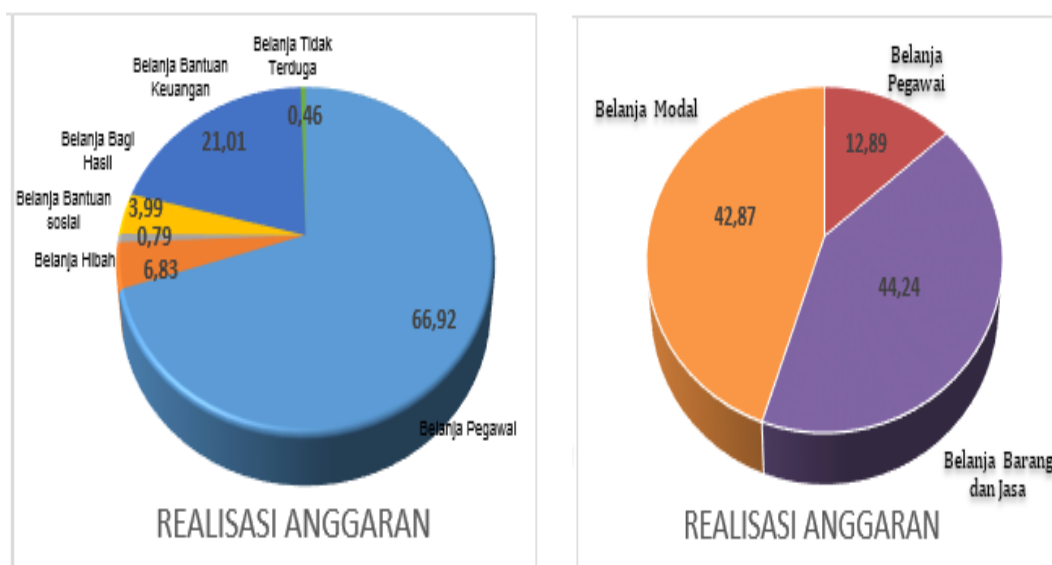
Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah)

Gambar 3.5
Rata-Rata Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2013-2018

Rata-rata proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2013-2018 yang memberi kontribusi terbesar adalah untuk

Belanja Pegawai sebesar 66,92 persen, diurutan kedua ialah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa Dan Lainnya dengan kontribusi sebesar 21,01 persen, sedangkan kontribusi terendah adalah realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,46 persen.

Rata-rata proporsi realisasi Belanja Langsung tahun 2013-2018 yang memberi kontribusi terbesar adalah untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 44,24 persen, diurutan kedua adalah Belanja Modal dengan kontribusi sebesar 42,87 persen, sedangkan kontribusi terendah untuk realisasi Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai sebesar 12,89 persen.



Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah)

Gambar 3.6
Rata-Rata Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2013-2018

C. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Struktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman; (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan (7) Penerimaan Pihak Ketiga. Adapun komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari: (1) Pembentukan Dana Cadangan;

(2) Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; (3) Pembayaran Pokok Utang; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; (5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan; dan (6) Pengeluaran Pihak Ke-3, dimana jumlah defisit anggaran pada setiap tahunnya tidak boleh lebih besar dari 3 persen PDRB dan dapat tertutupi oleh pembiayaan netto setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar dalam penerimaan pembiayaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dalam kurun waktu 2013-2018.

Berikut adalah gambaran realisasi dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun 2013-2018 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



Tabel 3.3

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN DAERAH	694.793.492.035	623.582.956.713	955.749.821.407	1.184.835.661.274	582.114.027.451	850.938.396.380	15,78%
a	Penerimaan Daerah	751.793.492.035	673.082.956.713	1.101.793.821.407	1.349.935.661.274	692.814.027.451	923.862.211.780	15,41%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	700.208.345.854	652.855.128.532	1.101.793.821.407	1.349.935.661.274	692.814.027.451	685.197.397.351	6,95%
2	Pencairan Dana Cadangan	30.943.533.272	-	-	-	-	218.000.000.000	
3	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	20.664.814.429	
4	Penerimaan Hasil Investasi Daerah	20.641.612.909	20.227.828.181	-	-	-	-	
b	Pengeluaran Daerah	57.000.000.000	49.500.000.000	146.044.000.000	165.100.000.000	110.700.000.000	72.923.815.400	25,57%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	100.000.000.000	75.000.000.000	43.000.000.000	-	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	57.000.000.000	49.500.000.000	46.044.000.000	90.100.000.000	67.700.000.000	72.923.815.400	11,68%

Sumber : LPJP Tahun 2013-2018

Pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan target pendapatan daerah. Dalam realisasinya, terjadi surplus anggaran, terlihat dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA) yang antara lain disebabkan oleh : (1) pendapatan daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; (2) efisiensi terhadap belanja daerah, khususnya pada belanja operasional, pemeliharaan dan belanja modal; (3) terdapat beberapa kegiatan khususnya yang dilaksanakan dengan pihak ketiga yang diluncurkan ke tahun berikutnya maupun yang tidak dapat dilaksanakan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bogor serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.4
Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Uraian	Jumlah (Rp)						Rata-rata pertumbuhan (persen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1. ASET	15.017.930.236.200,80	18.168.758.328.991,10	17.631.672.611.397,60	18.687.360.178.967,60	21.285.843.792.604,70	23.413.085.671.371,10	11,18
1.1. ASET LANCAR	829.903.621.181,80	1.805.841.455.446,01	2.307.694.576.837,90	1.815.233.706.679,29	1.813.078.646.277,02	2.122.125.036.105,18	29,53
1.1.1. Kas dan Setara Kas	653.067.357.704,09	1.101.953.332.122,16	1.354.483.612.182,33	701.050.544.113,33	685.672.898.828,06	846.377.945.315,97	5,92
<i>Kas Di Kas Daerah</i>	<i>639.294.800.936,09</i>	<i>1.021.590.471.149,16</i>	<i>1.253.345.611.080,33</i>	<i>610.071.954.838,33</i>	<i>618.438.118.704,79</i>	<i>794.568.343.162,97</i>	<i>4,86</i>
<i>Kas Di Bendahara Penerimaan</i>	<i>12.229.172,00</i>	<i>159.510.715,00</i>	<i>128.978.359,00</i>	<i>199.812.232,00</i>	<i>53.397.500,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kas Di Bendahara Pengeluaran</i>	<i>790.737.274,00</i>	<i>179.889.787,00</i>	<i>50.591.939,00</i>	<i>1.409.028,00</i>	<i>966.713.720,00</i>	<i>419.946.679,00</i>	<i>-9,38</i>
<i>Kas di Bendahara BLUD</i>	<i>12.769.590.322,00</i>	<i>36.459.157.144,00</i>	<i>30.920.346.602,00</i>	<i>14.281.407.090,00</i>	<i>27.835.391.120,27</i>	<i>31.074.270.207,00</i>	<i>28,67</i>
<i>Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran</i>	-	-	<i>0,00</i>	<i>148.894.191,00</i>	<i>1.539.896,00</i>	<i>500.716,00</i>	
<i>Kas Lainnya Di Bendahara BLUD</i>	-	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419.456.872,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kas Lainnya Di Bendahara FKTP</i>	-	-	<i>0,00</i>	<i>7.300.397,00</i>	<i>616.478,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kas Di FKTP JKN</i>	-	<i>43.564.303.327,00</i>	<i>66.084.230.182,00</i>	<i>68.461.022.188,00</i>	<i>32.083.093.345,00</i>	<i>17.495.664.789,00</i>	
<i>Kas Di BOS</i>	-	-	<i>3.953.854.020,00</i>	<i>7.878.744.149,00</i>	<i>5.874.571.192,00</i>	<i>2.805.918.297,00</i>	
1.1.3. Piutang Pendapatan	136.473.211.012,06	1.339.704.698.098,43	1.596.447.234.021,51	1.716.440.605.307,95	1.678.326.770.506,60	1.795.725.994.038,19	243,16
<i>Piutang Pajak</i>	<i>135.665.684.772,06</i>	<i>961.471.583.354,52</i>	<i>1.157.677.199.127,87</i>	<i>1.233.366.743.517,07</i>	<i>1.298.963.322.642,66</i>	<i>1.334.701.639.402,45</i>	<i>176,78</i>
<i>Piutang Retribusi</i>	<i>807.526.240,00</i>	<i>4.280.612.219,48</i>	<i>6.785.749.870,48</i>	<i>9.709.611.758,48</i>	<i>11.026.763.314,80</i>	<i>10.389.929.721,80</i>	<i>237,33</i>
<i>Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>		-	-	<i>343.402.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.865.370,00</i>	
<i>Piutang Denda Pajak</i>		<i>373.952.502.524,43</i>	<i>431.984.285.023,16</i>	<i>428.643.190.537,40</i>	<i>338.923.793.246,14</i>	<i>101.531.950.255,00</i>	
<i>Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</i>			<i>0,00</i>	<i>44.377.656.560,00</i>	<i>29.412.891.303,00</i>	<i>66.649.643.732,00</i>	
1.1.4. Piutang Lainnya	29.319.596.101,48	32.878.372.509,88	63.865.454.916,60	53.684.373.440,70	94.569.322.810,78	103.794.688.650,60	50,80



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Uraian	Jumlah (Rp)						Rata-rata pertumbuhan (persen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</i>	1.436.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	(5,57)
<i>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian</i>	1.337.736.644,00	1.236.950.500,00	1.150.959.098,00	1.246.565.798,00	1.289.875.798,00	1.264.369.118,00	(1,10)
<i>Piutang lainnya</i>	27.980.423.457,48		62.713.459.818,60	52.436.771.642,70	93.278.411.012,78	102.529.283.532,60	53,29
1.1.5. Penyisihan Piutang	(37.083.737.210,83)	(746.107.461.141,93)	(795.085.240.948,34)	(749.877.333.280,50)	(778.572.934.098,66)	(788.317.838.907,17)	405,06
1.1.6. Beban Dibayar Dimuka	-	-	72.375.000,01	19.691.667,00	16.666.666,67	20.000.000,00	
1.1.7. Persediaan	48.127.193.575,00	76.174.527.357,47	87.911.141.665,79	93.915.825.430,81	133.065.921.563,57	127.529.050.817,59	20,52
1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG	637.318.867.822,36	695.893.372.697,50	717.254.430.350,81	813.754.264.103,36	869.356.445.654,61	970.345.037.259,50	10,45
1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.254.220.480,17	4.433.739.576,58	4.433.739.576,58	4.519.794.443,18	746.691.866,80	746.691.866,80	(16,49)
1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen	633.064.647.342,19	691.459.633.120,92	712.820.690.774,23	809.234.469.660,18	868.609.753.787,81	969.598.345.392,70	10,63
1.3. ASET TETAP	13.424.265.723.334,50	15.404.006.919.773,80	14.225.467.794.649,40	15.603.984.069.228,50	18.010.518.795.030,10	19.614.838.490.172,50	9,22
1.3.1. Tanah	6.548.241.647.525,00	7.302.681.059.352,00	8.027.180.677.434,57	8.440.210.220.153,32	10.279.958.207.749,50	11.713.554.119.346,40	15,73
1.3.2. Peralatan dan Mesin	1.098.539.697.088,40	1.355.134.891.523,40	1.665.770.333.029,40	1.897.367.672.251,34	2.049.015.417.260,72	2.207.651.272.276,53	20,50
1.3.3. Gedung dan Bangunan	2.057.807.973.978,07	2.549.907.317.046,32	3.419.055.691.390,82	4.136.624.123.652,82	4.466.782.577.235,45	4.922.287.759.972,94	27,84
1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.858.743.358.363,00	3.240.302.148.821,00	3.628.702.080.829,00	4.152.482.843.032,00	4.739.748.988.455,31	5.678.032.034.564,30	19,72
1.3.5. Aset Tetap Lainnya	337.954.153.404,06	473.541.234.377,06	616.485.700.969,06	633.429.270.826,56	711.596.617.748,04	325.553.314.617,49	(0,73)
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	522.978.892.975,93	482.440.268.654,00	243.005.427.823,00	282.203.013.466,17	220.079.905.731,41	117.119.950.165,44	(15,52)
1.3.7. Akumulasi Penyusutan	-	-	(3.374.732.116.826,46)	(3.938.333.074.153,69)	(4.456.662.919.150,35)	(5.352.519.685.729,66)	19,54
<i>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	-	-	(1.121.537.410.174,54)	(1.354.703.610.443,58)	(1.537.170.367.102,16)	(1.617.222.640.614,18)	14,73



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Uraian	Jumlah (Rp)						Rata-rata pertumbuhan (persen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	(695.853.546.781,75)	(792.891.774.849,43)	(868.648.730.879,97)	(984.831.137.726,25)	13,84
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	(1.557.341.159.870,17)	(1.790.737.688.860,68)	(2.050.843.821.168,22)	(2.750.465.907.389,23)	25,54
1.4. DANA CADANGAN			100.000.000.000,00	175.000.000.000,00	218.000.000.000,00	0,00	
1.4.1. Dana Cadangan	-	-	100.000.000.000,00	175.000.000.000,00	218.000.000.000,00	0,00	
1.5. ASET LAINNYA	126.442.023.862,16	263.016.581.073,76	281.255.809.559,51	279.388.138.956,42	374.889.905.643,03	772.623.412.171,67	102,21
1.5.3. Barang Inventaris Rusak Berat	72.446.844.184,00	71.715.881.158,00	61.585.184.542,00	54.223.650.010,00	60.682.626.207,00	285.917.374.369,01	58,93
1.5.4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	19.961.000.000,00	19.961.000.000,00	19.961.000.000,00	19.961.000.000,00	19.961.000.000,00	19.961.000.000,00	0,00
1.5.5. Aset Tidak Berwujud	3.172.239.822,00	5.911.367.172,00	9.699.877.172,00	13.869.976.566,00	14.945.416.587,19	23.894.259.347,19	130,65
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya			(4.379.144.633,00)	(6.938.148.946,40)	(8.874.931.663,47)	(13.075.779.369,32)	66,20
1.5.6. Aset Lain-lain	30.861.939.856,16	165.428.332.743,76	194.388.892.478,51	198.271.661.326,82	288.175.794.512,31	455.926.557.824,79	275,46
JUMLAH ASET	15.017.930.236.200,80	18.168.758.501.923,38	17.631.672.611.397,60	18.687.360.178.967,60	21.285.843.792.604,70	23.413.085.671.371,10	175,35
2. KEWAJIBAN	23.304.603.225,56	5.975.932.842,97	35.655.515.955,85	81.436.080.253,64	88.823.908.856,70	216.904.996.562,49	166,15
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.301.228.225,56	5.975.932.842,97	35.655.515.955,85	81.436.080.253,64	88.823.908.856,70	216.904.996.562,49	166,17
2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	2.515.380,00	2.089.000,00	7.300.397,00	420.073.350,00	0,00	
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	9.126.721.580,65	10.108.522.767,96	11.999.580.965,50	12.270.636.013,88	11,48
2.1.5. Utang Belanja	-	-	20.317.730.702,00	38.373.414.221,68	75.610.948.965,20	203.575.263.738,61	300,65
2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya	23.301.228.225,56	5.973.417.462,97	6.208.974.673,20	32.946.842.867,00	793.305.576,00	1.059.096.810,00	(19,09)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Uraian	Jumlah (Rp)						Rata-rata pertumbuhan (persen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.375.000,00						
2.2.1 Kewajiban Jangka Panjang							
2.2.2 Utang Jangka Panjang lainnya	3.375.000,00	-	0,00	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	23.304.603.225,56	5.975.932.842,97	35.655.515.955,85	81.436.080.253,64	88.823.908.856,70	216.904.996.562,49	166,15
3. EKUITAS	14.994.625.632.975,30	18.162.782.396.148,10	17.596.017.095.441,80	18.605.924.098.714,00	21.197.019.883.748,00	23.196.180.674.808,60	10,94
3.1. EKUITAS	14.994.625.632.975,30	18.162.782.396.148,10	17.596.017.095.441,80	18.605.924.098.714,00	21.197.019.883.748,00	23.196.180.674.808,60	10,94
3.1.1. Ekuitas		-	17.596.017.095.441,80	18.605.924.098.714,00	20.108.146.431.390,40	22.616.112.360.537,60	9,51
3.1.2. Surplus/Defisit - LO		-	0,00	0,00	1.088.873.452.357,63	580.068.314.270,98	
3.1.4. Ekuitas Dana Lancar	806.602.392.956,25	1.799.865.522.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)
3.1.5. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	14.188.023.240.019,00	16.362.916.873.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)
JUMLAH EKUITAS DANA	14.994.625.632.975,30	18.162.782.396.148,10	17.596.017.095.441,80	18.605.924.098.714,00	21.197.019.883.748,00	23.196.180.674.808,60	10,94
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	15.017.930.236.200,80	18.168.758.328.991,10	17.631.672.611.397,60	18.687.360.178.967,60	21.285.843.792.604,70	23.413.085.671.371,10	11,18

Sumber : LPJP Tahun 2013-2018

Aset Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode Tahun 2013-2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,18 persen, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata naik sebesar 10,45 persen, aset tetap peningkatan dengan rata-rata turun sebesar 9,22 persen. Sedangkan aset lancar terjadi penurunan sebesar 29,53 persen.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata 166,15 persen, kewajiban jangka pendek meningkat dengan rata-rata sebesar 166,17 persen serta pada Tahun 2017 tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Sedangkan perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bogor selama Tahun 2013-2018 tumbuh rata-rata sebesar 10,94 persen.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
 - d. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - e. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
 - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan

ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
 - b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM, Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting*

melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10 persen, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;

9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bogor, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 42,7 persen, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan SiLPA digunakan untuk membiayai program/kegiatan strategis.
2. Merintis penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD.
2. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Kebijakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bogor;

2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan anggaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Bogor.



Tabel 3.5

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi			2017			2018			Rata-rata pertumbuhan (persen)	Rata-rata Penyerapan (persen)
		2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	persen	Anggaran	Realisasi	persen		
A	Belanja Tidak Langsung	2.236.881.395.671	2.556.263.551.684	3.083.375.228.502	3.063.149.585.000	3.135.997.525.254	102,38	2.915.082.268.000	3.672.650.462.819	125,99	23,61	114,18
1	Belanja Pegawai	1.792.660.858.984	1.874.387.373.342	2.045.082.450.917	1.856.097.493.000	1.895.900.242.332	102,14	1.896.631.681.000	2.219.154.498.361	117,01	14,86	109,57
2	Belanja Hibah	90.667.749.388	64.372.714.150	108.858.733.000	191.328.384.000	221.563.642.076	115,80	93.877.200.000	518.180.271.989	551,98	436,17	333,89
3	Belanja Bantuan Sosial	11.942.385.000	3.570.135.000	43.245.630.000	40.000.000.000	34.614.400.000	86,54	47.589.635.000	22.264.100.000	46,78	-39,75	66,66
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	95.088.516.722	86.715.113.223	109.557.277.652	109.600.156.000	135.194.512.293	123,35	109.600.156.000	158.976.844.270	145,05	21,70	134,20
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	234.081.035.020	514.490.606.673	763.780.203.283	856.123.552.000	834.111.180.226	97,43	757.383.596.000	738.976.413.927	97,57	0,14	97,50
6	Belanja Tidak Terduga	12.440.850.557	12.727.609.296	12.850.933.650	10.000.000.000	14.613.548.327	146,14	10.000.000.000	15.098.334.272	150,98	4,85	148,56
B	Belanja Langsung	2.663.001.879.434	3.081.935.313.802	3.381.925.325.374	3.500.070.624.000	3.739.744.794.732	106,85	3.598.946.462.000	3.632.313.609.861	100,93	-5,92	103,89
1	Belanja Pegawai	340.586.340.900	392.323.950.778	485.321.060.230	447.589.536.000	536.961.880.170	119,97	494.044.855.000	371.475.516.071	75,19	-44,78	97,58
2	Belanja Barang dan Jasa	1.090.165.857.161	1.229.964.063.386	1.354.774.042.566	1.462.244.561.000	1.677.630.861.939	114,73	1.512.446.487.000	1.947.002.681.700	128,73	14,00	121,73
3	Belanja Modal	1.232.249.681.373	1.459.647.299.638	1.541.830.222.578	1.590.236.527.000	1.525.152.052.623	95,91	1.592.455.120.000	1.313.835.412.090	82,50	-13,40	89,21
	Jumlah Belanja	4.899.883.275.105	5.638.198.865.486	6.465.300.553.876	6.563.220.209.000	6.875.742.319.986	104,76	6.514.028.730.000	7.304.964.072.680	112,14	7,38	108,45

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor

Berdasarkan Tabel 3.5 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2017-2018 sebesar 7,38 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 23,61 persen dan Belanja Langsung sebesar -5,92 persen. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2017-2018 rata-rata sebesar 108,45 persen, dengan rata-rata penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 114,18 persen dan Belanja Langsung sebesar 103,89 persen.

B. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bogor ditampilkan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

**Tabel 3.6****Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018**

No	Uraian	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	1.787.417.558.629	1.455.076.596.390	1.608.216.490.557	1.499.964.775.522	1.835.370.011.731
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.106.081.266.820	1.189.670.573.716	1.252.233.195.649	1.145.746.096.063	1.123.484.890.902
2	Belanja Tambahan Penghasilan	627.350.245.788	201.432.601.735	280.857.921.500	265.359.817.500	606.913.439.920
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.022.643.100	6.849.368.000	7.271.855.000	12.634.889.000	20.577.984.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	47.963.402.921	57.124.052.939	67.853.518.408	76.223.972.959	84.393.696.909
B	Belanja Langsung	1.526.986.046.579	1.842.806.228.835	2.082.393.770.071	2.072.375.000.328	1.690.967.115.604
1	Belanja Honorarium PNS	168.326.230.000	200.538.522.155	250.689.416.400	228.182.049.895	13.269.275.000
2	Belanja Uang Lembur	35.300.000	270.000.000	849.100.000	536.820.000	293.370.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.139.110.000	1.175.040.680	1.828.490.850	1.698.801.400	651.282.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12.837.699.275	12.642.849.384	24.636.411.547	22.222.641.428	15.781.333.088
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1.542.101.331	64.196.108.865	92.551.475.326	114.199.243.683	137.770.977.960
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	37.906.193.279	44.807.274.155	57.980.578.580	55.769.410.064	62.705.631.485
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.172.097.500	463.680.500	2.226.692.000	4.410.981.053	1.664.931.000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.431.320.740	3.826.481.880	5.592.828.800	6.085.094.370	4.797.381.800
9	Belanja perjalanan dinas	65.050.410.581	55.238.971.578	104.208.553.990	114.055.610.812	140.197.521.181

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

No	Uraian	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0	0	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	1.232.249.681.373	1.459.647.299.638	1.541.830.222.578	1.525.152.052.623	1.313.835.412.090
	Jumlah Belanja	3.314.403.605.208	3.297.882.825.225	3.690.610.260.628	3.572.339.775.850	3.526.337.127.335

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		a	b	a/b x 100 persen
1	2014	3.301.565.905.933	4.949.383.275.105	66,71
2	2015	3.285.239.975.841	5.784.242.865.486	56,80
3	2016	3.665.973.849.081	6.630.400.553.876	55,29
4	2017	3.550.117.134.422	6.986.442.319.986	50,81
5	2018	3.510.555.794.247	7.377.887.888.080	47,58

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, tahun 2014 persentasenya sebesar 66,71 persen dan tahun 2018 sebesar 47,58 persen. Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran



tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2014 sampai 2018.



Tabel 3.8
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

No	URAIAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018 (Un Audited)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.378.094.139.799	6.032.847.734.882	5.973.280.685.746	6.975.053.078.040	7.300.403.120.900
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	4.899.883.275.105	5.638.198.865.486	6.465.300.553.876	6.875.742.319.986	7.304.964.072.680
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49.500.000.000	146.044.000.000	165.100.000.000	110.700.000.000	72.923.815.400
A	Surplus / (Defisit) riil	428.710.864.694	248.604.869.396	(657.119.868.130)	(11.389.241.945,65)	(77.484.767.179,82)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	652.855.128.532	1.101.793.821.407	1.349.935.661.274	692.814.027.451	685.197.397.350
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	218.000.000.000
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	20.664.814.429
7	Penerimaan Hasil Investasi Daerah	20.227.828.181	-	-	3.773.102.576	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	673.082.956.713	1.101.793.821.407	1.349.935.661.274	696.587.130.027	923.862.211.779
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	1.101.793.821.407	1.350.398.690.803	692.815.793.144	685.197.888.082	846.377.444.599

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2014 sampai 2018, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2015 yaitu Rp 1.350.398.690.803 Posisi SiLPA pada Tahun 2018 sebesar Rp 846.377.444.599.

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini:



Tabel 3.9

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

No	URAIAN	2014		2015		2016		2017		2018		Rata-rata Pertumbuhan(persen)
		Rp	persen dari SiL PA	Rp	persen dari SiL PA	Rp	persen dari SiL PA	Rp	persen dari SiL PA	Rp	persen dari SiL PA	
	Jumlah SiLPA	1.101.793.821.407,16		1.350.398.690.803,33		692.815.793.144,33		685.197.888.082,06		846.377.444.599,97		
1	Pelampauan penerimaan PAD	231.909.587.136,16	21,05	216.909.687.261,53	16,06	226.352.795.801,00	32,67	759.293.940.905,35	110,81	319.125.014.152,18	37,70	9,40
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	42.823.835.940,00	3,89	4.679.772.525,00	0,35	45.283.173.861,00	6,54	158.182.147.177,00	23,09	70.746.145.862,00	8,36	(66,30)
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	63.865.271.277,00	5,80	5.846.867.146,00	0,43	24.763.682.194,00	3,57	455.661.263.688,00	66,50	4.491.726.610,00	0,53	(26,76)
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	882.596.514.895,00	80,11	1.132.321.908.513,63	83,85	536.972.545.124,00	77,51	556.640.835.014,00	81,24	590.709.687.320,00	69,79	(8,27)
	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	8.329.154.713,00	0,76	407,16	0,00	462.691.725,00	0,07	16.893.476.972,29	2,47	2.797.162.379,79	0,33	(16,60)
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	5.975.932.842,97		35.655.515.955,85		81.436.080.253,64		88.823.908.856,78		216.904.996.562,49		882,41
6	Kegiatan lanjutan											

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor



3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, baik melalui belanja langsung 72 Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan Daerah kurun waktu tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan kemungkinan masuknya dana alokasi khusus disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2019-2023

URAIAN PENDAPATAN DAERAH	APBD	PROYEKSI			
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	7.471.627.532.300	7.709.362.665.836	7.872.878.870.752	8.019.094.992.346	8.161.842.806.652
Pendapatan Asli Daerah	2.554.365.775.000	2.792.100.908.536	2.955.617.113.452	3.101.833.235.046	3.244.581.049.352
Hasil Pajak Daerah	1.745.119.000.000	1.884.728.520.000	2.007.235.873.800	2.107.597.667.490	2.212.977.550.865
Hasil Retribusi Daerah	159.919.751.000	182.018.531.718	190.856.866.432	200.237.420.992	210.241.943.410
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	50.898.770.000	48.352.291.270	48.431.083.711	48.517.755.397	48.613.094.251
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	598.428.254.000	677.001.565.548	709.093.289.509	745.480.391.167	772.748.460.827
Dana Perimbangan	3.129.808.368.000	3.129.808.368.000	3.129.808.368.000	3.129.808.368.000	3.129.808.368.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	287.329.091.000	287.329.091.000	287.329.091.000	287.329.091.000	287.329.091.000
Dana Alokasi Umum	2.034.853.421.000	2.034.853.421.000	2.034.853.421.000	2.034.853.421.000	2.034.853.421.000
Dana Alokasi Khusus	807.625.856.000	807.625.856.000	807.625.856.000	807.625.856.000	807.625.856.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.787.453.389.300	1.787.453.389.300	1.787.453.389.300	1.787.453.389.300	1.787.453.389.300
Pendapatan Hibah	443.987.880.000	443.987.880.000	443.987.880.000	443.987.880.000	443.987.880.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	700.254.624.000	700.254.624.000	700.254.624.000	700.254.624.000	700.254.624.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	513.482.852.000	513.482.852.000	513.482.852.000	513.482.852.000	513.482.852.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	129.728.033.300	129.728.033.300	129.728.033.300	129.728.033.300	129.728.033.300
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau					
BELANJA DAERAH	8.032.196.812.300	8.057.362.665.836	8.222.878.870.752	8.369.094.992.346	8.511.842.806.652
Belanja Tidak Langsung			3.793.207.308.428		



URAIAN PENDAPATAN DAERAH	APBD	PROYEKSI			
	2019	2020	2021	2022	2023
	3.602.579.757.000	3.701.299.813.100		3.887.412.491.138	3.983.972.803.417
Belanja Pegawai	2.354.611.942.000	2.413.477.240.550	2.473.814.171.564	2.535.659.525.853	2.599.051.013.999
Belanja Hibah	228.101.399.000	233.803.933.975	239.649.032.324	245.640.258.132	251.781.264.586
Belanja Bantuan Sosial	28.918.200.000	29.641.155.000	30.382.183.875	31.141.738.472	31.920.281.934
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	158.774.405.000	162.743.765.125	166.812.359.253	170.982.668.234	175.257.234.940
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa Dan Lainnya	816.228.018.000	836.633.718.450	857.549.561.411	878.988.300.447	900.963.007.958
Belanja Tidak Terduga	15.945.793.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Belanja Langsung	4.429.617.055.300	4.356.062.852.736	4.429.671.562.324	4.481.682.501.208	4.527.870.003.236
PEMBIAYAAN DAERAH	560.569.280.000	348.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan	668.409.318.000	424.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	668.409.318.000	424.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan					
Penerimaan piutang daerah					
Penerimaan Hasil Investasi Daerah					
Pengeluaran Pembiayaan	107.840.038.000	76.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	107.840.038.000	76.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000

Sumber : BPKAD dan Bappenda Kabupaten Bogor

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan dana sangat diperlukan dalam upaya memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor tahun 2019-2023 adalah :

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Penyiapan dan penyempurnaan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi ;
3. Pemutakhiran data potensi dan data piutang pajak daerah;
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah ;
5. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi ;
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada penerimaan daerah; dan

7. Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yakni terdapatnya perkembangan pendapatan daerah yang merupakan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah tahun 2018-2023, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah:

1. Pemantauan dan pemeriksaan pajak daerah secara berkala;
2. Melakukan verifikasi lapangan;
3. Melakukan analisa zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi rata-rata (NIR);
4. Melakukan pendaftaran dan pendataan calon wajib pajak;
5. Penyusunan produk hukum yang bermuara pada peningkatan pendapatan daerah;
6. Koordinasi dengan daerah lain mengenai penyusunan produk hukum;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi penegak hukum;
8. Koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah mengenai penyusunan produk hukum;
9. Identifikasi data piutang PBB P2;
10. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subyek pajak;
11. Penyempurnaan dan identifikasi peta PBB P2;
12. Penyempurnaan sistem informasi;
13. Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait;
14. Pemungutan pajak daerah;
15. Mengikutsertakan diklat fungsional teknis yang diselenggarakan pusdiklat pajak;
16. Kerjasama dengan KPP dan BPN (berkaitan dengan optimalisasi penerimaan BPHTB); Kejaksaan (berkaitan dengan piutang PBB P2); Kepolisian (berkaitan dengan pemeriksaan pajak daerah); BJB, BRI (berkaitan dengan setoran pajak daerah);
17. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kemendagri, Kemenkeu, Provinsi dan ESDM Provinsi;

18. Menjalin kerjasama dengan DPMPTSP dengan membangun SIPAREL (Sistem Integrasi Pajak Reklame Online);
19. Meningkatkan pelayanan mobil keliling;
20. Menambah sarana pada loket pelayanan;
21. Menempatkan Bank BB di 8 UPT Pajak Daerah;
22. Memberdayakan PLD dan UPT;
23. Menggiatkan pembayaran pajak secara online;
24. Mengoptimalkan layanan SMS pengaduan dan call center;
25. Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana perpajakan
26. Melakukan sosialisasi pajak daerah;
27. Meningkatkan pengelolaan website resmi Bappenda Kabupaten Bogor

Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan pada:

1. Kebijakan belanja langsung :
 - a. Mendorong pengembangan potensi ekonomi wilayah.
 - b. Menyelesaikan permasalahan sosial.
 - c. Menyiapkan pembangunan tematik integratif, yaitu :
 - Pengembangan Geopark Pongkor
 - Pengembangan Situ Front City
 - Melanjutkan Pembangunan Poros Tengah – Timur
 - Pengembangan Pusat Pengobatan Alternatif Tradisional Khususnya Pengobatan Tulang Cimande
 - Pengembangan Minapolitan
 - Mendukung pengembangan kekerabatan Kota Baru Publik Maja
 - d. Pemeliharaan optimalisasi aset-aset daerah.
 - e. Alokasi DAU Tambahan untuk pemenuhan kebutuhan sarpras lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - f. Mencapai target Pancakarsa, yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun, dan Bogor Berkeadaban melalui pelaksanaan kewenangan perangkat daerah.
 - g. Mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai *'The City of Sport and Tourism'*

- h. Mendukung penganggaran perangkat daerah dalam memfasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.
 - i. Melaksanakan kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan yang diimplementasikan dalam belanja perangkat daerah.
 - j. Mempersiapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan melakukan penataan daerah.
2. Kebijakan belanja tidak langsung :
- a. Memenuhi kebutuhan belanja pegawai, diarahkan untuk :
 - 1) menganggarkan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
 - 2) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan PPPK sesuai formasi pegawai yang ditetapkan;
 - 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - 4) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

- 5) mengganggu penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 6) mengganggu tambahan penghasilan PNSD;
 - 7) mengganggu Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8) mengganggu Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.
- b. Memenuhi kebutuhan belanja hibah, diarahkan untuk :
- 1) mendukung pembangunan pendidikan terutama pada peningkatan rata-rata lama sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP;
 - 2) pencapaian program prioritas dan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kelompok masyarakat/perorangan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Memenuhi kebutuhan belanja bantuan sosial, diarahkan untuk mendukung penanggulangan resiko sosial, baik kepada individu dan/atau keluarga, direncanakan atau tidak direncanakan, serta kelompok masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
- d. Memenuhi kebutuhan belanja bagi hasil, dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa dari dana bagi hasil yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

- dibagikan kepada seluruh desa, serta bagi hasil dari pendapatan lainnya kepada kabupaten/kota.
- e. Memenuhi kebutuhan belanja bantuan keuangan, dialokasikan untuk:
- 1) Mendanai pembangunan desa yang bersifat umum berupa ADD (Alokasi Dana Desa), yang merupakan bagian dari persentase dana perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 2) Mendanai pembangunan desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada beberapa desa yang terkait dengan kompensasi persampahan.
 - 3) Mendanai pembangunan desa dari dana desa yang bersumber dari APBN, seperti Dana Desa.
 - 4) Melaksanakan target Pancakarsa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa.
 - 5) Membantu Partai Politik dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- f. Memenuhi kebutuhan belanja tidak terduga, diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu untuk mempedomani pelaksanaan prioritas nasional dan provinsi dalam wadah kewenangan kabupaten/kota, belanja belanja langsung daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 diarahkan pada :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBD Kabupaten Bogor, termasuk belanja pegawai;
- pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- penyediaan pendidikan berkualitas dan merata;
- penyediaan afirmasi pendidikan;
- penguatan kelembagaan satuan pendidikan;
- serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui pengembangan SDM pendidikan;
- mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen di luar belanja pegawai;
- menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;
- meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis;
- meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hidup sehat di kalangan masyarakat, baik remaja, pemuda, dan lansia;
- meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam pelayanan publik;
- meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya;
- meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
- meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- meningkatkan pengelolaan pemakaman;
- meningkatkan pengelolaan dan penertiban reklame;
- meningkatkan penataan pemukiman, PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- meningkatkan pengelolaan dan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah;
- meningkatkan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;

- meningkatkan pengawasan dan penegakan PERDA;
- membina, mengembangkan SDM di lingkungan masyarakat dalam meningkatkan upaya perlindungan masyarakat;
- meningkatkan pelayanan tanggap kebakaran;
- mengembangkan SDM masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran;
- meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana;
- meningkatkan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
- meningkatkan upaya penanganan dan tindak lanjut penanganan masalah sosial dan kasus-kasus sosial;
- meningkatkan upaya pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2. Urusan wajib non pelayanan dasar

- meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- mendorong perluasan kesempatan kerja;
- memfasilitasi kegiatan transmigrasi;
- meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan dan penanganan masalah perempuan dan anak;
- menggalakkan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- mengembangkan SDM kader pangan;
- meningkatkan upaya ketersediaan pangan melalui pengendalian distribusi pangan dan penanganan kerawanan pangan ;
- mengembangkan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- perlindungan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pengelolaan persampahan;
- meningkatkan pelayanan pemenuhan administrasi kependudukan;
- meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- meningkatkan ketertiban dan keselamatan bertransportasi;

- meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi masyarakat ;
- mengembangkan penyelenggaraan teknologi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor;
- mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara koperasi dan UKM;
- meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku koperasi dan UKM;
- meningkatkan upaya promosi dan minat investasi;
- meningkatkan kualitas layanan perijinan bagi pelaku ekonomi;
- meningkatkan pembinaan SDM pemuda dan insan olahraga;
- meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana olahraga masyarakat;
- memfasilitasi pembinaan insan olahraga;
- mengembangkan budaya dan potensi pariwisata daerah;
- meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah;
- meningkatkan layanan dan pengembangan SDM melalui fasilitasi perpustakaan;

3. Urusan Pilihan

- meningkatkan produksi hasil perikanan dan peternakan;
- mendorong pengembangan ekspor produk perikanan dan peternakan;
- meningkatkan kompetensi SDM pelaku perikanan dan peternakan;
- meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- mengembangkan teknologi pertanian;
- meningkatkan kompetensi SDM pelaku pertanian, hortikultura dan perkebunan;
- meningkatkan teknologi pertanian, hortikultura dan perkebunan;
- menyiapkan sarana distribusi barang/jasa (pasar rakyat);
- meningkatkan kompetensi SDM pelaku IKM;
- meningkatkan pengendalian perdagangan, tata niaga dan pelaku PKL;
- meningkatkan upaya perlindungan konsumen;
- menyiapkan sentra-sentra usaha perdagangan/produksi;

- memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan ekspor pelaku usaha;
- 4. Urusan Penunjang
 - meningkatkan kualitas perencanaan daerah;
 - meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui perluasan jaringan penelitian ;
 - meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - meningkatkan upaya penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya dari sumber non APBD Kabupaten Bogor;
 - meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - mengembangkan SDM aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur;
- 5. Urusan Pendukung
 - meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD;
 - meningkatkan kualitas pengawasan daerah;
- 6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat;
 - meningkatkan pembinaan politik masyarakat
 - memfasilitasi pelaksanaan Pilpres dan pilkades;
 - meningkatkan pengawasan organisasi masyarakat/kemasyarakatan;
- 7. Urusan Kewilayahan
 - memfasilitasi pengembangan kinerja desa/kelurahan;
 - meningkatkan pelayanan administrasi yang mendukung perijinan;
 - meningkatkan koordinasi kewilayahan;

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan awal yang

dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.11
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor untuk Pendanaan Pembangunan Daerah pada Kurun Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	7.471.627.532.300	7.709.362.665.836	7.872.878.870.752	8.019.094.992.346	8.161.842.806.652
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	668.409.318.000	424.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000
	Total Penerimaan	8.140.036.850.300	8.133.362.665.836	8.297.878.870.752	8.444.094.992.346	8.586.842.806.652
	Dikurangi :					
4	Belanja tidak langsung	3.602.579.757.000	3.701.299.813.100	3.793.207.308.428	3.887.412.491.138	3.983.972.803.417
5	Pengeluaran Pembiayaan	107.840.038.000	76.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
6	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.429.617.055.300	4.356.062.852.736	4.429.671.562.324	4.481.682.501.208	4.527.870.003.236

Sumber : Analisis, 2019

Berdasarkan Tabel 3.13 memperlihatkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor cukup besar. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut akan direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 3.12
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No.	Jenis Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prioritas I	1.436.207.063.306	1.270.787.157.510	1.170.283.690.742	1.076.019.261.112	938.792.854.162
2	Prioritas II	2.432.840.711.994	2.737.275.695.226	2.909.387.871.582	3.055.663.240.096	3.239.077.149.074
3	Prioritas III	3.602.579.757.000	3.701.299.813.100	3.793.207.308.428	3.887.412.491.138	3.983.972.803.417
	Total	7.471.627.532.300	7.709.362.665.836	7.872.878.870.752	8.019.094.992.346	8.161.842.806.652

Sumber : Analisis, 2019

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa proporsi kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah cukup adil, rencana Prioritas I yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan kesehatan.

Program Prioritas II yang merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan pembiayaan terhadap pencapaian visi-misi Kabupaten Bogor serta hubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Sementara Prioritas III yang merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

3.4.1 Tugas Pembantuan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan khususnya mengenai hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan dilaksanakan guna menghasilkan kinerja pemerintah yang lebih efektif dan efisien melalui pemberian sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa.

Tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor periode tahun 2014-2018 dari Pemerintah Pusat, selain dalam bentuk rupiah murni juga berbentuk fisik barang yang keseluruhannya diintegrasikan ke dalam program atau kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah. Total dana Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Bogor pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2018

TAHUN	ANGGARAN YANG DITERIMA	REALISASI ANGGARAN YANG DITERIMA	TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN YANG DITERIMA
2014	Rp 20.719.281.000,-	Rp 18.164.547.057,-	87,67 persen
2015	Rp 27.017.992.000,-	Rp 26.447.316.626,-	97,89 persen

2016	Rp 20.174.271.000,-	Rp 15.027.273.711,-	74,49 persen
2017	Rp 6.000.000.000,-	Rp 5.913.830.000,-	98,56 persen
2018	-	-	-
TOTAL	Rp 73.911.544.000	Rp 65.552.967.394	88,69 persen

Sumber : LKPj AMJ Tahun 2013-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan Tugas Pembantuan pada 5 (lima) tahun terakhir adalah terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan Tahun 2017 berada pada posisi menurun. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri Bappenas, Kementerian Keuangan RI, Kemendagri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menerima Tugas Pembantuan, hal ini berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : S-1204/WPB.13/KP.04/2018.

Pelaksanaan penggunaan yang pendanaannya bersumber dari Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017, digunakan untuk pembiayaan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dalam kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang berlokasi di Kecamatan Ciseeng. Penyerapan dana tugas pembantuan yang diterima dari total anggaran sebesar Rp 6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.913.830.000,00 atau 98,56 persen dengan outputnya yaitu Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi.

3.4.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kebijakan TJSL/CSR di Kabupaten Bogor berprinsip rupiah sama dengan nol, dimana Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menerima rupiah sepeser pun dari pelaksanaan CSR di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor merekomendasikan program/kegiatan dan lokasi kepada perusahaan secara rinci sebagai pilihan target pelaksanaan CSR. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tim fasilitasi CSR di Kabupaten Bogor bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan program TJSL dari perusahaan kepada Bupati Bogor melalui Sekretariat Tim Fasilitasi (Bappedalitbang Kabupaten Bogor), maka dapat disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Rekapitulasi Penerimaan TJSL Perusahaan Kepada Pemerintah
Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2018

TJSL Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai TJSL yang dilaporkan	1.710.000.000	4.300.597.500	1.914.619.800	14.171.541.852	1.217.547.000

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel di atas nilai TJSL terbesar yang dilaporkan ke Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bogor sebesar Rp 14.171.541.852,00. Sebenarnya laporan penerimaan TJSL periode 2014-2018 lebih dari nilai yang tertera pada tabel di atas, karena perusahaan-perusahaan yang telah memberikan TJSL-nya hanya mencantumkan nama kegiatan saja tanpa mencantumkan anggaran pada kegiatan tersebut, diharapkan pada periode selanjutnya perusahaan agar juga mencantumkan nilai anggaran pada kegiatan dimaksud.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, hal mendasar yang wajib diidentifikasi, dirumuskan dan dianalisis oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah terkait apa saja dan sejauhmana permasalahan-permasalahan daerah yang belum terselesaikan hingga akhir periode perencanaan sebelumnya. Menemukan permasalahan pembangunan menjadi dasar dalam penentuan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir periode perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **permasalahan pembangunan** didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun **isu strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Permasalahan yang dirumuskan terutama mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat; 2) aspek daya saing daerah; dan 3) aspek pelayanan umum.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan aspek kesejahteraan umum, permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

1. belum optimalnya kontribusi sektor-sektor produksi daerah terhadap PDRB Kabupaten Bogor. Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2018

- sebesar 221,547 triliun sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 148,959 triliun.
2. Ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh capaian indeks gini masih berada pada katagori sedang. Pada tahun 2018 indeks gini Kabupaten Bogor berada di posisi 0,34.
 3. Masih tingginya angka kemiskinan akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses potensi perekonomian. Pada tahun 2018 persentase penduduk dibawah garis kemiskinan sebesar 7,14%. Terlebih lagi dengan angka kemiskinan daerah sekitar khususnya Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mencapai 8,64% di tahun 2018, oleh karena itu harus ada penanganan bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan antar Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
 4. Masih tingginya tingkat pengangguran akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses lapangan kerja. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,08%.
 5. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai standar global. Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Bogor sebesar 69,61. Hal ini diakibatkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dimana rata-rata lama sekolah belum mencapai standar batas tertinggi usia pendidikan dasar (12 tahun), pada tahun 2018 angka RLS mencapai 7,89, sedangkan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bogor telah diprediksi dapat melampaui jenjang pendidikan dasar, di tahun 2018 capaiannya 12,51. Di sisi lain, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga menyebabkan capaian angka harapan hidup masih perlu ditingkatkan, dimana capaian tahun 2018 sebesar 70,96.
 6. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal, dibuktikan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 78,57 di tahun 2018.
 7. Masih terdapat wilayah rawan pangan akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menyediakan potensi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan angka rawan ketersediaan pangan sebesar 37,50 di tahun 2018 serta skor pola pangan harapan sebesar 86,18.

8. Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2018 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 38,28%.
9. Ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan indeks ketimpangan wiliamson pada tahun 2018 sebesar 0,96.

4.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah masih perlu ditingkatkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu :

1. Masih kurangnya desa yang berstatus swasembada. Berdasarkan data terakhir persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa sebesar 0,96%%.
2. Masih rendahnya kontribusi nilai ekspor bersih terhadap PDRB. Tahun 2017 rasio ekspor dan impor terhadap PDB sebesar 7,48%.
3. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk di bawah dan di luar usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 50,39%.
4. Masih rendahnya tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat akibat masih rendahnya penghasilan. Hal ini ditunjukkan oleh pengeluaran per kapita per tahun sebesar 9,901 juta per tahun.
5. Pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,21 %, dan laju inflasi sebesar 2,21%.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan dan bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1.1 Pendidikan

Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pendidikan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan, terutama dalam hal :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari jumlah bangunan Sekolah SD/MI dalam

kondisi baik pada tahun 2018 yang hanya mencapai 88,95% dan untuk SMP/MTs sebesar 92,13%.

- b. Masih rendahnya cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah. Rendahnya cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah terlihat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 43,28%.
- c. Belum idealnya komposisi guru terhadap murid/ rombongan belajar. Tahun 2018 rasio guru/murid SD/MI sebesar 1:413, sedangkan rasio guru/Murid SMP/MTs sebesar 1:512.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan guru berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 82,97%.

1.2 Kesehatan

Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan kesehatan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, terutama dalam hal:

- a. Belum optimalnya penanganan terhadap kasus-kasus utama kesehatan masyarakat, seperti gizi buruk, jumlah kematian ibu, bayi dan neonatal, penyakit menular dan tidak menular. Pada tahun 2018 Persentase balita gizi buruk sebesar **0,0138%**, jumlah kematian ibu sebanyak 55 kasus, jumlah kematian bayi sebanyak **109 kasus**.
- b. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan pertama sebelum mendapatkan pelayanan dari puskesmas, Hal ini ditunjukkan cakupan pembantu puskesmas terakhir tahun 2016 sebesar **35.02%**.
- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan data terakhir rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar **1 : 3.352** dan rasio dokter per satuan penduduk sebesar **1 : 3.869**
- d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin/kurang mampu. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2018 sebesar **26,84%**.

- e. Belum optimalnya kinerja pelayanan sdm kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan sebesar **78,22%**, RSUD Cibinong sebesar **85,44%**, RSUD Ciawi sebesar **69%**, RSUD Leuwiliang sebesar **75,89%**, dan RSUD Cileungsi sebesar **80,26%**
- f. Belum seluruhnya masyarakat Kabupaten Bogor yang terlayani jaminan kesehatan. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar **64,60 %**.

1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini ditunjukkan oleh jalan kabupaten kondisi baik sebesar 86,41 %.
- b. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian. Pada tahun 2017 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 67,74 %, sedangkan rasio jaringan irigasi sebesar 0,0491 per luas lahan budidaya pertanian.
- c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa sanitasi lingkungan, air bersih, air minum, pemakaman, dan ruang publik lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 68,53%, data akses air minum sebesar 4,78 %, rawan akses air bersih sebesar 62,50%, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk sebesar 1:273.000, rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,2831, ruang publik yang berubah peruntukannya 4,50 dan persentase penduduk berakses air minum sebesar 57,3 pada data terakhir.
- d. Masih kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan RTRW. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase kesesuaian RTRW dengan pembangunan wilayah sebesar 81,40%, ini menunjukkan bahwa sisanya masih belum sesuai dengan RTRW.

1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum terselesaikan adalah :

- a. Masih luasnya kawasan permukiman yang belum tertata. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Persentase pemukiman yang tertata sebesar 24,45%, hal ini menunjukkan bahwa kawasan pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan karena permukiman yang belum tertata sangat luas.
- b. Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni berdasarkan standar. Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,47%.
- c. Masih banyaknya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan areal kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bogor sebesar 0,23 %.
- d. Masih minimnya penanganan dan pemanfaatan PSU (Prasarana dan Sarana Umum). Hal ini ditunjukkan oleh cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 62,67%.
- e. masih rendahnya persentase bangunan yang berijin. Hal ini ditunjukkan oleh rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,3640.

1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan pelayanan umum yang belum terselesaikan adalah :

- a. Belum optimalnya penanggulangan dan pencegahan bencana. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen sebesar 20,27 menit, persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 80 %, Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan 20 %, persentase pemulihan di daerah yang terkena bencana sebesar 96,70 % serta persentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran pada tahun 2017 sebesar 82%.
- b. Masih kurangnya jumlah polisi pamong praja yang mendukung trantibum dan penegakan perda. Data terakhir menunjukkan bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah 0,86.

1.6 Sosial

Permasalahan pelayanan umum di lingkup bidang urusan sosial yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya penanganan dan penyelesaian kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial. Hal ini ditunjukkan dengan persentase PMKS yang tertangani sebesar 0,47% pada tahun 2018.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan tenaga kerja yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelesaian masalah ketenakagerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,08% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,71%.
- b. belum optimalnya pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2017 menunjukkan bahwa besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi hanya sebanyak 420 tenaga kerja/pencari kerja.

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan data terakhir penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 41 kasus.

2.3 Pangan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pangan yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya upaya penurunan kerawanan pangan daerah. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa rawan ketersediaan pangan sebesar 37,50%.
- b. belum optimalnya upaya dan kebijakan pemenuhan pangan utama daerah. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan pangan utama tahun 2018 sebesar 63,00%.

2.4 Pertanahan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanahan yang belum terselesaikan terutama adalah belum tertibnya administrasi pertanahan di Kabupaten Bogor.

2.5 Lingkungan hidup

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya penanganan masalah persampahan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 65,05%.
- b. Berkurangnya daerah resapan air yang memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan lahan pada zona resapan tahun 2017 sebesar 46.114,61 ha.
- c. masih tingginya pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa air sungai dan situ atau danau sudah tercemar dengan kadar BOD, COD, dan TSS yang tinggi misalnya Sungai Cikeas, Cipaeh, Cileungsi Cijare, Ciluar, Kali Angke, Kali Baru, Cikaniki, Cipamingkis, dan Cibeet. Sedangkan Danau Yang Tercemar Adalah Danau Kemuning, Telaga Warna, Lido dan Cigudeg. Kemudian untuk kerusakan tanah terdapat di kecamatan Cigudeg, Tenjo, Nanggung, Jasinga, dan Sukajaya. Selanjutnya penurunan kualitas udara di ukur melalui nilai parameter SO₂ sebesar 900 µg/Nm³, NO₂ sebesar 400 µg/Nm³, O₃ sebesar 235 µg/Nm³, dan TSP sebesar 230 µg/Nm³. Penurunan kualitas udara secara signifikan terjadi di jalan raya alternative (perempatan Cikeas), Kecamatan Gunung Putri. Tingginya pencemaran juga ditunjukkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 55,71 pada tahun 2017.

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, sehingga masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi

kependudukan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 0,85, artinya masih ada 15 %.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Permasalahan Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum terselesaikan adalah:

- a. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 2,28 %.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan penyuluhan terhadap masyarakat. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,61 %.

2.9 Perhubungan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah belum maksimalnya cakupan pelayanan angkutan umum yang masih di bawah 80% serta belum optimalnya

penanganan kemacetan di 7 (tujuh) lokasi kemacetan di Kabupaten Bogor yaitu di Cibinong, Cileungsi, Ciawi, Parung, Leuwiliang, Citeureup, dan Laladon.

2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan komunikasi ndan informatika adalah :

- a. belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
- b. belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang mempengaruhi kualitas lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, serta masih rendahnya tingkat kelangsungan hidup koperasi dan usaha kecil menengah. Hal ini ditunjukkan dengan persentase koperasi aktif sebesar 31,61% dan jumlah UMK berprestasi sebanyak 10 UMK.

2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan penanaman modal yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya peningkatan investasi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya nilai investasi daerah dari 7,2 triliun menjadi 8,69 triliun.

2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kepemudaan dan olahraga yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya pola dan arah pembinaan kepemudaan yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat keaktifan organisasi kepemudaan. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif sebanyak 85,71 persen.
- b. masih kurangnya ketersediaan fasilitas pembinaan keolahragaan prestasi dan keolahragaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum sebesar 5 persen.

2.14 Statistik

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan statistik yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya koordinasi antar pemangku kewenangan dalam mengintegrasikan sumber data dan informasi serta belum adanya bagian di perangkat daerah yang menangani urusan statistik.

2.15 Persandian

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan persandian yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah.

2.16 Kebudayaan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kebudayaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan dan upaya pelestarian budaya daerah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 35 benda.

2.17 Perpustakaan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perpustakaan yang belum terselesaikan adalah :

- a. Program peningkatan minat baca dan minat mengunjungi perpustakaan belum terinformasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga tingkat pemanfaatan perpustakaan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun sebesar 1,29 per populasi yang harus dilayani
- b. masih kurangnya jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,04 atau 1 (satu) perpustakaan melayani 26.458 penduduk. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga hanya sebanyak 13.010 buku di seluruh perpustakaan yang ada.

2.18 Kearsipan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan kearsipan daerah, khususnya di lingkungan perangkat daerah dan desa, serta belum

dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi pengelolaan kearsipan yang integratif.

3. Urusan Pilihan

3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kelautan dan perikanan yang belum terselesaikan adalah

- a. Minimnya ketersediaan induk ikan konsumsi yang berkualitas, di Kabupaten Bogor baru tersedia sebanyak 3 jenis (Lele, Gurame dan Mas) dari yang seharusnya 6 jenis (Lele, Gurame, Mas, Nila, Patin dan Bawal) induk Ikan.
- b. Menurunnya Produksi Telur sebesar 14,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya Perusahaan Peternak Ayam Petelur yang memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain di luar Kabupaten Bogor
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur, Luas lahan tidur yang telah dimanfaatkan untuk Hijauan Ternak dan Padang penggembalaan sebesar 58,18% dari luas lahan tidur yang bisa dimanfaatkan sebesar 16.242.068 m².

3.2 Pariwisata

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pariwisata yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya promosi dan penyebarluasan informasi destinasi wisata daerah ke tingkat nasional dan internasional yang berdampak pada masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2017 sebanyak 6.944.804 orang menjadi 7.173.278 orang di tahun 2018.
- b. belum optimalnya upaya pembinaan dan kerjasama kemitraan pelaku pariwisata, sehingga pengelolaan pariwisata belum terintegrasi dengan baik. Pada tahun 2018 lama kunjungan wisata rata-rata selama 1,56 hari, artinya para wisatawan rata-rata hanya bermalam 1 hari di tempat wisata Kabupaten Bogor.

3.3 Pertanian

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanian yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum imbangnya rasio indeks harga yang diterima petani dibagi dengan indeks harga yang dibayar petani, baik untuk faktor produksi maupun konsumsi rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tukar petani pada tahun 2018 sebesar 103,18%.
- b. belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan bina kelompok petani di tahun 2018 sebesar 5,32%, artinya ada 94,68% kelompok petani yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
- c. Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hal ini ditunjukkan dengan capaian di tahun 2018 sebesar 74,30%, artinya ada 25,70% produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang gagal panen.

3.4 Kehutanan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kehutanan adalah belum terlaksananya pemenuhan kebutuhan taman hutan rakyat skala kabupaten.

3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan energi dan sumberdaya mineral adalah belum terpetakannya kewenangan pengelolaan panas bumi dan pemanfaatannya di Kabupaten Bogor akibat belum jelasnya tata aturan dan sinergi pengelolaan dengan pemerintah provinsi.

3.6 Perdagangan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perdagangan yang belum terselesaikan adalah :

- a. minimnya promosi produk perdagangan daerah sehingga perlu ditingkatkannya volume ekspor daerah, yang pada tahun 2018 mencapai USD 1.518.619.551,65.
- b. masih kurangnya cakupan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan terutama yang berkaitan dengan kelayakan produk perdagangan. Hal ini ditunjukan dengan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 57,65 persen.

3.7 Perindustrian

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perindustrian adalah belum optimalnya pengelolaan perindustrian di Kabupaten Bogor.

3.8 Transmigrasi

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan transmigrasi adalah belum optimalnya pengelolaan transmigrasi

4. Urusan Penunjang

4.1 Perencanaan

Permasalahan lingkup bidang urusan perencanaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan.

4.2 Keuangan

Permasalahan lingkup bidang urusan keuangan yang belum terselesaikan adalah kapasitas pengelola keuangan dan barang daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan lingkup kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, disebabkan oleh jumlah pensiun tiap tahun lebih banyak dari jumlah ASN yang diterima, selain itu rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi sebesar 40,50% di tahun 2018.
- b. belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Di tahun 2018 persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi sebesar 64,55 %.

4.4 Penelitian dan pengembangan

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah yang terintegrasi lintas sektoral. Hasil penelitian dan kajian di setiap perangkat daerah hanya dimanfaatkan oleh intern perangkat daerah bersangkutan saja. Selain itu juga belum optimal dan berkembangnya inovasi daerah di perangkat Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bogor.

5. Urusan Pendukung

5.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya pelaksanaan pengoordinasian antar perangkat daerah
- b. belum optimalnya pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah daerah.
- c. belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.

5.2 Sekretariat DPRD

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukkan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD sebesar 85%.

5.3 Inspektorat

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya tenaga auditor untuk melayani pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah. Saat ini hanya ada 58 orang tenaga pengawas di Inspektorat.

6. Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Permasalahan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik adalah belum optimalnya implementasi kesatuan bangsa dan politik karena masih menunggu kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kesatuan bangsa dan politik di tingkat kabupaten.

7. Urusan Kewilayahan

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan yang mengelola kewilayahan. Dalam hal ini, permasalahan bidang urusan kewilayahan adalah belum dimutakhirkannya kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan kewilayahan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga fungsi camat masih terbatas pada pendelegasian kewenangan yang ada sebelumnya.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi akumulatif dari sekian banyak permasalahan pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat. Oleh karena itu, isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Di sisi lain, sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda internasional yang disepakati secara internasional, perencanaan pembangunan wajib memperhatikan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai bagian dari substansi perencanaan jangka panjang. Adapun keterkaitan perencanaan pembangunan dengan isu-isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat serta SDG's diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lain.

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah pusat dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya presiden dan wakil presiden, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan

bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Visi pembangunan nasional tahun 2020–2024 dalam RPJPN adalah:

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi pembangunan nasional tahun 2020–2024 itu mengarah pada visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, seperti tertuang dalam dokumen RPJPN Tahun 2005-2025, yaitu “**Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur**”.

Visi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tersebut dikerucutkan kembali dengan tema “**Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**” dengan fokus sebagai berikut:

1. FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA
 - a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
 - c. Pembangunan Karakter Bangsa
2. FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI
 - a. Pangan
 - b. Energi
 - c. Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
 - d. Industri Manufaktur
 - e. Kelautan dan Kemaritiman
3. FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
 - a. Sentra-Sentra Pertumbuhan
 - b. Komoditas Unggulan Daerah
 - c. Pertumbuhan Perkotaan
4. FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 - a. Transportasi
 - b. Telekomunikasi
 - c. Sumber Daya Air
 - d. Perumahan dan Pemukiman
5. FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
 - a. Hukum dan Regulasi

- b. Pertahanan dan Keamanan
- c. Politik

Sedangkan 5 (lima) prioritas Nasional yang ingin dicapai adalah

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun isu strategis kewilayahan adalah:

1. Penurunan ketimpangan antar wilayah
2. Pengelolaan urbanisasi
3. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
4. Pemanfaatan ruang
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah

4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

Misi Satu : **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa

Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

Misi Dua : **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebajikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Misi Tiga : **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya

tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Misi Empat : **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.

Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

Misi Lima : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Dalam tata kelola pemerintahan, ‘*Good Governance*’ atau ‘Tata Kelola yang Baik’ harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Di Jawa Barat, *Good Governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Isu strategis Provinsi Jawa Barat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan

RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu;

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi capaian Angka Partisipasi Kasar periode 2012-2017, sedangkan nilai APM menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan. Angka Partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah.

Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, Tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarannya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 29,99 persen.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret tahun 2012 penduduk miskin sebesar 10,09 persen, sedangkan Maret tahun 2018 sebesar 7,45 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan

sebesar 10,25 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,47 persen pada Maret Tahun 2018. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Februari Tahun 2012 sebesar 9,84 persen menjadi 8,16 persen pada bulan Februari Tahun 2018 dan selama lima tahun terakhir terjadi penurunan pengangguran sebesar 1,68 persen. Meskipun terjadi penurunan secara persentase namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 1,86 juta orang pada Februari Tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45%, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun disisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan. pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh Wilayah Jawa Barat.

Daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral.

Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi dapat diminimalisir, serta mempertahankan kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

Permasalahan Penataan ruang yang terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, adalah pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi

wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keragaman konsumsi pangan masih rendah, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS),

pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya potensi Ancaman Tantangan, Hambatan,

Gangguan (AHTG), terhadap stabilitas politik dan keamanan, Pemahaman Ideologi serta kerukunan beragama.

4.2.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar

Maksud adanya penelaahan RPJMD daerah sekitar adalah agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 160 poin h, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya. Adapun strategi dan arah kebijakan RPJMD daerah sekitar dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Strategi dan Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN BEKASI	
Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan tata kelola, pemanfaatan IT dan pengembangan SDM	Peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana
	Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT
	Pengembangan layanan cepat tanggap terhadap penanganan sampah, limbah, air minum, jalan, saluran, PJU dan kemacetan berbasis IT
Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan	Pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah
Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara
Peningkatan tata kelola kearsipan melalui perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip serta pemanfaatan IT	Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana serta pengembangan informasi kearsipan
Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak lainnya

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan akuntabilitas melalui sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan daerah
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
	Penerapan smart parking di pusat perbelanjaan
Peningkatan kinerja BUMD Peningkatan Tata Kelola Perusahaan	
Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan	Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan melalui mall pelayanan publik
	Peningkatan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
	Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya Berbasis IT
MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	
Menyediakan infrastruktur (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan aksesibel	Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan dan jembatan
	Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
	Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki
Mengembangkan transportasi perkotaan	Penyediaan angkutan massal yang terintegrasi
	Pengembangan Transportasi massal melalui BUMD
	Pembangunan sarana transportasi City Tourism*
	Pembangunan gedung comuter transit parking (stasiun KA dan LRT)
Mengembangkan smart parking	Penerapan smart parking
memelihara prasarana dan sarana LLAJ	Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ
mengembangkan kawasan TOD	Cakupan kawasan TOD terbangun
Menyediakan infrastruktur (drainase) terintegrasi dengan drainase perkotaan	Pengembangan jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi
	Penerapan eco drainage dalam Penanggulangan banjir
Mengembangkan pengelolaan air limbah	Penyediaan sanitasi yang aman melalui pengelolaan rumah tangga
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah	Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan	Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota
Mengembangkan jaringan air minum	Penyediaan air bersih
Meningkatkan Kesigapan pemadam kebakaran	Pengembangan rencana pemadam kebakaran yang efektif dan efisien
Menyediakan tempat pendidikan	Penyediaan sarana tempat pendidikan
Menyediakan layanan kesehatan	Penyediaan sarana tempat layanan kesehatan
Menyediakan layanan perdagangan	penyediaan sarana tempat perdagangan
Mengembangkan fasos dan fasum	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana
	penyediaan prasarana sarana olahraga dalam rangka pemasaran olah raga masyarakat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat di tingkat kota dan lingkungan masyarakat*
Menyediakan sarana pemakaman	Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH
Menyelenggarakan Penataan Ruang Daerah Dalam Rangka Mengembangkan Sistem Pusat Pelayanan Kota yang Mendukung Perwujudan Fungsi Kota Bekasi Sebagai Pusat Kekuatan Nasiona	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
Menyediakan ruang terbuka hijau	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.)
Penyediaan gedung kantor	penyediaan sarana gedung kantor
Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Pembebasan tanah untuk kepentingan umum	Penyediaan tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan PSU
Menyediakan jaringan listrik dan telepon	Penyediaan PSU terpadu (ducting) yang terbangun
	Penyediaan PSU Hemat Energi, Estetis dan ramah lingkungan
Menyediakan jaringan gas Kota	Penyediaan jaringan gas Kota
MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	
Meningkatkan Investasi Daerah	Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing
Meningkatkan keunggulan, daya dan promosi wisata	Pengembangan “Urban Tourism” untuk meningkatkan daya wisata Kota Bekasi
	Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event “BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan*
Meningkatkan daya saing kreatif	Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park:
	Pengembangan wirausaha kreatif berbasis komunitas
Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil	Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama pengembangan bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi
Meningkatkan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako
	Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
Menjaga stabilitas Harga Komoditas	Penguatan Stock Ketersediaan Cadangan Pangan
	Pengendalian Inflasi
Harmonisasi Tingkat Upah	Harmonisasi UMK
	Insentif dan Bantuan Peningkatan pendapatan
Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Pelatihan dan Penyiapan Tenaga Kerja Terdidik
MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.	
Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Layanan Pendidikan	peningkatan efektivitas skema pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin
	peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi
	peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (smart School)
	Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan tahfidz Al-Quran
Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap perpustakaan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Literas
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui optimalisasi germas dan PHBS*	Peningkatan gizi masyarakat
	Pemberian makanan tambahan/pendamping bagi anak usia sekolah
	Peningkatan kapasitas layanan informasi kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi dan balita
pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa	Meningkatkan pengendalian terhadap penularan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa
meningkatkan kualitas akses dan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan kapasitas layanan Kesehatan
	Penguatan tata kelola layanan kartu sehat berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan masyarakat
Menurunkan kesenjangan antar penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin	Pengembangan layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan
	Pembangunan Panti Rehabilitasi PMKS
	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Peningkatan upaya pengendalian penduduk Penguatan kelembagaan penanggulangan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kemiskinan
	Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitas kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	Peluang 150.000 tenaga kerja baru, melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja
peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan meningkatkan kerjasama dengan unsur terkait	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kerja sama dengan unsur terkait
Mewujudkan Pemuda yang berdaya saing	Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda
meningkatkan prestasi olahraga dan kualitas olahragawan	Peningkatan pembinaan olah raga pendidikan
	Peningkatan pembinaan organisasi olahraga
Peningkatan kualitas hidup dan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemenuhan kualitas hidup dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan
	Pengarusutamaan Gender
Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama , ekonomi, budaya dan keagamaan	Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ikhsan
MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.	
Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana
	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif ketua RT, RW, LINMAS, KADER Posyandu, Marbod Masjid dan kelompok penggerak lainnya
Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan	peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan
pencegahan konflik	Pencegahan konflik dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran dan demokratis
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui mitigasi bencana	Pengembangan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara online, tepat dan cepat;
	Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan.
	Integrasi penanggulangan resiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan;
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan
Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penegakan lingkungan	Meningkatkan pengawasan, penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan lingkungan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat peduli lingkungan	Pengelolaan event “Car Free Day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan
KOTA DEPOK	
MISI I Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan
MISI II Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing	
Meningkatkan rata-rata lama sekolah	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan daya satuan pendidikan dan peningkatan akses kepada peserta didik masyarakat tidak mampu
Meningkatkan pendidikan Non formal	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), PKBM dan kelompok belajar/kursus masyarakat lainnya.
	Peningkatan kesetaraan pendidikan masyarakat
	Penyelenggaraan penuntasan buta aksara latin dan Al-Quran
Meningkatkan mutu dan daya saing pendidika	Penguatan tata kelola pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
	Peningkatan kapabilitas tenaga pendidik
Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat
Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju smart healthy city	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujuka
	Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan
	Pengembangan program kota sehat
	Pengembangan manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi
Meningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan penanganan/pengendalian mortalitas, morbiditas
	Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat
	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
Meningkatkan kualitas fungsi keluarga	Penguatan keluarga luarga harmonis yang dimulai sejak pra nikah
	Peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hakhak anak.
	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga
	Peningkatan fungsi keluarga dalam



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pengendalian kependudukan
Meningkatkan peran kelembagaan ketahanan keluarga	Penguatan kelembagaan ketahanan keluarga
Meningkatkan ekonomi keluarga	Penguatan Ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan
Meningkatkan kualitas kesejahteraan	Pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat
	Peningkatan kualitas hidup lansia dari aspek, ekonomi, mental keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri
Meningkatkan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat	Peningkatan kreatifitas pelaku seni budaya dan pembinaan seni budaya masyarakat
	Peningkatan fasilitas, sarana seni budaya daerah.
Meningkatkan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda	Pengembangan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda
Meningkatkan ruang kreativitas dan prestasi olahraga masyarakat	Peningkatan/pemenuhan fasilitas/sarana prasarana olah raga masyarakat
	Peningkatan kualitas/mutu atlet
Misi III Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan	
Meningkatkan tingkat kemudahan investasi dan usaha	Perbaikan iklim investasi dan usaha
Menciptakan kecil menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru
Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif	Pembangunan sentra ekonomi kreatif
Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro
Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata	Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata
Meningkatkan kapasitas daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatkan kompetensi dan produktifitas usia kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas usia kerja
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Peningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
Meningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan panga	Peningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan panga
Meningkatkan produksi dan distribusi bahan pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan
	Peningkatkan distribusi bahan pangan
Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK;



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
	Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis Transit Oriented Development (TOD);
Mengembangkan angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal	Pembangunan simpul-simpul transportasi
Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum	Peningkatan kualitas layanan transportasi umum
Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang efisien, Konsisten, dan berkelanjutan	Penyusunan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota
Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas	Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan ruang yang ramah keluarga
Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih
Meningkatkan ketersediaan air untuk pair bak	Peningkatan kualitas layanan jaringan irigasi
Meningkatkan pengendalian banjir	Pengembangan drainase mikro dan makro yang terpadu;
	Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali banjir alami dan pengendalian run-of
Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah	Peningkatan cakupan layanan dan sarana prasarana air limbah
Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan dan penerapan berbagai pengendalian
Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik
Mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah;
Pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan	Peningkatan cakupan layanan melalui revitalisasi dan optimalisasi TPA Cipayung, keikutsertaan dalam TPPAS Nambo, dan Pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan
Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau	Penyediaan lahan RTH melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga
Misi V Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kohesi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui dialog dialog, pembauran dan resolusi konflik	Melakukan dialogis, pembauran antar pulau dan etnis pada semua level
Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pendidikan bela negara, penanaman nilai-nilai luhur Pancasila	Melaksanakan pendidikan bela negara dan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada pelajar dan pemuda dan masyarakat
Meningkatkan cakupan layanan organisasi politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan politik, peningkatan partisipasi politik	layanan organisasi politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan politik, peningkatan partisipasi politik
	Meningkatkan partisipasi politik bagi bagi pelajar dan masyarakat.
	Melaksanakan pemberdayaan organisasi (ormas dan LSM) dan politik (parpol) dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi.
Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Penguatan dan pengembangan potensi masyarakat
Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama	Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyarakat
Mengoptimalkan peran dari lembaga lembaga keagamaan	Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan, keagamaan (seperti lembaga zakat dan wakaf) dalam kegiatan masyarakat
KABUPATEN CIANJUR	
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan mantap	Peningkatan jalan strategis Kabupaten
Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis	
Meningkatkan Prasarana pendukung jalan dan sarana transportasi darat	
Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian	Pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka pemenuhan akses air minum
Meningkatkan sarana- prasarana sanitasi lingkungan	Mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana sanitasi lingkungan
Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum	Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum
Meningkatkan perbaikan dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air dan udara serta peningkatan ruang terbuka hijau
	Peningkatan penanganan timbulan sampah perkotaan dan perdesaan
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan	
Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi umat manusia	Menanamkan nilai akhlak mulia melalui gerakan shalat subuh dan ashar berjamaah, penghapalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al – quran



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang	
Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya	Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
	Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat
	Peningkatan mutu Pelayanan kesehatan masyarakat
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengarusutamaan gender serta meningkatkan ketahanan keluarga , partisipasi masyarakat dalam ber KB dan perlindungan anak	
Meningkatkan kualitas iklim usaha dan daya investasi	Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan investasi dan realisasi investasi
	Peningkatan Produksi dan komoditas unggulan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	Mengoptimalkan kolaborasi peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan
	Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan dan perlindungan konsumen
	Peningkatan keberdayaan lembaga perekonomian masyarakat desa
Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pengembangan pariwisata secara terpadu dan profesional	Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran
	Percepatan pembangunan pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata
Meningkatkan daya beli masyarakat	
Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
Mempercepat penanggulangan kemiskinan	
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja
	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS
	Peningkatan strategi mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan	Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Desa yang akuntabel dan transparan
Menerapkan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel
Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintahan dan non gedung yang representatif	
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Pengawasan internal serta Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah
KABUPATEN SUKABUMI	
Peningkatan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama.	Meningkatkan pembinaan kepada lembaga , kesehatan dan keagamaan
	Mengembangkan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik penduduk
Peningkatan wawasan kebangsaan dengan cara meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.	Revitalisasi peran rumah ibadah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan disiplin masyarakat melalui peningkatan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda	Meningkatkan penegakan peraturan daerah
	Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif melalui peningkatan antisipasi terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban didukung pendidikan politik yang berkualitas.	
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pengendalian pe-nyakit menular dan tidak menular yang bermutu, merata dan terjangkau, penguatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, keterjangkauan, pemerataan farmasi dan alat kesehatan berkualitas.	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
	Meningkatkan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
	Meningkatkan pelayanan keselamatan anak balita
	Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di masyarakat
	Mengembangkan lingkungan sehat
	Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan
Meningkatkan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat melalui promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan	Meningkatkan dan mengembangkan PPK-BLUD UPT
	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak/hewan
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/kecamatan
	Meningkatkan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya
	Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan
Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui perluasan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perluasan pendidikan formal dan non-formal serta pemberian bantuan bagi siswa miskin.	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan wajib belajar pendidikan dasar tahun
	Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan mengembangkan pendidikan luar sekolah berbasis ekonomi kreatif
Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan perpustakaan dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).	Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
	Meningkatkan penanggula-ngan kenakalan remaja dan pelaksanaan <i>Student Camp</i>
Peningkatan kompetensi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelaksanaan pendidikan pelatihan, peningkatan kualifikasi pendidikan para pendidik dan tenaga kependidikan serta optimalisasi penggunaan IT	Meningkatkan budaya literasi berbasis komunitas dan wilayah
Peningkatan tata kelola pendidikan yang berkualitas melalui pelaksanaan akreditasi bagi jenjang pendidikan dasar dan lembaga pendidikan nonformal serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi.	
Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dalam masyarakat serta melestarikan warisan budaya melalui sosialisasi dan penanaman budaya sejak dini dengan cara memasukkannya dalam muatan di sekolah dan pengembangan kesenian khas Kota Sukabumi didukung dengan penguatan kapasitas kelompok	Mengembangkan nilai-nilai budaya



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
masyarakat komunitas dan kelompok agama.	
	Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya
Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif.	Meningkatkan peran serta kepemudaan
	Meningkatkan pembinaan dan pasyarakatan olahraga
	Membentuk pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di sekolah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.	
	Meningkatkan upaya penumbuhan kewira-usahaan dan kecakapan hidup pemuda
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana olahraga
	Meningkatkan upaya pencegahan penyalah-gunaan narkoba
Meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengendalian fertilitas	Meningkatkan KB dan kesehatan reproduksi remaja
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
Peningkatan ketahanan keluarga dan penguatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender serta jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Mengembangkan perlindungan yang komprehensif melalui optimalisasi penggunaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk menentukan individu dan rumah tangga sasaran serta perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan pemberda-yaan komunitas perumahan dan kelembagaan
	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan melalui pemberdayaan forum dan kelembagaan serta peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma serta pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dasar serta mengembangkan penghidupan bagi penduduk miskin dan rentan miskin melalui pembangunan dan pemerataan pelayanan dasar di kantung-kantung kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan penduduk miskin serta pelatihan dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin	
Meningkatkan kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja serta link and match pendidikan dan .	Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja
Meningkatkan kualitas dan produktivitas pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja serta sertifikasi keahlian/kompetensi.	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Meningkatkan ketahanan keluarga dan penguatan peran keluarga melalui pendidikan pra nikah, pelatihan parenting dan pemberdayaan tenaga pembinaan keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Mengembangkan model operasional BKB/Posyandu Padu
	Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Meningkatkan kemandirian keluarga melalui pengembangan ekonomi keluarga berbasis keluarga	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan
Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi prasarana perhubungan melalui peningkatan pelayanan jalan, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi dan perlengkapan jalan	Pembangunan jalan dan jembatan serta saluran drainase/gorong-gorong
	Peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan serta pedestrian dan lahan parkir
	Meningkatkan dan mengamankan lalu lintas
Mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang baru melalui pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan	Meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum
	Membangun sarana dan prasarana perhubungan
	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
	Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong
	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien melalui penyusunan n pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada RTRW, sinkronisasi RTRW dan penyempurnaan tatacara perizinan penataan ruang	Meningkatkan perencanaan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan/Kecamatan
Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang melalui penyelenggaraan forum konsultasi .	Meningkatkan pengelolaan RTH
	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman umum
	Meningkatkan penataan ruang budaya
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Rawan Bencana (KRB) melalui peringatan dan pencegahan dini, perencanaan pengelolaan risiko bencana yang na, peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur penyelenggaraan penanggulangan bencana serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana.	Meningkatkan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	Pemetaan daerah rawan bencana dan penetapan lokasi evakuasi korban bencana
	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatkan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyebaran informasi terkait norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran.	
Mewujudkan transportasi yang berkualitas, handal dan ramah lingkungan melalui penggunaan na, mengembangkan layanan angkutan umum/trayek yang efisien serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung kereta api double track dan Tol Bocimi.	Meningkatkan pelayanan angkutan
	Meningkatkan pelaksanaan uji kelayakan
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lingkungan melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengembangan produk ramah lingkungan, pengendalian Dampak Perubahan Iklim, pengendalian dan pengawasan SDA, pengembangan data dan informasi Lingkungan Hidup serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.	Meningkatkan pengendalian polusi
	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	Mengembangkan produk ramah lingkungan
	Meningkatkan perlindungan konservasi Sumber Daya Alam



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan data dan informasi serta akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui kerjasama pengelolaan persampahan, peningkatan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatkan kualitas perumahan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi air minum, pengelolaan air limbah, pemberdayaan komunitas perumahan untuk percepatan penganan kawasan kumuh perkotaan dan pengembangan lingkungan sehat.	Mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Membangun infrastruktur kelurahan
	Mengembangkan perumahan sehat sederhana dan pemberdayaan komunitas perumahan
	Membangun saluran drainase dan gorong/gorong
	Mengembangkan lingkungan sehat
Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama investasi yang didukung peningkatan pelayanan sector perizinan melalui simplisasi prosedur dan percepatan pelayanan berbasis IT	Mengembangkan pendukung usaha bagi UMKM
	Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
	Meningkatkan penataan PKL dan asongan
	Meningkatkan pembinaan UKM
	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
Mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi melalui penguatan pemodalan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
	Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi
	Menyiapkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Mengembangkan -sektor unggulan daerah yang didukung sarana distribusi perdagangan berkualitas baik melalui revitalisasi tata kelola pasar rakyat maupun pembangunan pusat perdagangan baru	Meningkatkan efisiensi perdagangan (distribusi barang)
	Membangun dan mengembangkan sarana distribusi perdagangan
	Meningkatkan pembinaan dan penataan PKL dan asongan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pendampingan para pelaku, pemberian bantuan modal, pemanfaatan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kerjasama pelaku ekonomi kreatif baik dalam daerah maupun antar daerah didukung optimalisasi penggunaan IPTEK.	Meningkatkan perencanaan dan pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif
	Meningkatkan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif
	Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas IPTEK dalam proses produksi
	Mengembangkan IKM dan sentra-sentra potensial
	Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah
Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Kota Sukabumi berbasis wisata kuliner dan warisan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Mengembangkan pemasaran pariwisata melalui promosi di dalam dan luar negeri
	Mengelola kekayaan budaya untuk mengembangkan pariwisata
Mengembangkan disain Kota Sukabumi sebagai objek wisata heritage melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung objek wisata heritage serta pembuatan pengelolaan gedung bersejarah.	Mengembangkan pariwisata berbasis kuliner dan sejarah
Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) melalui peningkatan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan penguatan cadangan pangan.	Meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Memanfaatkan pekarangan dan penggunaan sumber bahan pangan alternatif
	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan
	Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner
Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui perluasan lahan LP2B milik pemerintah.	
Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak swasta/BUMN/BUMD maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan.	Meningkatkan sinergitas pengelolaan CSR
Meningkatkan proses perencanaan yang berkualitas, pengelolaan keuangan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informatika didukung peningkatan profesionalisme	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
serta kompetensi pegawai.	
	Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
	Meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah
	Meningkatkan penataan pelaksanaan reformasi birokrasi
	Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Meningkatkan dan mengembangkan pelaporan capaian kinerja serta keuangan
	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur
	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
	Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan
	Meningkatkan koordinasi ketatalaksanaan dan kelemb-bagaan antar pemerintah dan pemerintah daerah
	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan pajak daerah berbasis IT
	Mengoptimalkan pengawa-san dan pengendalian pajak daerah serta bagi hasil pajak dan bukan pajak
	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah dengan didukung keterbukaan informasi , transparansi, partisipasi , serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi .	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan
	Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM pelayanan
	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
Optimalisasi penggunaan Informasi Teknologi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan didukung pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.	Mengembangkan informasi pengadaan barang dan jasa
	Mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam perencanaan, pengang-garan, akuntansi dan pengelolaan pengaduan publik
	Memberdayakan kelompok informasi masyarakat
	Meningkatkan respon terhadap pengaduan masyarakat



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan inovasi daerah didukung pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional, pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi.	Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah
	Meningkatkan pembinaan terhadap pos pelayanan teknologi pedesaan
KOTA BOGOR	

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat

Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu;	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan;
	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
	Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
	Peningkatan Ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar;
	Kolaborasi pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
	Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;
Menurunkan Angka Kelahiran	Penurunan angka kelahiran pada usia remaja
	Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)
Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat	Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam
	Peningkatan kecukupan konsumsi energy dan protein pada asupan pangan masyarakat
	Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat
	Menjamin Kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita
Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan dan preventif serta penyehatan lingkungan	Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan;
	Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat;
	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat;



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan.
Meningkatkan Kebugaran Masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
	Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahraga Prestasi secara Berkelanjutan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	Menyediakan sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan;
	Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas;
	Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan s air limbah yang layak	Menyediakan s air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat.
	Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah.
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan,;
	Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
	Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman
	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
	Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana
	Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana
Reduksi timbulan sampah	Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional;
	Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
	Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah
	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
	Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
	Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi Sumberdaya Air
Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air	Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
	Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air.
	Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air.
Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara	Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara
	Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
	Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara
Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi, dan pengelolaan limbah , serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
	Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
	Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah.
	Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau.
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas	
Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun	Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan enterpreneurship.
	Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar
	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
	Pengembangan dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penerapan Sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah
	Penguatan Karakter, Kreatifitas, Inovasi, dan Prestasi Siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
	Menjamin Pendidikan Inklusif yang berkualitas.
	Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin.
Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal	pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK)
	Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja
	Meningkatkan Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterpreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka
	Penguatan Kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas
Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
	Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang
	Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda
	Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda
	Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor
	Memerangi penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda
	Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan social (anak jalanan, WTS,dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	berdaya.
	Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
	Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda
	Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
	Memperkuat kharakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti.
Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat	Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis
	Menguatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas "Bussiness As Usual"
	Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll)
Membangun dan menguatkan budaya partisipatif dalam setiap proses pembangunan daerah	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender	Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender
Mengembangkan s pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan na (open government)
	Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas
	Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Penyempurnaan s manajemen dan pelaporan kinerja
	Penguatan s pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
	Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart
	Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.
	Penguatan pengendalian intern pemerintah (SPIP)
	Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tindih
Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat
	Mengoptimalkan pemanfaatan terbarukan
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera	
Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & nal	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
	Mengembangkan Inkubator Bisnis
	memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
	Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja
	Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja
	Menjamin adanya perlindungan social bagi masyarakat miskin
	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin
	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Miskin
Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya
	Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga
Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga	Menjamin kecukupa pangan dalam setiap keluarga
	Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia
	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga
	Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga
Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	Peningkatan Pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun
	Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga d. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera
	Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga
Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak
	Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak
	Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga
	Peingkatan kualitas hidp bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga
Meningkatkan ketahanan social dan Budaya dalam keluarga	Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah
	Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku social dan seksual menyimpang
Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local
	penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.
	Mengembangkan klaster , kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah
	Memperkuat s dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
	Meningkatkan dayaasaing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)
	Meningkatkan dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen
	Revitalisasi pasar tradisional
	Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing	Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan .
Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanksi dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya.
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah	Pembangunan jalan-jalan alternative/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran
	Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (Flyover/underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
	Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Mendorong percepatan tersedianya jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau
	Mengintegrasikan jaringan transportasi perkotaan antar moda
	Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan s Transit Oriented Development (TOD).
	Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parker di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas.
	Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT

Sumber : RPJMD Daerah sekitar

4.2.4 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesenjangan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan

secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.5 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor, penelaahan RTRW Kabupaten Bogor, penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Bogor, penelaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, RPJMD daerah sekitar, dan penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka ditetapkan 13 (tiga belas) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor yaitu;

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan
3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
5. Peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian daerah
6. Peningkatan investasi daerah
7. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9. Pengelolaan kebencanaan
10. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
11. Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
13. Peningkatan pelayanan publik

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan kronologis, rumusan visi dan misi Kabupaten Bogor pada awalnya diusung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi yang diusung tersebut terlahir dari penelaahan terhadap substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, untuk selanjutnya disampaikan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. Setelah terpilih, visi dan misi tersebut disinergikan dengan konsep perencanaan teknokratik, karena jarak waktu antara penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelantikan melebihi 6 (enam) bulan. Pasca pelantikan tanggal 30 Desember 2018, visi dan misi kepala daerah dijadikan sebagai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui serangkaian tahapan, yaitu dibahas dalam forum konsultasi publik maupun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2023.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah :

1. Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan wakil Bupati Bogor saat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Adanya keinginan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD tahun 2013-2018, baik dari aspek kesejahteraan rakyat, daya saing, maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada pelayanan publik.
3. Adanya keinginan untuk menyelesaikan isu strategis daerah yang terkait dengan isu nasional, Provinsi Jawa Barat, serta isu-isu kewilayahan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah:

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan dengan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. **Termaju**, yaitu perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional.
3. **Nyaman**, yaitu Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi.
4. **Berkeadaban**, yaitu masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya,

menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban serta Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. **Misi Kedua**, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan

berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan

3. **Misi Ketiga**, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. **Misi Keempat**, yaitu Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. **Misi Kelima**, yaitu Mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

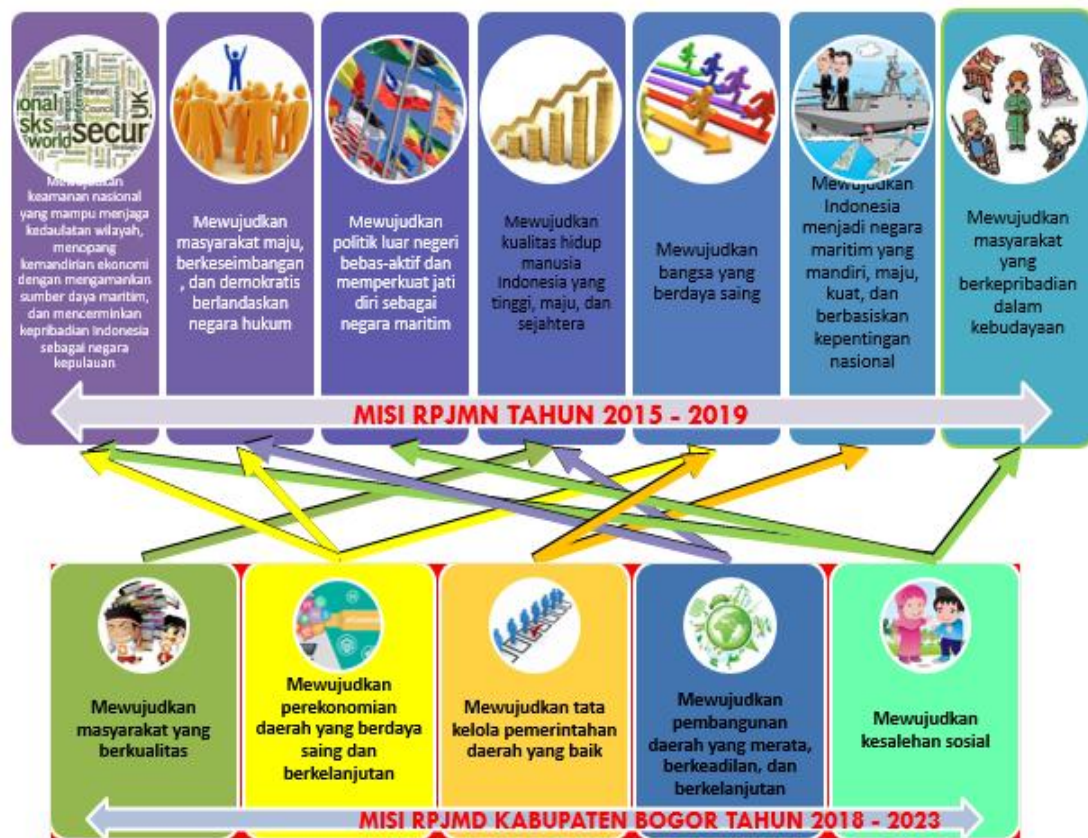
5.3 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 tidak terlepas dari visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 serta visi dan misi RPJMN tahun 2015-2019 dan visi RPJMN 2020-2024 yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2023. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana digambarkan di bawah ini:



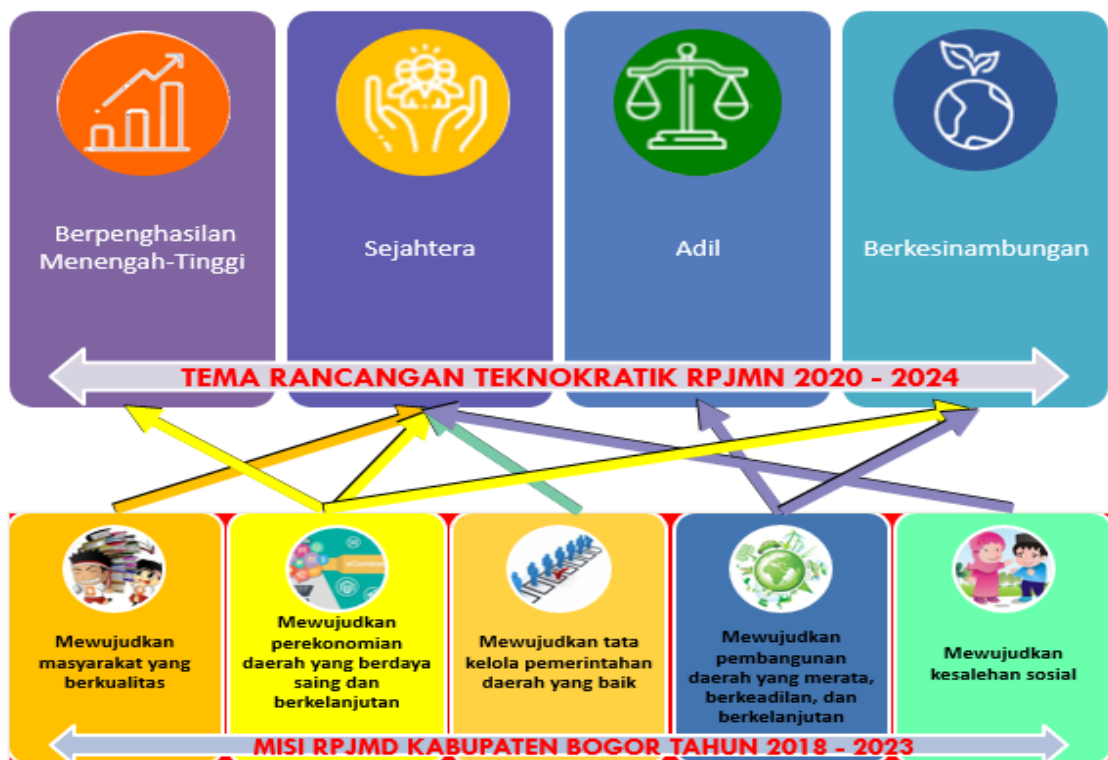
Gambar 5.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat

Keterkaitan dengan RPJMN tahun 2015-2019 digambarkan di bawah ini:



Gambar 5.2
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Misi RPJMN

Keterkaitan dengan tema ***“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”*** pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2023, digambarkan di bawah ini:



Gambar 5.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Tema Rancangan Teknokratik RPJMN

5.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/*impact*.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Mempedomani ketentuan Pasal 167 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran disusun dengan mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban									
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas									
1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas		a Indeks Pendidikan (poin)	61,44	61,50	61,89	62,31	62,73	63,14	63,14
	1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan	a Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,88	8,14	8,30	8,47	8,64	8,80	8,80
		b Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,44	12,60	12,68	12,77	12,85	12,94	12,94
	1.1.2 Meningkatnya budaya literasi	a Indeks Membaca (poin)	52,69	52,81	53,01	53,20	53,39	53,58	53,58
1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat		a Indeks Kesehatan (poin)	77,82	78,80	79,20	79,60	80,02	80,42	80,42
		b Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,20	2,17	2,11	2,06	2,01	1,96	1,96
	1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan	a Angka harapan hidup (tahun)	70,86	71,22	71,48	71,74	72,01	72,27	72,27
	1.2.2 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	a Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,18	86,73	87,28	87,83	88,38	88,93	88,93
	1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	a Crude Birth Rate (CBR) (%)	25,59	24,80	24,03	23,28	22,56	21,86	21,86
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan									
2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		a Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,21	6,24	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08
	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a PDRB Perkapita (Juta Rp.)	37,93	40,53	42,16	43,90	45,75	47,72	47,72
		b Tingkat kemiskinan (%)	7,14	6,91	6,78	6,60	6,47	6,38	6,38
		c Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,75	9,61	9,20	8,82	8,45	8,10	8,10
	2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah	a PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp)	221,55	241,86	256,90	273,00	290,24	308,70	308,70
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik									
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang		a Indeks reformasi birokrasi (poin)	48	60,00	63,00	66,00	68,00	70,00	70,00
	3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat	a Indeks kepuasan masyarakat (poin)	78,57	79,05	80,00	81,05	81,75	82,00	82,00
	3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan	a Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
berkualitas	efektif	(predikat)							
		b Nilai AKIP (predikat)	B	B	B	BB	BB	A	A
		c Indeks Inovasi Daerah (poin)	4.280	6.420	9.630	14.445	21.667	32.500	32.500
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan									
4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan		a Indeks ketimpangan wilayah (Williamson) (poin)	0,96	0,90	0,86	0,81	0,77	0,73	0,73
		b Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	56,21	56,71	57,21	57,71	58,21	58,71	58,71
	4.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik	a Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	84,9	85,0	85,1	85,2	85,3	85,4	85,4
	4.1.2 Menurunnya tingkat kemacetan	a Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)	55	60	65	70	75	80	80
	4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat	a Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh (%)	46,2	13,45	28,15	42,02	85,43	100	100
	4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	a Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah (%)	28,205	36,181	52,599	64,727	70,799	81,526	81,526
	4.1.5 Mengurangi Risiko bencana	b Indeks Risiko Bencana (poin)	152	150	148	146	144	142	142
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan social									
5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban		a Indek kebahagiaan (poin)	67,94	67,95	67,97	67,98	68,00	68,01	68,01
		b Indeks pembangunan Gender (IPG)	88,69	88,87	89,16	89,63	90,09	90,56	90,56
	5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	a Indek kerukunan hidup beragama (poin)	67,75	67,92	68,09	68,26	68,43	68,60	68,60
		b Persentase gangguan trantibum (%)	NA	84,88	69,77	54,65	39,53	24,41	24,41
	5.1.2 Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan	a Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,10	57,57	58,04	58,50	58,90	59,00	59,00
	5.1.2 Pelestarian seni dan budaya	a Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	NA	20,00	23,33	26,67	30,00	33,33	33,33

Sumber: Analisa Bappedalitbang, tahun 2019

5.5 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis daerah merupakan penjabaran dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan daerah. Disamping itu, program strategis daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengimplementasikan program-program unggulan yang menjadi janji-janji politis kepala daerah. Program strategis daerah dapat dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah hingga tahun 2023.

Adapun janji politis kepala daerah periode tahun 2018-2023 tertuang dalam slogan **“PANCAKARSA”** yang terdiri atas :

1. Karsa Bogor Cerdas
2. Karsa Bogor Sehat
3. Karsa Bogor Maju
4. Karsa Bogor Membangun
5. Karsa Bogor Berkeadaban

Seluruh program strategis ini diimplementasikan ke dalam tahapan perencanaan pembangunan tahunan dengan tema umum, yaitu : ***Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa***, yang dituangkan dalam bentuk prioritas pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban

Adapun penjabaran Pancakarsa diuraikan sebagai berikut :

5.4.1 Karsa Bogor Cerdas

Karsa ini merupakan tekad untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional,

dan global, dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas, pada tahun 2045. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Cerdas adalah :

1. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021)
2. Penerbitan Kartu Bodas
3. Pemberian bantuan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi
4. Pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah
5. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan
6. *Forkopimda Goes to School*
7. Peningkatan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah
8. Penambahan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

5.4.2 Karsa Bogor Sehat

Karsa ini merupakan keinginan dan tekad Bupati Bogor untuk menjadikan warga Kabupaten Bogor sehat. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Sehat adalah :

1. Pemberian kartu sehat
2. Pelayanan Bogor Siaga
3. Gerakan Bogor Bebas Stunting
4. Gerakan Bogor Bebas Asap Rokok
5. Pembangunan RSUD Bogor Utara

5.4.3 Karsa Bogor Maju

Karsa ini merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, dan pemberdayaan petani. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Maju adalah :

1. Pembangunan career center

2. Pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)
3. Penerbitan Kartu Tani Bogor
4. Gerakan beli beras petani Bogor
5. Produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat
6. Pembangunan terminal agribisnis / *Agro Distribution Centre*
7. Petani Millenial di Kabupaten Bogor
8. Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional
9. Festival wisata desa
10. Pengembangan Geopark Pongkor
11. Gerakan bela beli produk UKM/IKM
12. Optimalisasi dan pengembangan Bumdes
13. Pembangunan GOM Kecamatan
14. Penyelenggaraan Sekolah Pemerintah Desa
15. Pembangunan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PMKS (Graha Pancakarsa)

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan Karsa Bogor Maju, dalam periode tahun 2023 akan dilaksanakan pula program yang mendukung Bogor maju, yaitu :

1. GERBANG JUGALA (GERakan pemBANGunan menuJU keluarGA hidup LAyAk)
2. Pengembangan *Agrotechnopark*
3. Pengembangan Minapolitan
4. *Bogor The City of Sport and Tourism*

5.4.1 Karsa Bogor Membangun

Karsa Bogor Membangun merupakan tekad Bupati untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju secara infrastruktur yang mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Membangun adalah :

1. Betonisasi jalan desa
2. Penataan jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari

3. Terbangunnya jalan Poros Tengah Timur
4. Terbangunnya jalan Bojonggede – Kemang
5. Terbangunnya jalan lingkaran Kebun Raya Cibinong
6. Terbangunnya jalan Bantarkaret–Pabangbon
7. Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung
8. Penataan kawasan simpang Parung
9. Terbangunnya akses lingkaran jalan tambang
10. Terbangunnya jalan lingkaran Gunungsindur
11. Pembangunan Park and Ride
12. Peningkatan kualitas desa melalui Bedah kampung
13. Menyediakan ruang terbuka publik
14. Mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik (Antik)
15. Penanganan sampah berbasis Zonasi

Disamping itu, untuk mendukung Bogor membangun, beberapa hal yang turut dipersiapkan adalah :

1. Mendukung pengembangan Kota Baru Publik Maja
2. Pengembangan Situ *Front City*
3. Pembangunan *Transit-Oriented Development*
4. Mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

5.4.5 Karsa Bogor Berkeadaban

Karsa ini merupakan wujud tekad Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor memiliki masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Dengan terwujudnya Kabupaten Bogor berkeadaban, diharapkan Kabupaten Bogor menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Berkeadaban adalah :

1. Menggiatkan kegiatan Jumling dan Boling
2. Gerakan Bogor Ngaos
3. Bedah pesantren
4. Memberikan bantuan legalitas bagi pontren
5. Membangun dan merevitalisasi Islamic Center
6. Menggalakkan aksi Nobat “Nongol Babat”

7. Menyelenggarakan festival seni dan budaya
8. Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande
9. Pelestarian bahasa Sunda melalui program Kamis Nyunda
10. Pelestarian budaya melalui program Bogor *Culture Night*
11. Peningkatan kualitas keagamaan melalui program Hafizd Quran
12. Peningkatan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu

Seluruh agenda kegiatan PANCAKARSA bermuara pada program pembangunan daerah yang secara khusus akan dijabarkan dalam Bab VI dokumen ini.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam capaian target indikator tujuan dan sasaran perlu dilakukan dengan strategi yang tepat serta dilandasi dengan arah kebijakan yang jelas. Disamping itu, dalam rangka menjabarkan program strategis daerah yang menjadi target politis, perlu disusun program-program pembangunan daerah yang dapat memayungi pelaksanaan setiap kegiatan yang secara langsung menjadi target pencapaian keseluruhan indikator kinerja daerah.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang melahirkan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap

program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah **“optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah”**. Tema ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dan akan dijabarkan setiap tahunnya bagi penentuan tema pembangunan dalam RKPD. Pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1

Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 6.1

**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas			
1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	1.1.1.1 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	a Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah b Memberikan penunjang pendidikan melalui Kartu Bogor Cerdas c Meningkatkan kualitas pendidik dan siswa d Optimalisasi koordinasi dan pembinaan wilayah
	1.1.2 Meningkatnya budaya literasi	1.1.1.2 Peningkatan minat baca masyarakat	a Mengembangkan Pelayanan Perpustakaan
1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan	1.2.1.1 Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	a Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan b Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) c Menyediakan layanan Bogor Siaga
			a mendorong budaya konsumsi makanan bergizi
	1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1.2.2.1 Diversifikasi pangan bergizi	
	1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	1.2.4.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk alami	a Meningkatkan kepesertaan KB



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan			
2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2.1.1.1 Peningkatan kerjasama dan peluang penyediaan lapangan kerja	a Menyediakan pusat informasi dan pelayanan ketenagakerjaan
		2.1.2.2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	a Membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Puskesmas tiap desa
	2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah	2.1.2.1 Peningkatan produksi pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berdaya saing	a Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
			b Meningkatkan produksi dan olahan perikanan dan peternakan, kualitas dan kuantitas kelembagaan, serta sumberdaya manusia perikanan dan peternakan
			c Penanganan penyakit ternak dan zoonosis
		2.1.2.3 peningkatan promosi, pengembangan destinasi dan penguatan jejaring pariwisata	a mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan
		2.1.2.4 Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, koperasi dan Bumdes	a Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan
		2.1.2.5 Peningkatan efisiensi dan efektivitas BUMD	a Meningkatkan produktivitas BUMD
		2.1.2.6 Penyediaan data peluang investasi dan pemberian kemudahan berusaha	a Menyediakan informasi peluang investasi
		2.1.2.7 Peningkatan Prestasi Olahraga	a Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insan Olahraga
			b Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Sarana Prasarana Olahraga Olahraga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat	3.1.1.1 Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	a Penerapan standar pelayanan minimal dan SOP (Sistem Operasional dan Prosedur)
			b Mengembangkan pelayanan adminduk
			c Implementasi pelayanan perijinan transparan dan terpadu
	3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	3.1.2.1 Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	a Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan			
4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	4.1.1 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik	4.1.1.1 Pemantapan jalan dan jembatan	a Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
		4.1.1.2 Penambahan jalan dan jembatan baru	a Pembangunan jalan dan jembatan baru
	4.1.2 Menurunnya tingkat kemacetan	4.1.2.1 peningkatan pelayanan transportasi yang nyaman	a Menyelesaikan titik kemacetan
			b Meningkatkan kualitas angkutan massal
	4.1.3 Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat	4.1.3.1 Pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	a Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh
			b Penataan kawasan perkotaan
	4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4.1.4.1 Pengelolaan sampah berbasis zonasi	c Penyediaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang terbuka biru
			a Penyediaan sarana prasarana persampahan
		4.1.4.2 Pengelolaan kelestarian lingkungan	a Pelestarian Keanekaragaman hayati
			b Pengendalian pencemaran lingkungan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4.1.5 Mengurangi Risiko bencana	4.1.5.1 Mitigasi bencana	a Membentuk desa tangguh bencana b Meningkatkan respon time penanggulangan bencana kebakaran
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial			
5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	5.1.1.1 Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	a Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik
		5.1.1.2 Peningkatan pelayanan keagamaan	a Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan
		5.1.5.3 Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	a Penertiban PKL simpatik b Patroli ketertiban umum
	5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	5.1.2.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan	a Meningkatkan kompetensi perempuan
	5.1.3 Terlestarikannya seni dan budaya	5.1.3.1 Implementasi penanaman nilai budaya melalui pendidikan formal dan non formal	a melestarikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Bogor.

RTRW Kabupaten Bogor disusun berdasarkan asas pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.

Tujuan penataan ruang wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Adapun Kebijakan penataan ruang di daerah meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:
 1. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 3. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air;

4. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 5. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada *enclave* yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
 6. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
 7. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung
- b. pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:
1. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
 2. mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
 3. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
 4. penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.
- c. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:
1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
 2. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien

- melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
3. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
 4. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
 5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
 7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
 8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, dengan strategi meliputi:
1. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
 2. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;
 4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 5. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
 6. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses;

7. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 8. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.
- e. perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
 2. mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 3. mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
 4. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
 5. memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
 6. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
 7. mengembangkan kawasan minapolitan;
 8. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
 9. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
 10. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan
 11. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.
- f. penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi:

1. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
2. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;
3. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
4. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
5. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
6. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
7. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
8. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
9. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
10. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
11. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
12. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;

13. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
 14. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 15. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- g. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 2. mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
 3. mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
 4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan

5. mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Kebijakan dan strategi penataan ruang di atas lebih dioperasionalkan lagi melalui pendekatan spasial melalui :

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu WP Barat, WP Tengah dan WP Timur dengan cakupan wilayah setiap WP tercantum dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2

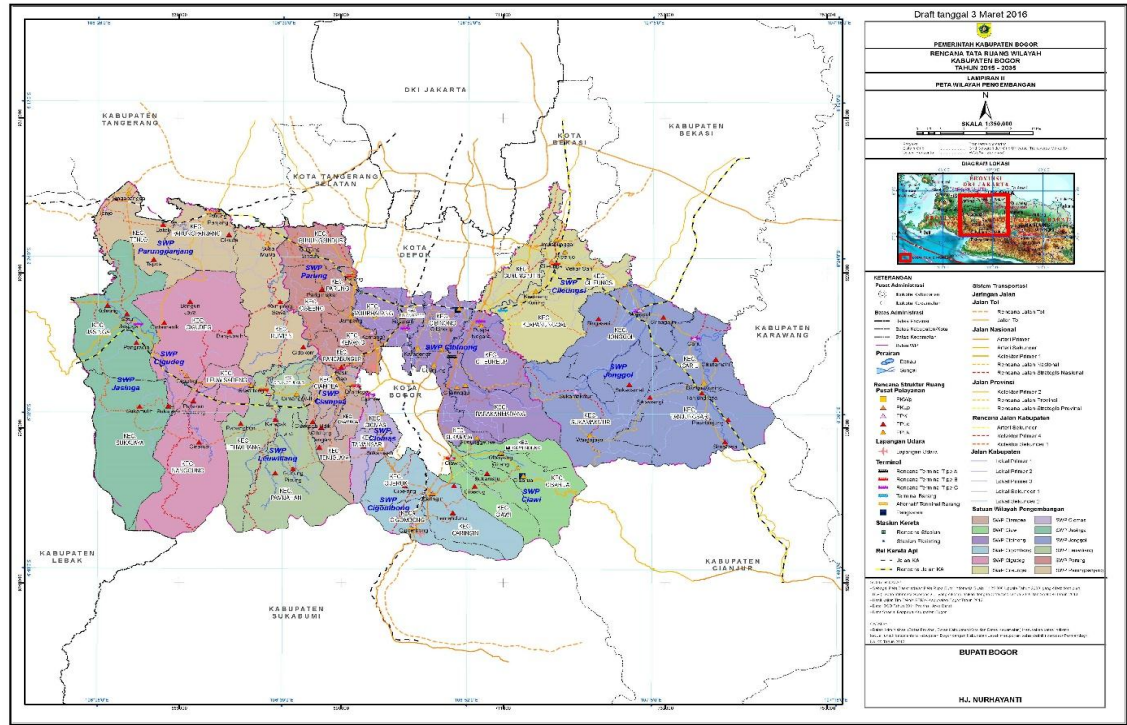
Pembagian Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan	Arahan Fungsi Wilayah Pengembangan	Sub Wilayah Pengembangan
1. WP Barat	WP Barat sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dan Penelitian;	1. SWP Cigudeg meliputi Kecamatan Cigudeg, Nanggung, dan Leuwisadeng
		2. SWP Parung Panjang meliputi Kecamatan Parung Panjang, Tenjo dan Rumpin
		3. SWP Leuwiliang meliputi Kecamatan Leuwiliang, Cibungbulang dan Pamijahan
		4. SWP Jasinga meliputi Kecamatan Jasinga dan Sukajaya
		5. SWP Ciampea meliputi Kecamatan Ciampea, Tenjolaya dan Dramaga
2. WP Tengah	WP Tengah sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Pemerintahan dan Penelitian, Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, Pelayanan Umum dan Sosial, Industri Ramah Lingkungan, Perikanan, Pariwisata dan Budaya, Konservasi Wilayah Hulu	1. SWP Cibinong meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Bojonggede, Babakan Madang dan Tajurhalang
		2. SWP Parung meliputi Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Kemang, Ciseeng dan Rancabungur
		3. SWP Cigombong meliputi Kecamatan Cigombong, Caringin dan Cijeruk
		4. SWP Ciawi meliputi Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung
		5. SWP Ciomas meliputi Kecamatan Ciomas dan Tamansari
2. WP Timur	WP Timur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan	1. SWP Cileungsi meliputi Kecamatan Cileungsi, Gunung Putri dan Klapanunggal

Wilayah Pengembangan	Arahan Fungsi Wilayah Pengembangan	Sub Wilayah Pengembangan
	peran sebagai pusat Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Peternakan, Pertambangan, Pariwisata.	2. SWP Jonggol meliputi Kecamatan Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Peta pembagian wilayah pengembangan sebagaimana di bawah ini:



Gambar 6.2
Peta Wilayah Pengembangan

b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

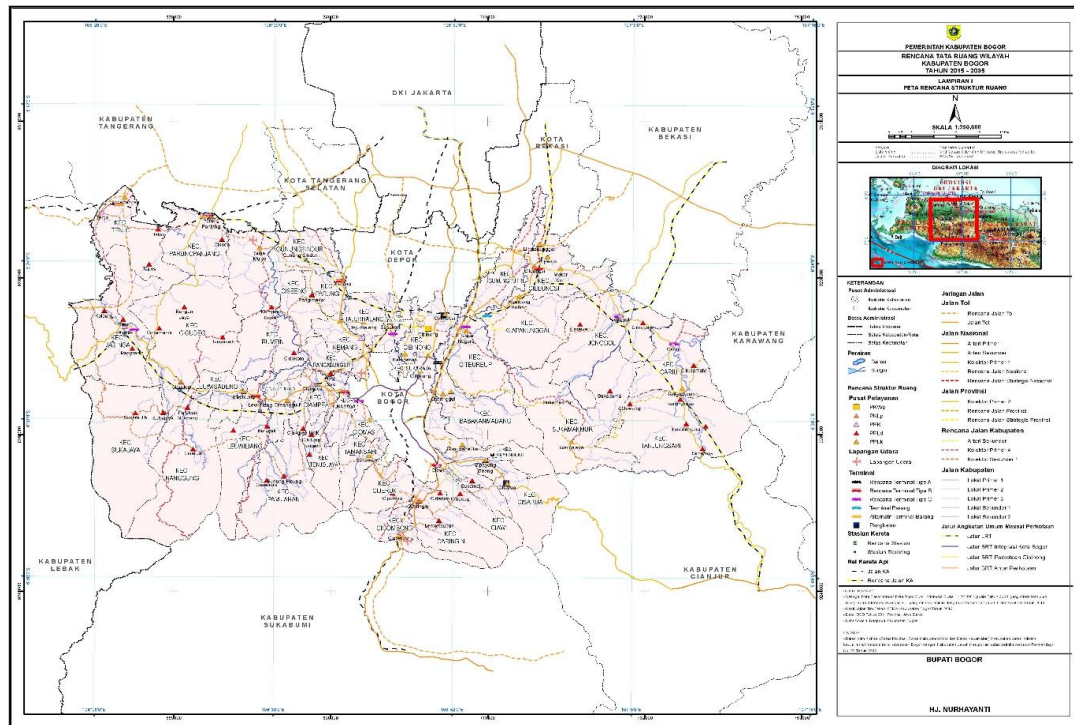
Kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan, meliputi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
2. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi/Kabupaten (PKWp) yaitu PKWp Perkotaan Cibinong.
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi/Kabupaten (PKLp) meliputi:
 - a. PKLp Perkotaan Cigudeg;
 - b. PKLp Perkotaan Parungpanjang;
 - c. PKLp Perkotaan Parung;
 - d. PKLp Perkotaan Caringin; dan

- e. PKLp Perkotaan Cileungsi.
- 4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - a. PPK Perkotaan Jasinga;
 - b. PPK Perkotaan Leuwiliang;
 - c. PPK Perkotaan Ciampea;
 - d. PPK Perkotaan Dramaga;
 - e. PPK Perkotaan Ciomas; dan
 - f. PPK Perkotaan Tenjo
 - g. PPK Perkotaan Gunung Sindur;
 - h. PPK Perkotaan Kemang;
 - i. PPK Perkotaan Ciawi;
 - j. PPK Perkotaan Cigombong;
 - k. PPK Perkotaan Jonggol;
 - l. PPK Perkotaan Cariu; dan
 - m. PPK Perkotaan Sukamakmur.
- 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Kota (PPLk) meliputi:
 - a. PPLk Karadenan, Nanggewer dan Cirimekar di Kecamatan Cibinong;
 - b. PPLk Susukan di Kecamatan Bojonggede;
 - c. PPLk Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang;
 - d. PPLk Gununggeulis dan Cijujung di Kecamatan Sukaraja;
 - e. PPLk Citaringgul dan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang;
 - f. PPLk Puspanagara di Kecamatan Citeureup;
 - g. PPLk Limusnunggal, Cipenjo dan Mekarsari, di Kecamatan Cileungsi;
 - h. PPLk Kembangkuning di Kecamatan Klapanunggal;
 - i. PPLk Wanaherang di Kecamatan Gunung Putri;
 - j. PPLk Bantarkuning dan Cariu di Kecamatan Cariu;
 - k. PPLk Jampang di Kecamatan Kemang;
 - l. PPLk Sukamulya di Kecamatan Rumpin;
 - m. PPLk Singabangsa dan Tenjo di Kecamatan Tenjo;
 - n. PPLk Cisarua di Kecamatan Cisarua;
 - o. PPLk Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung;

- p. PPLk Ciomas Rahayu di Kecamatan Ciomas;
 - q. PPLk Wargajaya di Kecamatan Sukamakmur;
 - r. PPLk Sibanteng di Kecamatan Leuwisadeng;
 - s. PPLk Cimanggu II di Kecamatan Cibungbulang; dan
 - t. PPLk Sukamantri di Kecamatan Tamansari.
6. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa (PPLd) meliputi:
- a. PPLd Desa Batok, dan Desa Tapos di Kecamatan Tenjo;
 - b. PPLd Desa Sukamulih dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya;
 - c. PPLd Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya di Kecamatan Cigudeg;
 - d. PPLd Desa Cikuda di Kecamatan Parung Panjang;
 - e. PPLd Desa Cijujung di Kecamatan Cibungbulang;
 - f. PPLd Desa Pabangbon dan Desa Karacak di Kecamatan Leuwiliang;
 - g. PPLd Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan;
 - h. PPLd Desa Ciampea Udik di Kecamatan Ciampea;
 - i. PPLd Desa Sirnagalih di Kecamatan Tamansari;
 - j. PPLd Desa Cidokom dan Kampung sawah di Kecamatan Rumpin;
 - k. PPLd Desa Cibitung Tengah, Desa Tapos II dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya;
 - l. PPLd Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua di Kecamatan Nanggung;
 - m. PPLd Desa Parigimekar di Kecamatan Ciseeng;
 - n. PPLd Desa Pasir Gaok di Kecamatan Rancabungur;
 - o. PPLd Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;
 - p. PPLd Desa Cipelang di Kecamatan Cijeruk;
 - q. PPLd Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur di Kecamatan Caringin;
 - r. PPLd Desa Cibedug di Kecamatan Ciawi;
 - s. PPLd Desa Sukamaju di Kecamatan Megamendung;

- t. PPLd Desa Sukadamai di Kecamatan Sukamakmur;
- u. PPLd Desa Sirnagalih dan Desa Singasari di Kecamatan Jonggol;
- v. PPLd Desa Cikutamahi di Kecamatan Cariu; dan
- w. PPLd Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa dan Desa Pasir tanjung di Kecamatan Tanjungsari.



Gambar 6.3
Peta Rencana Struktur Ruang

Kebijakan sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi:

1. Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada seperti pelebaran jalan dan atau penataan gerbang tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi.
2. Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru, meliputi:
 - a. jalan tol/bukaan Jalan Tol Ruas Antasari - Depok - Susukan - Kemang – Dramaga - Caringin;
 - b. jalan tol Ruas Cimanggis – Cibitung;
 - c. jalan tol Ruas Bogor - Ciawi – Sukabumi;

- d. jalan tol Bogor Outer Ring Road Ruas Kedung Halang - Kemang;
 - e. bukaan akses tol Sentul Selatan-Cipambuan
 - f. bukaan jalan tol Ruas Sukaraja – Pandansari;
 - g. bukaan jalan tol Ruas Tangerang – Tenjo – Maja; dan
 - h. bukaan jalan tol Ruas Jasinga – Tenjo.
3. Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada, meliputi:
- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 - 1) Ruas Jalan Cilodong/Batas Depok– Batas Kota Bogor; dan
 - 2) Ruas Jalan Ciawi – Benda.
 - b. Jalan Kolektor Primer I meliputi:
 - 1) Ruas Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten) – Batas Kota Jasinga;
 - 2) Ruas Jalan Raya Jasinga (Jasinga);
 - 3) Ruas Jalan Cigelung Baru (Jasinga);
 - 4) Ruas Jalan Batas Kota Jasinga – Batas Kota Leuwiliang;
 - 5) Ruas Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang);
 - 6) Ruas Jalan Batas Kota Leuwiliang – Batas Kota Bogor;
 - 7) Ruas Jalan Raya Dramaga;
 - 8) Ruas Jalan Batas Depok/Bogor - Bogor;
 - 9) Ruas Jalan Kemang – Kedunghalang;
 - 10) Ruas Jalan Transyogi (Depok);
 - 11) Ruas Jalan Letda Nasir (Cikeas);
 - 12) Ruas Jalan Cimanggis – Nagrak;
 - 13) Ruas Jalan Raya Ciawi (Bogor); dan
 - 14) Ruas Jalan Ciawi - Puncak.
4. Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional yaitu Ruas Jalan Narogong – Cileungsi;
5. Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada, meliputi:
- a. Jalan Narogong - Cileungsi
 - b. Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup)
 - c. Jalan Mayor Oking (Citeureup);
 - d. Jalan Mayor Oking (Cibinong);

- e. Jalan Cileungsi - Cibeet;
 - f. Jalan Batas Tangerang/Bogor - Parung;
 - g. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
 - h. Jalan Parungpanjang - Bunar;
 - i. Jalan Pondok Rajeg - Harapan Jaya - Tegar Beriman; dan
 - j. Jalan Cibarusah - Cibucil.
6. Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru, meliputi:
- a. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
 - b. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sentul – Kandang Roda;
 - c. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Gunung Batu -Arca (Istana Cipanas);
 - d. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung;
 - e. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Jasinga - Koleang;
 - f. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Koleang - Lebak Pinang;
 - g. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sukahati - Jampang;
 - h. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sentul - Sukamakmur - Cariu; dan
 - i. Pembangunan Jalan Baru Ruas Bantar Kuning - Jagatamu (Batas Karawang).
7. Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi yaitu Ruas Jalan Gunung Putri – Lulut.
8. Jalan Kabupaten, meliputi:
- a. Pengembangan Jalan Arteri Sekunder yang meliputi:
 - 1) Ruas Lingkar GOR Pakansari;
 - 2) Ruas Lingkar Utara dan Selatan Leuwiliang;
 - 3) Ruas Lingkar Parung;
 - 4) Ruas Lingkar Dramaga;
 - 5) Ruas Lingkar Laladon; dan
 - 6) Ruas Banjar Waru-Nagrog.
 - b. Pengembangan Jalan Kolektor Primer IV yang meliputi ruas:
 - 1) Ruas Gerbang Pemda - Cibinong - Gerbang Tol Citeureup;

- 2) Ruas Tlajung Udik - Wanaherang – Cileungsi;
 - 3) Ruas Wanaherang - Nagrak - Ciangsana - Bojongkulur;
 - 4) Ruas Cariu - Batas Bekasi;
 - 5) Ruas Puspanagara - Tajur - Sukamakmur - Wargajaya;
 - 6) Ruas Cipicung - Cipelang - Cisalada - Tugujaya;
 - 7) Ruas Kampung Sawah – Karehkel – Leuwiliang – Karacak - Purwasari – Klapanunggal (Batas Sukabumi);
 - 8) Ruas Sukamulya – Rumpin - Kampung Sawah -Banyuasih - Cigudeg - Sukajaya - Malasari (Poros Barat);
 - 9) Ruas Jasinga - Koleang – Tegalwangi;
 - 10) Ruas Jasinga - Tenjo – Singabangsa;
 - 11) Ruas Curug – Rawakalong; dan
 - 12) Ruas Gandoang – Raga Manunggal (Batas Bekasi).
- c. Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi ruas:
- 1) Ruas Kopo - Sukamanah - Citapen - Lemah Duhur - Cinagara - Muarajaya;
 - 2) Ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder – Pamijahan – Nanggung – Pasir Madang - Curug;
 - 3) Ruas Gunung Malang - Cinangneng - Cibanteng;
 - 4) Ruas Cemplang - Ciampea - Rancabungur - Semplak;
 - 5) Ruas Bojongrangkas - Ciampea;
 - 6) Ruas Rancabungur - Putatnutug - Kampung Sawah;
 - 7) Ruas Putatnutug - Ciseeng - Warujaya - Parung;
 - 8) Ruas Gunung Sindur - Sukamulya - Parungpanjang;
 - 9) Ruas Cidokom – Cibadung – Jampang;
 - 10) Ruas Lumpang - Batok - Tenjo;
 - 11) Ruas Pasirmadang – Sukajaya - Kalongliud;
 - 12) Ruas Gunung Bunder – Cibuntu – Bojongrangkas;
 - 13) Ruas Tanjungsari – Warung Menteng – Caringin;
 - 14) Ruas Cisalada – Cigombong;
 - 15) Ruas Lingkar Bojonggede;
 - 16) Ruas Jalan Ciomas - Kreteg – Laladon;
 - 17) Ruas Citaringgul – Cibadak – Tajur;
 - 18) Ruas Kembangkuning - Bantarjati;

- 19) Ruas Jalan Lulut – Tajur; dan
 - 20) Ruas Kembang Kuning - Ligar Mukti – Singasari.
9. pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi:
- a. pengembangan sistem bus rapid transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;
 - b. pengembangan sistem bus rapid transit di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojonggede;
 - c. pengembangan sistem bus rapid transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong - Cileungsi, Bojonggede - Parung, Ciawi - Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga - Leuwiliang;
 - d. pengembangan sistem angkutan monorel/light rail transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja;
 - e. pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTJ) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi
10. Rencana pengembangan terminal penumpang, meliputi:
- a. pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe C di Bojonggede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parungpanjang, Tenjo dan Cariu; dan
 - d. penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan.
11. Rencana pengembangan terminal barang/peti kemas
- a. terminal barang/peti kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;

- b. alternatif terminal barang/peti kemas di Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo atau di Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang;
 - c. alternatif terminal barang/peti kemas di Kecamatan Cigombong; dan
 - d. alternatif terminal barang/peti kemas di Kecamatan Jonggol.
12. Rencana pengembangan kawasan dengan konsep *Transit Oriented Development (TOD)* merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojonggede, Cibinong dan Cileungsi.
13. pengembangan kawasan *park and ride* yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tamansari.
14. Jalur Kereta Api, meliputi:
- a. rehabilitasi dan pengembangan kembali jalur Jakarta - Bogor
 - b. rehabilitasi dan pengembangan kembali jalur Citayam - Cibinong - Nambo;
 - c. pengembangan jalur ganda Parung Panjang - Tenjo;
 - d. pengembangan jalur Bogor - Cigombong - Sukabumi;
 - e. pembangunan jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi;
 - f. pembangunan jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur;
 - g. pembangunan jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang; dan
 - h. pembangunan jalur Bogor - Rangkas Bitung.
 - i. Pengembangan sistem angkutan monorel/light rail transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta – Cibinong (Sentul) – Sukaraja.

15. Stasiun Kereta Api, meliputi:

- a. optimalisasi stasiun penumpang yang sudah ada di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede dan di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja.
- b. pengembangan stasiun penumpang yang meliputi:
 - 1) stasiun penumpang Desa Maseng di Kecamatan Cijeruk;
 - 2) stasiun penumpang Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;
 - 3) stasiun penumpang Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong;
 - 4) stasiun penumpang Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
 - 5) stasiun penumpang Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
 - 6) stasiun penumpang Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang; dan
 - 7) stasiun penumpang Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
- c. pembangunan stasiun penumpang yang meliputi:
 - 1) stasiun penumpang di Kecamatan Cileungsi;
 - 2) stasiun penumpang di Kecamatan Bojong Gede;
 - 3) stasiun penumpang di Kecamatan Gunung Putri;
 - 4) stasiun penumpang di Kecamatan Babakan Madang;
 - 5) stasiun penumpang di Kecamatan Sukaraja;
 - 6) stasiun penumpang di Kecamatan Jonggol;
 - 7) stasiun penumpang di Desa Batok Kecamatan Tenjo;
 - 8) stasiun penumpang di Kecamatan Dramaga;
 - 9) stasiun penumpang di Kecamatan Leuwiliang;
 - 10) stasiun penumpang di Kecamatan Cigudeg;
 - 11) stasiun penumpang di Kecamatan Jasinga;
 - 12) stasiun penumpang di Kecamatan Gunung Sindur;
 - 13) stasiun penumpang di Kecamatan Parung; dan
 - 14) stasiun penumpang di Kecamatan Tajur Halang.

16. Bandar udara, meliputi:

- a. Bandar udara untuk pertahanan keamanan Atang Senjaya di Kecamatan Kemang;

- b. Bandar udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin;
 - c. Bandar udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong; dan
 - d. Bandar udara perintis sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengembangan sarana pembangkit tenaga listrik, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Cibogo, terdapat di Kecamatan Megamendung;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak, terdapat di Kecamatan Leuwiliang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Leuwiliang (Sungai Karacak dan Sungai Cianten), Nanggung dan Pamijahan (Sungai Cikaniki), Cisarua dan Megamendung (Sungai Ciesek);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), meliputi:
 - 1. lapangan Panas Bumi Awi Bengkok Gunung Salak; dan
 - 2. pengembangan energi Panas Bumi Ciseeng, Gunung Pancar, Gunung Gede Pangrango dan Bujal-Jasinga (Gajrug);
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Nambo; dan
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cioray.
18. Pengembangan jaringan prasarana energi, meliputi:
- a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - 1. Jaringan pipa transmisi gas bumi Nagrak - Bogor -Gunung Putri;
 - 2. Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi Bogor-Cibinong;
 - 3. Pengembangan sumber minyak dan gas bumi, meliputi Blok Citarum yang berada di 8 (delapan) kecamatan meliputi Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari serta Blok Rangkas yang terdiri dari

14 (empat belas) Kecamatan, meliputi Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Parung dan Kecamatan Ciseeng;

4. Pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Jasinga;
 5. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di ruas jalan utama yang memiliki kepadatan tinggi khususnya untuk angkutan penumpang umum; dan
 6. Pengembangan Jaringan Pipa Gas Bumi di Perkotaan Cibinong.
- b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
- 1) Pengembangan instalasi Gardu Induk, meliputi:
 - a) Gardu Induk Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri;
 - b) Gardu Induk Cibinong di Kecamatan Cibinong;
 - c) Gardu Induk Semen Baru di Kecamatan Klapanunggal;
 - d) Gardu Induk Sentul di Kecamatan Babakan Madang;
 - e) Gardu Induk Ciawi di Kecamatan Ciawi; dan
 - f) Pembangunan Gardu Induk Baru di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Ciseeng, Jasinga, Cigudeg dan Kecamatan Jonggol.
 - 2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV melalui:
 - a) Kecamatan Cigombong;
 - b) Kecamatan Caringin;
 - c) Kecamatan Ciawi;

- d) Kecamatan Sukaraja;
 - e) Kecamatan Babakan Madang;
 - f) Kecamatan Citeureup;
 - g) Kecamatan Gunungputri;
 - h) Kecamatan Klapanunggal;
 - i) Kecamatan Cileungsi;
 - j) Kecamatan Leuwisadeng;
 - k) Kecamatan Leuwiliang;
 - l) Kecamatan Cibungbulang;
 - m) Kecamatan Ciampea;
 - n) Kecamatan Dramaga;
 - o) Kecamatan Tajurhalang;
 - p) Kecamatan Ciseeng;
 - q) Kecamatan Parung;
 - r) Kecamatan Gunungsindur;
 - s) Kecamatan Jasinga;
 - t) Kecamatan Cigudeg;
 - u) Kecamatan Rumpin;
 - v) Kecamatan Jonggol;
 - w) Kecamatan Bojonggede;
 - x) Kecamatan Cijeruk;
 - y) Kecamatan Caringin;
 - z) Kecamatan Cibinong;
 - aa) Kecamatan Pamijahan;
 - bb) Kecamatan Tanjungsari;
 - cc) Kecamatan Cariu;
 - dd) Kecamatan Megamendung; dan
 - ee) Kecamatan Parung Panjang.
- 3) Jaringan Transmisi Suralaya - Cilegon - Cibinong -Purwakarta - Bandung - Kuningan - Ungaran - Surabaya - Probolinggo;
 - 4) Jaringan Tranmisi Cibinong - Tasikmalaya - Banyumas - Klaten;
 - 5) Jaringan Transmisi Cibinong - Bekasi; dan
 - 6) Jaringan Transmisi Cibinong - Saguling - Bandung Selatan.

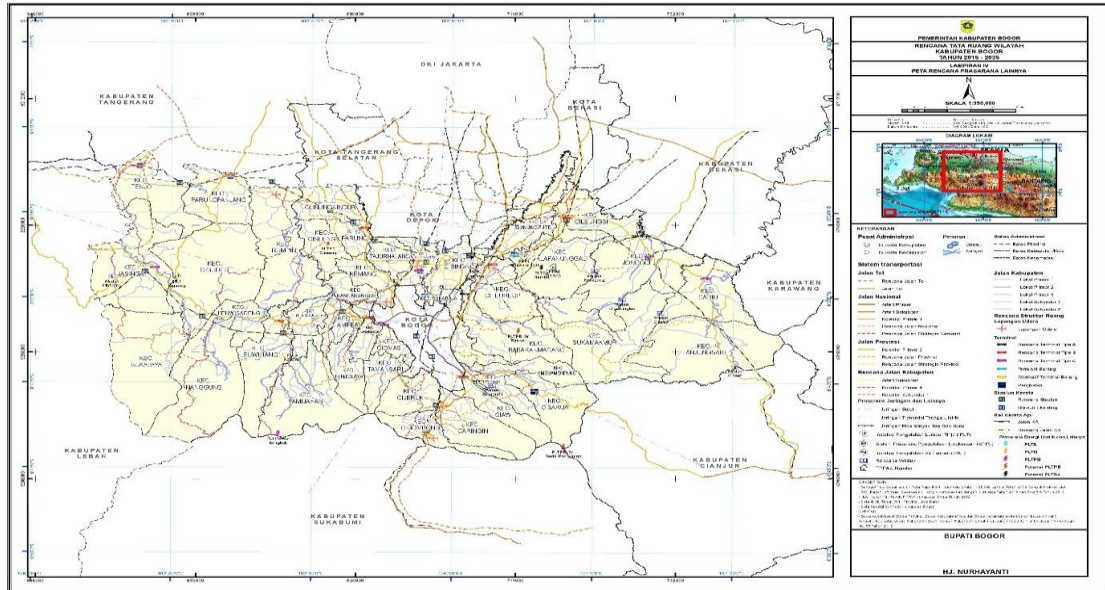
19. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. sumber air berupa air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi, yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane, dan WS Citarum;
 - b. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian mencakup DAS Cidurian dan DAS Ciujung;
 - c. WS Ciliwung-Cisadane mencakup DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Angke, DAS Ciliwung, dan DAS Bekasi;
 - d. WS Citarum mencakup DAS Citarum; dan
 - e. Sumber air berupa air tanah pada CAT meliputi CAT lintas provinsi yaitu CAT Serpong-Tangerang dan CAT Jakarta, CAT lintas kabupaten/kota yaitu CAT Bogor dan CAT Bekasi-Karawang, serta wilayah bukan CAT di Klapanunggal dan Cigudeg.
20. Pengembangan bendungan, meliputi:
 - a. Bendungan pada Waduk Cijurey di Kecamatan Sukamakmur;
 - b. Bendungan pada Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjungsari;
 - c. Bendungan pada Waduk Cipamingkis di Kecamatan Jonggol;
 - d. Bendungan pada Waduk Narogong di Kecamatan Klapanunggal;
 - e. Bendungan pada Waduk Ciberang di Kecamatan Sukajaya; dan
 - f. Bendungan pada Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kecamatan Megamendung dan Cisarua.
21. Pengembangan Sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a. bendung, mencakup bendung pada Daerah Irigasi (DI) Angke V dan bendung pada DI Karadenan yang merupakan DI lintas kabupaten/kota kewenangan Pemerintah Provinsi dan mengalir wilayah Kota Depok.
 - b. irigasi permukaan, mencakup:
 - 1) DI lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Cipamingkis seluas kurang lebih 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar;

- 2) DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Cisadane Empang seluas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar; DI Parakanjati seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar; DI Ciliwung Katulampa seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar; DI Cibanon seluas kurang lebih 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hektar; DI Bantarjati seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; DI Kranji seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar; dan DI Cibalok seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar;
 - 3) DI utuh kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Cihoe Cikumpeni seluas kurang lebih 1.486 (seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar dan DI Sasak seluas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) hektar
22. Pengembangan Sistem penyediaan air baku, meliputi:
- a. rencana pemanfaatan air baku yang mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - b. ketentuan pemanfaatan air baku dilakukan berdasarkan standar kualitas sumber air baku dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sistem penampungan air baku di Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibinong;
 - d. upaya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA/PDAM) di Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Gunung Sindur; dan
 - e. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, saluran perpipaan air baku, jaringan perpipaan air minum, dan instalasi

pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman.

23. Pengembangan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer ditetapkan di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Parung Panjang;
 - b. jaringan drainase sekunder ditetapkan di daerah padat penduduknya dengan blok-blok daerah permukiman yang sempit antara lain di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunung Putri; dan
 - c. jaringan drainase tersier ditetapkan di Kecamatan Citeureup, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Sukaraja.
24. Pengembangan sistem jalur evakuasi bencana, meliputi
 - a. jalur evakuasi bencana longsor menuju tempat evakuasi yang berada di:
 - 1) Kecamatan Babakan Madang yang tersebar di Desa Karang Tengah;
 - 2) Kecamatan Sukamakmur yang tersebar di Desa Cibadak; dan
 - 3) Kecamatan Sukajaya yang tersebar di Desa Sukajaya.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir menuju tempat evakuasi yang berada di:
 - 1) Kecamatan Gunung Putri yang tersebar di Desa Bojong Kulur; dan
 - 2) Kecamatan Parung Panjang yang tersebar di Desa Parung Panjang.
 - c. jalur evakuasi bencana gempa bumi menuju tempat evakuasi yang berada di :
 - 1) Kecamatan Tamansari yang tersebar di Desa Tamansari; dan
 - 2) Kecamatan Pamijahan yang tersebar di Desa Pamijahan.
 - d. tempat evakuasi bencana meliputi: 1. gedung serba guna kecamatan; 2. gedung balai desa/kelurahan; 3. gedung sekolah; dan 4. alun-alun/lapangan.

- e. jalur evakuasi bencana memanfaatkan jaringan jalan utama menuju tempat evakuasi bencana; dan
- f. pemasangan rambu-rambu petunjuk arah evakuasi di tempat-tempat yang mudah dilihat.

**Gambar 6.4****Peta Jaringan Prasarana Wilayah****c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang**

1. Rencana kawasan lindung diarahkan sebesar kurang lebih 46 % (empat puluh enam persen) dari luas daerah, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung di dalam kawasan hutan diarahkan sebesar kurang lebih 14 % (empat belas persen) dari luas daerah; dan
 - b. kawasan lindung di luar kawasan hutan diarahkan sebesar kurang lebih 32% (tiga puluh dua persen) dari luas daerah.
2. Kawasan pelestarian alam, terdiri dari:
 - a. Taman Nasional, meliputi:
 - 1) Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg; dan

- 2) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong.
- b. Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) Taman Wisata Alam Gunung Pancar yang terletak di Kecamatan Babakan Madang; dan
 - 2) Taman Wisata Alam Telaga Warna yang terletak di Kecamatan Cisarua.
3. Kawasan suaka alam adalah cagar alam yang meliputi:
 - a. Cagar alam Yanlapa yang terletak di Kecamatan Jasinga;
 - b. Cagar alam Talaga Warna yang terletak di Kecamatan Cisarua;
 - c. Cagar alam Dungus Iwul yang terletak di Kecamatan Jasinga;
 - d. Cagar alam Arca Domas yang terletak di Kecamatan Megamendung.
4. Kawasan resapan air terletak di:
 - a. Kecamatan Nanggung;
 - b. Kecamatan Leuwiliang;
 - c. Kecamatan Leuwisadeng;
 - d. Kecamatan Pamijahan;
 - e. Kecamatan Tenjolaya;
 - f. Kecamatan Tamansari;
 - g. Kecamatan Cisarua;
 - h. Kecamatan Ciawi;
 - i. Kecamatan Citeureup;
 - j. Kecamatan Megamendung;
 - k. Kecamatan Caringin;
 - l. Kecamatan Cijeruk;
 - m. Kecamatan Cigombong;
 - n. Kecamatan Babakan Madang;
 - o. Kecamatan Sukaraja;
 - p. Kecamatan Cariu;
 - q. Kecamatan Jasinga;
 - r. Kecamatan Jonggol;

- s. Kecamatan Sukajaya;
 - t. Kecamatan Sukamakmur; dan
 - u. Kecamatan Tanjungsari.
5. Kawasan sempadan sungai diarahkan untuk:
- a. DAS Ciliwung, seperti pada Sungai Ciesek dan Sungai Ciliwung;
 - b. DAS Angke, seperti pada Sungai Pesanggrahan dan Sungai Kali Angke;
 - c. DAS Cileungsi, seperti pada Sungai Cibadak, Sungai Cijanggal, Sungai Cikeruh, Sungai Ciherang, Sungai Citeureup, Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi;
 - d. DAS Cikarang, seperti pada Sungai Cipatujah dan Sungai Cikarang;
 - e. DAS Cipamingkis, seperti pada Sungai Cipamingkis, Sungai Cisuren, Sungai Cibeet, Sungai Cihoe, Sungai Ciomas dan Sungai Cibadak;
 - f. DAS Cisadane, seperti pada Sungai Cisadane, Sungai Ciapus, Sungai Cihideung, Sungai Cinangneng, Sungai Ciampea, Sungai Cianten, Sungai Ciaruteun, Sungai Cikaniki, Sungai Citempuhan, Sungai Cipinang, Sungai Citeureup, Sungai Cigamea, Sungai Cikuluwung dan Sungai Cipuraseda;
 - g. DAS Cimanceuri, seperti pada Sungai Cimanceuri dan Sungai Cimatuk; dan
 - h. DAS Cidurian seperti pada Sungai Cidurian.
6. kawasan sekitar waduk/situ diarahkan untuk:
- a. kawasan sekitar waduk/situ pada situ-situ yang ada di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
 - b. penetapan sempadan sekitar waduk/situ meliputi daratan sepanjang tepian waduk/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/situ antara 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
7. Kawasan sekitar mata air diarahkan untuk:
- a. mata air di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk,

Kecamatan Cigombong, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, dan Kecamatan Sukamakmur; dan

- b. penetapan kawasan sekitar mata air adalah perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

8. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. lingkungan non bangunan, terletak di :
 - 1. Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg;
 - 2. Situs Purbakala Cibalay di Kecamatan Tenjolaya;
 - 3. Situs Purbakala Megalit di Kecamatan Ciampea;
 - 4. Situs Purbakala Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; dan
 - 5. Situs Purbakala Garisul di Kecamatan Jasinga.
- b. lingkungan bangunan non gedung, terletak di:
 - 1. Cagar Budaya Dungus Iwul di Kecamatan Jasinga;
 - 2. Arca Wisnu di Kecamatan Sukamakmur; dan
 - 3. Makam Jerman di Kecamatan Megamendung.
- c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, terletak di :
 - 1. Bangunan Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya;
 - 2. Bangunan Kampung Adat Lemah Duhur di Kecamatan Caringin;
 - 3. Bangunan Museum Pasir Angin di Kecamatan Cibungbulang; dan
 - 4. Bangunan Kampung Budaya Sindangbarang di Kecamatan Tamansari.

9. Kawasan rawan bencana alam

- a. Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan

- Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cigombong.
- b. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Sukaraja
10. Kawasan lindung geologi diarahkan sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
- a. Kawasan cagar alam geologi
1. Gunung Kapur (Air Panas) di Kecamatan Parung;
 2. Gunung Cibodas di Kecamatan Ciampea; dan
 3. Gunung Rengganis (Gua Gudawang) di Kecamatan Cigudeg.
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:
1. Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Pamijahan;
 2. Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
 3. Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya
 4. kawasan rawan gerakan tanah tinggi, terletak di: Kecamatan Nanggung; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Sukamakmur; dan Kecamatan Tanjungsari.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi:

1. kawasan imbuhan air tanah pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang dan Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi;
 2. kawasan imbuhan air tanah pada wilayah CAT Bogor dan Bekasi-Karawang yang merupakan CAT Lintas Kabupaten/Kota;
 3. kawasan imbuhan air tanah pada wilayah bukan CAT Klapanunggal dan Cigudeg.
11. Kawasan lindung lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah, terletak di :
- a. Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
 - b. Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan
 - c. Gunung Salak Endah di Kecamatan Pamijahan.
12. Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas terletak di: Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Sukamakmur; dan Kecamatan Tanjungsari.
 - b. Kawasan hutan produksi tetap, terletak di: Kecamatan Tenjo; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Cariu; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Sukamakmur.
13. Kawasan peruntukan pertanian
- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
 1. kawasan peruntukan lahan basah yang diarahkan sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) dari luas Daerah merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, terletak di: Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan

Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.

2. kawasan peruntukan lahan kering yang diarahkan sebesar kurang lebih 7% (tujuh persen) dari luas Daerah terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.

b. Kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan diarahkan sebesar kurang lebih 14% (empat belas persen) dari luas Daerah, terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan

Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.

c. Kawasan peternakan, terdiri dari:

1. kawasan ternak kecil dan aneka ternak, terletak di sebagian: Kecamatan Bojong Gede; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cariu; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tenjolaya; dan Kecamatan Tenjo.
2. kawasan ternak besar, terletak di sebagian : Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya;

Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Tenjo.

3. kawasan ternak unggas, terletak di sebagian: Kecamatan Cibinong; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tamansari.

13. Kawasan perikanan, terdiri dari:

- a. Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar, terletak di sebagian: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cariu; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Cibinong; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Tenjolaya; dan Kecamatan Tamansari.
- b. Pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan dan pengembangan industri.
- c. Pengembangan pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan.

- d. Pengembangan kawasan minapolitan, terletak di sebagian:
 - 1. Kecamatan Ciseeng (Desa Babakan, Desa Parigi Mekar, Desa Putat Nutug, Desa Ciseeng, Desa Cibentang, Desa Cibeuteung Udik, Desa Cibeuteung Muara dan Desa Cihoe);
 - 2. Kecamatan Parung (Desa Bojongindah, Desa Cogreg, Desa Bojongsempu, Desa Warujaya, Desa Waru, Desa Pamegarsari dan Desa Iwul);
 - 3. Kecamatan Gunung Sindur (Desa Pengasinan, Desa Cibinong, Desa Gunungsindur, Desa Curug, Desa Cidokom dan Desa Pabuaran); dan
 - 4. Kecamatan Kemang (Desa Pabuaran, Desa Kemang, Desa Tegal, Desa Pondok Udik, Desa Bojong dan Desa Jampang).
- 14. Kawasan peruntukan industri diarahkan sebesar kurang lebih 3% (tiga persen) dari luas Daerah, terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibinong; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cariu; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; dan Kecamatan Tenjo.
- 15. Kawasan pariwisata, meliputi:
 - a. Kawasan pariwisata alam, antara lain:
 - 1. Curug Cisuren, Curug Kembar, Telaga Warna, Mata Air Ciburial, Panorama Alam Riung Gunung, Perkebunan Teh Gunung Mas, di Kecamatan Cisarua;
 - 2. Curug Panjang, Curug Cilember, di Kecamatan Megamendung;
 - 3. Perkebunan Teh Cianten, Curug Cibeureum, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Curug Ngumpet, Curug Seribu, Curug Cigamea, Air Panas Gunung Salak Endah, di Kecamatan Pamijahan;
 - 4. Curug Nangka di Kecamatan Tamansari;
 - 5. Curug Luhur di Kecamatan Tenjolaya;
 - 6. Danau Lido di Kecamatan Cigombong;
 - 7. Curug Cikaracak di Kecamatan Caringin;

8. Curug Luhur, Air Panas Gunung Pancar, di Kecamatan Babakan Madang;
 9. Curug Cibeureum, Setu Rawa Gede dan Curug Ciherang, di Kecamatan Sukamakmur;
 10. Setu Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri;
 11. Curug Gebluk di Kecamatan Cibungbulang;
 12. Curug Ciampea di Kecamatan Ciampea;
 13. Air Panas Ciseeng/Tirtasanita di Kecamatan Parung;
 14. Curug Bandung di Kecamatan Jasinga;
 15. Gunung Munara di Kecamatan Rumpin;
 16. Gua Lalay dan Pemandian Sodong di Kecamatan Klapanunggal;
 17. Gua Gudawang di Kecamatan Cigudeg; dan
 18. Wana Wisata Bodogol di Kecamatan Cigombong.
- b. Kawasan pariwisata budaya, antara lain:
1. Makam Mbah Arya, Arca Domas di Kecamatan Megamendung;
 2. Masjid Attawun di Kecamatan Cisarua;
 3. Kampung Budaya Sindang Barang, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Kecamatan Tamansari;
 4. Situs Batu Tapak di Kecamatan Sukamakmur;
 5. Situs Batu Tulis Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang;
 6. Kampung Urug di Kecamatan Sukajaya;
 7. Kampung Garisul di Kecamatan Jasinga;
 8. Makam Syekh Abdul Rosyid di Kecamatan Ciseeng; dan
 9. Situs Megalit di Kecamatan Tenjolaya.
- c. Kawasan pariwisata buatan, antara lain:
1. Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
 2. Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari; dan
 3. Taman Wisata Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi.
16. Kawasan peruntukan permukiman, meliputi:
- a. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan sebesar kurang lebih 5% (lima persen) dari luas Daerah terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan

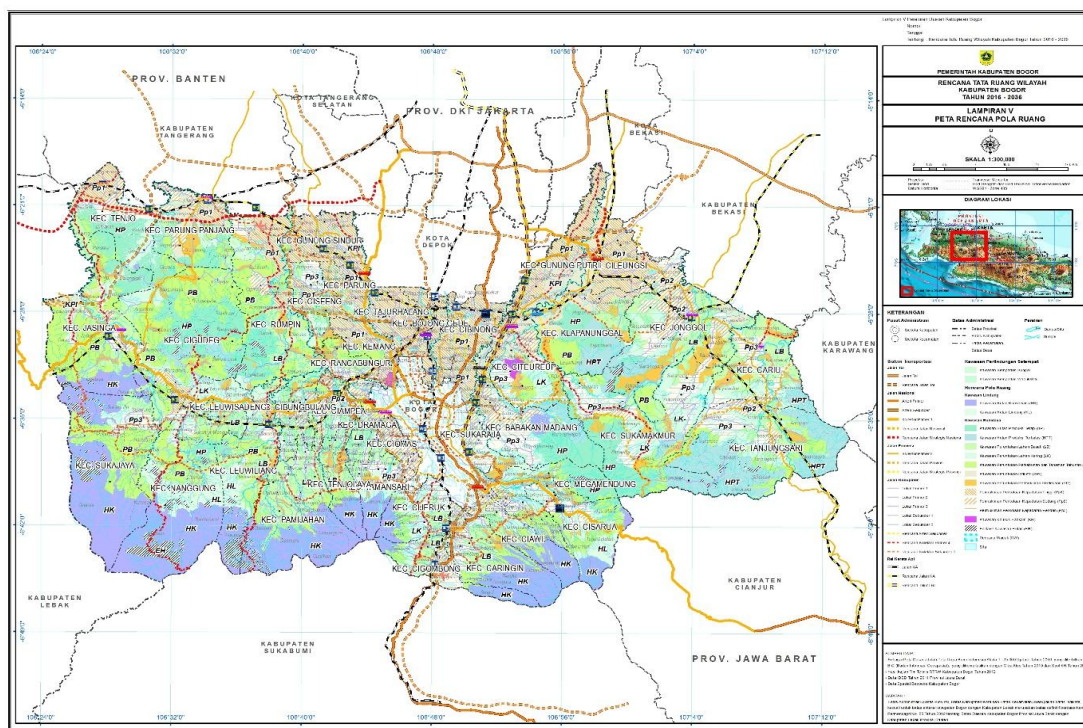
Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.

b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan, terdiri dari:

1. permukiman perkotaan kepadatan tinggi, terletak di sebagian: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Bojong Gede; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cibinong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tajurhalang; dan Kecamatan Tenjo.
2. permukiman perkotaan kepadatan sedang, terletak di sebagian : Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan

Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Tenjo.

3. permukiman perkotaan kepadatan rendah, terletak di sebagian: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.



Gambar 6.5

Peta Rencana Pola Ruang

Arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Bogor melalui penyusunan dan pelaksanaan program

penataan/pengembangan daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci dijelaskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor.

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Beberapa hal yang menjadi alasan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor adalah :

1. Luas wilayah
2. Jumlah penduduk yang cukup besar
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah

Secara umum arahan kebijakan daerah terkait pembentukan daerah adalah :

1. Pemerintah daerah dapat melaksanakan penataan daerah berdasarkan desain penataan daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Penataan daerah dapat berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang diselaraskan dengan kepentingan strategis nasional.

3. Pemerintah daerah dapat melakukan pembentukan daerah, pembentukan kecamatan, pembentukan kelurahan, pembentukan desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan jangka menengah yang diambil terkait pembentukan daerah adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan wacana pembentukan Kabupaten Bogor Timur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait BUMD

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Disamping itu, keberadaan BUMD menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya visi dan misi daerah serta indikator kinerja utama daerah dalam hal kontribusi target pelaksanaan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Keberadaan BUMD di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung tercapainya target Pancakarsa lingkup karsa Bogor Maju. Untuk itu, strategi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui peningkatan kinerja BUMD. Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja BUMD adalah melalui :

1. Optimalisasi peran BUMD dalam mendukung tercapainya visi dan misi daerah.
2. Pembinaan terhadap manajemen BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pencapaian target kinerja utama daerah.
3. Melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah.

6.5 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program

pembangunan daerah menjadi dasar pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi, termasuk program yang menaungi target-target PANCAKARSA. Keterkaitan antara Program pembangunan daerah dengan Program Prioritas Pembangunan PANCAKARSA sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.3
Keterkaitan Program Strategis Pancakarsa dengan Program
Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD pengampu
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	Tuntas Rehabilitasi SD dan SMP dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021)	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Utama SD	Disdik
		Penerbitan Kartu Bodas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD	Disdik
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Disdik
		Pemberian bantuan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Utama SMP	Disdik
		Pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah	Program Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Utama SMP	Disdik
		Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD	Disdik
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Disdik
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
		Forkopimda Goes to School	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Setda
		Peningkatan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		Penambahan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan		Disdik



MISI	TUJUAN	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD pengampu
	Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	keagamaan		
		Pemberian kartu sehat	Program Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Pelayanan Bogor Siaga		
		Gerakan Bogor Bebas Stunting		
		Gerakan Bogor Bebas Asap Rokok		
		Pembangunan RSUD Bogor Utara	Program Pelayanan Kesehatan	Dinkes
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Pembangunan career center	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Disnaker
		Pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		Penerbitan Kartu Tani Bogor	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	DTPHP
		gerakan beli beras petani Bogor	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	DTPHP
		Produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	DTPHP
		Pembangunan Terminal Agribisnis/Agro Distribution Centre	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura	DTPHP
		Petani Millenial di Kabupaten Bogor	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	DTPHP
		Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional	Program Pengembangan Pemasaran	Disbudpar
		Festival wisata desa	Program Pengembangan Kemitraan	Disbudpar
		Pengembangan Geopark Pongkor	Program Pengembangan Destinasi pariwisata	Disbudpar
		Gerakan bela beli produk UKM/IKM	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	DiskopUKM
			Program pengembangan industri kecil dan menengah	Disdagin
		Optimalisasi dan pengembangan Bumdes	Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa	DPMD
		Pembangunan GOM Kecamatan	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Dispora
		Pembangunan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PMKS (Graha Pancakarsa)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinsos



MISI	TUJUAN	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD pengampu
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik		Penyelenggaraan Sekolah Pemerintah Desa	Program Pemerintahan Desa	DPMD
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Betonisasi jalan desa	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	DPUPR
		Penataan jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari	Program Pembangunan Jalur Pedestrian	DPUPR
		Terbangunnya jalan Poros Tengah Timur	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	DPUPR
		Terbangunnya jalan Bojonggede – Kemang		
		Terbangunnya jalan lingkaran Kebun Raya Cibinong		
		Terbangunnya jalan Bantarkaret - Pabangbon		
		Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung		
		Penataan kawasan Simpang Parung		
		Terbangunnya akses lingkaran jalan tambang		
		Terbangunnya jalan lingkaran Gunung Sindur		
		Pembangunan Park and Ride	Program Manajemen rekayasa lalu Lintas	Dishub
		Peningkatan kualitas desa melalui Bedah kampung	Program Penataan Perumahan	DPKPP
			Program Penataan Kawasan Permukiman	DPKPP
		Menyediakan ruang terbuka publik	Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman	DPKPP
		Mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik (Antik)	Program Pengelolaan Sampah	DLH
		Penanganan sampah berbasis Zonasi		
Mewujudkan kesalehan sosial	terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Menggiatkan kegiatan Jumling dan Boling	Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Setda
		Gerakan Bogor Ngaos		
		Bedah pesantren		
		Memberikan bantuan legalitas pontren		
		Membangun dan merevitalisasi Islamic Center		



MISI	TUJUAN	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD pengampu
		Menggalakkan aksi Nobat “Nongol Babat”	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Menyelenggarakan festival seni dan budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Disbudpar
		Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande	Program pengelolaan kekayaan budaya	Disbudpar
		Pelestarian bahasa Sunda melalui program Kamis Nyunda	Program Pengembangan Nilai Budaya	Disbudpar
		Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Disbudpar
		Peningkatan kualitas keagamaan melalui program Hafizd Quran	Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Setda
		Peningkatan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMD
			Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Setda
			Program Perlindungan Masyarakat	Satpol PP

Adapun program pembangunan daerah beserta target disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:



Tabel 6.4
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban							
	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas							
	Tujuan 1 :							
1.1	Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	Indeks Pendidikan	poin	61,44		61,50		
	Sasaran 1:							
1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	tahun	7,88		8,14		
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	tahun	12,44		12,60		
	Program :							
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88,95		91,39	85.810.423.000	Disdik



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,75		89,03		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,45		97,46		
		% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	48,11		53,39		
		% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	45,26		50,73		
		Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Sekolah	36,71		36,21		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	%	93,91		95,50		
	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	88,95		91,39	120.355.226.900	Disdik
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,76	334.812.391.646	100,00	36.744.005.800	Disdik
		Nilai Rata-Rata UN SD	poin	74,60		77,98		
	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Utama SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	83,21		83,54	21.411.454.600	Disdik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB	%	92,69		92,70		
		% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	73,00		75,74		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	45,26		50,73		
		Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Sekolah	31,15		31,01		
		% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang	%	92,02		93,51		
		% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	%	77,79		82,23		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Utama SMP	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	92,13		93,08	14.039.000.000	Disdik
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82,97	119.593.470.850	85,39	147.189.299.050	Disdik
		% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	77,84		82,26		
		% SD yang memiliki 6 orang guru	%	96,76		97,40		
		% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	31,20		36,11		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	99,84		99,89		
		% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	88,86		91,10		
		% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	87,23		89,84		
		% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	26,56		31,59		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	84,31		87,47		
		% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	39,33		43,58		
		Rasio Guru SD-MI / Murid	Orang	412,56		393,78		
		Rasio Guru SMP-MTs / Murid	Orang	512,21		502,31		
		Rasio guru SD-MI/rombel	Poin	1,15		1,10		
	Sasaran 2 :							
1.1.2	Meningkatnya budaya literasi	Indeks membaca	poin	52,69		52,81		
	Program :							



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam buku	%	1,30	1.096.834.800	1,80	761.081.000	DAP
	Tujuan 2 :							
1.2	Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	Indeks Kesehatan	poin	77,82		78,80		
		LPP	%	2,20		2,17		
	Sasaran 1:							
1.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan	AHH (Angka Harapan Hidup)	tahun	70,86		71,22		
	Program :							
	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Gizi Masyarakat	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%			80,25	1.133.815.000	Dinkes
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%			90,00		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Cakupan kunjungan bayi	%			95,00		
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan	%	80,70	150.124.070.000	85	72.524.788.000	Dinkes
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		70,58	205.997.841.988		108.930.841.981	Dinkes
	Sasaran 2 :							
1.2.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	poin	86,18		86,73		
	Program :							
	Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,80	1.673.951.400	105,60	4.992.250.000	DKP
		Skor Angka Kecukupan Protein	%	110,90		111,10		
	Sasaran 3 :							
1.2.3	Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	Crude Birth Rate (CBR)	%	25,59		24,80		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program :							
	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%			10,75	685.515.500	DP3AP2KB
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	42,02	1.972.504.600		1.093.572.377	DP3AP2KB
	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan							
	Tujuan 1 :							
2.1	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,21		6,24		
	Sasaran 1:							
2.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	37,93		40,53		
		Tingkat Kemiskinan	%	7,14		6,91		
		Tingkat pengangguran terbuka	%	9,75		9,61		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program :							
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	angka partisipasi angkatan kerja	%	62,71	701.481.400		3.473.150.000	Disnaker
		Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%			11,94		Disnaker
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%			40,00		Disnaker
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	420,00	3.940.997.280		922.760.000	Disnaker
		Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Org			180,00		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial	%			100,00	50.000.000	Dinsos



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Dilatih	%	37,26		37,26	7.184.516.000	Dinsos
	Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%			56,76	7.184.516.000	Dinsos
	Sasaran 2:							
2.1. 2	Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku	Triliun Rupiah	221,55		241,86		
	Program :							
	Program peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan:					8.467.041.000	Distanhorbun
		- Produksi padi	Tom GKG	545.418,00		417.839,00		
		- Produksi palawija	Ton	162.190,00		151.715,00		
		- Produktivitas padi sawah	ku/ha	63,25		55,20		
		- Produktivitas padi gogo	ku/ha	32,58		33,62		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		- Produktivitas palawija	ku/ha	172,02		171,83		
	Program peningkatan produksi hortikultura	- Produksi sayuran	Ton	95.252,00		92.487,00	4.950.276.700	Distanhorbun
		- Produksi buah-buahan	Ton	131.369,00		59.972,00		
		- Produksi tanaman hias bunga	tangkai	4.389.308,00		4.150.786,00		
		- Produksi tanaman hias daun indah	pohon	527.119,00		411.380,00		
		- Produksi tanaman obat	Ton	11.228,00		4.409,00		
		- Produktivitas sayuran	ku/ha	116,05		116,11		
	Program peningkatan produksi tanaman perkebunan	- Produksi tanaman perkebunan	Ton	7.939,00		7.993,34	3.896.687.000	Distanhorbun



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok)					1.392.106.300	Distanhorbun
		- Kelompok Pemula	klpk	377,00		378,00		
		- Kelompok Lanjut	klpk	1.183,00		1.187,00		
		- Kelompok Madya	klpk	278,00		279,00		
		- Kelompok Utama	klpk	20,00		21,00		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging (kg)	ton	182.180,54	9.444.019.392	187.645,40	7.719.571.000	Diskanak
		Produksi Telur (kg)	ton	47.405,81		47.519,77		
		Produksi Susu (liter)	ton	18.591,32		19.334,64		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi (ton)	ton	122.131,00	6.372.176.391	123.962,97	5.209.229.000	Diskanak
		Produksi Benih Ikan (RE)	RE	5.545.493,52		5.628.676,41		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Produksi Ikan Hias (RE)	RE	283.469,46		287.721,04		
		Konsumsi ikan (kg/kap/th)	kg/kap/tahun	29,53		29,77		
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Sentra agribisnis perikanan (lokasi)	Lokasi	2,00	738.592.933	2,00	3.916.880.000	Diskanak
		Produksi olahan produk perikanan (ton)	ton	21.325,00		22.718,00		
	Program Pengembangan Pemasaran	Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisatawan	7.173.278,00	4.211.672.500	7.584.000,00	4.446.987.000	Disbudpar
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	339.931,00		316.000,00		
		Jumlah event pariwisata	event	9,00		10,00		
	Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,56	2.545.873.500	2,00	2.047.078.000	Disbudpar



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pengembangan Destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	buah	953,00	1.076.498.310	N/A		
		Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional	Usaha	1,00		10,00	3.439.837.000	Disbudpar
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil	Jumlah pelatihan kewirausahaan	Orang			400,00	3.767.205.000	Diskopukm
		Jumlah desa wirausaha	desa			2,00		
		Jumlah wirasusaha baru	Orang			280,00		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah komoditi Unggulan IKM	Jenis			5,00	9.614.679.000	Disperdagin
		Jumlah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana IKM	IKM			500,00		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif	lembaga	5,00		5,00	2.231.884.000	DPMD
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN	%	-	118.316.000	4,70	1.504.247.000	DPMPTSP
		Jumlah Nilai investasi PMA - PMDN	Trilyun Rp	8,69		9,10		
		PMA		5,05		5,29		
		PMDN		3,64		3,81		
		Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	20,00		30,00		
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	98,40		4,70		
	Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi	Persentase BUMD yang sehat	%	25,00	4.728.028.906	25,00	1.516.055.000	Setda
	Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik							



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
				2019				
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Tujuan :							
3.1	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	48,00		60,00		
	Sasaran 1 :							
3.1.1	Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,57		79,05		
	Program :							
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Rumusan Kebijakan	11,00	506.260.950	6,00	1.543.386.000	Setda
	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1,08	2.300.255.000	1,00	4.066.699.000	Disdukcapil
	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1,00	737.510.000	1,00	1.212.619.000	Disdukcapil
	Program Pelayanan Perizinan	Izin terbit bidang pemanfaatan ruang	Berkas izin	31.190,00	5.197.289.200	25.000,00	4.637.811.000	DPMPTSP



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Izin terbit bidang operasional	Berkas izin	13.000,00	602.728.300	8.000,00	630.357.000	DPMPTSP
	Sasaran 2 :							
3.1.2	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	opini	WTP		WTP		
		Nilai SAKIP	predikat	B		B		
		Indeks Inovasi Daerah	poin		4.280		6.420	
	Program :							
	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Meningkat	Rp (dalam milyar)	2.794.723.739.852 ,18	-	2.554,36	1.985.601.000	Bappenda
	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	91,67	2.898.662.307	83,33	2.527.096.000	BPKAD



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100.00		100.00		
		Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	86,11		86,11		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/ Tidak Ada	-		Ada		
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penolakan SP2D yang diajukan oleh Perangkat Daerah	%	0.02	1.708.681.350		993.522.000	BPKAD



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%	-		99,90		
		Persentase Kelebihan Bayar Gaji dan Tunjangan PNS	%	0.30		-		
		Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen	-		690,00		
		Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Tidak Lengkap Berdasarkan Per-Undang- Undangan	%	5.67		-		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	-	-	-	93,08		
	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Pencatatan Transaksi Keuangan Real Time di Perangkat Daerah	%	83.33	2.504.994.675		2.525.746.000	BPKAD
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu	-		Tepat		
		Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	83.33		86,11		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDK PBMD	%	86.11	3.006.661.431	86,11	1.970.061.000	BPKAD
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%	83.33		86,11		
		Persentase Pemanfaatan BMD yang tidak digunakan di Perangkat Daerah	%	46.95		-		
		Persentase BMD yang dimanfaatkan	%	-		47,75		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Peningkatan Pengamanan Administrasi BMD yang Memiliki Bukti Kepemilikan	%	30.82		-		
		Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%	-		32,00		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%			100,00	3.734.979.878	Bappedalitbang
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi	%			100,00		
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional	%			80,00		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	15,00		20,00	18.292.126.000	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,63		1,56		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	5,50		34,16		
	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Level			4,00	4.293.650.000	Diskominfo
	Program Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang terbangun	aplikasi			4,00	794.579.000	Diskominfo



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B		B	26.560.000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/ Tidak	ada		ada	9.282.387.000	Setwan
	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/ Tidak			ada	14.650.871.000	Setwan
	Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%			20,83	1.159.321.000	DAP
	Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan							
	Tujuan 1 :							



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
4.1	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah williamson	poin	0,96		0,90		
		Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	56,21		56,71		
	Sasaran 1 :							
4.1.1	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik	Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	84,90		85,00		
	Program :							
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang direhabilitasi	%	1,55	56.278.813.713	0,59	107.181.019.000	DPUPR
		Persentase jembatan yang direhabilitasi	%	0,36		0,18		
		Persentase capaian jalan yang dipelihara	%	57,03		55,74		
		Persentase jembatan yang dipelihara	%	100,00		100,00		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%			100,00		
	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru	KM	-	236.104.186.451	2,00	376.757.323.000	DPUPR
			%	-		16,67		
		Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten	%	7,67		9,59		
		Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten	%	3,78		1,98		
	Sasaran 2 :							



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
4.1.2	Menurunnya tingkat kemacetan	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	55,00		60,00		
	Program :							
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	59.549.461,00		60.144.955,00	907.858.000	Dishub
		rasio ijin trayek	%	0,00		0,00		
		jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus	jumlah terminal	5,00		3,00		
		presentase layanan angkutan darat	%	0,04		0,04		
		rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,00		0,00		
		jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum	jumlah orang	17.864.838,00		18.043.486,38		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
		jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	jumlah orang	586.937,00		592.806,00		
		Integrasi moda angkutan umum	jumlah moda	2,00		6,00		
	Program Manajemen rekayasa lalu Lintas	Pemasangan Rambu-rambu	%	0,14		13,78	50.831.731.000	Dishub
		jumlah fasilitas lalu lintas terpasang	%	0,55		60,30		
		tingkat kinerja jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	V/C ratio	0,01		0,69		
	Sasaran 3 :							
4.1.3	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat	Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh	%	46,20		13,45		
	Program :							
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang tertata	%			93,58	2.789.935.000	DPKPP



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Penataan Lingkungan Permukiman	Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2			1.049.377,78	3.120.461.000	DPKPP
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman/ruang publik terbangun	Lokasi			149,00	4.809.100.000	DPKPP
	Sasaran 4 :							
4.1.4	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	28,205		36,181		
	Program :							
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan sampah	%	28,21	45.517.580.000	36,18	42.284.356.355	DLH
	Sasaran 5 :							
4.1.5	Mengurangi Risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	poin	152,00		150,00		
	Program :							
	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan	%	20,00	1.431.234.500	20,00	680.260.000	BPBD



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program penanggulangan desa rawan bencana alam	Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan	%				574.740.000	BPBD
	Program Penanganan Kebakaran	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	%			27,98	11.560.454.200	Disdamkar
	Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial							
	Tujuan 1 :							
5.1	terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Indeks kebahagiaan	poin	67,94		67,95		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	88,69		88,87		
	Sasaran 1 :							
5.1.1	Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	Indek kerukunan hidup beragama	poin	67,75		67,92		
		Persentase gangguan trantibum	%	NA		84,88		
	Program :							



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Jumlah penyelenggaraa n kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan	21,00	6.261.989.800	24,00	12.766.436.000	Setda
	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100,00	8.211.802.000	100,00	7.710.693.000	Satpol PP
	Sasaran 2 :							
5.1.2	Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	57,10		57,57		
	Program :							
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	30,17	511.321.000		1.210.397.665	DP3AP2KB
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	12,78		27,80		
	Sasaran 3:							



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Pengampu
						2019		
				Realisasi	Rp.	Target	Rp.	
5.1.3	Pelestarian seni dan budaya	Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	N/A		20,00		
	Program :							
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Organisasi seni	%	33,00	613.059.500	N/A		Disbudpar
		Penyelenggaraa n festival seni dan budaya	Festival	9,00		25,00	1.847.250.000	
	Program pengelolaan kekayaan budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35,00	630.063.000	40,00	1.118.050.000	Disbudpar
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	N/A	1.534.073.486	40,00	2.076.800.000	Disbudpar
		Cakupan Gelar Seni	%	75,00		N/A		Disbudpar



Tabel 6.5
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban													
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas													
Tujuan 1 :													
Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	Indeks Pendidikan	poin	61,89		62,31		62,73		63,14		63,14		
Sasaran 1:													
Meningkatnya pelayanan pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	tahun	8,00		8,05		8,11		8,16		8,16		
	HLS (Harapan Lama Sekolah)	tahun	12,68		12,77		12,85		12,94		12,94		
Program :													
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di bangun	%	5,60	88.942.821.064	5,70	82.526.220.377	5,80	95.479.320.645	6,00	91.667.855.117	6,00	358.616.217.203	Disdik
	% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	58,67		63,83		69,21		74,47		74,47		
Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD	Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di rehab	%	95,75	63.055.628.091	99,65	57.331.508.713	99,67	17.163.292.748	99,68	16.333.465.149	99,68	153.883.894.700	Disdik
	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	95,75		99,65		99,67		99,68		99,68		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	16.864.944.738	100,00	15.179.925.347	100,00	16.997.339.504	100,00	15.807.224.956	100,00	64.849.434.545	Disdik
	Nilai Rata-Rata UN SD	Point	81,36		84,74		88,12		91,50		91,50		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		%	89		89		90		90		90	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		%	97,47		97,48		97,49		97,50		97,50	
	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7- 12 tahun	Orang	940,06		959,64		979,60		1.000,00		1.000,00		
	Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	86,90		91,24		95,64		100,00		100,00		
	Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7- 12 tahun	Sekolah	35,72		35,23		34,74		34,26		34,26		
	Angka Putus Sekolah SD-MI	%	0,09		0,09		0,08		0,08		0,08		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang dibangun	%	83,80	19.536.430.197	84,01	19.554.575.248	84,17	21.683.373.982	84,27	22.403.875.711	84,27	83.178.255.139	Disdik
	% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	92,72		93,16		93,17		93,18		93,18		
Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP	Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang direhab	%	97,19	37.338.520.919	100,00	33.195.616.059	100,00	9.740.952.549	100,00	9.349.389.255	100,00	89.624.478.782	Disdik
	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik												
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	9.977.474.205	100,00	8.605.139.363	100,00	9.276.224.302	100,00	8.326.834.157	100,00	36.185.672.026	Disdik
	Nilai Rata-rata UN SMP	Point	60,19		65,29		70,40		75,50		75,50		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	83,80		84,01		84,17		84,27		84,27		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	92,72		93,16		93,17		93,18		93,18		
	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Sekolah	30,87		30,71		30,55		30,38		30,38		
	Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%	74,21		79,57		84,92		90,62		90,62		
	Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Orang	892,15		904,62		916,81		929,65		929,65		
	Angka Putus Sekolah SMP-MTs	%	0,25		0,24		0,23		0,22		0,22		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	87,83	51.694.365.265	90,26	45.088.880.478	92,70	49.152.037.800	95,13	44.607.301.138	95,13	190.542.584.681	Disdik
	% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	86,69		91,13		95,59		100,00		100,00		
	% SD yang memiliki 6 orang guru	%	98,01		98,62		99,32		100,00		100,00		
	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	40,88		45,53		50,46		55,26		55,26		
	% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	99,95		99,95		99,95		100,00		100,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	93,34		95,54		97,74		100,00		100,00		
	% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	92,32		94,93		97,53		100,00		100,00		
	% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	36,35		41,26		46,16		51,33		51,33		
	% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	90,55		93,73		96,90		100,00		100,00		
	% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	45,95		49,27		52,54		55,77		55,77		
	Rasio Guru SD-MI / Murid	Orang	383,92		374,43		364,37		354,42		354,42		
	Rasio Guru SMP-MTs / Murid	Orang	492,44		482,03		471,95		462,04		462,04		
	Rasio guru SD-MI/rombel	Point	1,08		1,06		1,04		1,02		1,02		
Sasaran 2 :													
Meningkatnya budaya literasi	Indeks membaca	poin	53,01		53,20		53,39		53,58		53,58		
Program :													
Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan di wilayah	persen	225,00	911.116.929	230,00	727.595.119	235,00	727.595.119	240,00	727.595.119	240,00	3.093.902.286	DAP
Program, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	persen	1,84	911.116.929	1,86	727.595.119	1,89	727.595.119	1,93	727.595.119	1,93	3.093.902.286	DAP
Tujuan 2 :													
Terwujudnya masyarakat	Indeks Kesehatan	poin											



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Bogor sehat			79,20		79,60		80,02		80,42		80,42		
	LPP	%	2,11		2,06		2,01		1,96		1,96		
Sasaran 1:													
Meningkatnya kualitas kesehatan	AHH (Angka Harapan Hidup)	tahun	71,48		71,74		72,01		72,27		72,27		
Program :													
Program Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100,00	5.186.301.822	100,00	4.910.617.282	100,00	5.042.399.768	100,00	4.346.361.201	100,00	19.485.680.073	Dinkes
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	(0,20)		(0,20)		(0,40)		(0,60)		(0,60)		
	Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00		1,00		1,00		1,00		1,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	46,00		46,00		49,00		52,00		52,00		
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS	%	62,50		65,00		67,50		70,00		70,00		
	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Desa yang melaksanakan STBM	%	5,00		7,50		10,00		12,00		12,00		
	Cakupan Desa ODF (Open Defection Free)	%	10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		
	Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)	%	30,00		40,00		50,00		60,00		60,00		
	Cakupan Sanitasi Layak	%	15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat	%	65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		
	Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat	%	65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		
Program Pelayanan Kesehatan	Akreditasi FKTP	%	69,80	145.629.009.203	79,80	117.334.146.962	89,90	103.293.317.872	100,00	83.125.169.412	100,00	449.381.643.450	Dinkes
	Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re- Akreditasi	%	28,70		50,40		8,01		100,00		100,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Akreditasi puskesmas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN	%	82,00		84,00		100,00		95,00		95,00		
Sasaran 2 :													
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	poin	87,28		87,83		88,38		88,93		88,93		
Program :													
Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,00	1.662.250.000	104,40	1.662.250.000	103,80	1.662.250.000	103,20	1.662.250.000	103,20	6.649.000.000	DKP
	Skor Angka Kecukupan Protein	%	111,30		111,50		111,80		112,10		112,10		
Sasaran 3 :													
Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	Crude Birth Rate (CBR)	%	24,03		23,28		22,56		21,86		21,86		
Program :													
Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%	11,08	2.407.660.097,9 ₁	11,42	2.880.258.701,6 ₂	11,77	2.867.700.966,0 ₇	12,13	2.855.691.764,4 ₇	12,13	11.011.311.530	DP3AP2KB
	Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	77,97		78,05		78,12		78,20		78,20		
	Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%	76,07		76,10		76,09		76,14		76,14		
	Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%	76,14		76,19		76,25		76,33		76,33		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	77,14		78,01		78,36		78,84		78,84		
	Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja	%	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan													
Tujuan 1 :													
Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,34		6,48		6,61		6,83		6,83		
Sasaran 1:													
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rp.	44,10		47,77		51,95		56,74		56,74		
	Tingkat Kemiskinan	%	6,78		6,60		6,47		6,38		6,38		
	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,20		7,79		7,40		7,03		7,03		
Program :													
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	12,38	2.621.837.565	12,78	2.230.137.266	13,20	2.103.542.931	14,53	1.923.675.345	14,53	8.879.193.108	Disnaker
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	41,18		42,11		42,86		43,48		43,48		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Org	220,00	1.555.165.896	260,00	1.084.067.311	300,00	1.071.221.960	340,00	1.039.141.820	1.120,00	5.948.660.000	Disnaker
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan	%	0,01	5.809.319.522	0,15	5.777.342.131	0,15	5.680.898.985	0,15	5.716.232.588	0,56	22.983.793.226	Dinsos
	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : a. Pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : b. Setelah tanggap darurat bencana kabupaten	%	0,51		0,51		0,51		0,51		2,59		
	Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial	%	55,58		55,58		55,58		55,58		55,58		
Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%	66,10	8.358.301.602	71,20	9.061.967.991	77,23	9.357.801.931	81,32	9.498.114.614	81,32	36.276.186.138	Dinsos
Sasaran 2:													
Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku	triliun	268,71		297,13		329,56		367,02		367,02		
Program :													
Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan:	Ton	570.751, 00	8.597.899.404	570.950, 00	8.597.899.404	573.152, 00	6.960.975.904	574.356, 00	5.960.975.904	574.356, 00	30.117.750.616	Distanhorbun
	Produksi Padi	Ton GKG	418.884,		419.931,		420.981,		422.033,		422.033,		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			00		00		00		00		00		
	Produksi Palawija	Ton	151.867, 00		151.019, 00		152.171, 00		152.323, 00		152.323, 00		
	Produktivitas Padi Sawah	ku/ha	55,78		56,36		56,94		57,52		57,52		
	Produktivitas Padi Gogo	ku/ha	33,64		33,66		33,69		33,73		33,73		
	Produktivitas Palawija	ku/ha	171,92		172,05		172,22		172,44		172,44		
	Persentase nilai tambah tanaman pangan	%	1,95		1,95		1,95		1,95		1,95		
Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	8.032	6.567.180.500	8.073	6.567.180.500	8.116	6.030.208.000	8.160	5.030.208.000	8.160	24.194.777.000	Distanhorbun
	Persentase nilai tambah tanaman perkebunan	%	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura	Produksi Buah- buahan	Ton	60.572,0 0	8.675.947.000	60.602,0 0	8.675.947.000	60.633,0 0	6.727.400.000	60.663,0 0	5.345.400.000	60.663,0 0	29.424.694.000	Distanhorbun
	Produksi Sayuran	Ton	92.950,0 0		92.996,0 0		93.043,0 0		93.089,0 0		93.089,0 0		
	Produksi Tanaman Hias	Tangkai	4.192.29 4,00		4.194.39 0,00		4.196.48 7,00		4.198.58 6,00		4.198.58 6,00		
		Pohon	415.494, 00		415.702, 00		415.910, 00		416.118, 00		416.118, 00		
	Produksi tanaman obat	Ton	4.453,00		4.455,00		4.457,00		4.460,00		4.460,00		
	Produktivitas sayuran	ku/ha	116,17		116,23		116,30		116,36		116,36		
	Persentase nilai tambah tanaman hortikultura	%	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan	Produksi olahan produk perikanan	ton	23.163,0 0	2.621.600.000	23.609,0 0	2.621.600.000	24.054,0 0	2.271.600.000	24.500,0 0	1.696.500.000	24.500,0 0	9.211.300.000	Diskanak
	Peningkatan status kelas Kelompok perikanan	%	2,00		2,02		2,05		2,08		2,08		
Peningkatan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi	ton	125.822, 41	3.492.319.000	127.709, 75	3.492.319.000	129.625, 39	3.142.319.000	131.569, 77	2.562.729.000	131.569, 77	12.689.686.000	Diskanak
	Produksi Benih Ikan	RE	5.713.10 6,56		5.841.65 1,45		5.973.08 8,61		6.107.48 3,11		6.107.48 3,11		
	Produksi Ikan Hias	RE	292.036, 85		296.417, 40		300.863, 66		305.376, 62		305.376, 62		
	Konsumsi Ikan	kg/kap/ thn	30,06		30,36		30,67		30,97		30,97		
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Produksi DOC (Day Out Chick/Bibit) Ayam Lokal Unggul termasuk Terbanyak di Indonesia	Ekor	6.390.15 1,00	6.240.087.500	7.462.52 4,00	5.735.087.500	8.723.04 7,00	5.275.087.500	10.205.5 38,00	4.365.512.000	10.205.5 38,00	21.615.774.500	Diskanak
	Produksi Daging	ton	193.274, 76		199.073, 00		205.045, 20		211.196, 55				
	Produksi Telur	ton	47.633,8 2		47.748,1 4		47.862,7 4		47.977,6 1		211.196, 55		
	Produksi Susu	ton	20.108,0 0		20.912,0 0		21.749,0 0		22.619,0 0		47.977,6 1		
	Produksi Olahan Ternak	ton	73.260,9 0		75.458,7 2		77.722,4 8		80.054,1 6		22.619,0 0		
	Peningkatan status kelas Kelompok peternakan	%	2,11		2,15		2,20		2,25		2,25		
Program Pengembangan Pemasaran	Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisatawan	8.064.00 0,00	5.390.342.000	8.544.00 0,00	5.103.766.169	9.024.00 0,00	5.103.766.169	9.600.00 0,00	5.103.766.169	9.600.00 0,00	20.701.640.507	Disbudpar



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	336.000,00		356.000,00		376.000,00		400.000,00		400.000,00		
	Jumlah event pariwisata	event	12,00		14,00		16,00		18,00		18,00		
Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2,00	3.248.900.000	2,00	3.076.173.257	2,00	3.076.173.257	2,00	3.076.173.257	2,00	12.477.419.771	Disbudpar
Program Pengembangan Destinasi pariwisata	Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional	Usaha	20,00	1.871.064.000	30,00	2.058.170.400	40,00	2.263.987.440	50,00	2.490.386.184	150,00	8.683.608.024	Disbudpar
Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,97	11.760.743.929	98,98	9.938.582.427	98,98	8.552.718.074	98,98	8.655.519.757	98,98	38.907.564.187	Diskopukm
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	69,89		72,73	-	75,58		78,42		78,42		
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	0,69		0,70		0,71		0,72		0,72		
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah komoditi unggulan IKM	Jenis	5,00	21.810.177.897	5,00	13.393.943.000	5,00	12.135.296.863	5,00	12.593.378.620	20,00	14.527.471.000	Disperdagin
	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM	IKM	500,00		500,00		500,00		500,00		2.000,00		
Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa	Strata BUMDes :			1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		7.200.000.000	DPMD
	Mandiri		4		6		8		10		10		
	Maju		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
	Berkembang		25,00		30,00		35,00		40,00		40,00		
	Dasar		371,00		360,00		348,00		336,00		446,00		
	Prosentase raperdes tentang APBDes yang diklarifikasi	%	100,00		100,00		100,00		1,00		100,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Prosentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	%	100,00		100,00		100,00		1,00		100,00		
Program Koordinasi Lingkup Perekonomian	Jumlah BUMD Sehat	BUMD	3,00	650.000.000	4,00	396.323.779	4,00	132.332.149	5,00	168.254.424	5,00	1.346.910.351	Setda
	Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan Kebijakan	6,00	533.000.000	10,00	332.579.395	1,00	344.063.587	3,00	341.316.117	20,00	1.550.959.099	
Program Peningkatan iklim investasi	Nilai realisasi investasi PMA - PMDN meningkat	Trilyun Rp	9,60	1.373.248.006	10,10	1.453.261.097	10,60	1.528.743.152	11,19	1.495.454.902	7,50	5.850.707.156	DPMPPTSP
	PMA	Trilyun Rp	5,58		5,87		6,16		6,50		3,75		
	PMDN	Trilyun Rp	4,02		4,23		4,44		4,69		3,75		
	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/Perusahaan	35,00		38,00		41,00		45,00		45,00		
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	5,50		5,20		4,90		5,60		5,60		
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik													
Tujuan :													
Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	60,00		68,00		68,00		70,00		70,00		
Sasaran 1 :													
Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	80,00		81,05		81,75		82,00		82,00		
Program :													
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi	Rumusan Kebijakan	34,00	649.175.000	35,00	415.724.243	35,00	423.462.876	36,00	432.654.233	140,00	1.921.016.353	Setda



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Perangkat Daerah												
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1,00	3.000.074.000	1,00	2.456.280.932	1,00	2.485.995.766	1,00	2.465.224.776	1,00	3.472.960.664	Disdukcapil
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1,00	1.245.540.000	1,00	1.019.773.563	1,00	1.032.110.264	1,00	1.023.486.777	1,00	1.023.486.777	Disdukcapil
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah izin terbit	Berkas izin	30.000,0 0	2.605.000.011	33.000,0 0	2.413.767.971	36.000,0 0	2.532.530.761	39.000,0 0	2.537.662.542	39.000,0 0	10.088.961.284	DPMPPTSP
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Operasional Pemanfaatan Ruang	Jumlah izin terbit	Berkas izin	8.000,00	2.765.683.449	9.923,00	2.750.852.624	10.419,0 0	2.868.832.367	10.940,0 0	2.797.773.304	10.940,0 0	11.183.141.745	DPMPPTSP
Sasaran 2 :													
Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	predikat	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Nilai SAKIP	predikat	B		BB		BB		A		A		
	Indeks Inovasi Daerah	poin	9.630,00		14.445,0 0		21.667,0 0		32.500,0 0		32.500,0 0		
Program :													
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Meningkat	Rp (dalam milyar)	2.792,00	2.355.883.275	2.955,00	1.786.458.487	3.101,00	1.770.080.971	3.244,00	1.457.177.435	3.131,81	7.369.600.168	Bappenda
Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	83,33	2.443.455.512	86,11	2.528.252.427	88,89	2.506.494.455	91,67	2.417.917.342	91,67	9.896.119.737	BPKAD
	Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	88,89	-	91,67	-	94,44	-	97,22	-	97,22	-	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari	%	99,91	2.051.916.159	99,91	1.584.377.721	99,92	2.506.494.455	99,93	1.545.407.737	99,93	7.688.196.072	BPKAD
	Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen	931,00		915,00		1.223,00		1.169,00		4,24		
	Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%	93,14		93,20		93,26		93,32		93,23		
Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu	Tepat	2.488.713.760	Tepat	2.570.388.648	Tepat	2.564.523.853	Tepat	2.445.438.445	Tepat	10.069.064.706	BPKAD
	Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	88,89		91,67		94,44		97,22		97,22		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPMD	%	86,12	6.669.680.163	88,89	7.234.994.816	91,67	2.045.951.307	94,45	2.590.959.220	94,45	18.541.585.506	BPKAD
	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib	%	86,12		88,89		91,67		94,45		94,45		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	di Perangkat Daerah												
	Persentase BMD yang dimanfaatkan	%	48,01		48,28		48,54		48,81		48,81		
	Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%	33,03		34,06		35,10		36,13		36,13		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%	100,00	2.854.796.679	100,00	2.854.796.679	100,00	2.854.796.679	100,00	2.952.090.579	100,00	15.251.460.494	Bappedalitbang
	Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional	%	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
	Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD	%	25,72		28,30		34,13		34,24		34,24		
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20,00	17.114.821.088	20,00	17.114.821.088	20,00	17.114.821.088	20,00	13.872.218.486	20,00	83.508.807.750	BKPP
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,59		1,75		1,92		2,11		8,93		
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	10,02		11,02		12,12		13,34		80,66		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Level	4,00	5.867.037.953	4,00	9.686.260.990	4,00	4.860.707.149	4,00	4.774.248.664	4,00	25.188.254.756	Diskominfo
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B	858.290.057	BB	858.289.840	BB	858.289.808	A	858.289.756	A	3.433.159.461	Inspektorat
	Tindak Lanjut temuan BPK	%	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase Raperda yang difasilitasi	%	70%	22.113.815.000	75%	26.787.435.925	80%	21.957.561.281	85%	18.714.712.328	85%	98.855.911.534	Setwan
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/ Tidak	ada		ada		ada		ada		ada		
Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/ Tidak	ada	15.896.061.000	ada	13.560.874.063	ada	11.817.736.412	ada	10.198.169.797	ada	66.123.712.272	Setwan
Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang terkelola	Persen	49,02	1.714.093.772	58,25	1.395.013.198	67,96	1.395.013.198	76,92	1.395.013.198	76,92	5.899.133.365	DAP
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan													
Tujuan 1 :													
Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah williamson	poin	0,86		0,81		0,77		0,73		0,73		
	Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	57,21		57,71		58,21		58,71		58,71		
Sasaran 1 :													



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik	Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	85,10		85,20		85,30		85,40		85,40		
Program :													
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang direhabilitasi	%	0,59	124.427.809.564	0,59	85.514.152.440	0,59	55.019.956.067	0,59	67.802.336.260	2,96	332.764.254.331	DPUPR
	Persentase jembatan yang direhabilitasi	%	0,36		0,36		0,36		0,36		1,62		
	Persentase jalan yang dipelihara	%	58,07		61,03		64,07		67,26		67,26		
	Persentase jembatan yang dipelihara	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru	Km	4,00	348.359.440.667	6,00	360.408.902.139	9,00	385.941.881.175	12,00	301.389.325.223	12,00	1.396.099.549.204	DPUPR
		%	33,33		50,00		75,00		100,00		100,00		
	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jembatan baru	%	-		100,00		-		-		100,00		
	Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten	%	16,09		22,60		29,10		35,60		35,60		
	Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten	%	3,24		4,50		5,76		7,01		7,01		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Sasaran 2 :													
Menurunnya tingkat kemacetan	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		
Program :													
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Presentase layanan angkutan darat	%	60,00	33.772.084.931	65,00	25.043.268.627	70,00	30.084.909.746	75,00	27.695.083.454	75,00	116.595.346.759	Dishub
Program Manajemen rekayasa lalu Lintas	presentase ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan	%	45,00	18.198.801.202	52,00	16.243.946.997	57,00	17.671.983.503	71,00	19.862.867.101	71,00	71.977.598.803	
Sasaran 3 :													
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat	Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh		28,15		42,02		85,43		100,00		100,00		
Program :													
Program Penataan Perumahan	persentase perumahan yang tertata	%	93,90	2.485.725.853	94,06	8.134.876.299	94,22	4.844.296.374	94,38	6.121.114.914	94,38	21.586.013.439	DPKPP
	Rasio rumah layak huni	rasio	0,2469		0,2516		0,2561		0,2608		0,2608		DPKPP
	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPKPP
	cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPKPP



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Penataan Kawasan Permukiman	Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2	1.101.846,67	3.101.849.199	1.156.939,00	2.437.553.008	1.214.785,95	1.680.547.640	1.275.525,25	2.000.095.120	1.275.525,25	9.220.044.968	DPKPP
	Rasio permukiman layak huni	rasio	0,9980		0,9987		0,9993		1,00		1,00		
Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase PSU perumahan yang tertata	%	26,22	10.375.027.459	31,22	9.251.161.629	36,22	12.014.775.307	41,22	7.410.830.396	41,22	39.051.794.791	DPKPP
	Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi	159,00		169,00		179,00		189,00		189,00		
	Persentase TPU yang tertata	%	57,21		66,44		75,23		79,78		79,78		
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	‰	36,65		38,92		39,13		41,09		41,09		
Sasaran 4 :													
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	52,60		64,73		70,80		81,53		81,53		
Program :													
Program Pengelolaan Sampah	Peningkatan penanganan sampah	%	41,03	60.324.347.022	50,24	61.036.866.944	54,34	46.091.402.783	62,90	29.932.879.250	62,90	197.385.495.999	DLH
	Peningkatan Pengurangan sampah	%	11,57		14,48		16,46		18,63		18,63		DLH
Program Penataan Lingkungan	Persentase area konservasi dalam bentuk hutan kota dan taman kehati	%	40,00	391.521.152	20,00	336.262.031	20,00	211.916.159	20,00	127.384.761	20,00	1.067.084.103	DLH
Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tingkat capaian penataan sumber penghasil emisi terhadap baku mutu udara	persen	80,00	1.349.932.304	90,50	1.016.862.256	95,70	657.121.996	98,00	388.335.401	98,00	3.412.251.957	DLH
	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan B3	persen	16,89		20,32		25,51		34,25		34,25		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	dan limbah B3												
Sasaran 5 :													
Mengurangi Risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	poin	148,00		146,00		144,00		142,00		142,00		
Program :													
Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase mitigasi yang dilaksanakan	%	35,00	1.156.159.000	40,00	1.156.159.000	45,00	1.156.159.000	50,00	1.156.159.000	50,00	1.156.159.000	BPBD
	Cakupan layanan informasi rawan bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
	cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
	cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	%	16,67	252.657.629	20,00	958.967.246	23,33	958.967.246	28,33	958.967.246	28,33	3.129.559.366	Disdamkar
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial													
Tujuan 1 :													
terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Indeks kebahagiaan	poin	67,97		67,98		68,00		68,01		68,01		
Sasaran 1 :													
Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	Indek kerukunan hidup beragama	poin	68,09		68,26		68,43		68,60		68,60		
	Persentase gangguan trantibum	%	69,77		54,65		39,53		24,41		24,41		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :													
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Politik	Jumlah peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat	Kegiatan	9,00	8.822.538.429	9,00	8.890.748.589	9,00	8.956.849.493	9,00	9.020.869.258	9,00	35.691.005.769	Kesbangpol
	Jumlah Pembinaan Politik	Kegiatan	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
	Persentase peran aktif, penguatan dan pemberdayaan orkesmas	%	37,41		38,90		40,46		42,08		42,08		
Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan	15,00	11.745.349.000	15,00	5.975.343.123	15,00	6.162.972.837	15,00	6.040.333.821	60,00	29.923.998.781	Setda
Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100,00	8.786.656.963	100,00	6.772.309.154	100,00	6.718.695.893	100,00	6.631.076.537	100,00	28.908.738.547	Satpol PP
	Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		Satpol PP
Sasaran 2 :													
Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	58,04		58,50		58,90		59,00		59,00		
Program :													
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan	%	5,37	1.671.687.450	5,50	2.029.950.482	5,63	2.340.959.674	5,76	2.694.635.634	5,76	8.737.233.240	DP3AP2KB
	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	%	32,05		32,05		25,64		12,82		12,82		
	Rasio KDRT	%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pelestarian seni dan budaya	Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	23,33		26,67		30,00		33,33		33,33		
Program :													
Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	25,00	2.247.250.000	25,00	2.127.775.663	25,00	2.127.775.663	25,00	2.127.775.663	125,00	8.630.576.989	Disbudpar
Program pengelolaan kekayaan budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45,00	1.236.150.000	50,00	1.170.430.475	55,00	1.170.430.475	60,00	1.170.430.475	60,00	4.747.441.426	Disbudpar
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	46,00	2.276.000.000	48,00	2.154.997.178	50,00	2.154.997.178	52,00	2.154.997.178	60,00	8.740.991.535	Disbudpar

Pelaksanaan program strategis pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program tersebut diarahkan juga untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diuraikan dibawah ini :

Tabel 6.6
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	PD Pengampu
SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD	1 APM SD/MI	Dinas Pendidikan
			2 APK SD/MI	
			3 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP	4 APM SMP/MTs	
			5 APK SMP/MTs	
			6 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	
2	Pendidikan Kesenjangan	Program Pendidikan Non-Formal	7 APM Paket A	Dinas Pendidikan
			8 APM Paket B	
			9 APK Paket A	
			10 APK Paket B	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11 APK PAUD	Dinas Pendidikan
SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan kesehatan balita		4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	PD Pengampu
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		6 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		7 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8 Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		9 Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		10 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		11 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		12 Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV	
SPM PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah DOMESTIK	Program Pelayanan Air Limbah	2 Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	PD Pengampu
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Penataan Perumahan	1 Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		2 Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	
SPM TRANTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Cakupan layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
SPM SOSIAL				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	PD Pengampu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	Dinas Sosial

Sumber : Bappedalitbang Kab. Bogor 2019, diolah

Selanjutnya proyek strategis daerah yang direncanakan di wilayah Kabupaten Bogor, baik yang didanai APBN, APBD Provinsi Jawa Barat serta APBD Provinsi DKI Jakarta, digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.7
Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD Prov. Jabar	APBD Prov. DKI Jakarta	Swasta	
1	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54km)	√				2019
2	Jl. Tol Cinere – Jagorawi (14,64km)				√	2019
3	Bendungan Ciawi	√	√			2022
4	Bendungan Sukamahi	√	√			2021
5	Jalan Puncak II (67,65km)	√	√			2021
6	Jalan khusus Tambang Parung (15 km)				√	2022
7	Fly over Bojonggede - Kemang		√			2021
8	Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari	√	√			2021
9	TPPAS Regional Nambo	√	√			2020
10	KEK Lido, Kabupaten Bogor	√			√	2021
11	Food Hubs, Kabupaten Bogor		√		√	2020
12	Penataan Alun-Alun Kabupaten Bogor		√			2019-2020
13	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong		√			2019
14	Revitalisasi Pasar Cisarua		√			2019-2020
15	Pembangunan Desa Wisata Malasari		√			
16	Pembangunan Pusat Budaya		√			
17	Pembangunan Destinasi Wisata Tipe 1		√			
18	Command Center Kabupaten Bogor		√			2020
19	Revitalisasi Islamic Centre		√			2020
20	Pembangunan terminal parung Tipe B		√			2020
21	Pembangunan Park and Ride			√		2021
22	Kampung Keluarga Bahagia		√			2020
23	Sekolah Perempuan Raih Cita-cita		√			2020
24	Kampung Kabagjaan		√			2020

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Bappedalitbang Kab.Bogor 2019, diolah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGAM PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan dalam indikator-indikator tujuan dan sasaran bermuara pada penetapan program-program pembangunan daerah yang strategis serta mencakup seluruh program perangkat daerah. Agar terlaksana seluruh program yang mendukung tercapainya visi dan misi hingga akhir periode, diperlukan pendanaan pembangunan yang terukur berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan tidak menutup kemungkinan terhadap adanya sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya selain APBD kabupaten Bogor.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menginformasikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor hingga akhir periode tahun 2023. Hal mendasar yang perlu dipetakan adalah kemampuan dan kekuatan pendapatan daerah untuk dibelanjakan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kemampuan keuangan daerah tergambar dari kondisi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah yang dibutuhkan untuk menutupi defisit belanja. Kondisi kemampuan keuangan daerah hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	6.078.635.501.000	6.323.403.256.536	6.367.886.190.011	6.505.040.282.634	6.638.070.775.783
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.554.365.775.000	2.792.100.908.536	2.861.632.484.011	2.998.786.576.634	3.131.817.069.783
DANA PERIMBANGAN	2.310.532.250.000	2.317.564.872.000	2.317.564.872.000	2.317.564.872.000	2.317.564.872.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.213.737.476.000	1.213.737.476.000	1.188.688.834.000	1.188.688.834.000	1.188.688.834.000
BELANJA DAERAH	6.401.085.697.000	7.067.839.282.070	6.792.886.190.011	6.930.040.282.634	7.063.070.775.783
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.110.860.842.000	3.403.897.797.686	3.668.860.479.956	4.052.376.745.007	4.408.725.242.500
BELANJA LANGSUNG	3.290.224.855.000	3.663.941.484.384	3.124.025.710.055	2.877.663.537.626	2.654.345.533.283
DEFISIT BELANJA	- 322.450.196.000	- 744.436.025.534	- 425.000.000.000	- 425.000.000.000	- 425.000.000.000
PEMBIAYAAN	322.450.196.000	744.436.025.534	425.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	430.290.234.000	820.436.025.534	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	107.840.038.000	76.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
SILPA TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil analisis

7.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dikontribusi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah belum termasuk pendapatan DAK, hibah, dan bantuan keuangan diproyeksi berada pada kisaran angka 6 (enam) triliunan, dengan kenaikan sekitar 600 milyaran rupiah selama kurun waktu tahun 2019-2023. Kondisi pendapatan tersebut diharapkan akan terdistribusi ke dalam 2 (dua) komponen belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung dengan komponen utama yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga diprediksi akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan alokasi belanja tidak langsung, seperti untuk gaji dan tunjangan ASN, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dan belanja hibah yang dialokasikan untuk mengimplementasikan janji politis kepala daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun, alokasi belanja tidak langsung akan meningkat lebih dari 1 miliar rupiah. Hal ini berkonsekuensi pada terjadinya penurunan pada belanja langsung yang dialokasikan

untuk kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah (belanja urusan wajib dan pilihan), serta pendanaan program-program yang menaungi target-target PANCAKRSA yang pelaksanaannya diemban oleh 32 perangkat daerah dan 40 kecamatan. Dengan kemampuan pendapatan yang ada, peningkatan belanja tidak langsung akan menurunkan belanja langsung, sehingga sampai dengan tahun 2023, akan terjadi penurunan kemampuan pendanaan untuk alokasi belanja langsung dengan kisaran hampir mencapai 1 miliar rupiah.

Adanya tren penurunan kemampuan belanja langsung, akan diimbangi dengan upaya pencarian sumber dana pembangunan lainnya melalui :

1. Pengusulan pendanaan bersumber dana APBN
2. Pengusulan pendanaan bersumber dana APBD Provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, atau provinsi/kabupaten/kota lainnya)
3. Pengusulan pendanaan bersumber dana kerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pendanaan pembangunan melalui penggiatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Sumber-sumber pendanaan lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan dan arahan kebijakan nasional.

7.2 Program Perangkat Daerah

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bogor seperti telah diuraikan diatas merupakan rangkaian kebijakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 2018-2023. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai program perangkat daerah yaitu program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Penerapan program perangkat daerah telah mengacu pada konsep penerapan kinerja outcome, atau dengan kata lain berorientasi pada hasil yang diharapkan dengan pertimbangan jumlah program yang

efektif dan efisien. Keseluruhan program perangkat daerah akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator dampak/impact Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Daerah.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 481 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Bogor, penunjang urusan, pendukung dan kewilayahan. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Program perangkat daerah Kabupaten Bogor disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang, seperti disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
I.1	PENDIDIKAN						606.739.527.000	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	43,28	1.236.820.354	43,71	2.465.197.500	Disdik
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,76	334.812.391.646	100,00	36.744.005.800	Disdik
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	Nilai Rata-Rata UN SD	Point	74,60		77,98		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88,95		91,39	85.810.423.000	Disdik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,75		89,03		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,45		97,46		
		% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	48,11		53,39		
		% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	45,26		50,73		
		Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Sekolah	36,71		36,21		
		% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	%	93,91		95,50		
4	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	88,95		91,39	120.355.226.900	Disdik
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Angka Putus Sekolah SD-MI	%	0,10		0,09	7.400.700.000	Disdik
6	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	78,17		82,53	10.980.000.000	Disdik
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,21		83,54	21.411.454.600	Disdik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB	%	92,69		92,70		
		% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	73,00		75,74		
		% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	45,26		50,73		
		Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Sekolah	31,15		31,01		
		% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang	%	92,02		93,51		
		% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	%	77,79		82,23		
8	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	92,13		93,08	14.039.000.000	Disdik

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Angka Putus Sekolah SMP-MTs	%	0,27		0,26	5.281.000.000	Disdik
12	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%		-		80.000.000.000	Disdik
13	Program Pendidikan Non-Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,75	19.497.239.510	89,03	34.943.107.000	Disdik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,21		83,54		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,45		97,46		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB	%	92,69		92,70		
14	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82,97	119.593.470.850	85,39	147.189.299.050	Disdik
		% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	77,84		82,26		
		% SD yang memiliki 6 orang guru	%	96,76		97,40		
		% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	31,20		36,11		
		% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	99,84		99,89		
		% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	88,86		91,10		
		% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	87,23		89,84		
		% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	26,56		31,59		
		% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	84,31		87,47		
		% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	39,33		43,58		
		Rasio Guru SD-MI / Murid	Orang	412,56		393,78		
		Rasio Guru SMP-MTs / Murid	Orang	512,21		502,31		
		Rasio guru SD-MI/rombel	Point	1,15		1,10		
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	%	95,11	5.114.648.569	95,11	5.647.756.600	Disdik
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan	%	91,46	718.453.985	91,46	30.773.216.700	Disdik
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100		Disdik
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan	%	97,75	9.580.000	97,75	58.800.000	Disdik
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan	%	94,87	1.822.296.100	94,87	2.444.913.400	Disdik
20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelayanan manajemen pendidikan	%	94,90	2.137.367.950	94,90	1.195.426.450	Disdik
I.2	KESEHATAN							
1	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka				3.806.205.000	Dinkes
		Jumlah Kematian bayi	jiwa	109,00		95		
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka					
		Jumlah kematian ibu	jiwa	55,00		55		
		Persentase balita gizi buruk	%	0,0138		0		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	77,6		80		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,93		90		
		Cakupan kunjungan bayi	%	94,16		95		
2	Program Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah bebas jentik	%	85,79		95	555.061.000	Dinkes
		Persentase TTU memenuhi syarat	%	32,75		80		
		Persentase TPM memenuhi syarat	%	51,65		91		
		Cakupan JAGA	%	65,85		73		
		Cakupan SAB	%	77,44		73		
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS	%	48,35	1.975.349.209	70	1.726.957.000	Dinkes
4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan	%	80,70	147.595.026.936	85	128.724.788.000	Dinkes
5	Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%			75	108.930.841.981	Dinkes
6	Program Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,22		80,89	19.962.341.000	Dinkes
7	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	%	96,47		85	2.013.886.000	Dinkes
		Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	16,45		100		
		Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	83,00		87		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	82,00		83		
		Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	91,95		1		
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (CDR)	%	5,6		< 5		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	8,27		100		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	11,70		100		
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	0,84		100		
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00		100		
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pengadaan Obat Esensial	%	100,00	10.289.079.760	100	9.465.268.000	Dinkes
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	Ratio	1:13.808	48.264.073.415	1 : 9,110	30.335.688.841	Dinkes
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diakomodir	%			100		Dinkes
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Score	B	83.963.928.716	B	29.840.401.000	Dinkes
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik		0,85	3.939.874.571	1	627.846.000	Dinkes
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100		Dinkes
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Temuan materiil	temuan	2	3.969.259.995	2	143.875.000	Dinkes
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	1.360.854.089	100	1.168.922.000	Dinkes
16	Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Terwujudnya Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%			100	53.929.666.000	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
17	Program Upaya Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	%			80	3.358.871.000	Dinkes
18	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cibinong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70	17.991.970.000	Dinkes
19	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70	15.051.557.500	Dinkes
20	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Leuwiliang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70	9.873.158.000	Dinkes
21	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cileungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70	15.275.612.000	Dinkes
22	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cibinong	Current Rasio (CR)	%			85	220.000.000	Dinkes
23	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Ciawi	Current Rasio (CR)	%			85	385.000.000	Dinkes
24	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Leuwiliang	Current Rasio (CR)	%			85	16.927.000	Dinkes
25	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cileungsi	Current Rasio (CR)	%			85	310.000.000	Dinkes
26	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong	Akreditasi Rumah Sakit	%			1	750.000.000	Dinkes
27	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawi	Akreditasi Rumah Sakit	%			1	100.000.000	Dinkes
28	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang	Akreditasi Rumah Sakit	%			1	266.662.000	Dinkes
29	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi	Akreditasi Rumah Sakit	%			1	300.000.000	Dinkes
30	Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75	52.042.000.000	Dinkes
31	Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75	37.177.312.000	Dinkes
32	Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75	34.631.994.000	Dinkes
33	Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75	33.840.975.000	Dinkes
34	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75	5.562.500.000	Dinkes
35	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75	6.781.023.000	Dinkes
36	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75	4.321.568.000	Dinkes
37	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75	5.192.329.000	Dinkes
38	Program Promosi Kesehatan RSUD Ciawi	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	%	69,38		65	192.900.000	Dinkes
39	Program Promosi Kesehatan RSUD Leuwiliang	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	%	94,38		65	195.860.000	Dinkes
40	Program Promosi Kesehatan RSUD Cileungsi	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	%	62,46		65	150.000.000	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
41	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cibinong	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70	141.000.000.000	Dinkes
42	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Ciawi	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70	129.401.136.000	Dinkes
43	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Leuwiliang	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70	79.644.488.000	Dinkes
44	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cileungsi	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70	37.258.284.000	Dinkes
I.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru	KM	-	236.104.186.451	2,00	376.757.323.000	DPUPR
			%	-		16,67		
		Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten	%	7,67		9,59		
		Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten	%	3,78		1,98		
2	Program Pembangunan Jalur Pedestrian	Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian	%	2,08	1.538.940.000	2,08	7.075.316.000	DPUPR
		Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas	meter	632,00				
3	Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air	%	31,02	2.816.690.400	31,07	31.374.361.000	DPUPR
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor	%	11,19		30,60		
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang direhabilitasi	%	1,55	56.278.813.713	0,59	107.181.019.000	DPUPR
		Persentase jembatan yang direhabilitasi	%	0,36		0,18		
		Persentase capaian jalan yang dipelihara	%	57,03		55,74		
		Persentase jembatan yang dipelihara	%	100,00		100,00		
		Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%			100,00		
5	Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi	%		15.695.619.000	100,00	33.086.800.000	DPUPR
6	Program Pengelolaan Peralatan dan Perbekelan	Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan	%		499.378.500	100,00	2.165.325.000	DPUPR
7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan	%		795.103.900	100,00	3.520.458.000	DPUPR
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan	%	3,84	75.653.386.919	1,62	75.237.649.000	DPUPR
		Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi	%	4,85		2,63		
		Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara	%	23,74		23,64		
9	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor	%		15.792.483.955	15,54	39.840.649.000	DPUPR
10	Program Pengelolaan Penataan Situ	Persentase penataan situ	%			12,50	435.000.000	DPUPR
11	Program Pengawasan Jaringan Irigasi	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi	%	100,00	738.089.000	100,00	1.059.396.000	DPUPR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
12	Program Pembangunan Drainase Lingkungan	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	%		10.820.415.600	23,78	9.906.690.000	DPUPR
12	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	70,07	43.444.229.382	70,54	54.816.371.000	DPUPR
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	12,68		16,70		
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	68,53		68,94		
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	68,53		68,94		
13	Program Pelayanan Air Limbah	Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	%		1.579.593.600	100	4.100.000.000	DPUPR
14	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi	Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan	%		21.382.632.473	75,00	4.592.478.000	DPUPR
		Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan	%			91,00		
		Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat	%			33,33		
15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%		1.683.877.350	100	1.200.000.000	DPUPR
15	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	0,05	455.045.250	0,047	1.694.160.000	DPUPR
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	81,40	557.938.100	81,50	1.760.766.000	DPUPR
16	Program Pengadaan Tanah	Persentase realisasi pengadaan tanah	%		52.604.090.600	8,90	35.586.052.000	DPUPR
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan	kegiatan			16	6.980.948.000	DPUPR
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan	kegiatan			6	4.780.525.000	DPUPR
19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan	kegiatan			1		DPUPR
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan	kegiatan			2	537.995.000	DPUPR
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan	kegiatan			9	1.252.022.000	DPUPR
I.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
1	Program Penataan Lingkungan Permukiman	Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,23	1.437.513.477		3.283.533.000	DPKPP
		Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2			1.049.377,78		
		Rasio permukiman layak huni	rasio			1,00		
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur	Lokasi	42,00	3.776.832.200		4.178.300.500	DPKPP
		Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi			149		
3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	33,37	4.017.844.600	35,18	4.549.162.500	DPKPP
		Persentase TPU yang tertata	%			47,55		
4	Program Pengendalian dan Penataan Reklame	Jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	Jalur	15,00	1.770.347.393		1.562.740.000	DPKPP
		Persentase jalur strategis reklame yang tertata	%			50,00		
5	Program Penataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase PSU perumahan yang tertata	%			21,22	348.120.000	DPKPP
6	Program Pengembangan Perumahan	persentase perumahan yang tertata	%			93,58	2.928.983.000	DPKPP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
		Rasio rumah layak huni	rasio			0,243		
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan	kegiatan	16,00	4.099.941.727	15	4.502.654.800	DPKPP
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	kegiatan	8,00	2.065.064.748	4	1.055.460.000	DPKPP
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan	kegiatan	1,00	76.990.000	1	198.000.000	DPKPP
10	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	kegiatan	2,00	199.050.000	2	629.782.000	DPKPP
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	kegiatan	8,00	255.027.238	9	369.966.400	DPKPP
I.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Program Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	%	100	592.503.000	100	300.000.000	Satpol PP
2	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	7.052.082.000	100	7.710.693.000	Satpol PP
3	Program Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,28	11.040.952.000	108,75	608.387.000	Satpol PP
4	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum	Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun	orang			35	878.000.000	Satpol PP
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100	1.877.417.000	100	1.887.202.000	Satpol PP
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100	805.300.000	100	493.450.000	Satpol PP
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100	157.514.000	100	100.000.000	Satpol PP
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100	326.760.000	100	280.460.000	Satpol PP
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100	164.097.000	100	280.460.000	Satpol PP
10	Program Penigkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan	%			10	680.250.000	BPBD
11	Program Penanggulangan Desa Rawan Bencana Alam	Persentase Desa Siaga Bencana	%			5	574.740.000	BPBD
12	Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Alam	Rata-rata waktu penanganan bencana alam (24 jam)	%			100	2.973.831.000	BPBD
13	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pelaksanaan pemulihan di daerah terkena bencana alam	%			20	625.000.000	BPBD
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	1.533.331.762	100	1.260.000.000	BPBD
15	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	6.497.189.498	100	645.000.000	BPBD
16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	99.945.800	100	100.000.000	BPBD
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaa Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	190.700.000	100	50.000.000	BPBD
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	499.697.400	100	598.855.000	BPBD
19	Program Penanganan Kebakaran	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	%			28	11.560.454.200	Disdamkar

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
20	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	%			11,67	592.400.000	Disdamkar
21	Program Pengawasan dan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%			10,00	500.600.000	Disdamkar
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%			100	1.067.990.000	Disdamkar
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%			57	26.864.900.000	Disdamkar
24	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%			100	458.250.00	Disdamkar
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%			100	25.000.000	Disdamkar
26	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%			100	540.622.000	Disdamkar
27	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Menurunnya kasus SARA	%	50,00	634.602.000	95	1.558.435.000	Kesbangpol
28	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah	%	76,00	2.766.739.000	-	1.243.675.000	Kesbangpol
		Persentase LSM atau Ormas yang aktif	%	86,11	623.096.000	-		Kesbangpol
		Persentase penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat	%			60,00		Kesbangpol
29	Program Penanganan Konflik	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik	%			80	792.805.000	Kesbangpol
30	Program Pendampingan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden	%			70	235.236.000	Kesbangpol
31	Program Pendampingan Pemilihan Kepala Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades	%			65	234.854.000	Kesbangpol
32	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Orkemas yang aktif	%			34	213.732.000	Kesbangpol
33	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	14,00	694.326.000	15	1.094.053.000	Kesbangpol
34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	5,00	264.804.000	3	5.092.867.000	Kesbangpol
35	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Disiplin Aparatur	kegiatan			1		Kesbangpol
36	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur	Kegiatan			1	46.653.000	Kesbangpol
37	Program pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	59.343.000	15	178.028.000	Kesbangpol
I.6	SOSIAL							
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%		14.908.960.835	0,49	5.007.013.000	Dinsos
2	Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial	%			100	50.000.000	Dinsos

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	%	2,00		2	2.603.532.000	Dinsos
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	-		40	2.603.532.000	Dinsos
5	Program Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma		%			20	1.200.000.000	Dinsos
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Dilatih	%	37,26		37,26	7.184.516.000	Dinsos
7	Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%			57	7.184.516.000	Dinsos
8	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	8.623.953.779	100	1.740.117.200	Dinsos
9	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	42,86	4.656.476.631	88	9.407.867.000	Dinsos
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%			100		Dinsos
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	67.810.000	100	113.000.000	Dinsos
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	3.445.498.509	100	441.163.700	Dinsos
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
II.1	TENAGA KERJA							
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	420,00	3.940.997.280		2.953.379.000	Disnaker
		Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Org			180		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%			66,44		
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja	%	62,71	701.481.400		3.473.150.000	Disnaker
		Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%			11,94		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%			40,00		
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus yang masuk	Kasus	153,00	674.894.775		1.255.673.000	Disnaker
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%			54,13		
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%			35,00		
4	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	%			92,86	1.032.783.000	Disnaker
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keg	14	1.863.935.614	14	2.054.540.000	Disnaker
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keg	10	843.877.460	7	771.050.000	Disnaker
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	Keg			1		Disnaker
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keg	1	44.910.000	1	46.250.000	Disnaker
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Keg	8	431.042.700	9	657.818.000	Disnaker

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
II.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	12,78	511.321.000	27,80	1.210.397.665	DP3AP2KB
2	Program Perlindungan Hak Perempuan	Rasio KDRT	%	0,00		0,0042	495.175.410	DP3AP2KB
3	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase PD yang memiliki data anak	%			20	757.597.158	DP3AP2KB
4	Program Perlindungan Anak	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%			13	281.793.000	DP3AP2KB
II.3	PANGAN							
1	Program pengembangan konsumsi dan pengankaragaman pangan	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,80		105,60	4.992.250.000	DKP
		Skor Angka Kecukupan Energi	%	110,90		111,10		
2	Program pengembangan ketersediaan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Energi per Kapita	%	102,26		102,50	1.671.368.000	DKP
		Ketersediaan Protein per Kapita	%	143,68		144,00		
		Ketersediaan Pangan Utama	%	63,00		38,33		
3	Program Mitigasi dan Penanganan Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	NA		4,37	2.298.421.260	DKP
4	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	91,00		91,50	2.682.933.000	DKP
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	95,02		100		
5	Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,00		91,50	3.863.113.600	DKP
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	3.095.439.496	100	2.417.660.250	DKP
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur	%	100	1.374.300.000	100	3.757.240.000	DKP
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	%			100	137.500.000	DKP
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	%	100	552.520.000	100	561.703.000	DKP
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	%	100	906.900.000	100	488.229.752	DKP
II.4	PERTANAHAN							
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sertifikasi kepemilikan tanah aset Pemda	Bidang	75,00	762.748.088		1.452.725.000	DPKPP
		Sertifikasi kepemilikan tanah masyarakat Pemda melalui Program PTSL	Bidang	80.000,00				
		Jumlah aset pemda yang terdaftar	Bidang			80		
		Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Bidang			75.000		
II.5	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Pembuatan Lubang Biopori	Persen	50,00	439.764.000	50	424.108.550	DLH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Pemulihan Lahan	Lokasi	6,00	666.089.000	7	840.000.000	DLH
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan	point	220,00	2.066.057.000	341	2.110.927.000	DLH
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran udara	Persen	91,00	80.708.000	73	205.900.000	DLH
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang telah melakukan Pelaporan Dokumen Lingkungan	Persen	73,00	4.148.244.000	-	3.802.729.968	DLH
		Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran air	Persen	93,00		48,05		
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan sampah	Persen	60,00	45.517.580.000	80	42.284.356.355	DLH
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	Persen	100,00	5.488.616.000	100	4.249.676.327	DLH
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai	Persen	100,00	32.225.210.000	100	44.142.561.000	DLH
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100		DLH
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	104.500.000	100	104.500.000	DLH
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	Persen	100,00	452.861.000	100	734.191.800	DLH
II.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan	unit	5,00	13.482.117.903	6	570.688.000	Disdukcapil
2	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1,08	2.300.255.000	1	4.066.699.000	Disdukcapil
3	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1,00	737.510.000	1	1.212.619.000	Disdukcapil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK	%	-	-	100	3.100.457.000	Disdukcapil
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	3.056.152.711	100	4.099.192.000	Disdukcapil
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	9.401.303.747	100	9.706.274.000	Disdukcapil
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%			100		Disdukcapil
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	79.375.000	100	67.325.000	Disdukcapil
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	205.572.000	100	452.209.000	Disdukcapil
II.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	desa			416	2.017.577.000	DPMD
2	Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam penataan administrasi pemerintahan desa	desa			416	4.899.669.000	DPMD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
3	Program Pembinaan Penataan Desa	Tingkat Perkembangan Desa					3.524.781.000	DPMD
		Jumlah desa cepat berkembang	desa			16		
		Jumlah desa berkembang	desa			140		
		Jumlah desa kurang berkembang	desa			260		
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	orang			416	4.088.298.000	DPMD
5	Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	LPM Berprestasi	lembaga			4	7.350.000.000	DPMD
		PKK aktif	%			100		
		Posyandu aktif	%			100		
		Jumlah pengurus lembaga masyarakat yang dibina	orang			416		
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif	lembaga			5	2.231.884.000	DPMD
7	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%			1	4.378.097.000	DPMD
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%			100		
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	kegiatan	13,00	1.405.053.618	15	1.363.872.000	DPMD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	5,00	4.716.715.000	7	1.478.600.000	DPMD
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya disiplin aparatur yang berkualitas	kegiatan			1	75.500.000	DPMD
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas	kegiatan	1,00	40.800.000	2	155.200.000	DPMD
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	kegiatan	8,00	756.105.975	9	1.564.469.000	DPMD
II.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%			10,75	685.515.500	DP3AP2KB
2	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	42,02	1.972.504.600	77,84	1.093.572.377	DP3AP2KB
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%			76,05		
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%			76,12		
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%			77,08		
3	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja	%		569.609.000	60,00	884.000.000	DP3AP2KB
4	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%			77,60	4.384.954.640	DP3AP2KB
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%			100		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.654.902.700	100	1.771.176.781	DP3AP2KB

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	%	100	732.455.000	100	641.659.500	DP3AP2KB
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100		DP3AP2KB
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur	%	100	21.000.000	100	29.700.000	DP3AP2KB
9	Program Peningkatan 'Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban SKPD	%	100	653.267.000	100	675.370.969	DP3AP2KB
II.9	PERHUBUNGAN							
1	Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemasangan Rambu-rambu	%	0,14		13,78%	50.831.731.000	Dishub
2	Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Kecamatan	40,00		40	9.215.000.000	Dishub
3	Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	25.598,00		45.000	2.037.180.000	Dishub
4	Program Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ	Tingkat pengawasan lalu lintas	Prosentase			1,136	6.604.047.000	Dishub
5	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	59.549.461,00		60.144.955	907.858.000	Dishub
		rasio ijin trayek	prosentase	0,00		0,001418		
		jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus	jumlah terminal	5,00		3		
		presentase layanan angkutan darat	Prosentase	0,04		0,040706		
		rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,00		0,00117		
		jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum	jumlah orang	17.864.838,00		18.043.486		
		jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	jumlah orang	586.937,00		592.806		
		Integrasi moda angkutan umum	jumlah moda	2,00		6		
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	15,00	3.478.091.000	15	3.135.236.000	Dishub
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	9,00	4.843.100.000	4	1.121.200.000	Dishub
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Dishub
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	2,00	539.300.000	2	200.000.000	Dishub
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel	Kegiatan	8,00	528.860.000	9	753.100.000	Dishub
II.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Program Penyebaran Informasi dan Komunikasi	Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik dan Non Elektronik	%	77.78	2.546.378.073	86	1.774.604.000	Diskominfo
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sapras Diseminasi Informasi yang Terbangun	Buah	-	-	3	730.334.000	Diskominfo
3	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Buku	-	-	13	201.581.000	Diskominfo
4	Program Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi	%	-	-	90	171.594.000	Diskominfo
5	Program Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti SKPD	%			80	50.738.000	Diskominfo
6	Program Peningkatan Kerjasama Informasi dan Komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%			100	1.304.888.000	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
7	Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yg Terkoneksi	%	75,00	1.621.174.260	19	3.501.189.000	Diskominfo
8	Program Pengembangan Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Terbangun	Aplikasi	-	-	4	794.579.000	Diskominfo
9	Program Penyelenggaraan Persandian	Tersedianya Sistem Keamanan Informasi Perangkat Daerah	PD			32	100.317.000	Diskominfo
10	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Level			4	4.293.650.000	Diskominfo
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100,00	5.019.894.559	100	4.977.605.000	Diskominfo
12	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Parasarana Apaatur	%	100,00	1.083.683.497	100	873.127.000	Diskominfo
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur	%		-	100	6.000.000	Diskominfo
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	%	100,00	327.859.000	100	276.800.000	Diskominfo
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	%	100,00	285.339.910	100	350.546.000	Diskominfo
II.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Program Penataan Koperasi	Jumlah koperasi	Unit	1.750,00	1.155.774.500	1.603	500.350.000	DisKopUKM
		Jumlah Koperasi Aktif	Unit	1.250,00		542		
		Persentase koperasi aktif	%	31,61		34		
		Jumlah kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam	Unit	4,00		5		
		Jumlah Izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam baru	Unit	3,00		4		
		Jumlah Anggota, Karyawan, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, SHU koperasi						
		- Anggota	orang	290.656,55		296.470		
		-Karyawan	orang	4.357,20		4.444		
		-Modal Sendiri	Rp.	428.894.843.592,44		437.472.740.464		
		-Modal Luar	Rp.	638.986.261.291,12		651.765.986.517		
		-Volume Usaha	Rp.	1.209.166.788.765,31		1.233.350.124.541		
		-SHU	Rp.	60.656.875.496,84		61.870.013.007		
		Jumlah software koperasi	Unit	1,00		1		
		Jumlah koperasi syariah yang memenuhi persyaratan (Permen 13)	Unit	40,00		50		
		Persentase koperasi syariah	%	4,41		0		
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unit			235.804.200		1.094.107.000	DisKopUKM
		- sangat berkualitas	Unit	3,00		4		
		- berkualitas	Unit	4,00		5		
		- cukup berkualitas	Unit	28,00		29		
		- tidak berkualitas	Unit	15,00		13		
		Jumlah perintisan koperasi syariah baru	Unit	5,00				
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan	unit	100,00	338.780.000	200	361.500.000	DisKopUKM

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
		Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	unit	1.750,00		1.603		
		Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi	%	11,52		12		
4	Program Peningkatan SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang dilatih	Orang	40,00	2.419.409.000	40	1.555.000.000	DisKopUKM
		Jumlah pengawas koperasi yang dilatih	Orang	40,00		40		
		Jumlah manajer koperasi yang dilatih	Orang	20,00		20		
		Jenis pelatihan koperasi	Jenis	5,00		5		
5	Program Pemberdayaan Koperasi	Jumlah pembinaan koperasi	Unit	100,00	1.856.091.650	120	1.845.000.000	DisKopUKM
		Prosentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan	%	4,99		5		
6	Program Peningkatan Kelembagaan, Legalitas Usaha dan Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terdata	Unit	4.000,00	604.290.000	4.000	1.315.570.000	DisKopUKM
		Jumlah UMKK keseluruhan (BPS)	Unit	682.579,00		682.579		
		Presentasi Usaha mikro dan kecil	%	0,99		99		
		Jumlah sosialisasi kebijakan	kali	4,00		4		
		Jumlah IUMK	Unit	1.000,00		1.000		
		Jumlah UMK berprestasi	Unit	10,00		100		
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	64,00		67		
7	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil	Jumlah pelatihan kewirausahaan	Orang	300,00		400	3.767.205.000	DisKopUKM
		Jumlah desa wirausaha	desa	3,00		2		
		Jumlah wirausaha baru	Orang	400,00		280		
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Modal Usaha	Jumlah kemitraan UMK	Unit	6,00		10	475.000.000	DisKopUKM
		Jumlah UMK terfasilitasi akses permodalan (unit)	Unit	120,00		140		
		Jumlah ukm yang mendapat pelatihan dan Pemantauan dana lainnya	UMKM	100,00		20		
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	0,63		0,73		
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah pameran UMKM (ukm/kali)	kali	0,63		10	2.865.468.000	DisKopUKM
		Kontribusi sektor UKM terhadap PDRB (%)	%	28,45		28,50		
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,97		99		
10	Program Pelayanan Administrasi 'Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	15,00	1.079.560.595	16	2.637.109.000	DisKopUKM
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	11,00	827.448.612	7	459.451.000	DisKopUKM
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		DisKopUKM
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	2,00	41.400.000	2	97.200.000	DisKopUKM
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan	9,00	400.000.000	9	550.900.000	DisKopUKM
II.12	PENANAMAN MODAL							
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN	Persen	-	118.316.000	4,7	1.504.247.000	DPMPSTP
		Jumlah Nilai investasi PMA - PMDN	Trilyun Rp	8,69		9,10		
		PMA		5,05		5,29		
		PMDN		3,64		3,81		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
		Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	20,00		30		
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	98,40		4,7		
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	331,00	1.415.226.020	340	1.951.490.000	DPMPTSP
		PMA		173,00		177		
		PMDN		158,00		163		
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah	Dokumen	-	514.019.000	3	535.248.000	DPMPTSP
4	Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	Dokumen	-	248.783.000	2	393.000.000	DPMPTSP
5	Program Pelayanan Perizinan	Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang)	Berkas Izin	31.190,00	5.197.289.200	25.000	4.637.811.000	DPMPTSP
		Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional)	Berkas Izin	13.000,00		8.000		
6	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang)	Berkas Izin	31.190,00	602.728.300	25.000	630.357.000	DPMPTSP
		Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional)	Berkas Izin	13.000,00		8.000		
7	Program Pengendalian Kinerja Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	50,00	569.382.000	100	1.367.000.000	DPMPTSP
		Perizinan Non OSS Berstandar ISO	Izin	77,00		20		
8	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perizinan	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Sistem	1,00	1.107.429.420	1	1.145.251.000	DPMPTSP
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan		-	2.774.511.936	70	2.892.708.700	DPMPTSP
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai	Persen	-	7.563.771.648	90	2.447.670.100	DPMPTSP
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen			100		DPMPTSP
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pelayanan Kepegawaian	Persen	-	387.798.000	90	450.000.000	DPMPTSP
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase perencanaan sesuai target	Persen	-	387.225.900	90	523.816.200	DPMPTSP
		Presentase Kinerja Keuangan Daerah sesuai Target	Persen	-		90		
II.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Program Peningkatan Kompetensi Pemuda	Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha	%	-	-	2.00	30.688.420.000	Dispora
		Jumlah Pemuda Berpretasi Tk Provinsi & Tk Nasional (Pemuda Pelopor dan Paskibraka dll)	Orang	-	-	3		
2	Program Peningkatan Organisasi Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan	%			28.57	10.540.100.000	Dispora
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peringkat PORDA	Peringkat	1,00	95.370.512.975		3.011.208.000	Dispora
		Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	850				
		Jumlah atlit pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	150,00		165		
		Persentase pelatih yang bersertifikasi	%	44,64		25.00		
4	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat :	Peringkat			-	19.680.720.000	Dispora
		Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga	Orang			53		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pembangunan stadion olahraga berskala internasional	%	100,00	105.240.872.455	-	22.165.892.000	Dispora
		Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum	%	5,00		-		
		Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun	Gedung/Lapangan			1		
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	15,00	5.499.010.504	15	8.321.757.000	Dispora
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan Sarana Aparatur	Kegiatan	9,00	5.622.468.957	5	1.302.500.000	Dispora
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Dispora
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	2,00	42.344.000	2	70.000.000	Dispora
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan	8,00	750.901.700	9	1.140.200.000	Dispora
II.14	STATISTIK							
II.15	PERSANDIAN							
II.16	KEBUDAYAAN							
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	N/A	613.059.500	25	1.847.250.000	Disbudpar
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35	630.063.000	40	1.118.050.000	Disbudpar
		Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Warisan	N/A		58		
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	N/A	1.534.073.486	44	2.076.800.000	Disbudpar
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14	1.688.496.954	15	2.257.401.000	Disbudpar
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	10	710.208.148	4	419.900.000	Disbudpar
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Disbudpar
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	Kegiatan	3	216.125.000	2	48.150.000	Disbudpar
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8	270.111.000	8	269.962.000	Disbudpar
II.17	PERPUSTAKAAN							
1	Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan umum/khusus dan sekolah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	%			41	886.730.000	DAP
2	Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan umum/khusus dan sekolah	Rasio Pengelola Perpustakaan	%			4	317.903.000	DAP
3	Program Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam buku	%			2	761.081.000	DAP
II.18	KEARSIPAN							

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
1	Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%			20,83	1.159.321.000	DAP
2	Program Penyelenggaraan pengelolaan pengembangan sistem dan layanan informasi kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah non Kecamatan yang mengelola arsip berbasis Teknologi	%			15,63	541.260.000	DAP
3	Program Penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM pengelola kearsipan	Rasio peningkatan SDM pengelola kearsipan	%			22,62	731.155.000	DAP
4	Program Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan	Persentase pengelolaan kearsipan yang baik pada unit kearsipan	%			70,00	287.180.000	DAP
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	kegiatan	14	1.351.771.897	14	1.589.447.000	DAP
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	7	1.948.088.287	6	1.197.322.000	DAP
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		DAP
8	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	kegiatan	1	20.000.000	2	113.000.000	DAP
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	kegiatan	8	303.920.000	9	249.644.000	DAP
III	URUSAN PILIHAN							
III.1	PARIWISATA							
1	Program Pengembangan Pemasaran	Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisatawan	7.173.278	4.211.672.500	7.584.000	4.446.987.000	Disbudpar
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	339.931		316.000		
		Jumlah event pariwisata	event	9		10		
2	Program Pengembangan Destinasi	Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional	Usaha	N/A	1.076.498.310	10	3.439.837.000	Disbudpar
3	Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,56	2.545.873.500	2	2.047.078.000	Disbudpar
III.2	PERTANIAN							
1	Program peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan					8.467.041.000	Distanhorbun
		- Produksi padi	Tom GKG	545.418		417.839		
		- Produksi palawija	Ton	162.190		151.715		
		- Produksi benih padi unggul bersertifikat	Ton	1.158		-		
		- Produktivitas padi sawah	ku/ha	63,25		55,20		
		- Produktivitas padi gogo	ku/ha	32,58		33,62		
		- Produktivitas palawija	ku/ha	172,02		171,83		
2	Program peningkatan produksi hortikultura	- Produksi sayuran	Ton	95.252		92.487	4.950.276.700	Distanhorbun
		- Produksi buah-buahan	Ton	131.369		59.972		
		- Produksi tanaman hias bunga	tangkai	4.389.308		4.150.786		
		- Produksi tanaman hias daun indah	pohon	527.119		411.380		
		- Produksi tanaman obat	Ton	11.228		4.409		
		- Produktivitas sayuran	ku/ha	116,05		116,11		
3	Program peningkatan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan	Ton	7.939		7.993	3.896.687.000	Distanhorbun
4	Program penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan utama	%	1,52		2,18	1.562.149.000	Distanhorbun
5	Program Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi	unit	-		16	5.860.032.800	Distanhorbun

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
6	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan	Persentase nilai tambah dari padi menjadi beras	%	0,80		0,81	1.059.629.200	Distanhorbun
		Persentase nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung	%	2,00		2,00		
		Persentase nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung	%	3,00		3,00		
7	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Hortikultura	Persentase nilai tambah dari buah-buahan menjadi bahan olahan	%	-		50,00	186.040.000	Distanhorbun
8	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Perkebunan	Persentase nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri	%	10,00		10,00	1.081.193.000	Distanhorbun
		Persentase nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering	%	5,00		5,00		
		Persentase nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan	%	5,60		6,00		
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok)					1.392.106.300	Distanhorbun
		- Kelompok Pemula	klpk	377		378		
		- Kelompok Lanjut	klpk	1.183		1.187		
		- Kelompok Madya	klpk	278		279		
		- Kelompok Utama	klpk	20		21		
10	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha	%	69,39		69,39	2.511.260.000	Distanhorbun
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	kegiatan	15	2.495.896.748	15	3.087.026.000	Distanhorbun
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	7	947.639.372	12	14.394.013.000	Distanhorbun
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Distanhorbun
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas	kegiatan	3	384.809.500	3	448.572.000	Distanhorbun
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas	kegiatan	6	387.835.610	7	494.156.000	Distanhorbun
III.3	PERDAGANGAN							
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	- Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA) - Terwujudnya sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga	Eksportir Unit			318 7	694.312.000	Disperdagin
2	Program Promosi dan Pencitraan Produk Ekspor Daerah						800.000.000	Disperdagin
3	Program Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan						12.784.000.000	Disperdagin
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Rp.			31.998.175	3.770.000.000	Disperdagin
5	Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan						220.000.000	Disperdagin
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase kecamatan yang mempunyai pasar	%			100	15.000.000.000	Disperdagin
7	Program Kemetrolagian	Persentase UTP bertanda tera sah dan berlaku	%			78,73	3.885.255.000	Disperdagin
8	Program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen						874.700.000	Disperdagin
9	Program Bina Tata Niaga						874.913.000	Disperdagin

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			2.650.798.000		4.032.991.000	Disperdagin
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.285.483.000		2.586.543.000	Disperdagin
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Disperdagin
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				283.534.000		375.000.000	Disperdagin
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				522.122.000		772.394.000	Disperdagin
III.4	PERINDUSTRIAN							
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Jumlah komoditi Unggulan IKM - Jumlah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana IKM	Jenis IKM			5 500	9.614.679.000	Disperdagin
2	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku	Rp.			132.566.000	172.722.000	Disperdagin
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan industri	%			0,55	1.075.000.000	Disperdagin
4	Program Penataan Struktur Industri						91.616.000	Disperdagin
III.5	TRANSMIGRASI							
1	Program Transmigrasi Regional	Jumlah peserta transmigran yang ditempatkan	KK	3,00	52.552.650		209.947.000	Disnaker
		Laju pengiriman transmigrasi regional	%			100		
III.6	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terkendalnya wabah PHMS/penyakit ikan			5.450.461.700		4.215.749.000	Diskanak
		- Rabies (kecamatan)	Kec	40,00		40		
		- Anthrax (kecamatan)	Kec	40,00		40		
		- Brucellosis (kecamatan)	Kec	40,00		40		
		- SE (kecamatan)	Kec	40,00		40		
		- AI (kecamatan)	Kec	40,00		40		
		peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH	Kec	40,00		40		
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging (kg)	ton	182.180,54	9.444.019.392	187.645	7.719.571.000	Diskanak
		Produksi Telur (kg)	ton	47.405,81		47.520		
		Produksi Susu (liter)	ton	18.591,32		19.335		
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Sentra agribisnis peternakan	Lokasi	2,00	470.905.960	2	1.028.334.000	Diskanak
4	Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Peternakan	Persentase Peningkatan Status Kelas Kelompok Peternakan	%	2,52	475.292.600	2,06	480.000.000	Diskanak
5	Program Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Aplikasi Teknologi Peternakan (%)	%	3,51	97.108.500	3,56	108.000.000	Diskanak
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan	Terwujudnya keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membudidayakan ikan	%			100	630.701.000	Diskanak
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi (ton)	ton	122.131,00	6.372.176.391	123.963	5.209.229.000	Diskanak
		Produksi Benih Ikan (RE)	RE	5.545.493,52		5.628.676		
		Produksi Ikan Hias (RE)	RE	283.469,46		287.721		
		Konsumsi ikan (kg/kap/th)	kg/kap/tahun	29,53		29,77		
8	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Sentra agribisnis perikanan (lokasi)	Lokasi	2,00	738.592.933	2	3.916.880.000	Diskanak

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
		Produksi olahan produk perikanan (ton)	ton	21.325,00		22.718		
9	Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	-	619.862.477	648	1.051.696.000	Diskanak
		Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	-		648	1.051.696.000	Diskanak
10	Program Penerapan Teknologi Perikanan	Cakupan Aplikasi Teknologi Perikanan (%)	%	2,09	193.161.500	2	200.000.000	Diskanak
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kegiatan	15,00	2.229.218.000	15	2.252.187.000	Diskanak
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kegiatan	11,00	1.295.850.000	5	757.798.000	Diskanak
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Diskanak
14	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas	Kegiatan	1,00	28.400.000	1	30.672.000	Diskanak
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	294.125.000	9	475.750.000	Diskanak
IV	PENUNJANG URUSAN							
IV.I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%	4,00	11.614.914.000	100	2.234.094.844	Bappedalitbang
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi	%			85		
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional	%			80		
2	Program Pengembangan Data/Informasi;	Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD	Dok	5,00	5.281.323.600	23,39	1.107.540.760	Bappedalitbang
3	Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah	Dok	11	3.416.990.220	9	393.344.274	Bappedalitbang
4	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Sumberdaya Daya Alam	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%			100	1.428.913.243	Bappedalitbang
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%			100		
5	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%			100	1.948.614.000	Bappedalitbang
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%			100		
6	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang InFrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%			100	1.904.898.553	Bappedalitbang
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%			100		
		Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW	%			70		
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%	19,00	3.234.137.000	20	1.629.509.000	Bappedalitbang
8	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Kabupaten Bogor	%	12,00	3.464.892.000	20	683.747.000	Bappedalitbang
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Tersedianya data dan informasi Pendukung Perencanaan Kelembagaan	Dok	20,00	2.148.917.000	5	590.489.424	Bappedalitbang
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14,00	10.630.382.700	14	4.505.711.806	Bappedalitbang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	9,00	5.023.800.000	5	785.250.000	Bappedalitbang
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur	Kegiatan	1,00	220.000.000	2	54.000.000	Bappedalitbang
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	Kegiatan	2,00	1.094.520.000	2	220.500.000	Bappedalitbang
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	9,00	3.303.367.200	9	688.976.001	Bappedalitbang
IV.2	KEUANGAN							
1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	91,67	2.898.662.307	83,33	2.527.096.000	BPKAD
		Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100,00		100,00		
		Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	86,11		86,11		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada			Ada		
2	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%		1.708.681.350	100	993.522.000	BPKAD
		Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen			690		
		Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%			93,08		
3	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu		2.504.994.675	Tepat	2.525.746.000	BPKAD
		Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	83,33		86,11		
4	Program Pengelolaan Barang Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD	%	86,11	3.006.661.431	86,11	1.970.061.000	BPKAD
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%	83,33		86,11		
		Persentase BMD yang dimanfaatkan	%			47,75		
		Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%			32,00		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan	Kegiatan	16	3.243.563.413	14	3.951.976.000	BPKAD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan	Kegiatan	12	2.535.743.250	13	2.035.277.000	BPKAD
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	179.775.000	2	68.825.000	BPKAD
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan	Kegiatan	3	467.445.000	3	465.162.000	BPKAD
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan	Kegiatan	9	521.866.130	9	621.640.000	BPKAD
10	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (dalam milyar)			7.471	786.335.000	Bappenda
11	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%			65,81	259.114.000	Bappenda

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
12	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp (dalam milyar)			2.554	1.985.601.000	Bappenda
13	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah	Rp (dalam milyar)			727	2.836.932.000	Bappenda
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	WP			4.863		
		Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah Berbayar	Rp (dalam milyar)			29		
14	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rp (dalam Milyar)			470	16.023.708.000	Bappenda
		Colection Ratio	%			57,70		
		Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar	Rp (dalam Milyar)			94		
15	Program Optimalisasi Pengelolaan BPHTB	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rp (dalam milyar)			547	2.319.624.000	Bappenda
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan	Keg	16	10.433.763.765	16	10.966.257.000	Bappenda
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	Keg	10	6.717.183.259	7	6.664.026.000	Bappenda
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan	Keg			1		Bappenda
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	Keg	2	365.560.000	2	310.619.000	Bappenda
20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	Keg	8	2.017.551.678	9	1.978.362.000	Bappenda
IV.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	15,00		20	18.292.126.000	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,63		1,56		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	5,50		34,16		
2	Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai	Persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan	%			90,65	755.861.000	BKPP
3	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase akurasi data kepegawaian	%			88,22	228.380.000	BKPP
4	Program Pembinaan Aparatur	ASN yang mencapai nilai SKP "Baik	%			80,00	1.947.321.000	BKPP
		Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	%			80,00		
5	Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	%			72,04	1.510.953.000	BKPP
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	15	2.289.363.546	16	1.829.623.000	BKPP
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	8	1.843.428.337	7	1.644.896.000	BKPP
8	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan	1	112.425.000	1		BKPP
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	Kegiatan	2	29.050.000	2	301.000.000	BKPP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8	256.254.500	10	747.770.000	BKPP
IV.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
IV.5	PENGAWASAN							
1	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindakan Hasil Pengawasan	temuan	100	1.706.146.000	100	1.071.804.000	Inspektorat
2	Program Fasilitas Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100		100	319.704.000	Inspektorat
3	Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B		B	26.560.000	Inspektorat
		Tindak Lanjut temuan BPK	%					
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3	522.216.000	3	525.142.000	Inspektorat
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Level	3	79.290.000	3	29.468.000	Inspektorat
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	%	100	1.718.762.000	100	1.838.013.000	Inspektorat
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan	%	100	962.305.000	100	1.111.325.000	Inspektorat
9	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%			100		Inspektorat
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan	%	100	101.739.000	100	251.842.000	Inspektorat
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan	%	100	273.935.000	100	1.019.487.000	Inspektorat
IV.6	SEKRETARIAT DEWAN							
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah workshop yang difasilitasi	kali	7		7	4.200.000.000	Setwan
2	Program Penyelenggaraan Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada		ada	9.282.387.000	Setwan
3	Program Penyelenggaraan Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak			ada	14.650.871.000	Setwan
4	Program Penyelenggaraan Kehumasan Dan Keprotokolan	Jumlah fasilitas kehumasan dan keprotokolan DPRD	kali			156	2.116.470.000	Setwan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100	6.020.183.000	100	7.601.761.000	Setwan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100	23.744.084.000	100	15.689.550.000	Setwan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100	512.700.000	100	544.680.000	Setwan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100	2.107.475.000	100	340.872.000	Setwan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100	640.771.000	100	628.220.000	Setwan
IV.7	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,06		3	855.367.000	Setda

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
2	Program Peningkatan Pembinaan Wilayah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Diatas 75	%	76,00		80	432.316.000	Setda
3	Program Penataan Wilayah	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	%	70,00		70	510.364.000	Setda
4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Daerah Otonomi Baru	DOB			2	50.000.000	Setda
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	Produk Hukum	100	8.382.308.722	100	1.408.380.000	Setda
6	Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	Perkara		7.551.385.250	100	307.816.000	Setda
7	Program Penyuluhan Hukum	Persentase tingkat pemahaman hukum masyarakat				100	696.735.000	Setda
8	Program Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Indeks Kerukunan Beragama		92,31		96,92	12.766.436.000	Setda
9	Program Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Persentase PHBN dan PHBD				100	2.292.005.000	Setda
10	Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat				100	863.227.000	Setda
11	Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi	Persentase BUMD yang sehat		25,00	4.728.028.906	25,00	1.516.055.000	Setda
12	Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti		100	6.899.774.023	100	918.324.000	Setda
13	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang di implementasikan		100		4	414.910.000	Setda
14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Indeks kualitas pelayanan pimpinan				4	5.843.031.000	Setda
15	Program Pengelolaan Administrasi Aparatur	Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK		100		100	339.864.000	Setda
16	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang implementatif				39	1.543.386.000	Setda
17	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah				98	6.874.865.000	Setda
18	Program Administrasi Perkantoran	Temuan Materiil	Temuan	27,00	46.897.120.885	27	13.764.918.000	Setda
19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Temuan Materiil	Temuan	27,00	39.596.852.132	27	24.888.693.000	Setda
		Persentase Aset dalam Kondisi Baik	%	97,00		97		
20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Temuan Materiil	Temuan	27,00	1.610.006.000	27	287.950.000	Setda
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Temuan Materiil	Temuan	27,00	2.468.578.400	27	920.386.000	Setda
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan	Temuan Materiil	Temuan	27,00	8.712.474.527	27	1.033.218.000	Setda
		Nilai Akip	70 (B)	70 (B)		70 (B)		
V	KEWILAYAHAN							
V.1	KECAMATAN CIBINONG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	109.153.000	8	507.213.000	Kec. Cibinong
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	23.858.000	4	524.008.000	Kec. Cibinong
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	24	669.412.000	19	1.643.195.000	Kec. Cibinong
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	11	3.231.432.700	251	10.765.600.000	Kec. Cibinong
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	1.368.797.124	11	1.863.253.000	Kec. Cibinong
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	10	2.898.166.000	14	324.500.000	Kec. Cibinong
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Cibinong

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8	63.909.000	8	210.000.000	Kec. Cibinong
V.2	KECAMATAN GUNUNG PUTRI							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5	108.727.000	5	131.388.000	Kec. Gunungputri
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	39.147.000	3	100.000.000	Kec. Gunungputri
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	17	419.256.000	14	526.537.000	Kec. Gunungputri
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan			3	29.290.000	Kec. Gunungputri
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10	444.279.970	11	519.851.000	Kec. Gunungputri
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8	721.943.900	2	115.000.000	Kec. Gunungputri
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1	10.000.000	Kec. Gunungputri
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	82.324.000	8	94.680.000	Kec. Gunungputri
V.3	KECAMATAN CITEUREUP							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	88.092.000	6	270.000.000	Kec. Citeureup
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	24.692.000	4	219.197.000	Kec. Citeureup
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	19	550.226.000	16	802.303.400	Kec. Citeureup
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan			31	1.722.285.000	Kec. Citeureup
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	389.578.670	14	757.694.000	Kec. Citeureup
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	3	50.902.000	10	120.000.000	Kec. Citeureup
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	137.908.000	8	217.042.600	Kec. Citeureup
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1	56.000.000	Kec. Citeureup
V.4	KECAMATAN SUKARAJA							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	179.355.000	8	237.962.000	Kec. Sukaraja
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	75.000.000	4	131.626.000	Kec. Sukaraja
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14	525.988.000	16	542.247.000	Kec. Sukaraja
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan			5	92.738.000	Kec. Sukaraja
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	256.756.001	11	334.555.000	Kec. Sukaraja
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	9	235.913.000	10	312.653.000	Kec. Sukaraja
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Sukaraja
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	88.100.000	8	111.442.000	Kec. Sukaraja
V.5	KECAMATAN BABAKAN MADANG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	255.175.000	7	251.900.000	Kec. Babakan Madang
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	95.942.500	3	150.980.000	Kec. Babakan Madang
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15	814.549.750	18	847.434.000	Kec. Babakan Madang
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	36.800.000	4	89.790.000	Kec. Babakan Madang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	340.914.395	13	390.928.000	Kec. Babakan Madang
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	128.431.000	2	30.000.000	Kec. Babakan Madang
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Babakan Madang
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	127.297.000	8	140.790.000	Kec. Babakan Madang
V.6 KECAMATAN JONGGOL								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	4	148.604.000	4	145.585.000	Kec. Jonggol
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	38.857.000	3	143.989.000	Kec. Jonggol
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	8	437.486.000	14	499.067.000	Kec. Jonggol
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	7.567.300	1	15.302.000	Kec. Jonggol
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	8	443.203.667	10	533.377.000	Kec. Jonggol
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2	43.560.324	2	19.000.000	Kec. Jonggol
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Jonggol
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	6	204.173.000	7	218.536.000	Kec. Jonggol
V.7 KECAMATAN CILEUNGSI								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	2	174.830.000	6	310.522.000	Kec. Cileungsi
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	121.879.000	2	174.125.000	Kec. Cileungsi
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	8	721.274.500	14	603.678.000	Kec. Cileungsi
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	33.521.500	2	53.350.000	Kec. Cileungsi
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	439.333.260	12	481.083.800	Kec. Cileungsi
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2	52.145.750	4	63.246.000	Kec. Cileungsi
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Cileungsi
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	129.652.000	7	147.228.200	Kec. Cileungsi
V.8 KECAMATAN CARIU								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5	381.117.000	6	158.928.000	Kec. Cariu
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	51.130.000	2	62.250.000	Kec. Cariu
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15	566.302.000	14	522.448.000	Kec. Cariu
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	41.100.000	1	65.800.000	Kec. Cariu
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	362.964.000	12	468.196.000	Kec. Cariu
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	3	139.870.000	2	73.820.000	Kec. Cariu
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Cariu
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	1.830.447.000	7	243.174.000	Kec. Cariu
V.9 KECAMATAN SUKAMAKMUR								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	118.325.000	3	139.707.000	Kec. Sukamakmur
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	43.150.000	3	157.020.000	Kec. Sukamakmur
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20	505.093.000	10	436.000.000	Kec. Sukamakmur

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	16.599.000	2	19.000.000	Kec. Sukamakmur
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	440.657.193	13	542.236.000	Kec. Sukamakmur
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	139.367.000	2	25.000.000	Kec. Sukamakmur
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Sukamakmur
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1	6.000.000	Kec. Sukamakmur
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	257.530.000	9	189.520.000	Kec. Sukamakmur
V.10	KECAMATAN PARUNG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	142.893.500	6	206.300.000	Kec. Parung
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	48.093.500	3	104.500.000	Kec. Parung
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	17	531.807.500	15	582.300.000	Kec. Parung
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	11.263.000	2	12.000.000	Kec. Parung
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	180.352.589	11	265.700.000	Kec. Parung
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6	181.646.000	7	18.000.000	Kec. Parung
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1		Kec. Parung
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan	1	3.850.000	1	10.000.000	Kec. Parung
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	84.489.000	8	110.200.000	Kec. Parung
V.11	KECAMATAN GUNUNG SINDUR							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	151.905.500	8	200.000.000	Kec. Gunung Sindur
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	104.396.000	4	134.000.000	Kec. Gunung Sindur
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	24	419.517.500	18	449.013.000	Kec. Gunung Sindur
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	12.038.000	1	10.000.000	Kec. Gunung Sindur
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	252.854.100	14	506.240.000	Kec. Gunung Sindur
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	7	250.505.000	9	87.500.000	Kec. Gunung Sindur
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1	5.000.000	Kec. Gunung Sindur
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1	12.000.000	Kec. Gunung Sindur
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	108.819.000	8	177.000.000	Kec. Gunung Sindur
V.12	KECAMATAN KEMANG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	4	116.580.000	7	187.200.000	Kec. Kemang
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	1	26.760.000	3	142.361.000	Kec. Kemang
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	12	521.049.000	14	592.367.000	Kec. Kemang
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	6	116.200.000	15	504.696.000	Kec. Kemang
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	481.131.101	14	758.462.000	Kec. Kemang
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	56.990.000	11	96.750.000	Kec. Kemang
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Kemang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	5	89.259.000	8	111.754.000	Kec. Kemang
V.13 KECAMATAN BOJONGGEDE								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	139.375.000	6	265.000.000	Kec. Bojonggede
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	24.496.000	4	138.620.000	Kec. Bojonggede
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	22	462.180.000	16	708.434.000	Kec. Bojonggede
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4	17.425.000	17	1.005.734.000	Kec. Bojonggede
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	526.760.921	13	820.101.000	Kec. Bojonggede
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8	403.671.734	6	621.500.000	Kec. Bojonggede
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Bojonggede
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	28.620.000	8	136.500.000	Kec. Bojonggede
V.14 KECAMATAN LEUWILIANG								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	239.139.500	8	169.250.000	Kec. Leuwiliang
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	75.344.000	3	117.165.000	Kec. Leuwiliang
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	25	510.334.000	17	575.926.000	Kec. Leuwiliang
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4	79.216.000	4	38.071.000	Kec. Leuwiliang
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	165.043.323	12	240.290.000	Kec. Leuwiliang
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8	210.850.000	5	7.050.000.000	Kec. Leuwiliang
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Leuwiliang
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	99.962.000	8	115.800.000	Kec. Leuwiliang
V.15 KECAMATAN CIAMPEA								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	235.346.050	6	277.270.000	Kec. Ciampea
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	92.959.625	3	138.000.000	Kec. Ciampea
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14	686.720.174	15	770.739.000	Kec. Ciampea
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	39.648.650	3	52.000.000	Kec. Ciampea
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	316.238.802	12	352.408.000	Kec. Ciampea
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	167.441.000	5	206.600.000	Kec. Ciampea
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Ciampea
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	248.287.425	8	238.417.000	Kec. Ciampea
V.16 KECAMATAN CIBUNGBULANG								
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	288.416.380	6	274.630.000	Kec. Cibungbulang
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	118.025.000	3	116.399.000	Kec. Cibungbulang
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16	578.013.000	14	456.633.500	Kec. Cibungbulang
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	123.140.000	3	30.608.500	Kec. Cibungbulang
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14	331.036.547	14	376.503.000	Kec. Cibungbulang
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	213.140.716	2	6.963.210.000	Kec. Cibungbulang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1	2.500.000	Kec. Cibungbulang
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1		Kec. Cibungbulang
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	143.481.000	8	111.503.000	Kec. Cibungbulang
V.17	KECAMATAN PAMIJAHAN							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	316.637.000	7	223.259.000	Kec. Pamijahan
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	94.906.000	3	209.958.000	Kec. Pamijahan
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	26	755.619.400	16	777.235.000	Kec. Pamijahan
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	36.000.000	1	47.968.000	Kec. Pamijahan
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	394.281.800	12	366.081.000	Kec. Pamijahan
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	1	84.000.000	1	18.000.000	Kec. Pamijahan
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Pamijahan
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	40.032.000	8	17.549.000	Kec. Pamijahan
V.18	KECAMATAN RUMPIN							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8	278.600.800	7	192.611.500	Kec. Rumpin
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	57.550.000	3	131.773.000	Kec. Rumpin
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23	417.207.600	6	415.121.000	Kec. Rumpin
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	20.500.000	1	4.209.000	Kec. Rumpin
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	261.908.162	11	300.251.000	Kec. Rumpin
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	7	47.240.000	2	28.700.000	Kec. Rumpin
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan	7	7.700.000			Kec. Rumpin
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	1	133.156.400	8	166.790.500	Kec. Rumpin
V.19	KECAMATAN JASINGA							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	198.073.000	8	195.620.000	Kec. Jasinga
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	57.845.000	3	199.000.000	Kec. Jasinga
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16	491.699.000	16	618.164.000	Kec. Jasinga
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	55.074.000	2	56.610.000	Kec. Jasinga
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	253.562.000	12	282.916.000	Kec. Jasinga
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	344.222.000	2	202.000.000	Kec. Jasinga
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Jasinga
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	93.579.000	8	89.599.000	Kec. Jasinga
V.20	KECAMATAN PARUNG PANJANG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	90.075.000	8	104.000.000	Kec. Parung Panjang
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	43.675.000	3	95.000.000	Kec. Parung Panjang
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	22	558.887.500	18	651.000.000	Kec. Parung Panjang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	12.200.000	3	40.000.000	Kec. Parung Panjang
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	180.631.293	12	297.410.000	Kec. Parung Panjang
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	71.850.000	3	76.000.000	Kec. Parung Panjang
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1	500.000	Kec. Parung Panjang
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	6	81.272.000	8	165.000.000	Kec. Parung Panjang
V.21	KECAMATAN NANGGUNG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	175.775.000	7	185.500.000	Kec. Nanggung
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	34.838.000	3	104.992.000	Kec. Nanggung
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20	513.312.500	14	486.700.000	Kec. Nanggung
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4	32.740.000	3	27.500.000	Kec. Nanggung
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	266.555.618	13	330.000.000	Kec. Nanggung
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	63.490.000	4	7.038.000.000	Kec. Nanggung
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Nanggung
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	146.052.000	8	149.500.000	Kec. Nanggung
V.22	KECAMATAN CIGUDEG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5	175.269.000	3	154.000.000	Kec. Cigudeg
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	81.300.000	3	190.000.000	Kec. Cigudeg
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15	616.660.520	16	605.975.000	Kec. Cigudeg
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	41.240.000	3	36.100.000	Kec. Cigudeg
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10	286.651.114	11	318.565.000	Kec. Cigudeg
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8	286.335.334	6	20.280.000	Kec. Cigudeg
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1	3.000.000	Kec. Cigudeg
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	116.043.500	8	193.000.000	Kec. Cigudeg
V.23	KECAMATAN TENJO							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8	127.917.000	10	151.950.000	Kec. Tenjo
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	22.000.000	3	91.000.000	Kec. Tenjo
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23	602.763.200	18	570.000.000	Kec. Tenjo
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4	39.887.000	4	20.000.000	Kec. Tenjo
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14	257.037.400	13	382.113.000	Kec. Tenjo
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6	125.460.000	5	14.600.000	Kec. Tenjo
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Tenjo
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8	95.236.000	9	114.900.000	Kec. Tenjo
V.24	KECAMATAN CIAWI							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	167.601.000	6	145.526.500	Kec. Ciawi
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	52.831.000	3	119.882.500	Kec. Ciawi

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	18	459.457.750	16	464.627.500	Kec. Ciawi
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	35.111.000	2	17.095.000	Kec. Ciawi
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	307.644.810	10	397.508.000	Kec. Ciawi
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	151.654.122	4	60.727.500	Kec. Ciawi
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Ciawi
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	171.497.950	8	140.483.000	Kec. Ciawi
V.25	KECAMATAN CISARUA							
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	141.599.000	6	187.316.000	Kec. Cisarua
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	41.977.000	3	120.278.000	Kec. Cisarua
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21	621.714.350	17	738.501.000	Kec. Cisarua
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	12	278.778.000	17	582.654.000	Kec. Cisarua
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	375.932.439	13	457.704.000	Kec. Cisarua
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	13	557.263.259	8	81.575.000	Kec. Cisarua
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8	85.651.500	8	135.341.000	Kec. Cisarua
V.26	KECAMATAN MEGAMENDUNG							
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5	185.825.040	6	178.412.000	Kec. Megamendung
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	1	30.440.000	3	121.185.000	Kec. Megamendung
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	8	575.391.000	18	643.199.000	Kec. Megamendung
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	14.850.000	5	47.702.000	Kec. Megamendung
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10	465.354.000	13	538.870.000	Kec. Megamendung
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	187.118.744	8	50.625.000	Kec. Megamendung
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Megamendung
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1	15.000.000	Kec. Megamendung
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	122.137.000	8	151.160.000	Kec. Megamendung
V.27	KECAMATAN CARINGIN							
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	125.591.000	7	187.000.000	Kec. Caringin
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	37.071.000	3	117.000.000	Kec. Caringin
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23	519.610.000	18	554.525.000	Kec. Caringin
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	13.291.300	4	26.000.000	Kec. Caringin
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	169.399.317	12	245.024.000	Kec. Caringin
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	36.643.000	5	44.500.000	Kec. Caringin
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Caringin
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8	132.027.500	8	129.000.000	Kec. Caringin

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
V.28	KECAMATAN CIJERUK							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5	206.486.000	8	141.410.000	Kec. Cijeruk
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	56.330.500	3	200.987.000	Kec. Cijeruk
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21	639.672.000	18	570.004.000	Kec. Cijeruk
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	37.935.500	5	75.000.000	Kec. Cijeruk
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	408.504.989	11	454.241.000	Kec. Cijeruk
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	7	518.132.789	8	111.991.000	Kec. Cijeruk
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Cijeruk
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	112.929.000	8	120.281.000	Kec. Cijeruk
V.29	KECAMATAN CIOMAS							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	254.001.600	9	262.370.000	Kec. Ciomas
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	31.402.000	4	125.000.000	Kec. Ciomas
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	17	431.169.000	17	566.041.000	Kec. Ciomas
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	6	67.578.000	16	648.674.000	Kec. Ciomas
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	714.022.763	12	680.779.000	Kec. Ciomas
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	5.970.507.422	4	202.000.000	Kec. Ciomas
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Ciomas
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	95.625.000	8	145.223.000	Kec. Ciomas
V.30	KECAMATAN DRAMAGA							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8	210.026.500	9	185.000.000	Kec. Dramaga
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	98.086.000	3	125.311.000	Kec. Dramaga
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20	701.702.500	17	562.462.000	Kec. Dramaga
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	39.147.000	2	30.000.000	Kec. Dramaga
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13	227.626.575	13	292.176.000	Kec. Dramaga
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6	240.655.337	3	30.000.000	Kec. Dramaga
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Dramaga
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	113.607.800	8	115.800.000	Kec. Dramaga
V.31	KECAMATAN TAMANSARI							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	187.268.000	9	193.978.000	Kec. Tamansari
2	Program Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	84.677.000	3	125.259.300	Kec. Tamansari
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	25	329.944.000	18	394.347.200	Kec. Tamansari
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	27.253.000	4	41.783.000	Kec. Tamansari
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	311.070.017	12	480.143.000	Kec. Tamansari
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	10	6.226.090.500	7	192.000.000	Kec. Tamansari
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1	3.000.000	Kec. Tamansari
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	51.531.100	8	58.793.500	Kec. Tamansari

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
V.32	KECAMATAN KLAPANUNGGAL							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	156.007.500	7	214.749.500	Kec. Klapanunggal
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	29.615.000	3	96.391.000	Kec. Klapanunggal
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15	627.541.000	16	520.760.200	Kec. Klapanunggal
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	13.783.000	4	28.000.000	Kec. Klapanunggal
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14	427.244.927	14	606.079.800	Kec. Klapanunggal
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6	6.515.006.000	2	166.963.000	Kec. Klapanunggal
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Klapanunggal
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	116.278.000	8	86.523.500	Kec. Klapanunggal
9	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan	1	32.385.000	1	27.360.000	Kec. Klapanunggal
V.33	KECAMATAN CISEENG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	179.130.000	7	235.347.000	Kec. Ciseeng
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	4	66.415.000	3	105.600.000	Kec. Ciseeng
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	25	768.888.000	17	591.147.000	Kec. Ciseeng
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	7.400.000	1	15.000.000	Kec. Ciseeng
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	7	194.524.926	7	233.248.000	Kec. Ciseeng
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6	322.990.880	1	15.500.000	Kec. Ciseeng
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Ciseeng
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	6	152.564.500	7	217.019.000	Kec. Ciseeng
V.34	KECAMATAN RANCABUNGUR							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	233.945.000	7	206.550.000	Kec. Rancabungur
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	108.600.000	3	117.070.000	Kec. Rancabungur
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16	558.585.000	17	489.247.000	Kec. Rancabungur
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	59.880.000	2	35.600.000	Kec. Rancabungur
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	216.574.306	11	235.120.800	Kec. Rancabungur
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5	61.175.000	4	16.400.000	Kec. Rancabungur
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Rancabungur
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	123.187.000	8	123.091.200	Kec. Rancabungur
V.35	KECAMATAN SUKAJAYA							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6	125.287.000	5	118.600.000	Kec. Sukajaya
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	59.616.000	3	117.344.000	Kec. Sukajaya
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20	385.263.375	14	326.485.000	Kec. Sukajaya
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	79.882.000	3	84.560.000	Kec. Sukajaya
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	212.173.699	13	262.380.000	Kec. Sukajaya
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	306.675.000	5	430.000.000	Kec. Sukajaya

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4					19
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Sukajaya
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	169.992.325	8	189.124.000	Kec. Sukajaya
V.36	KECAMATAN TANJUNGSARI							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	248.340.000	6	228.001.000	Kec. Tanjungsari
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	72.695.000	3	123.740.000	Kec. Tanjungsari
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21	668.460.000	12	530.740.000	Kec. Tanjungsari
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	96.560.000	1	89.860.000	Kec. Tanjungsari
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10	153.004.062	8	111.739.000	Kec. Tanjungsari
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2	106.588.500	1	16.150.000	Kec. Tanjungsari
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Tanjungsari
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	69.955.000	8	60.960.000	Kec. Tanjungsari
V.37	KECAMATAN TAJURHALANG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	4	198.854.000	5	215.854.000	Kec. Tajurhalang
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	59.375.000	3	122.750.000	Kec. Tajurhalang
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14	595.405.700	15	652.441.000	Kec. Tajurhalang
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	30.942.000	2	28.485.000	Kec. Tajurhalang
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	7	283.083.124	8	347.322.000	Kec. Tajurhalang
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	97.910.000	3	22.900.000	Kec. Tajurhalang
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Tajurhalang
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	122.710.300	8	152.009.000	Kec. Tajurhalang
V.38	KECAMATAN CIGOMBONG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	111.480.000	8	176.310.000	Kec. Cigombong
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2	38.920.000	4	116.490.000	Kec. Cigombong
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23	570.447.000	19	667.158.500	Kec. Cigombong
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	28.300.000	3	51.350.000	Kec. Cigombong
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	323.147.000	12	449.439.500	Kec. Cigombong
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2	34.211.000	2	45.000.000	Kec. Cigombong
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Cigombong
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	136.954.000	9	225.308.000	Kec. Cigombong
V.39	KECAMATAN LEUWISADENG							
1	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7	147.384.500	8	169.655.000	Kec. Leuwisadeng
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	45.255.000	3	124.006.000	Kec. Leuwisadeng
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21	596.621.672	18	649.813.000	Kec. Leuwisadeng
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1	17.094.000	3	16.964.000	Kec. Leuwisadeng
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	264.767.823	12	311.174.000	Kec. Leuwisadeng

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		TARGET KINERJA 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	
				5,00	6	7	8	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	19
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4	119.867.500	5	27.250.000	Kec. Leuwisadeng
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Leuwisadeng
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	141.951.000	9	142.378.000	Kec. Leuwisadeng
V.40	KECAMATAN TENJOLAYA							
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8	156.187.000	8	196.032.000	Kec. Tenjolaya
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	36.965.200	3	101.956.000	Kec. Tenjolaya
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21	463.042.700	16	504.592.000	Kec. Tenjolaya
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3	54.659.800	2	45.549.000	Kec. Tenjolaya
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12	191.974.176	12	255.370.000	Kec. Tenjolaya
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6	325.196.191	3	50.036.000	Kec. Tenjolaya
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1		Kec. Tenjolaya
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7	107.934.000	8	113.444.000	Kec. Tenjolaya

Tabel 7.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
I.1	PENDIDIKAN				527.882.258.040		412.882.650.589		392.882.650.589		372.882.650.589		1.706.530.209.809	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	47,75	7.161.600.000	50,13	6.305.695.883	52,63	6.817.276.445	52,63	6.610.410.698	52,63	26.894.983.026	Disdik
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di bangun	%	5,60	113.081.400.000	5,70	82.526.220.377	5,80	95.479.320.645	6,00	91.667.855.117	6,00	382.754.796.139	Disdik
		% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	58,67		63,83		69,21		74,47		74,47		
3	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD	Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di rehab	%	9,30	163.922.540.000	9,50	57.331.508.713	9,60	17.163.292.748	9,70	16.333.465.149	9,70	254.750.806.610	Disdik
		Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	95,75		99,65		99,67		99,68		99,68		
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di bangun	%	2,00	386.000.000	2,10	46.662.087.588	2,20	53.667.829.689	2,30	50.385.377.592	2,30	151.101.294.869	Disdik
5	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di rehab	%	5,00		5,10	11.614.488.538	5,20	13.311.757.561	5,30	12.608.969.533	5,30	37.535.215.632	Disdik
6	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Presentase Penyediaan Sarana dan Prasana Penunjang SD	%	3,00	10.240.000.000	3,00	29.578.230.811	3,00	34.206.779.678	3,50	32.763.922.371	3,50	106.788.932.859	Disdik
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	27.826.400.000	100,00	15.179.925.347	100,00	16.997.339.504	100,00	15.807.224.956	100,00	75.810.889.806	Disdik
		Nilai Rata-Rata UN SD	Point	81,36		84,74		88,12		91,50		91,50		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	89,26		89,42		89,53		89,58		89,58		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	97,47		97,48		97,49		97,50		97,50		
		Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Orang	940,06		959,64		979,60		1.000,00		1.000,00		
		Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	86,90		91,24		95,64		100,00		100,00		
		Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Sekolah	35,72		35,23		34,74		34,26		34,26		
		Angka Putus Sekolah SD-MI	%	0,09		0,09		0,08		0,08		0,08		
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	Presentase Sarana dan Prasama Utama yang dibangun	%	5,60	4.412.400.000	5,70	19.554.575.248	5,80	21.683.373.982	6,00	22.403.875.711	6,00	68.054.224.941	Disdik
		% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	92,72		93,16		93,17		93,18		93,18		
9	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP	Presentase Sarana dan Prasama Utama yang direhab	%	9,30	5.150.200.000	9,50	33.195.616.059	9,60	9.740.952.549	9,70	9.349.389.255	9,70	57.436.157.863	Disdik
		Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	97,19		100,00		100,00		100,00		100,00		
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Presentase Sarana dan Prasama Penunjang yang dibangun	%	0,25	1.870.000.000	0,24	10.893.404.777	0,23	13.479.189.889	0,22	12.963.055.262	0,22	39.205.649.928	Disdik
11	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Presentase Sarana dan Prasama Penunjang yang direhab	%	3,00		3,00	1.486.654.533	3,00	1.703.904.968	3,50	1.613.948.100	3,50	4.804.507.601	Disdik
12	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	%	3,00	1.320.000.000	3,10	30.009.022.749	3,20	33.924.274.601	3,30	32.056.526.849	3,30	97.309.824.199	Disdik
13	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	32.940.477.500	100,00	8.605.139.363	100,00	9.276.224.302	100,00	8.326.834.157	100,00	59.148.675.321	Disdik
		Nilai Rata-rata UN SMP	Point	60,19		65,29		70,40		75,50		75,50		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	83,80		84,01		84,17		84,27		84,27		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	92,72		93,16		93,17		93,18		93,18		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Orang	892,15		904,62		916,81		929,65		929,65		
		Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%	74,21		79,57		84,92		90,62		90,62		
		Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Sekolah	30,87		30,71		30,55		30,38		30,38		
		Angka Putus Sekolah SMP-MTs	%	0,253		0,243		0,233		0,223		0,223		
14	Program Pendidikan Non-Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) Paket A	%	89,26	31.681.680.540	89,42	11.315.749.815	89,53	12.366.326.957	89,58	11.461.359.321	89,58	66.825.116.633	Disdik
		Angka Partisipasi Murni (APM) Paket B	%	83,80		84,01		84,17		84,27		84,27		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A	%	97,47		97,48		97,49		97,50		97,50		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B	%	92,72		93,16		93,17		93,18		93,18		
15	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	87,83	115.151.760.000	90,26	45.088.880.478	92,70	49.152.037.800	95,13	44.607.301.138	95,13	253.999.979.416	Disdik
		% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	86,69		91,13		95,59		100,00		100,00		
		% SD yang memiliki 6 orang guru	%	98,01		98,62		99,32		100,00		100,00		
		% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	40,88		45,53		50,46		55,26		55,26		
		% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	99,95		99,95		99,95		100,00		100,00		
		% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	93,34		95,54		97,74		100,00		100,00		
		% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	92,32		94,93		97,53		100,00		100,00		
		% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	36,35		41,26		46,16		51,33		51,33		
		% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	90,55		93,73		96,90		100,00		100,00		
		% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	45,95		49,27		52,54		55,77		55,77		
		Rasio Guru SD-MI / Murid	Orang	383,92		374,43		364,37		354,42		354,42		
		Rasio Guru SMP-MTs / Murid	Orang	492,44		482,03		471,95		462,04		462,04		
		Rasio guru SD-MI/rombel	Point	1,08		1,06		1,04		1,02		1,02		
16	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	94,00	12.737.800.000	96,00	3.535.450.311	98,00	3.912.769.272	100,00	3.923.135.382	100,00	24.109.154.965	Disdik
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	88,75		92,50		96,25		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	96,61		97,41		98,20		99,00		99,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	92,50		95,00		97,50		100,00		100,00		
1.2	KESEHATAN				1.173.112.712.462		1.119.340.900.522		1.133.629.083.016		1.085.758.133.403		4.483.328.637.029	
1	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100,00	6.522.141.000	100,00	4.910.617.282	100,00	5.042.399.768	100,00	4.346.361.201	100,00	20.821.519.251	Dinkes
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	88,00		91,00		94,00		95,00		95,00		
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,50		95,00		97,50		100,00		100,00		
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,0115		0,0098		0,0081		0,0064		0,0064		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	46,00		46,00		49,00		52,00		52,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Pelayan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS	%	62,50		65,00		67,50		70,00		70,00		
		Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Desa yang melaksanakan STBM	%	42,00		52,00		62,00		72,00		72,00		
		Cakupan Desa ODF (Open Defection Free)	%	15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
		Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)	%	80,08		83,38		86,68		90,00		90,00		
		Cakupan Sanitasi Layak	%	80,36		83,56		86,76		90,00		90,00		
		Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat	%	65,00		65,00		70,00		75,00		80,00		
		Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat	%	65,00		65,00		70,00		75,00		80,00		
2	Program Pelayanan Kesehatan	Akreditasi FKTP	%	0,70	122.372.648.417	0,80	117.334.146.962	0,90	103.293.317.872	1,00	83.125.169.412	1,00	426.125.282.664	Dinkes
		Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re-Akreditasi	%	28,70		50,40		80,10		100,00		100,00		
		Akreditasi puskesmas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN	%	82,00		84,00		86,00		95,00		95,00		
3	Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	76,00	63.594.764.100	77,00	65.502.607.023	78,00	67.467.685.234	80,00	69.491.715.791	80,00	266.056.772.147	Dinkes
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	88,00	2.391.834.000	89,00	1.717.153.807	91,00	1.740.254.226	93,00	1.494.096.124	93,00	7.343.338.157	Dinkes
		Cakupan Keberhasilan pengobatan penderita TBC	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate(CDR) yang diobati	%	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
		Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV	%	55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
		Cakupan kasus cacat kusta tingkat 2	%	<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		
		Cakupan Ibu Hamil diperiksa Hepatitis	%	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
		Cakupan Balita Pneumonia mendapatkan tateleksana sesuai standar	%	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
		Cakupan keberhasilan POPM Kecacingan	%	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
		Angka Kesakitan/ Incidence Rate (IR) Penderita DBD	%	<49,5%		<49%		<48,5%		<48%		<48%		
		Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	%	100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar		100		100		100		100		100		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		100		100		100		100		100		
5	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi nya	%	38,90	92.499.042.300	42,78	71.940.520.167	47,04	49.654.140.008	51,72	41.091.409.695	51,72	255.185.112.170	Dinkes
		Cakupan Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasana sesuai standar	%	73,27		82,00		91,09		100,00		100,00		
		Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dan Indikator Penilaian Pengelolaan Obat di GFK	%	80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	%	1: 205.833	1.650.000.000	1:203.225	120.000.000.000	1:200.781	70.000.000.000	1:200.781	58.000.000.000	1:200.781	249.650.000.000	Dinkes
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	65,00	53.607.811.000	70,00	32.744.111.394	75,00	30.995.043.653	80,00	24.866.511.691	80,00	142.213.477.738	Dinkes
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Jasinga	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.598.057.000	73,00	2.346.906.139	78,00	2.173.636.831	80,00	1.701.723.011	80,00	8.962.051.539	Dinkes
9	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cibungbulang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.858.382.000	73,00	2.672.696.153	78,00	2.612.054.019	80,00	2.146.342.550	80,00	10.369.106.012	Dinkes
10	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Leuwiliang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	6.278.822.000	73,00	4.349.847.525	78,00	4.251.577.208	80,00	3.493.848.609	80,00	16.876.360.980	Dinkes
11	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Nanggung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.893.740.000	73,00	1.922.583.269	78,00	1.811.381.077	80,00	1.440.918.029	80,00	7.378.356.934	Dinkes
12	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Ciamepa	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.176.761.000	73,00	2.278.340.230	78,00	2.335.558.034	80,00	1.939.581.836	80,00	8.972.464.543	Dinkes
13	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Ciawi	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.400.000.000	73,00	2.227.541.272	78,00	2.208.198.043	80,00	1.851.726.788	80,00	8.718.882.946	Dinkes
14	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cigombong	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.066.418.000	73,00	2.041.927.208	78,00	1.932.198.721	80,00	1.546.632.433	80,00	7.855.720.746	Dinkes
15	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cijeruk	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.620.256.000	73,00	2.298.326.861	78,00	2.073.390.398	80,00	1.582.254.855	80,00	8.710.661.379	Dinkes
16	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Bojonggede	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	4.579.233.000	73,00	3.042.414.900	78,00	2.866.441.938	80,00	2.280.198.402	80,00	11.675.969.550	Dinkes
17	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Parung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.928.508.000	73,00	2.616.008.956	78,00	2.475.415.179	80,00	1.981.451.765	80,00	10.064.287.511	Dinkes
18	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sinagali	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.121.740.000	73,00	1.395.198.130	78,00	1.302.049.135	80,00	1.026.675.951	80,00	5.339.548.709	Dinkes
19	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Tajurhalang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.855.013.000	73,00	2.715.675.496	78,00	2.691.445.189	80,00	2.237.860.531	80,00	10.580.429.138	Dinkes
20	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cigudeg	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.648.358.000	73,00	1.847.530.188	78,00	1.831.487.059	80,00	1.535.827.936	80,00	7.231.470.546	Dinkes
21	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cimandala	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.668.839.000	73,00	2.559.432.235	78,00	2.537.206.541	80,00	2.127.622.250	80,00	10.017.944.426	Dinkes
22	Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Cirmekar	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.598.312.000	73,00	1.115.004.778	78,00	1.105.322.104	80,00	926.888.815	80,00	4.364.270.383	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Citeureup	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.441.158.000	73,00	1.586.967.176	78,00	1.479.313.245	80,00	1.158.397.525	80,00	6.083.528.502	Dinkes
24	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Jonggol	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.223.609.000	73,00	2.088.721.229	78,00	1.922.295.757	80,00	1.495.887.288	80,00	7.961.561.714	Dinkes
25	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sentul	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.610.631.000	73,00	1.070.093.680	78,00	1.008.199.102	80,00	802.002.725	80,00	4.106.730.650	Dinkes
26	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Tanjung sari	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.281.000.000	73,00	1.493.527.409	78,00	1.377.396.133	80,00	1.082.715.291	80,00	5.690.534.845	Dinkes
27	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Bantarjaya	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.789.449.000	73,00	1.191.601.489	78,00	1.127.560.536	80,00	902.558.222	80,00	4.584.318.595	Dinkes
28	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Tenjo	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.808.868.000	73,00	929.313.976	78,00	838.471.892	80,00	640.377.514	80,00	3.522.844.002	Dinkes
29	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sukajaya	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.894.578.000	73,00	1.261.607.018	78,00	1.046.969.660	80,00	806.044.281	80,00	4.557.271.102	Dinkes
30	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Parung Panjang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.443.795.200	73,00	2.293.182.912	78,00	2.169.939.008	80,00	1.736.919.318	80,00	8.822.362.217	Dinkes
31	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Tenjolaya	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.672.440.000	73,00	232.918.485	78,00	2.268.929.211	80,00	1.859.186.413	80,00	6.931.305.165	Dinkes
32	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Rumpin	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.681.299.000	73,00	1.200.249.361	78,00	1.097.885.308	80,00	849.511.052	80,00	4.567.460.364	Dinkes
33	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Pamijahan	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.417.656.000	73,00	2.275.830.723	78,00	2.153.195.358	80,00	1.723.194.758	80,00	8.754.637.798	Dinkes
34	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Leuwisadeng	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.666.144.000	73,00	1.009.446.954	78,00	955.195.641	80,00	764.566.918	80,00	3.883.505.982	Dinkes
35	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Dramaga	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.667.863.000	73,00	1.110.636.543	78,00	1.050.946.938	80,00	841.232.705	80,00	4.272.831.353	Dinkes
36	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cimas	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.841.112.000	73,00	1.284.385.373	78,00	1.273.231.836	80,00	1.067.692.779	80,00	5.027.247.775	Dinkes
37	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Caringin	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	4.223.800.000	73,00	2.812.645.062	78,00	2.661.460.818	80,00	2.130.371.955	80,00	10.820.743.237	Dinkes
38	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cisarua	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.420.208.000	73,00	1.001.806.182	78,00	939.687.647	80,00	795.690.735	80,00	3.818.619.729	Dinkes
39	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Megamendung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.195.276.000	73,00	1.291.894.866	78,00	1.280.676.062	80,00	1.073.935.058	80,00	5.056.640.918	Dinkes
40	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Gunung sindur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.055.249.000	73,00	1.087.592.367	78,00	986.924.333	80,00	752.837.866	80,00	4.133.019.123	Dinkes
41	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Ciseeng	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.240.000.000	73,00	2.206.995.916	78,00	2.126.105.234	80,00	1.673.089.222	80,00	8.473.328.944	Dinkes
42	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Kemang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.436.292.000	73,00	1.622.336.696	78,00	1.535.146.854	80,00	1.228.811.707	80,00	6.241.440.308	Dinkes
43	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Gunung Putri	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.300.000.000	73,00	865.675.122	78,00	819.150.625	80,00	655.690.855	80,00	3.330.417.882	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cileungsi	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.747.184.000	73,00	1.163.429.313	78,00	1.100.902.434	80,00	881.203.893	80,00	4.475.950.775	Dinkes
45	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sukamakmur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.837.818.000	73,00	1.665.702.897	78,00	1.591.193.731	80,00	1.285.804.359	80,00	6.429.466.531	Dinkes
46	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cariu	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.750.700.000	73,00	1.165.798.028	78,00	1.103.145.704	80,00	883.012.050	80,00	4.485.048.219	Dinkes
47	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Klapanunggal	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.461.407.000	73,00	973.156.679	78,00	920.855.737	80,00	737.100.927	80,00	3.743.920.004	Dinkes
48	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Lebakwangi	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	877.395.032	78,00	828.358.033	80,00	660.190.550	80,00	2.365.943.614	Dinkes
49	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Purasada	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	1.292.357.194	78,00	1.281.134.432	80,00	1.074.319.781	80,00	3.647.811.407	Dinkes
50	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cijujung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	1.137.030.978	78,00	1.147.651.030	80,00	979.882.173	80,00	3.264.564.181	Dinkes
51	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Situ Udik	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	1.059.640.890	78,00	1.109.800.642	80,00	964.092.393	80,00	3.133.533.925	Dinkes
52	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Banjarsari	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	841.523.738	78,00	781.131.063	80,00	613.347.537	80,00	2.236.002.338	Dinkes
53	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Rancabungur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	672.619.423	78,00	630.409.062	80,00	499.806.213	80,00	1.802.834.698	Dinkes
54	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Kemuning	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	970.317.170	78,00	903.023.191	80,00	710.191.519	80,00	2.583.531.879	Dinkes
55	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sukaraja	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	1.105.254.042	78,00	1.024.240.852	80,00	802.305.537	80,00	2.931.800.430	Dinkes
56	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cilebut	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	911.033.962	78,00	822.388.935	80,00	627.978.790	80,00	2.361.401.687	Dinkes
57	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cibinong	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	952.159.555	78,00	883.825.375	80,00	693.984.338	80,00	2.529.969.268	Dinkes
58	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Pabuaran Indah	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	631.909.861	78,00	597.948.236	80,00	478.628.563	80,00	1.708.486.661	Dinkes
59	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Karadenan	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	705.919.693	78,00	655.257.632	80,00	514.511.535	80,00	1.875.688.859	Dinkes
60	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Babakan Madang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	609.507.584	78,00	560.487.634	80,00	435.818.829	80,00	1.605.814.047	Dinkes
61	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Leuwintug	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	572.020.997	78,00	567.053.984	80,00	475.513.742	80,00	1.614.588.723	Dinkes
62	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Tajur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		73,00	677.800.790	78,00	622.578.480	80,00	483.568.534	80,00	1.783.947.803	Dinkes
63	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cicangkal	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	762.091.705	80,00	762.091.705	Dinkes
64	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Ciasmara	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	821.573.077	80,00	821.573.077	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cinagara	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	331.618.919	80,00	331.618.919	Dinkes
66	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cibulan	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	539.638.372	80,00	539.638.372	Dinkes
67	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sukamanah	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	578.491.773	80,00	578.491.773	Dinkes
68	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Suliwer	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	451.896.170	80,00	451.896.170	Dinkes
69	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cibeuteung Udik	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	522.727.100	80,00	522.727.100	Dinkes
70	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Jampang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	634.001.475	80,00	634.001.475	Dinkes
71	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Sukadama	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	1.105.985.609	80,00	1.105.985.609	Dinkes
72	Program Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Ciderum	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00				78,00		80,00	688.880.545	80,00	688.880.545	Dinkes
	RSUD CIBINONG													
73	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	34.806.655.000	100,00	60.063.693.710	100,00	92.863.552.694	100,00	108.572.783.459	100,00	296.306.684.863	Dinkes
74	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	Cost Recovery Rate (CRR)	%	40,00	280.000.000	50,00	293.000.000	60,00	293.000.000	70,00	315.000.000	70,00	1.181.000.000	Dinkes
75	Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	18.550.000.000	76,00	15.300.000.000	78,00	21.050.000.000	80,00	41.250.000.000	80,00	96.150.000.000	Dinkes
76	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	7.140.000.000	76,00	8.574.305.972	78,00	6.212.570.939	80,00	4.106.475.499	80,00	26.033.352.409	Dinkes
77	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cibinong	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	141.500.000.000	73,00	90.317.835.642	78,00	81.801.094.723	80,00	62.359.866.406	80,00	375.978.796.772	Dinkes
	RSUD CIAWI													
78	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	65,00	21.123.906.000	70,00	26.810.695.033	75,00	15.558.438.780	80,00	12.413.293.880	80,00	75.906.333.693	Dinkes
79	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi	Cost Recovery Rate (CRR)	%	100,00	400.280.100	100,00	354.621.856	100,00	327.652.294	100,00	29.952.645.011	100,00	31.035.199.261	Dinkes
80	Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	13.733.505.600	76,00	102.063.422.458	78,00	87.262.226.346	80,00	177.370.085.449	80,00	380.429.239.852	Dinkes
81	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	51.368.074.400	76,00	2.955.192.297	78,00	3.239.204.903	80,00	15.559.767.715	80,00	73.122.239.315	Dinkes
82	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Ciawi	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	139.214.155.000	73,00	95.354.188.950	78,00	90.945.765.972	80,00	74.350.808.765	80,00	399.864.918.687	Dinkes
	RSUD LEUWILIANG													
83	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	15.518.120.463	100,00	2.359.500.000	100,00	2.595.450.000	100,00	2.854.995.000	100,00	23.328.065.463	Dinkes
84	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	Cost Recovery Rate (CRR)	%	40,00	150.280.555	50,00	291.836.000	60,00	301.426.500	70,00	311.497.000	70,00	1.055.040.055	Dinkes
85	Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	14.660.561.482	76,00	20.274.316.700	78,00	133.125.772.100	80,00	24.470.737.500	80,00	192.531.387.782	Dinkes
86	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	51.190.971.045	76,00	10.198.654.700	78,00	10.554.855.600	80,00	11.106.402.800	80,00	83.050.884.145	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Leuwiliang	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	92.082.415.000	73,00	57.069.625.452	78,00	56.660.119.231	80,00	47.042.054.889	80,00	252.854.214.572	Dinkes
	RSUD CILEUNGSI													
88	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	65,00	17.031.783.800	70,00	13.962.546.077	75,00	12.425.809.650	80,00	23.260.580.363	80,00	66.680.719.890	Dinkes
89	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	Cost Recovery Rate (CRR)	%	100,00	288.700.000	100,00	296.691.281	100,00	311.185.221	100,00	276.260.797	100,00	1.172.837.299	Dinkes
90	Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	51.851.344.000	76,00	49.076.151.055	78,00	35.727.559.444	80,00	36.350.000.000	80,00	173.005.054.499	Dinkes
91	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	8.287.363.000	76,00	21.709.550.000	78,00	24.550.555.000	80,00	7.510.510.000	80,00	62.057.978.000	Dinkes
92	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cileungsi	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	40.896.381.000	73,00	44.534.477.000	78,00	48.172.574.000	80,00	51.810.671.000	80,00	185.414.103.000	Dinkes
I.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				737.275.061.000		686.955.074.241		586.955.074.241		536.955.074.241		2.548.140.283.722	
1	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru	Km	4,00	330.037.909.000	6,00	360.408.902.139	9,00	385.941.881.175	12,00	301.389.325.223	12,00	1.377.778.017.536	DPUPR
			%	33,33		50,00		75,00		100,00		100,00		
		Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jembatan baru	%	-		100,00		-		-		100,00		
		Persentase peningkatan jalan kabupaten	%	45,21		63,47		81,74		100,00		100,00		
		Persentase peningkatan jembatan kabupaten	%	17,95		17,95		17,95		17,95		100,00		
2	Program Pembangunan Jalur Pedestrian	Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian	%	5,09	5.000.000.000	36,74	60.077.385.154	68,11	36.336.544.996	100,00	40.640.603.683	100,00	142.054.533.833	DPUPR
		Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas	meter	1.547,00		11.162,00		20.692,00		30.380,00		30.380,00		
3	Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air	%	31,12	29.278.000.000	31,18	7.697.755.204	31,24	4.692.382.641	31,30	5.477.910.462	31,30	47.146.048.307	DPUPR
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor	%	49,25		64,93		80,60		100		100		
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang direhabilitasi	%	0,59	81.647.400.000	0,59	85.514.152.440	0,59	55.019.956.067	0,59	67.802.336.260	2,96	289.983.844.767	DPUPR
		Persentase jembatan yang direhabilitasi	%	0,36		0,36		0,36		0,36		1,62		
		Persentase jalan yang dipelihara	%	58,07		61,03		64,07		67,26		67,26		
		Persentase jembatan yang dipelihara	%	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%	100		100		100		100		100		
5	Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi	%	100	23.220.000.000	100	18.304.173.495	100,00	11.624.439.766	100,00	14.133.335.001	100,00	67.281.948.261	DPUPR
6	Program Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan	Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan	%	100	550.000.000	100	1.191.600.100	100,00	756.750.016	100,00	920.078.878	100,00	3.418.428.994	DPUPR
7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan	%	100	2.702.000.000	100	2.126.245.368	100,00	1.414.616.354	100,00	1.801.833.604	100,00	8.044.695.327	DPUPR
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan	%	2,19	138.376.472.000	2,05	41.802.798.383	2,26	26.547.722.134	1,94	32.277.499.646	10,46	239.004.492.162	DPUPR
		Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi	%	4,38		4,11		4,52		3,87		19,39		
		Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara	%	23,64		23,64		23,64		23,64		23,64		DPUPR
9	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor	%	39,19	31.600.480.000	59,46	21.924.709.382	79,73	13.923.735.134	100,00	16.928.885.785	100,00	84.377.810.302	DPUPR
10	Program Pengelolaan Penataan Situ	Persentase penataan situ	%	25,00	200.000.000	50,00	371.365.691	75,00	235.843.378	100,00	286.745.300	100,00	1.093.954.368	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Program Pengawasan Jaringan Irigasi	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi	%	100	1.275.000.000	100	582.996.261	100	370.243.700	100	450.153.156	100	2.678.393.118	
12	Program Pembangunan Drainase Lingkungan	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	% Penduduk	25,10	18.950.000.000	26,40	5.451.751.029	27,70	3.462.245.999	29,00	4.209.500.290	29,00	32.073.497.319	
13	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	71,01	35.103.050.000	71,84	30.165.999.645	71,95	19.157.535.080	72,42	23.292.293.352	72,42	107.718.878.077	
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	17,17		17,64		18,11		18,58		18,58		DPUPR
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	69,23		69,52		69,81		70,10		70,10		DPUPR
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	69,23		69,52		69,81		70,10		70,10		DPUPR
15	Program Pelayanan Air Limbah	Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	%	100,00	1.000.000.000	100,00	2.256.271.188	100,00	1.432.891.167	100,00	1.742.151.131	100,00	6.431.313.487	DPUPR
16	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi	Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan	%	75,00	8.344.000.000	75,00	2.527.286.779	80,00	1.605.005.161	80,00	1.951.412.376	80,00	14.427.704.317	
		Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan	%	92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		
		Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat	%	50,00		66,67		83,33		100		100		
17	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100,00	1.150.000.000	100,00	660.372.055	100,00	419.382.781	100,00	509.897.892	100,00	2.739.652.728	
18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	0,05	1.700.000.000	0,05	932.313.267	0,05	592.084.610	0,05	719.873.844	0,05	3.944.271.721	
19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	82,00	465.000.000	83,00	968.967.218	84,00	615.362.451	85,00	748.175.726	85,00	2.797.505.396	DPUPR
20	Program Pengadaan Tanah	Persentase realisasi pengadaan tanah	%	25,74	13.858.750.000	56,38	36.936.910.115	81,51	18.113.930.706	100,00	15.696.076.808	100,00	84.605.667.628	DPUPR
21	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	80,00	12.817.000.000	80,00	7.053.119.325	80,00	4.692.520.926	80,00	5.976.985.823	80,00	30.539.626.074	DPUPR
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				30.162.941.667		25.512.440.705		18.164.275.936		23.449.334.498		90.760.986.372	
1	Program Penataan Perumahan	persentase perumahan yang tertata	%	93,90	2.526.061.000	94,06	8.134.876.299	94,22	4.844.296.374	94,38	6.121.114.914	94,38	21.626.348.587	DPKPP
		Rasio rumah layak huni	rasio	0,2469		0,2516		0,2561		0,2608		0,2608		
		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pengelolaan Rusunawa	Persentase Rusunawa yang dikelola	%	100,00	694.985.500	100,00	674.818.666	100,00	452.505.913	100,00	609.047.952	100,00	2.431.358.031	DPKPP
3	Program Penataan Kawasan permukiman	Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2	1.101.846,67	3.152.182.000	1.156.939,00	2.437.553.008	1.214.785,95	1.680.547.640	1.275.525,25	2.000.095.120	1.275.525,25	9.270.377.769	DPKPP
		Rasio permukiman layak huni	rasio	0,9980		0,9987		0,9993		1,00		1,00		
4	Program Penataan Bangunan	Persentase dokumen teknis yang diterbitkan	%	95,00	938.057.678	95,00	838.431.505	95,00	583.647.599	95,00	701.190.591	95,00	3.061.327.372	DPKPP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase PSU perumahan yang tertata	%	26,22	10.312.880.000	31,22	3.011.970.625	36,22	1.975.527.266	41,22	3.333.782.773	41,22	11.967.721.084	DPKPP
		Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi	159,00		169,00		179,00		189,00		189,00		
		Persentase TPU yang tertata	%	57,21		66,44		75,23		79,78		79,78		
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	36,65		38,92		39,13		41,09		41,09		
6	Program Pengelolaan reklame	Persentase jalur strategis reklame yang tertata	%	62,50	3.705.610.144	72,50	4.455.000.000	82,50	4.465.000.000	92,50	6.685.000.000	92,50	19.310.610.144	DPKPP
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	84,00	8.833.165.345	86,00	5.959.790.602	88,00	4.162.751.144	90,00	3.999.103.148	90,00	23.093.243.385	DPKPP
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	84,00		86,00		88,00		90,00		90,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
I.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				42.597.284.512		32.978.534.152		32.978.534.152		32.978.534.152		131.582.886.608	
1	Program Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	1.119.734.400	100,00	499.860.914	100,00	519.171.955	100,00	576.615.351	100,00	1.917.286.960	Satpol PP
2	Program Pengendalian Ketertaman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100,00	16.243.464.331	100,00	6.772.309.154	100,00	6.718.695.893	100,00	6.631.076.537	100,00	28.908.738.547	Satpol PP
		Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Perlindungan Masayarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	108,75	701.200.000	108,75	1.763.321.775	108,75	1.832.371.607	108,75	1.873.999.891	108,75	6.229.361.696	Satpol PP
4	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum	Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun	orang	70,00	1.096.040.000	75,00	1.157.742.374	80,00	1.145.232.255	85,00	1.153.230.702	95,00	4.008.338.480	Satpol PP
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	80,00	2.948.484.000	81,00	1.915.688.154	82,00	1.893.450.661	83,00	1.873.999.891	83,00	7.371.963.801	Satpol PP
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		82,00		84,00		86,00		86,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		
6	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase mitigasi yang dilaksanakan	%	35,00	1.156.159.000	35,00	1.156.159.000	35,00	1.156.159.000	35,00	1.156.159.000	35,00	4.624.636.000	BPBD
		Cakupan layanan informasi rawan bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	Program Tanggap Darurat Bencana Alam	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	%	100,00	2.905.679.000	100,00	2.905.679.000	100,00	2.905.679.000	100,00	2.905.679.000	100,00	11.622.716.000	BPBD
8	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pemulihan di daerah terkena bencana	%	100,00	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00	2.800.000.000	BPBD
9	Program Pelayanan Adm Umum,Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	80,00	2.552.376.837	80,00	2.602.376.837	80,00	2.602.376.837	80,00	2.602.376.837	80,00	10.409.507.348	BPBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase Perencanaan Sesuai dengan target	%	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase Kinerja keuangan PD sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan Kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
10	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	%	16,67	721.078.000	20,00	958.967.246	23,33	958.967.246	28,33	958.967.246	28,33	3.597.979.738	Disdamkar
11	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota	%	28,26	8.488.217.625	28,54	8.407.801.961	28,83	8.407.801.961	29,12	8.407.801.961	29,12	33.711.623.507	Disdamkar
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	Program Pengelolaan Data informasi dan Pengawasan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%	15,00	320.445.375	20,00	381.548.149	25,00	381.548.149	30,00	381.548.149	30,00	1.465.089.822	Disdamkar
13	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	55,00	3.644.405.944	61,00	3.757.079.588	67,00	3.757.079.588	73,00	3.757.079.588	73,00	14.915.644.709	Disdamkar
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	2,68		2,22		1,82		1,54		1,54		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	28,30		29,72		31,20		32,76		32,76		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,00		97,00		97,00		97,00		97,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	60,08		63,08		66,24		69,53		69,53		
I.6	SOSIAL				25.251.623.875		23.283.817.528		23.370.803.486		23.389.266.720		93.315.437.529	
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan	%	50,00	8.004.000.000	53,00	3.560.935.784	56,00	3.551.478.596	60,00	3.605.275.433	60,00	14.298.335.256	Dinsos
		Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinsos
		Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinsos
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	45,00	5.196.282.906	50,00	4.282.167.584	60,00	4.114.107.946	65,00	4.030.122.608	65,00	16.703.173.825	Dinsos
3	Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%	66,10	7.349.940.969	71,20	9.061.967.991	77,23	9.357.801.931	81,32	9.498.114.614	81,32	36.276.186.138	Dinsos
4	Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS di BKS	Persentase Pelayanan PMKS yang dilaksanakan	%	65,00	950.000.000	70,00	852.463.980	75,00	819.007.842	80,00	797.956.313	80,00	3.326.610.473	Dinsos
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	65,00	3.751.400.000	68,00	5.526.282.190	71,00	5.528.407.171	76,00	5.457.797.752	76,00	22.711.131.838	Dinsos
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	2,50		2,22		1,82		1,54		1,43		Dinsos
		Persentase perencanaan sesuai target	%	27,27		28,64		30,07		31,57		33,15		Dinsos
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,01		97,00		97,00		97,00		97,00		Dinsos
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	60,08		63,08		66,24		69,55		73,03		Dinsos
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II.1	TENAGA KERJA				11.970.126.000		12.056.010.648		12.058.473.440		12.064.619.827		48.212.830.257	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	orang	220,00	1.561.214.000	260,00	1.084.067.311	300,00	1.071.221.960	340,00	1.039.141.820	1.120,00	4.749.596.987	Disnaker
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	12,38	2.632.034.000	12,78	2.230.137.266	13,20	2.103.542.931	14,53	1.923.675.345	14,53	8.879.193.108	Disnaker
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	41,18		42,11		42,86		43,48		43,48		
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	50,74	1.184.773.000	47,36	1.065.926.639	43,98	1.046.843.547	42,29	1.010.320.125	42,29	4.303.273.529	Disnaker
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	35,33		35,71		36,15		36,00		36,00		
4	Program Uji kompetensi angkatan kerja	Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	%	93,75	1.034.762.000	94,44	999.664.645	95,00	1.178.648.758	95,45	1.500.649.826	95,45	4.709.716.587	Disnaker
5	Program peningkatan kompetensi pencari kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	67,57	2.003.410.000	68,00	1.792.090.858	68,46	1.831.226.457	69,19	1.907.598.430	69,19	7.526.564.585	Disnaker
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	85,00	3.553.933.000	86,00	4.884.123.928	87,00	4.826.989.788	88,00	4.683.234.281	88,00	18.044.485.462	Disnaker
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	70,00		73,00		75,00		76,00		76,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	96,22		96,28		96,34		96,65		96,65		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	91,15		91,64		91,88		92,10		92,10		
II.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.669.387.549		2.436.992.449		2.788.705.838		3.187.156.415		10.448.115.303	
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan	%	10,00	1.665.222.450	10,00	2.029.950.482	10,00	2.340.959.674	10,00	2.694.635.634	10,00	8.730.768.240	DP3AP2KB
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpisah	%	32,05		32,05		25,64		12,82		12,82		
		Rasio KDRT	%	0,0036		0,0033		0,0027		0,0016		0,0016		
2	Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase terbentuknya forum anak tingkat kecamatan	%	13,00	1.199.786.966	13,00		13,00		13,00		13,00	1.199.786.966	DP3AP2KB
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpisah	%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
3	Program Pengelolaan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	100,00	370.038.152	100,00	407.041.967	100,00	447.746.164	100,00	492.520.780	100,00	1.717.347.063	DP3AP2KB
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	100,00	5.434.339.981	100,00	5.291.059.997	100,00	5.218.625.283	100,00	5.146.352.732	100,00	21.090.377.994	DP3AP2KB
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Perencanaan Sesuai Target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
II.3	PANGAN				11.574.017.933		11.574.017.933		11.574.017.933		11.574.017.933		46.296.071.732	
1	Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,00	1.662.250.000	104,40	1.662.250.000	103,80	1.662.250.000	103,20	1.662.250.000	103,20	6.649.000.000	DKP
		Skor Angka Kecukupan Protein	%	111,30		111,50		111,80		112,10		112,10		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	92,00	917.568.000	92,50	917.568.000	93,00	917.568.000	93,50	917.568.000	93,50	3.670.272.000	DKP
3	Program Pengawasan dan Pengujian Pangan Segar	Keamanan Pangan Segar yang Diuji	%	88,00	300.000.000	89,00	300.000.000	90,00	300.000.000	91,00	300.000.000	91,00	1.200.000.000	DKP
4	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Energi per Kapita	%	102,80	2.375.918.000	103,10	2.375.918.000	103,40	2.375.918.000	103,70	2.375.918.000	103,70	9.503.672.000	DKP
		Ketersediaan Protein per Kapita:	%	144,30		144,60		144,90		145,20		145,20		
		Ketersediaan Pangan Utama	%	37,63		36,96		36,33		35,72		35,72		
5	Program Distribusi dan Cadangan Pangan	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	92,00	1.611.500.000	92,50	1.611.500.000	93,00	1.611.500.000	93,50	1.611.500.000	93,50	6.446.000.000	DKP
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	%	85,00	4.706.781.933	85,00	4.706.781.933	85,00	4.706.781.933	85,00	4.706.781.933	85,00	18.827.127.732	DKP
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
II.4	PERTANAHAN				1.544.824.125		1.399.163.459		993.714.549		1.214.596.554		5.152.298.687	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah aset pemda yang terdaftar	Bidang	80,00	1.544.824.125	80,00	1.399.163.459	80,00	993.714.549	80,00	1.214.596.554	320,00	5.152.298.687	DPKPP
		Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Bidang	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		320,00		
II.5	LINGKUNGAN HIDUP				172.828.086.520		77.127.915.861		57.127.915.861		37.127.915.861		344.211.834.104	
1	Program Pengelolaan Sampah	Peningkatan penanganan sampah	%	41,03	88.325.176.220	50,24	61.036.866.944	54,34	46.091.402.783	62,90	29.932.879.250	62,90	225.386.325.197	DLH
		Peningkatan Pengurangan sampah	%	11,57		14,48		16,46		18,63		18,63		
2	Program Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Operasionalisasi Pelayanan Angkutan Sampah	%	100,00	15.491.356.500	100,00	4.510.963.372	100,00	3.194.241.008	100,00	2.159.112.904	100,00	25.355.673.784	DLH
3	Program Penataan Lingkungan	Persentase area konservasi dalam bentuk hutan kota dan taman kehati	%	40,00	1.485.000.000	20,00	336.262.031	20,00	211.916.159	20,00	127.384.761	20,00	2.160.562.952	DLH
4	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tingkat capaian penataan sumber penghasil emisi terhadap baku mutu udara	%	80,00	4.050.000.000	90,50	1.016.862.256	95,70	657.121.996	98,00	388.335.401	98,00	6.112.319.653	DLH
		Persentase peningkatan pelaku usaha yang melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3	%	16,89		20,32		25,51		34,25		34,25		
5	Program Peningkatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan	sekolah	465,00	3.538.000.000	625,00	528.621.534	785,00	368.352.122	970,00	235.441.438	970,00	4.670.415.094	DLH
		Jumlah satgas lingkungan hidup	orang	82,00		120,00		122,00		132,00		132,00		
6	Program Penataan Hukum dan Pemulihan Lingkungan	Persentase Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	91,67	1.500.000.000	93,84	285.994.235	93,84	190.089.522	95,38	117.850.684	95,38	2.093.934.441	DLH
7	Program Pelayanan Pengujian UPT Laboratorium	Persentase layanan uji laboratorium lingkungan	%	100,00	1.663.170.000	100,00	307.628.365	100,00	211.461.403	100,00	134.372.111	100,00	2.316.631.879	DLH
8	Program Pelayana Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekreariatian	%	75,00	56.775.383.800	80,00	9.104.717.125	85,00	6.203.330.867	90,00	4.032.539.311	90,00	76.115.971.103	DLH
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
II.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.478.080.000		22.724.431.460		22.724.431.460		22.724.431.460		90.651.374.379	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan	unit	8,00	730.612.000	10,00	584.520.986	12,00	578.424.963	14,00	561.156.636	14,00	2.454.714.584	Disudicapil
2	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1,00	3.000.074.000	1,00	2.456.280.932	1,00	2.485.995.766	1,00	2.465.224.776	1,00	10.407.575.474	Disudicapil
3	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1,00	1.245.540.000	1,00	1.019.773.563	1,00	1.032.110.264	1,00	1.023.486.777	1,00	4.320.910.603	Disudicapil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK	%	100,00	3.974.092.000	100,00	3.253.748.541	100,00	3.293.110.732	100,00	3.265.596.136	100,00	13.786.547.409	Disudicapil
5	Program Pelayanan Ke UPT an	Cakupan Jumlah Penduduk Pemohon Adminduk yang Terlayani	%	100,00	314.720.000	100,00	257.673.889	100,00	260.791.096	100,00	258.612.135	100,00	1.091.797.120	Disudicapil
6	Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	100,00	13.213.042.000	100,00	15.152.433.549	100,00	15.073.998.638	100,00	15.150.355.001	100,00	58.589.829.188	Disudicapil
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00				
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00				
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	94,28		95,05		95,10		95,13				
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00				
II.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.330.000.000		10.133.485.614		10.133.485.614		10.133.485.614		41.873.150.828	
1	Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa	Strata BUMDes :			1.650.000.000		1.628.595.902		1.628.595.902		1.628.595.902		6.535.787.707	DPMD
		Mandiri		4,00		6,00		8,00		10,00		10,00		
		Maju		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
		Berkembang		25,00		30,00		35,00		40,00		40,00		
		Dasar		372,00		360,00		348,00		336,00		336,00		
		persentase raperdes tentang APBDes yang diklarifikasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		persentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pemerintahan Desa	Tingkat perkembangan desa :			1.800.000.000		1.628.595.902		1.628.595.902		1.628.595.902		6.685.787.707	DPMD
		Jumlah Cepat Berkembang	desa	20,00		24,00		28,00		32,00		32,00		
		Jumlah Berkembang	desa	175,00		210,00		245,00		280,00		280,00		
		Jumlah Kurang Berkembang	desa	221,00		182,00		143,00		104,00		104,00		
		Prosentase raperdes tentang RKPDes yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMD
		Sekolah Desa/Kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya	MoU	2,00		2,00		2,00		2,00		8,00		DPMD
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	aplikasi	1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	1.430.000.000	100,00	1.628.595.902	100,00	1.628.595.902	100,00	1.628.595.902	100,00	6.315.787.707	DPMD
		Strata posyandu :												
		Jumlah Mandiri	posyandu	1339		1.501,00		1665		1831		1831		
		Jumlah Purnama	posyandu	1.618,00		1.648,00		1.657,00		1.648,00		1.648,00		
		Jumlah Madya	posyandu	1.917,00		1.732,00		1.566,00		1.416,00		1.416,00		
		Jumlah Pratama	posyandu	53,00		46,00		39,00		32,00		32,00		
		Persentase PKK aktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMD
		Persentase LPM Berprestasi	%	4,80		5,76		6,72		7,68		7,68		DPMD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Program Sarana Prasarana dan Kewilayahan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	4,80	1.450.000.000	5,76	1.628.595.902	6,72	1.628.595.902	7,68	1.628.595.902	7,68	6.335.787.707	
5	Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	50,00	4.000.000.000	50,00	3.619.102.005	50,00	3.619.102.005	50,00	3.619.102.005	50,00	16.000.000.000	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pegawai	%	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
II.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.524.030.917		5.354.540.436		5.365.848.326		5.378.769.479		20.623.189.159	
1	Program Penyuluhan Dan Advokasi Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	83,09	1.969.785.040	88,70	2.474.281.735	94,40	2.498.147.360	100,00	2.523.077.715	100,00	9.465.291.850	DP3AP2KB
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%	11,08	2.554.245.877	11,42	2.880.258.702	11,77	2.867.700.966	12,13	2.855.691.764	12,13	11.157.897.309	DP3AP2KB
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	77,97		78,05		78,12		78,20		78,20		
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%	76,07		76,10		76,09		76,14		76,14		
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%	76,14		76,19		76,25		76,33		76,33		
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	77,14		78,01		78,36		78,84		78,84		
		Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja	%	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
II.9	PERHUBUNGAN				113.423.701.099		113.187.901.099		113.187.901.099		113.187.901.099		452.751.604.396	
1	Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu -rambu	%	45,36	20.440.069.999	51,64	16.243.946.997	56,92	17.671.983.503	71,20	19.862.867.101	71,20	71.977.598.803	Dishub
2	Program Pengelolaan Fasilitas Perengkapan Jalan	jumlah Rambu-rambu yang terpelihara	Kecamatan	40,00	9.215.000.000	40,00	7.645.503.161	40,00	8.441.065.829	40,00	8.932.290.426	40,00	32.508.865.737	Dishub
3	Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	kendaraan	45.000,00	6.088.100.000	45.000,00	10.484.439.805	45.000,00	3.764.645.634	45.000,00	2.718.001.037	45.000,00	22.200.012.107	Dishub
4	Program Pengendalian Ketetiban Lalu Lintas Sarana dan Prasarana LLAJ	Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (VIC rasio)	rasio	0,80	9.212.000.000	0,78	7.496.658.160	0,77	7.778.989.198	0,75	7.642.892.129	0,75	30.406.107.391	Dishub
5	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase layanan angkutan darat	%	60,00	13.519.692.972	65,00	25.043.268.627	70,00	30.084.909.746	75,00	27.695.083.454	75,00	116.595.346.759	Dishub
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	80,00	54.948.838.128	80,00	46.274.084.349	80,00	45.446.307.189	80,00	46.336.766.952	100,00	179.063.673.599	Dishub
		presentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		
		persentase perencanaan sesuai target	%	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		
		Presentase pelayanan kepegawaian	%	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		
II.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.436.443.000		20.184.750.057		20.184.750.057		20.184.750.057		79.990.693.171	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti	%	82,00	3.390.792.000	85,00	3.575.052.934	87,00	5.081.987.648	90,00	4.960.176.291	90,00	17.008.008.872	Diskominfo
		Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi	%	88,00		88,00		88,00		88,00		88,00		
2	Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Layanan Sistem Informasi	%	4,00	4.948.491.000	4,00	9.686.260.990	4,00	4.860.707.149	4,00	4.774.248.664	4,00	24.269.707.803	Diskominfo
3	Program Layanan Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika	%	85,00	4.938.080.000	90,00	3.215.453.772	95,00	4.615.573.688	100	4.512.147.577	100	17.281.255.037	Diskominfo
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100		100		100		100		100		
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	79,79		80,59		81,39		82,21		82,21		
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	90,00	6.159.080.000	90,00	3.707.982.361	90,00	5.626.481.573	90,00	5.938.177.525	90,00	21.431.721.459	Diskominfo
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pegawai	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	97,50		97,50		97,50		97,50		97,50		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
II.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				23.168.846.019		23.420.546.019		20.058.373.591		20.058.373.591		86.706.139.220	
1	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,97	9.891.739.019	98,98	9.938.582.427	98,98	8.552.718.074	98,98	8.655.519.757	98,98	37.038.559.277	DISKOPUKM
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	69,89		72,73		75,58		78,42		78,42		
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	0,69		0,70		0,71		0,72		0,72		
2	Program Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase koperasi aktif	%	36,34	4.171.184.000	38,98	4.211.512.889	41,90	3.624.247.405	45,04	3.667.810.047	45,04	15.674.754.341	DISKOPUKM
		Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi	%	11,87		11,88		11,90		11,91		11,91		
3	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	persentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan	%	5,48	5.300.745.000	5,94	5.351.994.999	6,38	4.605.697.476	6,81	4.661.056.856	6,81	19.919.494.331	DISKOPUKM
4	Program Pelayanan Administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan , dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	95,00	3.805.178.000	95,00	3.918.455.704	96,00	3.275.710.636	97,00	3.073.986.931	97,00	14.073.331.271	DISKOPUKM
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,00		97,5		98,00		98,00		99,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		
II.12	PENANAMAN MODAL				18.076.556.438		18.137.244.668		18.137.244.668		18.137.244.668		72.548.978.670	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN	%	5,50	1.373.248.000	5,20	1.453.261.097	4,90	1.528.743.152	5,60	1.495.454.902	5,60	5.850.707.156	DPMPPTSP
		Jumlah Nilai investasi PMA-PMDN meningkat	Trilyun Rp	9,60		10,10		10,60		11,19		11,19		
		PMA		5,58		5,87		6,16		6,50		6,50		
		PMDN		4,02		4,23		4,44		4,69		4,69		
		Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/Perusahaan	30,00		35,00		38,00		41,00		41,00		
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	5,50		5,20		4,90		5,60		5,60		
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	350,00	3.000.000.000	360,00	3.013.501.358	370,00	3.218.474.075	380,00	3.240.476.301	380,00	12.472.451.746	DPMPPTSP
		PMA		181,00		185,00		189,00		193,00		193,00		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PMDN		169,00		175,00		181,00		187,00		187,00		
3	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang)	Berkas Izin	30.000,00	2.605.000.000	33.000,00	2.413.767.971	36.000,00	2.532.530.761	39.000,00	2.537.662.542	39.000,00	10.088.961.284	DPMPTSP
4	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Operasional	Jumlah Izin Terbit (Bidang Operasional))	Berkas Izin	8.000,00	2.765.683.438	9.923,00	2.750.852.624	10.419,00	2.868.832.367	10.940,00	2.797.773.304	10.940,00	11.183.141.745	DPMPTSP
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	100,00	919.000.000	100,00	1.144.293.432	100,00	1.097.170.589	100,00	1.004.474.173	100,00	4.365.623.286	DPMPTSP
		Perizinan Non OSS Berstandar ISO	Izin	40,00		60,00		70,00		80,00		80,00		
6	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Sistem	1,00	1.300.000.000	1,00	1.260.021.093	1,00	1.288.393.697	1,00	1.253.021.645	1,00	5.101.436.440	DPMPTSP
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	70,00	6.113.625.000	72,00	6.101.547.092	74,00	5.603.100.027	76,00	5.808.381.801	76,00	23.486.657.013	DPMPTSP
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
		Presentase Perencanaan sesuai Target	%	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
		Presentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
		Presentase Pelayanan Kepegawaian	%	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
II.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				88.614.196.557		90.331.196.557		60.331.196.557		40.331.196.557		279.607.786.227	
1	Program Layanan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan	Orang	3.500,00	12.000.000.000	4.000,00	4.153.462.544	4.500,00	2.774.051.211	5.000,00	1.854.443.655	17.000,00	20.781.957.410	Dispora
2	Program Pembudayaan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti/dilaksanakan	Kegiatan	12,00	8.336.340.000	12,00	2.645.517.544	13,00	1.766.911.599	12,00	1.181.174.302	13,00	13.929.943.446	Dispora
		Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga	Orang	50,00		60,00	-	570,00	-	80,00	-	760,00	-	
3	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat :	Peringkat	-	10.300.000.000	-	-	1,00	-	-	-	1,00	10.300.000.000	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Gedung/Lapangan	4,00	27.600.000.000	5,00	75.450.160.368	5,00	50.392.318.811	5,00	33.687.091.105	19,00	187.129.570.284	Dispora
5	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Wilayah	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Wilayah	Gom/Gor/Stadion/Stadion Mini	23,00	14.250.000.000	25,00	3.769.862.500	28,00	2.517.849.029	30,00	1.683.173.381	30,00	22.220.884.910	Dispora
6	Program Pendidikan, Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPMP)	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	165,00	12.000.000.000	180,00	3.174.621.057	250,00	2.120.293.919	250,00	1.417.409.163	250,00	18.712.324.139	Dispora
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75,00	4.127.856.557	80,00	1.137.572.544	85,00	759.771.988	90,00	507.904.950	90,00	6.533.106.039	Dispora
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
II.14	STATISTIK				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.000.000.000	
1	Program Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Diskominfo
II.15	PERSANDIAN				988.307.000		1.000.000.000		950.000.000		1.000.000.000		3.938.307.000	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengelolaan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	988.307.000	100	1.000.000.000	100	950.000.000	100	1.000.000.000	100	3.938.307.000	Diskominfo
II.16	KEBUDAYAAN				9.249.448.727		9.258.419.300		10.184.261.230		11.202.687.353		44.424.253.610	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	25,00	2.204.050.000	25,00	2.471.975.000	25,00	2.719.172.500	25,00	2.991.089.750	125,00	10.429.487.250	Disbudpar
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45,00	1.204.550.000	50,00	1.359.765.000	55,00	1.495.741.500	60,00	1.645.315.650	60,00	5.736.972.150	Disbudpar
		Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Warisan	66,00		73,00		80,00		87,00		87,00		
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	46,00	2.268.350.000	48,00	2.503.600.000	50,00	2.753.960.000	52,00	3.029.356.000	52,00	15.009.903.000	Disbudpar
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	51,00	3.572.498.727	51,00	2.923.079.300	51,00	3.215.387.230	51,00	3.536.925.953	51,00	13.247.891.210	Disbudpar
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	51,00		51,00		51,00		51,00		51,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	51,00		51,00		51,00		51,00		51,00		
II.17	PERPUSTAKAAN				5.212.275.000		1.455.190.238		1.455.190.238		1.455.190.238		6.187.804.571	
1	Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan diwilayah	Perpust	225,00	931.000.000	230,00	727.595.119	235,00	727.595.119	240,00	727.595.119	240,00	3.093.902.286	DAP
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		
		Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	36,62		39,13		39,44		39,73		39,73		
2	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan	Persen	1,84	1.133.000.000	1,86	727.595.119	1,89	727.595.119	1,93	727.595.119	1,93	3.093.902.286	DAP
		Rasio Pengelola Perpustakaan	Persen	3,69		7,37		11,06		14,75		14,75		
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
3	Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	nilai	65,55	3.148.275.000	70,00	3.977.936.793	75,55	3.977.936.793	80,01	3.977.936.793	80,01	15.014.848.672	DAP
		Pesentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas seluruh pegawai	Persen	80,00		90,00		92,00		95,00		95,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	Persen	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	Persen	95,25		96,65		97,50		98,99		98,99		
		Persentase pelayanan kepegawaian	Persen	96,00		96,62		97,00		97,15		97,15		
II.18	KEARSIPAN				2.451.500.000		2.230.654.238		2.230.654.238		2.230.654.238		9.452.471.832	
1	Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang dikelola	Persen	49,02	1.751.500.000	58,25	1.395.013.198	67,96	1.395.013.198	76,92	1.395.013.198	76,92	5.899.133.365	DAP
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program pembinaan penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan kegiatan	kegiatan	3,00	700.000.000	4,00	835.641.040	4,00	835.641.040	4,00	835.641.040	4,00	3.553.338.467	DAP
		Persentase pengelolaan kersipan yang berpredikat baik pada unit kearsipan	Persen	76,67		76,67		76,67		76,67		76,67		
III	URUSAN PILIHAN													
III.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.547.912.053		11.404.252.553		11.489.228.553		11.409.860.953		45.329.354.612	
1	Peningkatan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi	ton	125.822,41	3.342.319.000	127.709,75	3.492.319.000	129.625,39	3.142.319.000	131.569,77	2.562.729.000	131.569,77	12.689.686.000	Diskanak

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Produksi Benih Ikan	RE	5.713.106,56		5.841.651,45		5.973.088,61		6.107.483,11		6.107.483,11		
		Produksi Ikan Hias	RE	292.036,85		296.417,40		300.863,66		305.376,62		305.376,62		
		Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	30,06		30,36		30,67		30,97		30,97		
2	Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan	Produksi olahan produk perikanan	ton	23.163,00	2.521.600.000	23.609,00	2.899.840.000	24.054,00	3.334.816.000	24.500,00	3.835.038.400	24.500,00	12.591.294.400	Diskanak
		Peningkatan status kelas Kelompok perikanan	%	2,00		2,02		2,05		2,08		2,08		
3	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Petencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	%	100,00	4.683.993.053	100,00	5.012.093.553	100,00	5.012.093.553	100,00	5.012.093.553	100,00	20.048.374.212	Diskanak
		Presentasi Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Perencanaan sesuai Target		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentasi Kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan Kesekretariatan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
III.2	PARIWISATA				9.560.030.000		11.443.216.600		12.587.538.260		13.846.292.086		47.437.076.946	
1	Program Pengembangan Pemasaran	Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisatawan	8.064.000	5.030.342.000	8.544.000	5.533.376.200	9.024.000	6.086.713.820	9.600.000	6.695.385.202	9.600.000	23.345.817.222	Disbudpar
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	336.000		356.000		376.000		400.000		400.000		
		Jumlah event pariwisata	event	12		14		16		18		70		
2	Program Pengembangan Destinasi Priwisata	Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional	Usaha	20	1.434.826.000	30	2.258.170.400	40	2.483.987.440	50	2.732.386.184	150	8.909.370.024	Disbudpar
3	Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	3.094.862.000	2	3.651.670.000	2	4.016.837.000	2	4.418.520.700	2	15.181.889.700	Disbudpar
III.3	PERTANIAN				58.817.851.904		59.874.403.404		53.574.403.404		44.729.093.404		216.946.603.616	
1	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	Produksi padi dan palawija	Ton	570.750	8.597.899.404	571.950	8.597.899.404	573.152	6.960.975.904	574.356	5.960.975.904	574.356	30.117.750.616	Distanhorbun
		Padi	Ton GKG	418.884		419.931		420.981		422.033		422.033		
		Palawija	Ton	151.867		152.019		152.171		152.323		152.323		
		Produktivitas tanaman pangan:												
		Produktivitas Padi	ku/ha	55,78		56,36		56,94		57,52		57,52		
		Produktivitas Padi Sawah	ku/ha	33,64		33,66		33,69		33,73		33,73		
		Produktivitas Palawija	ku/ha	171,92		172,05		172,22		172,44		172,44		
		Persentase nilai tambah tanaman pangan	%	1,95		1,95		1,95		1,95		1,95		
2	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan:	Ton	8.032	6.567.180.500,00	8.073	6.567.180.500,00	8.116	6.030.208.000,00	8.160	5.030.208.000,00	8.160	24.194.777.000,00	Distanhorbun
		Persentase nilai tambah tanaman perkebunan	%	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
3	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura:			8.675.947.000		8.675.947.000		6.727.400.000		5.345.400.000		29.424.694.000	Distanhorbun
		Produksi Buah-buahan	Ton	60.572		60.602		60.633		60.663		60.663		
		Produksi Sayuran	Ton	92.950		92.996		93.043		93.089		93.089		
		Produksi Tanaman Hias	Tangkai	4.192.294		4.194.390		4.196.487		4.198.586		4.198.586		
		Pohon		415.494		415.702		415.910		416.118		416.118		
		Produksi tanaman obat	Ton	4.453		4.455		4.457		4.460		4.460		
		Produktivitas sayuran	ku/ha	116,17		116,23		116,30		116,36		116,36		
		Persentase nilai tambah tanaman hortikultura	%	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		
4	Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Persentase pelayanan teknis pertanian	%	80,00	6.374.558.000	80,00	6.374.558.000	80,00	6.509.590.000	80,00	6.509.590.000	80,00	25.768.296.000	Distanhorbun
		Jumlah benih/bibit unggul yang dihasilkan	Ton	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Jumlah data dan Informasi pertanian	dok	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Persentase penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	%	100,00	6.168.184.000	100,00	6.168.184.000	100,00	5.972.402.000	100,00	4.354.402.000	100,00	22.663.172.000	Distanhorbun
		Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kemampuannya	klpk	5,00		5,00		5,00		5,00		20,00		
		Jumlah metode teknologi pertanian	unit	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	85,00	5.624.482.000	85,00	6.730.182.000	85,00	6.913.375.000	85,00	6.913.375.000	85,00	26.181.414.000	Distanhorbun
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
7	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Peternakan	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan, perikanan dan perikanan	%	100,00	8.534.697.000	100,00	8.735.549.000	100,00	7.120.549.000	100,00	4.734.814.500	100,00	28.821.461.500	Diskanak
8	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Produksi Daging	ton	193.274,76	5.985.088.000	199.073,00	5.735.087.500	205.045,20	5.275.087.500	211.196,55	4.365.512.000	211.196,55	21.615.774.500	Diskanak
		Produksi Telur	ton	47.633,82		47.748,14		47.862,74		47.977,61		47.977,61		
		Produksi Susu	ton	20.108,00		20.912,00		21.749,00		22.619,00		22.619,00		
		Produksi Olahan Ternak	ton	73.260,90		75.458,72		77.722,48		80.054,16				
		Peningkatan status kelas Kelompok peternakan	%	2,11		2,15		2,20		2,25		2,25		
		Produksi DOC (Day Out Chick/Bibit) Ayam Lokal Unggul termasuk Terbanyak di Indonesia	Ekor	6.390.151		7.462.524		8.723.047		10.205.538		10.205.538		
9	Program Pencegahan, penanggulangan penyakit hewan dan pengamanan kesehatan Produk Hewan	Penanggulangan Penyakit Hewan:			2.289.816.000		2.289.816.000		2.064.816.000		1.514.816.000		8.159.264.000	Diskanak
		- Rabies	Kecamatan	40		40		40		40		40		
		- Anthrax	Kecamatan	40		40		40		40		40		
		- SE	Kecamatan	40		40		40		40		40		
		- AI	Kecamatan	40		40		40		40		40		
		- Brucellosis	Kecamatan	40		40		40		40		40		
		peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH	Kecamatan	40		40		40		40		40		
III.3	PERDAGANGAN				32.610.359.697		30.162.357.697		20.421.003.834		19.962.922.077		23.028.829.697	
1	Program Pengembangan Perdagangan	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)	Eksportir	328,00	19.425.813.897	348,00	15.452.877.297	368,00	7.173.585.292	388,00	5.407.206.140	388,00	6.237.645.413	Disperdagin
		Jumlah sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga	Unit	5,00		6,00		6,00		6,00		23,00		
2	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha	Persentase UTPP bertanda tera sah dan berlaku	%	60,56	5.732.376.800	62,70	6.034.700.000	63,90	4.975.553.919	65,20	5.456.664.852	65,20	6.294.700.000	Disperdagin
3	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Dan laporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	95,00	7.452.169.000	95,00	8.674.780.400	96,00	8.271.864.623	97,00	9.099.051.085	97,00	10.496.484.284	Disperdagin
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,00		97,5		98,00		98,00		98,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	94,00		95,00		96,00		97,00		97,00		
III.4	PERINDUSTRIAN				12.341.433.000		13.393.943.000		12.135.296.863		12.593.378.620		50.464.051.484	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah komoditi unggulan IKM	Jenis	5	12.341.433.000	5	13.393.943.000	5	12.135.296.863	5	12.593.378.620	20	50.464.051.484	Disperdagin
		Jumlah fasilitas sarana dan prasarana IKM	IKM	500		500		500		500		2.000		
III.5	TRANSMIGRASI				183.245.000		207.761.037		205.298.245		199.151.858		842.256.483	
1	Program Transmigrasi Regional	Laju pengiriman transmigrasi regional	%	100,00	183.245.000	100,00	207.761.037	100,00	205.298.245	100,00	199.151.858	100,00	842.256.483	Disnaker
IV	PENUNJANG URUSAN													
IV.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				23.855.428.000		20.887.930.104		20.887.930.104		20.887.930.104		104.158.847.540	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%	100,00	2.854.796.000	100,00	2.765.842.167	100,00	2.653.828.491	100,00	2.599.950.051	100,00	15.251.460.494	Bappedalitbang
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional	%	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD	%	25,72		28,30		34,13		34,24		34,24		
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	Konsistensi program RKPD terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%	100,00	2.250.000.000	100,00	2.325.216.801	100,00	2.370.488.484	100,00	2.377.930.132	100,00	11.328.913.243	Bappedalitbang
		Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	2.661.384.000	100,00	2.673.999.321	100,00	2.714.441.715	100,00	2.703.794.631	100,00	11.411.348.000	Bappedalitbang
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%	100,00	3.520.004.000	100,00	2.325.216.801	100,00	2.370.488.484	100,00	2.377.930.132	100,00	11.804.898.553	Bappedalitbang
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Inprastuktur Dan Pengembangan Wilayah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW	%	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
5	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Prosentase Hasil Kajian /Penelitian yang Inovatif yang disosilasikan ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat Oleh Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi/Lembaga Peneliti	%	100,00	3.230.000.000	100,00	3.487.825.201	100,00	3.578.972.809	100,00	3.919.181.143	100,00	16.937.591.095	
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatian	%	80,00	9.339.244.000	80,00	7.309.829.815	80,00	7.199.710.122	80,00	6.909.144.016	80,00	37.424.636.155	Bappedalitbang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase Perencanaan Sesuai Target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai	%	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
IV.2	KEUANGAN				60.572.331.814		59.122.430.683		60.029.783.241		54.122.430.683		231.622.075.290	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	83,33	3.017.617.000	86,11	2.528.252.427	88,89	2.506.494.455	91,67	2.417.917.342	91,67	9.896.119.737	BPKAD
		Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	88,89		91,67		94,44		97,22		97,22		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari	%	99,91	2.428.594.000	99,91	1.584.377.721	99,92	2.506.494.455	99,93	1.545.407.737	99,93	7.688.196.072	BPKAD
		Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen	931,00		915,00		1.223,00		1.169,00		4.238,00		
		Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%	93,14		93,20		93,26		93,32		93,32		
3	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu	Tepat	2.883.510.000	Tepat	2.570.388.648	Tepat	2.564.523.853	Tepat	2.445.438.445	Tepat	10.069.064.706	BPKAD
		Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	88,89		91,67		94,44		97,22		97,22		
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD	%	86,12	2.615.479.000	88,89	2.015.530.258	91,67	2.045.951.307	94,45	2.590.959.220	94,45	8.932.219.060	BPKAD
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%	86,12		88,89		91,67		94,45		94,45		
		Persentase BMD yang dimanfaatkan	%	48,01		48,28		48,54		48,81		48,81		
		Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%	33,03		34,06		35,10		36,13		36,13		
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	%	75,00	7.213.245.000	80,00	7.234.994.816	82,00	7.217.432.357	85,00	6.933.821.124	85,00	28.055.928.460	BPKAD
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	85,00		85,00		87,00		87,00		87,00		
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	85,00		85,00		87,00		87,00		87,00		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	85,00		85,00		87,00		87,00		87,00		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	85,00		85,00		87,00		87,00		87,00		
6	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (dalam milyar)	7.709,00	844.926.745	7.872,00	860.701.801	8.019,00	916.063.017	8.161,00	796.619.641	8.161,00	3.418.311.205	Bappenda
7	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%	63,78	335.045.050	62,46	307.562.366	61,32	327.345.091	60,25	284.663.308	60,25	1.254.615.815	Bappenda
8	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp (dalam milyar)	2.792,00	2.355.883.275	2.955,00	1.786.458.487	3.101,00	1.770.080.971	3.244,00	1.457.177.435	3.244,00	7.369.600.168	Bappenda
9	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya	Rp (dalam milyar)	785,00	3.051.025.292	836,00	2.717.209.842	878,00	2.856.699.983	921,00	2.454.933.023	921,00	11.079.868.140	Bappenda
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	WP	4.990,00		5.185,00		5.400,00		5.616,00		5.616,00		
		Jumlah Piutang 8 Pajak Dearah Berbayar	Rp (dalam milyar)	28,00		27,35		26,26		25,21		25,21		
10	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rp (dalam Milyar)	508,00	16.104.636.050	541,00	15.515.578.079	568,00	15.650.443.866	596,00	12.836.494.895	596,00	60.107.152.890	Bappenda
		Colection Ratio	%	59,27		62,97		65,79		70,76		70,76		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar	Rp (dalam Milyar)	97,00		99,86		102,85		105,94		105,94		
11	Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rp (dalam milyar)	591,00	2.619.624.000	629,00	2.186.103.205	661,00	2.332.538.635	694,00	2.015.825.500	694,00	9.154.091.340	Bappenda
12	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	Persentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	%	100,00	600.000.000	100,00	1.198.696.665	100,00	1.391.779.697	100,00	1.320.336.768	100,00	4.510.813.130	Bappenda
13	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	80,00	16.502.746.402	85,00	18.616.576.368	90,00	17.943.935.554	95,00	17.022.836.244	95,00	70.086.094.568	Bappenda
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		83,00		85,00		90,00		90,00		
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
IV.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				26.390.562.000		26.390.562.136		26.390.562.136		21.390.562.136		120.365.327.407	
1	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	17.114.821.000	20	17.114.821.088	20	17.114.821.088	20	13.872.218.486	20	83.508.807.662	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,59		1,75		1,92		2,11		8,93		BKPP
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	10,02		11,02		12,12		13,34		80,66		BKPP
2	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja serta Kesejahteraan ASN	Persentase pegawai ASN Pemkab Bogor yang mempunyai nilai SKP Minimal Baik	%	85,01	2.754.196.000	85,01	2.754.196.014	85,01	2.754.196.014	85,01	2.232.381.435	85,01	10.494.969.463	BKPP
		Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN yang memenuhi persyaratan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKPP
		Penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKPP
3	Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	%	72,04	1.679.056.000	73,00	1.679.056.009	73,50	1.679.056.009	74,00	1.360.939.252	74,00	7.909.060.269	BKPP
		Persentase Kenaikan pangkat tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKPP
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	37,00		37,00		37,00		37,00		37,00		
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	246,00		246,00		246,00		246,00		246,00		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	10.656,00		10.656,00		10.656,00		10.656,00		10.656,00		
4	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi data	persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan	%	90,65	1.186.568.000	90,65	1.186.568.006	90,65	1.186.568.006	90,65	961.758.849	90,65	4.521.462.861	BKPP
		persentase akurasi data kepegawaian	%	83,72		90,00		90,00		90,00		90,00		BKPP
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	90,00	3.655.921.000	90,23	3.655.921.019	90,45	3.655.921.019	90,68	2.963.264.114	90,68	13.931.027.151	BKPP
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,25		97,30		97,30		97,30		97,30		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
V	URUSAN PENDUKUNG													
V.1	PENGAWASAN				5.989.505.000		5.989.505.397		5.989.505.397		5.989.505.397		23.958.021.587	
1	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Tindaklanjuti Hasil Pengawasan	temuan	100	1.564.396.000	100	1.564.396.153	100	1.564.395.836	100	1.564.396.015	100	6.257.584.108	Inspektorat
2	Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B	858.290.000	BB	858.289.840	BB	858.289.808	A	858.289.756	A	3.433.159.461	Inspektorat
		Tindak Lanjut temuan BPK	%	80		80		80		80		80		
3	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75,00	3.566.819.000	80,00	3.566.819.403	82,00	3.566.819.753	85,00	3.566.819.626	85,00	14.267.278.019	Inspektorat
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	85,00		85,00		87,00		87,00		87,00		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
V.2	SEKRETARIAT DPRD				54.191.535.000		54.191.535.362		54.191.535.362		49.191.535.362		211.766.141.087	
1	Program Penyelenggaraan Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase Raperda yang difasilitasi	%	70,00	24.142.260.000	75,00	28.181.316.154	80,00	23.250.232.650	85,00	20.089.019.811	85,00	95.662.828.615	Setwan
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada		ada		ada		ada		ada		
2	Program Penyelenggaraan Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak	ada	16.626.091.000	ada	14.599.550.211	ada	13.311.538.913	ada	11.350.331.181	ada	55.887.511.304	Setwan
3	Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	65,00	10.938.589.000	70,00	9.279.061.160	75,00	15.759.903.559	80,00	16.118.842.579	80,00	52.096.396.298	Setwan
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100		100		100		100		100		
		persentase pelayanan kepegawaian	%	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
4	Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Perencanaan sesuai target	%	100	2.484.595.000	100	2.131.607.837	100	1.869.860.241	100	1.633.341.792	100	8.119.404.870	Setwan
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
V.3	SEKRETARIAT DAERAH				133.083.850.000		113.383.784.512		113.383.784.608		108.383.784.810		448.535.204.799	
1	Program Koordinasi Lingkup Perekonomian	Jumlah BUMD Sehat	BUMD	3,00	1.183.000.000	4,00	1.183.000.000	4,00	1.183.000.000	5,00	1.183.000.000	5,00	4.732.000.000	Setda
		Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan Kebijakan	6,00		10,00		1,00		3,00		20,00		Setda
2	Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan	15,00	11.745.349.000	15,00	11.745.349.000	15,00	11.745.349.000	15,00	11.745.349.000	60,00	46.981.396.000	Setda
3	Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan	4,00	43.229.234.000	4,00	43.229.234.999	4,00	43.229.234.999	4,00	38.229.234.999	16,00	167.916.938.997	Setda
4	Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Produk hukum daerah yang diterbitkan	Produk Hukum Daerah	438,00	1.372.331.000	438,00	1.372.331.900	438,00	1.372.331.900	438,00	1.372.331.900	1.752,00	5.489.326.700	Setda
5	Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum	Persentase cakupan bantuan hukum yang tertangani	%	100,00	1.085.000.000	100,00	1.085.000.000	100,00	1.085.000.000	100,00	1.085.000.000	100,00	4.340.000.000	Setda
6	Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan	14,00	2.876.384.000	14,00	2.876.384.000	14,00	2.876.384.000	14,00	2.876.384.000	56,00	11.505.536.000	Setda
7	Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan	2,00	1.167.961.000	2,00	1.167.961.000	2,00	1.167.961.000	2,00	1.167.961.000	8,00	4.671.844.000	Setda
8	Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Kerjasama daerah	Kerjasama Daerah	50,00	448.025.000	54,00	448.025.750	64,00	448.025.750	71,00	448.025.750	239,00	1.792.102.250	Setda

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Program Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai pemohonan dari Perangkat Daerah	%	98,00	16.229.757.000	98,00	16.229.687.600	98,00	16.229.687.600	98,00	16.229.687.600	98,00	64.918.819.800	Selda
10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Rumusan Kebijakan	34,00	649.175.000	35,00	649.175.000	35,00	649.175.000	36,00	649.175.000	140,00	2.596.700.000	Selda
11	Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rumusan Akuntabilitas Kinerja	Rumusan Kebijakan	4,00	2.425.000.000	4,00	2.425.000.000	4,00	2.425.000.000	4,00	2.425.000.000	16,00	9.700.000.000	Selda
12	Program Kajian Strategis	Rumusan Kajian Strategis	Kajian	60,00	150.000.000	60,00	150.000.000	60,00	150.000.000	60,00	150.000.000	240,00	600.000.000	Selda
13	Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	70,00	4.095.393.000	75,00	4.095.393.000	80,00	4.095.393.000	85,00	4.095.393.000	85,00	16.381.572.000	Selda
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		100,00		100,00	100	100,00		Selda
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		100,00		100,00	100	100,00		Selda
14	Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlayani	%	100,00	2.329.210.000	100,00	2.329.210.263	100,00	2.329.210.263	100,00	2.329.210.263	100,00	9.316.841.052	Selda
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	92,00		94,00			96,00		98,00	98,00		
15	Program Pengelolaan Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah	Index kepuasan pelayanan kesekretariatan	%	70,00	44.098.031.000	75,00	24.398.032.000	80,00	24.398.032.000	85,00	24.398.032.000	100,00	97.592.128.000	Selda
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		100,00		100,00	100	100,00		
VI	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
VI.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.558.639.849		10.614.024.849		10.614.024.849		10.614.024.849		42.456.099.396	
1	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Politik	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan di masyarakat	Kegiatan	9,00	8.822.538.429	9,00	8.890.748.589	9,00	8.956.849.493	9,00	9.020.869.258	9,00	35.691.005.769	Kesbangpol
		Jumlah Pembinaan Politik	Kegiatan	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
		Persentase peran aktif, penguatan dan pemberdayaan orkesmas	%	37,41		38,90		40,46		42,08		42,08		
2	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan Perangkat	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	96,55	1.736.101.420	96,55	1.723.276.260	96,55	1.657.175.356	96,55	1.593.155.591	96,55	6.765.093.626	Kesbangpol
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	96,55		96,55		96,55		96,55		96,55		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	96,55		96,55		96,55		96,55		96,55		
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	96,55		96,55		96,55		96,55		96,55		
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	96,55		96,55		96,55		96,55		96,55		
VII	KEWILAYAHAN													
VII.1	KECAMATAN CIBINONG				30.144.401.947		28.460.436.597		28.460.436.597		28.460.436.597		115.525.711.737	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	48.000.000	100	53.266.399	100	53.266.399	100	53.266.399	100	207.799.197	Kec. Cibinong
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.451.835.022	100	2.500.808.607	100	2.500.808.607	100	2.500.808.607	100	8.954.260.844	Kec. Cibinong
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	4.976.410.000	100	4.976.410.000	100	4.976.410.000	100	4.976.410.000	100	19.905.640.000	Kec. Cibinong
4	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	1.603.907.000	100	1.835.126.212	100	1.835.126.212	100	1.835.126.212	100	7.109.285.635	Kec. Cibinong
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong	%	75	1.336.671.925	80	1.336.671.925	85	1.336.671.925	90	1.336.671.925	90	5.346.687.700	Kec. Cibinong
6	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong	%	75	1.360.860.000	80	1.360.860.000	85	1.360.860.000	90	1.360.860.000	90	5.443.440.000	Kec. Cibinong

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong	%	75	1.159.066.000	80	1.159.066.000	85	1.159.066.000	90	1.159.066.000	90	4.636.264.000	Kec. Cibinong
8	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong	%	75	1.284.009.000	80	1.284.009.000	85	1.284.009.000	90	1.284.009.000	90	5.136.036.000	Kec. Cibinong
9	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong	%	75	1.192.443.000	80	1.192.443.000	85	1.192.443.000	90	1.192.443.000	90	4.769.772.000	Kec. Cibinong
10	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong	%	75	1.194.678.000	80	1.194.678.000	85	1.194.678.000	90	1.194.678.000	90	4.778.712.000	Kec. Cibinong
11	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Harapan Jay Kecamatan Cibinong	%	75	1.151.287.000	80	1.151.287.000	85	1.151.287.000	90	1.151.287.000	90	4.605.148.000	Kec. Cibinong
12	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong	%	75	1.213.401.000	80	1.213.401.000	85	1.213.401.000	90	1.213.401.000	90	4.853.604.000	Kec. Cibinong
13	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong	%	75	1.218.918.000	80	1.218.918.000	85	1.218.918.000	90	1.218.918.000	90	4.875.672.000	Kec. Cibinong
14	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong	%	75	1.153.470.000	80	1.153.470.000	85	1.153.470.000	90	1.153.470.000	90	4.613.880.000	Kec. Cibinong
15	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong	%	75	1.281.325.000	80	1.281.325.000	85	1.281.325.000	90	1.281.325.000	90	5.125.300.000	Kec. Cibinong
16	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong	%	75	1.233.470.000	80	1.233.470.000	85	1.233.470.000	90	1.233.470.000	90	4.933.880.000	Kec. Cibinong
17	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong	%	75	1.224.518.000	80	1.224.518.000	85	1.224.518.000	90	1.224.518.000	90	4.898.072.000	Kec. Cibinong
18	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	6.060.133.000	80	3.090.708.453	85	3.090.708.453	90	3.090.708.453	90	15.332.258.360	Kec. Cibinong
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.2	KECAMATAN GUNUNG PUTRI				2.391.851.500		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		10.321.161.845	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.000.000	100	9.382.416	100	25.560.156	100	26.590.377	100	91.532.949	Kec. Gunungputri
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	684.519.500	100	339.330.702	100	924.425.643	100	961.685.302	100	2.909.961.147	Kec. Gunungputri
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	604.967.000	100	189.212.051	100	515.463.147	100	536.239.270	100	1.845.881.467	Kec. Gunungputri
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.072.365.000	80	2.105.178.279	85	1.177.654.503	90	1.118.588.500	90	5.473.786.282	Kec. Gunungputri
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.3	KECAMATAN CITEUREUP				7.223.414.800		9.316.317.295		9.877.668.857		10.319.231.577		36.736.632.529	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.840.000	100	12.932.782	100	14.183.082	100	15.166.576	100	58.122.439	Kec. Citeureup
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	277.607.000	100	763.393.368	100	837.195.800	100	895.249.264	100	2.773.445.432	Kec. Citeureup
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	861.379.200	100	861.379.200	100	861.379.200	100	861.379.200	100	3.445.516.800	Kec. Citeureup
4	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	734.500.000	100	599.692.437	100	657.668.786	100	703.273.352	100	2.695.134.576	Kec. Citeureup
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puspangegara Kecamatan Citeureup	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Puspangegara Kecamatan Citeureup	%	75	1.346.428.000	80	1.346.428.000	85	1.346.428.000	90	1.346.428.000	90	5.385.712.000	Kec. Citeureup
6	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup	%	75	1.302.034.000	80	1.302.034.000	85	1.302.034.000	90	1.302.034.000	90	5.208.136.000	Kec. Citeureup
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	2.685.626.600	80	4.430.457.509	85	4.858.779.989	90	5.195.701.184	90	17.170.565.282	Kec. Citeureup
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.4	KECAMATAN SUKARAJA				3.136.034.000		3.331.034.483		3.331.034.483		3.331.034.483		13.129.137.448	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	24.852.000	100	65.659.751	100	65.659.751	100	65.659.751	100	221.831.252	Kec. Sukaraja
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	660.000.000	100	874.587.879	100	874.587.879	100	874.587.879	100	3.283.763.636	Kec. Sukaraja
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	700.000.000	100	602.242.652	100	602.242.652	100	602.242.652	100	2.506.727.956	Kec. Sukaraja

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.751.182.000	80	1.788.544.202	85	1.788.544.202	90	1.788.544.202	90	7.116.814.605	Kec. Sukaraja
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.5	KECAMATAN BABAKAN MADANG				2.096.150.000		2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		9.337.529.310	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.932.000	100	84.009.847	100	84.009.847	100	84.009.847	100	282.961.542	Kec. Babakan Madang
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	702.472.000	100	1.195.303.448	100	1.195.303.449	100	1.195.303.449	100	4.288.382.345	Kec. Babakan Madang
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	562.746.000	100	149.358.382	100	149.358.381	100	149.358.381	100	1.010.821.144	Kec. Babakan Madang
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	800.000.000	80	985.121.427	85	985.121.426	90	985.121.427	90	3.755.364.280	Kec. Babakan Madang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.6	KECAMATAN JONGGOL				3.201.458.000		3.560.344.828		3.560.344.828		3.560.344.828		13.882.492.483	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	55.000.000	100	78.326.878	100	76.787.110	100	75.048.577	100	285.162.565	Kec. Jonggol
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	350.820.000	100	1.403.257.842	100	1.364.306.950	100	1.331.056.811	100	4.449.441.604	Kec. Jonggol
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	532.808.000	100	775.300.368	100	785.856.642	100	794.373.552	100	2.888.338.563	Kec. Jonggol
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	2.262.830.000	80	1.303.459.739	85	1.333.394.124	90	1.359.865.888	90	6.259.549.751	Kec. Jonggol
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.7	KECAMATAN CILEUNGSI				3.091.724.000		3.101.724.138		3.101.724.138		3.101.724.138		12.396.896.414	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	66.420.000	100	63.640.883	100	71.349.257	100	76.570.066	100	277.980.206	Kec. Cileungsi
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.124.133.000	100	1.101.639.769	100	1.226.576.909	100	1.307.590.128	100	4.759.939.806	Kec. Cileungsi
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	829.272.000	100	883.560.708	100	990.580.234	100	1.063.063.538	100	3.766.476.479	Kec. Cileungsi
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.071.899.000	80	1.052.882.779	85	813.217.737	90	654.500.405	90	3.592.499.922	Kec. Cileungsi

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.8	KECAMATAN CARIU				2.628.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		10.557.413.793	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	22.548.229	100	22.548.229	100	22.548.229	100	22.548.229	100	90.192.917	Kec. Cariu
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	789.188.028	100	789.188.028	100	789.188.028	100	789.188.028	100	3.156.752.113	Kec. Cariu
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	338.223.441	100	338.223.441	100	338.223.441	100	338.223.441	100	1.352.893.763	Kec. Cariu
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.478.143.750	80	1.493.143.750	85	1.493.143.750	90	1.493.143.750	90	5.957.574.999	Kec. Cariu
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.9	KECAMATAN SUKAMAKMUR				8.500.303.448		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		16.429.613.793	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	53.000.000	100	185.611.197	100	186.741.004	100	187.799.456	100	613.151.657	Kec. Sukamakmur
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	352.103.448	100	757.293.685	100	746.964.018	100	730.331.216	100	2.586.692.367	Kec. Sukamakmur
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	356.200.000	100	245.006.780	100	251.382.121	100	257.354.809	100	1.109.943.711	Kec. Sukamakmur
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	7.739.000.000	80	1.455.191.786	85	1.458.016.304	90	1.467.617.967	90	12.119.826.058	Kec. Sukamakmur
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.10	KECAMATAN PARUNG				2.158.021.000		2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		9.399.400.310	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	18.198.000	100	14.032.702	100	14.032.702	100	14.032.702	100	60.296.105	Kec. Parung
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	866.213.000	100	482.163.634	100	482.163.634	100	482.163.634	100	2.312.703.902	Kec. Parung
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	473.610.000	100	296.651.316	100	296.651.316	100	296.651.316	100	1.363.563.949	Kec. Parung
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	800.000.000	80	1.620.945.451	85	1.620.945.451	90	1.620.945.451	90	5.662.836.354	Kec. Parung
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%		75		80		85		90		90	
VII.11	KECAMATAN GUNUNG SINDUR				2.397.340.000		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		10.326.650.345	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	50.000.000	100	18.818.527	100	18.475.444	100	18.527.308	100	105.821.280	Kec. Gunung Sindur
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	536.440.000	100	926.162.705	100	900.441.478	100	895.549.519	100	3.258.593.702	Kec. Gunung Sindur
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	497.940.000	100	585.413.018	100	574.740.284	100	576.353.682	100	2.234.446.985	Kec. Gunung Sindur
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.312.960.000	80	1.112.709.197	85	1.149.446.241	90	1.152.672.939	90	4.727.788.378	Kec. Gunung Sindur
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.12	KECAMATAN KEMANG				4.089.035.000		4.754.312.265		4.754.312.265		4.754.312.265		18.351.971.795	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	67.253.000	100	59.963.531	100	59.963.531	100	59.963.531	100	247.143.592	Kecamatan Kemang
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.060.262.000	100	1.218.335.754	100	1.218.335.754	100	1.218.335.754	100	4.715.269.263	Kecamatan Kemang
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	211.670.000	100	211.670.000	100	211.670.000	100	211.670.000	100	846.680.000	Kecamatan Kemang
4	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	497.939.000	100	865.326.301	100	865.326.301	100	865.326.301	100	3.093.917.902	Kecamatan Kemang
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang	%	75	1.007.487.000	80	1.007.487.000	85	1.007.487.000	90	1.007.487.000	90	4.029.948.000	Kecamatan Kemang
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.244.424.000	80	1.391.529.680	85	1.391.529.680	90	1.391.529.680	90	5.419.013.039	Kecamatan Kemang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.13	KECAMATAN BOJONGGEDE				4.213.400.000		5.124.610.054		5.124.610.054		5.124.610.054		19.587.230.163	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.480.000	100	7.898.974	100	7.898.974	100	7.898.974	100	39.176.921	Kec. Bojonggede
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	671.975.000	100	461.272.143	100	461.272.143	100	461.272.143	100	2.055.791.428	Kec. Bojonggede
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	439.345.000	100	439.345.000	100	439.345.000	100	439.345.000	100	1.757.380.000	Kec. Bojonggede
4	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	518.422.000	100	366.275.015	100	366.275.015	100	366.275.015	100	1.617.247.044	Kec. Bojonggede
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede	%	75	1.143.822.000	80	1.143.822.000	85	1.143.822.000	90	1.143.822.000	90	4.575.288.000	Kec. Bojonggede
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.424.356.000	80	2.705.996.923	85	2.705.996.923	90	2.705.996.923	90	9.542.346.770	Kec. Bojonggede

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.14	KECAMATAN LEUWILIANG			2.633.018.000		2.872.413.793		2.872.413.793		2.872.413.793		11.250.259.379		
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	16.875.000	100	18.572.189	100	18.572.189	100	18.572.189	100	72.591.566	Kec. Leuwiliang
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	542.085.000	100	596.604.739	100	596.604.739	100	596.604.739	100	2.331.899.218	Kec. Leuwiliang
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	421.650.000	100	464.057.091	100	464.057.091	100	464.057.091	100	1.813.821.274	Kec. Leuwiliang
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.652.408.000	80	1.793.179.774	85	1.793.179.774	90	1.793.179.774	90	7.031.947.321	Kec. Leuwiliang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.15	KECAMATAN CIAMPEA			2.641.384.998		3.331.034.483		3.331.034.483		3.331.034.483		12.634.488.446		
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.400.000	100	14.644.318	100	45.042.091	100	45.042.091	100	135.128.500	Kec. Ciampea
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	393.622.498	100	192.983.931	100	593.568.080	100	593.568.080	100	1.773.742.589	Kec. Ciampea
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	1.095.596.500	100	334.996.724	100	1.030.362.273	100	1.030.362.273	100	3.491.317.771	Kec. Ciampea
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.121.766.000	80	2.788.409.509	85	1.662.062.039	90	1.662.062.039	90	7.234.299.587	Kec. Ciampea
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.16	KECAMATAN CIBUNGBULANG			3.107.249.000		3.789.655.172		3.789.655.172		3.789.655.172		14.476.214.517		
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	25.000.000	100	58.946.298	100	58.946.298	100	58.946.298	100	201.838.895	Kec. Cibungbulang
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.004.435.000	100	1.189.383.043	100	1.189.383.043	100	1.189.383.043	100	4.572.584.130	Kec. Cibungbulang
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	765.426.000	100	625.835.209	100	625.835.209	100	625.835.209	100	2.642.931.627	Kec. Cibungbulang
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.312.388.000	80	1.915.490.622	85	1.915.490.622	90	1.915.490.622	90	7.058.859.865	Kec. Cibungbulang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.17	KECAMATAN PAMIJAHAN				12.389.655.000		3.789.655.172		3.789.655.172		9.789.655.172		29.758.620.517	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	111.456.000	100	13.187.104	100	15.109.541	100	40.115.856	100	179.868.501	Kec. Pamijahan
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.634.522.500	100	1.715.048.911	100	1.827.900.374	100	4.847.807.528	100	10.025.279.313	Kec. Pamijahan
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	947.611.000	100	1.006.011.907	100	1.152.669.954	100	3.060.340.481	100	6.166.633.342	Kec. Pamijahan
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	9.696.065.500	80	1.055.407.250	85	793.975.304	90	1.841.391.308	90	13.386.839.362	Kec. Pamijahan
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.18	KECAMATAN RUMPIN				3.310.551.678		9.560.344.828		3.560.344.828		3.560.344.828		19.991.586.161	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	11.129.000	100	188.448.922	100	70.179.806	100	70.179.806	100	339.937.534	Kec. Rumpin
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	139.429.000	100	2.510.139.641	100	934.795.015	100	934.795.015	100	4.519.158.671	Kec. Rumpin
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	398.758.513	100	1.728.486.286	100	643.701.385	100	643.701.385	100	3.414.647.570	Kec. Rumpin
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	2.761.235.165	80	5.133.269.978,28	85	1.911.668.621,31	90	1.911.668.621	90	11.717.842.386	Kec. Rumpin
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.19	KECAMATAN JASINGA				9.562.825.000		4.018.965.517		4.018.965.517		4.018.965.517		21.619.721.552	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	39.100.000	100	67.561.189	100	67.561.189	100	67.561.189	100	241.783.566	Kec. Jasinga
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	982.752.000	100	1.698.104.691	100	1.698.104.691	100	1.698.104.691	100	6.077.066.072	Kec. Jasinga
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	740.848.000	100	1.107.326.156	100	1.107.326.156	100	1.107.326.156	100	4.062.826.469	Kec. Jasinga
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	7.800.125.000	80	1.145.973.481	85	1.145.973.481	90	1.145.973.481	90	11.238.045.444	Kec. Jasinga
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.20	KECAMATAN PARUNG PANJANG				2.642.391.000		2.872.413.793		2.872.413.793		2.872.413.793		11.259.632.379	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	25.000.000	100	23.460.294	100	29.809.193	100	28.972.023	100	107.241.509	Kec. Parung Panjang
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	852.000.000	100	1.012.077.085	100	1.240.062.410	100	1.199.441.734	100	4.303.581.229	Kec. Parung Panjang
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	617.000.000	100	664.395.527	100	857.312.377	100	847.141.940	100	2.985.849.844	Kec. Parung Panjang
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.148.391.000	80	1.172.480.887	85	745.229.813	90	796.858.097	90	3.862.959.797	Kec. Parung Panjang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.21	KECAMATAN NANGGUNG				2.336.333.000		2.872.413.793		2.872.413.793		2.872.413.793		10.953.574.379	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	17.800.000	100	70.013.456	100	70.961.831	100	70.625.034	100	229.400.322	Kec. Nanggung
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	740.550.000	100	1.195.012.539	100	1.186.807.643	100	1.180.360.190	100	4.302.730.373	Kec. Nanggung
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	436.365.000	100	725.452.911	100	728.727.955	100	731.789.850	100	2.622.335.715	Kec. Nanggung
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.141.618.000	80	881.934.887	85	885.916.364	90	889.638.719	90	3.799.107.970	Kec. Nanggung
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.22	KECAMATAN CIGUDEG				3.564.220.276		3.789.655.172		3.789.655.172		3.789.655.172	390	14.933.185.793	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	44.500.000	100	48.325.595	100	48.325.595	100	48.325.595	100	189.476.786	Kec. Cigudeg
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.891.555.000	100	2.054.169.019	100	2.054.169.019	100	2.054.169.019	100	8.054.062.058	Kec. Cigudeg
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	453.600.000	100	492.595.281	100	492.595.281	100	492.595.281	100	1.931.385.844	Kec. Cigudeg
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.174.565.276	80	1.194.565.276	85	1.194.565.276	90	1.194.565.276	90	4.758.261.105	Kec. Cigudeg
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.23	KECAMATAN TENJO				2.166.767.000		2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		9.408.146.310	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.000.000	100	54.428.455	100	54.428.455	100	54.428.455	100	193.285.364	Kec. Tenjo
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	593.340.000	100	1.661.229.005	100	1.661.229.005	100	1.661.229.005	100	5.577.027.015	Kec. Tenjo
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	607.727.000	100	446.313.328	100	446.313.328	100	446.313.328	100	1.946.666.983	Kec. Tenjo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	935.700.000	80	251.822.316	85	251.822.316	90	251.822.316	90	1.691.166.949	Kec. Tenjo
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.24	KECAMATAN CIAWI				3.194.787.500		3.331.034.483		3.331.034.483		3.331.034.483		13.187.890.948	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	16.130.000	100	62.512.711	100	62.512.711	100	62.512.711	100	203.668.134	Kec. Ciawi
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.022.243.000	100	1.553.887.399	100	1.553.887.399	100	1.553.887.399	100	5.683.905.198	Kec. Ciawi
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	579.682.000	100	642.987.889	100	642.987.889	100	642.987.889	100	2.508.645.668	Kec. Ciawi
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.576.732.500	80	1.071.646.482	85	1.071.646.482	90	1.071.646.482	90	4.791.671.947	Kec. Ciawi
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.25	KECAMATAN CISARUA				4.418.318.000		5.550.720.018		5.591.824.765		5.632.422.219		21.193.285.002	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	20.663.000	100	57.063.707	100	54.346.525	100	51.662.877	100	183.736.109	Kec. Cisarua
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.129.155.000	100	1.167.367.070	100	1.111.780.978	100	1.056.880.900	100	4.465.183.948	Kec. Cisarua
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	229.058.000	100	229.058.000	100	229.058.000	100	229.058.000	100	916.232.000	Kec. Cisarua
4	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	593.607.000	100	774.754.720	100	804.941.771	100	834.756.142	100	3.008.059.633	Kec. Cisarua
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua	%	75	1.545.925.000		1.545.925.000	85	1.545.925.000	90	1.545.925.000	90	6.183.700.000	Kec. Cisarua
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	899.910.000	80	1.776.551.521	85	1.845.772.490	90	1.914.139.300	90	6.436.373.312	Kec. Cisarua
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.26	KECAMATAN MEGAMENDUNG				3.119.527.138		3.101.724.138		3.101.724.138		3.101.724.138		12.424.699.552	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	49.620.000	100	55.110.188	100	55.110.188	100	55.110.188	100	214.950.563	Kec. Megamendung
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	605.068.500	100	628.700.954	100	628.700.954	100	628.700.954	100	2.491.171.362	Kec. Megamendung
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	492.465.000	100	546.953.620	100	546.953.620	100	546.953.620	100	2.133.325.861	Kec. Megamendung

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.972.373.638	80	1.870.959.376	85	1.870.959.376	90	1.870.959.376	90	7.585.251.765	Kec. Megamendung
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.27	KECAMATAN CARINGIN				2.891.724.100		3.101.724.138		3.101.724.138		3.101.724.138		12.196.896.514	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	17.784.000	100	17.681.063	100	17.695.304	100	17.707.219	100	70.867.586	Kec. Caringin
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	813.131.000	100	258.546.251	100	256.256.190	100	254.340.320	100	1.582.273.761	Kec. Caringin
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	410.800.000	100	202.149.009	100	202.311.831	100	202.448.049	100	1.017.708.889	Kec. Caringin
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.650.009.100	80	2.623.347.815	85	2.625.460.812	90	2.627.228.550	90	9.526.046.278	Kec. Caringin
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.28	KECAMATAN CIJERUK				2.243.631.498		2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		9.485.010.808	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	10.684.421	100	10.684.421	100	10.684.421	100	10.684.421	100	42.737.684	Kec. Cijeruk
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	442.676.750	100	482.012.208	100	482.012.208	100	482.012.208	100	1.888.713.375	Kec. Cijeruk
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	317.967.827	100	317.967.827	100	317.967.827	100	317.967.827	100	1.271.871.307	Kec. Cijeruk
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.472.302.500	80	1.603.128.647	85	1.603.128.647	90	1.603.128.647	90	6.281.688.442	Kec. Cijeruk
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.29	KECAMATAN CIOMAS				4.510.893.000		4.728.689.445		4.847.410.524		4.962.083.392		19.049.076.362	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	22.572.000	100	15.363.382	100	16.303.090	100	17.246.657	100	71.485.130	Kec. Ciomas
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	414.845.000	100	982.491.722	100	999.145.151	100	1.012.931.720	100	3.409.413.593	Kec. Ciomas
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	272.830.000	100	272.830.000	100	272.830.000	100	272.830.000	100	1.091.320.000	Kec. Ciomas
4	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	491.987.000	100	535.719.866	100	544.800.423	100	552.317.778	100	2.124.825.068	Kec. Ciomas
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas	%	75	1.417.392.000	80	1.417.392.000	85	1.417.392.000	90	1.417.392.000	90	5.669.568.000	Kec. Ciomas

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.891.267.000	80	1.504.892.474	85	1.596.939.860	90	1.689.365.237	90	6.682.464.571	Kec. Ciomas
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.30	KECAMATAN DRAMAGA				2.477.465.000		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		10.406.775.345	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.000.000	100	332.808.698	100	347.148.248	100	336.597.596	100	1.031.554.542	Kec. Dramaga
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	751.273.500	100	1.123.004.711	100	1.085.031.137	100	1.104.451.511	100	4.063.760.858	Kec. Dramaga
3	Program Fasilitas Kegiatan SKPD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	704.241.500	100	312.717.037	100	318.941.296	100	337.181.032	100	1.673.080.865	Kec. Dramaga
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.006.950.000	80	874.573.002	85	891.982.767	90	864.873.310	90	3.638.379.079	Kec. Dramaga
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.31	KECAMATAN TAMANSARI				2.147.766.000		2.184.482.759		2.184.482.759		2.184.482.759		8.701.214.276	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.000.000	100	452.599.018	100	452.599.018	100	452.599.018	100	1.372.797.053	Kec. Tamansari
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	762.820.000	100	554.486.149	100	554.486.149	100	554.486.149	100	2.426.278.446	Kec. Tamansari
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	328.680.000	100	234.885.228	100	234.885.228	100	234.885.228	100	1.033.335.685	Kec. Tamansari
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.041.266.000	80	942.512.364	85	942.512.364	90	942.512.364	90	3.868.803.091	Kec. Tamansari
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.32	KECAMATAN KLAPANUNGGAL				2.238.515.103		2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		9.479.894.413	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	75	17.662.000	80	38.930.387	85	40.354.126	90	42.456.333	90	139.402.846	Kec. Klapanunggal
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	75	509.626.000	80	410.255.113	85	425.258.720	90	447.412.143	90	1.792.551.977	Kec. Klapanunggal
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Persentase Fasilitas Kegiatan PD	%	75	536.160.000	80	382.100.217	85	396.074.159	90	416.707.242	90	1.731.041.617	Kec. Klapanunggal
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.175.067.103	80	1.582.507.387	85	1.552.106.099	90	1.507.217.385	90	5.816.897.974	Kec. Klapanunggal
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase perencanaan sesuai target	%		75		80		85		90		90	
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%		75		80		85		90		90	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%		75		80		85		90		90	
VII.33	KECAMATAN CISEENG				2.496.170.800		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		10.425.481.145	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	50.000.000	100	54.193.699	100	54.193.699	100	54.193.699	100	212.581.098	Kec. Ciseeng
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	202.000.000	100	218.942.545	100	218.942.545	100	218.942.545	100	858.827.634	Kec. Ciseeng
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	451.238.000	100	489.085.129	100	489.085.129	100	489.085.129	100	1.918.493.386	Kec. Ciseeng
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.792.932.800	80	1.880.882.076	85	1.880.882.076	90	1.880.882.076	90	7.435.579.027	Kec. Ciseeng
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.34	KECAMATAN RANCABUNGUR				1.651.172.414		1.955.172.414		1.955.172.414		1.955.172.414		7.516.689.655	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	16.810.000	100	4.103.275	100	19.965.374	100	19.965.374	100	60.844.023	Kec. Rancabungur
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	482.821.214	100	117.855.338	100	573.450.697	100	573.450.697	100	1.747.577.946	Kec. Rancabungur
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	446.541.200	100	108.999.486	100	530.360.628	100	530.360.628	100	1.616.261.942	Kec. Rancabungur
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	705.000.000	80	1.724.214.316	85	831.395.714	90	831.395.714	90	4.092.005.744	Kec. Rancabungur
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.35	KECAMATAN SUKAJAYA				2.492.382.900		2.872.413.793		2.872.413.793		2.872.413.793		11.109.624.279	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	38.325.000	100	45.812.183	100	45.812.183	100	45.812.183	100	175.761.549	Kec. Sukajaya
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	542.537.100	100	765.063.455	100	765.063.455	100	765.063.455	100	2.837.727.466	Kec. Sukajaya
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	631.829.200	100	911.194.240	100	911.194.240	100	911.194.240	100	3.365.411.921	Kec. Sukajaya
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.279.691.600	80	1.150.343.914	85	1.150.343.914	90	1.150.343.914	90	4.730.723.343	Kec. Sukajaya
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.36	KECAMATAN TANJUNGSARI				2.301.457.680		2.643.103.448		2.643.103.448		2.643.103.448		10.230.768.025	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	42.909.794	100	8.684.213	100	31.403.341	100	27.924.552	100	110.921.900	Kec. Tanjungsari
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	792.281.265	100	168.910.732	100	610.805.057	100	543.141.493	100	2.115.138.548	Kec. Tanjungsari
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	785.458.500	100	219.540.282	100	793.888.659	100	705.943.520	100	2.504.830.961	Kec. Tanjungsari
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	680.808.121	80	2.245.968.221	85	1.207.006.391	90	1.366.093.883	90	5.499.876.616	Kec. Tanjungsari
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.37	KECAMATAN TAJURHALANG				1.682.073.000		1.955.172.414		1.955.172.414		1.955.172.414		7.547.590.241	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	38.880.000	100	9.454.029	100	45.327.248	100	45.327.248	100	138.988.525	Kec. Tajurhalang
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	503.570.000	100	122.447.676	100	587.074.130	100	587.074.130	100	1.800.165.936	Kec. Tajurhalang
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	349.386.000	100	84.956.418	100	407.322.680	100	407.322.680	100	1.248.987.778	Kec. Tajurhalang
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	790.237.000	80	1.738.314.290	85	915.448.356	90	915.448.356	90	4.359.448.002	Kec. Tajurhalang
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.38	KECAMATAN CIGOMBONG				2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		2.413.793.103		9.655.172.413	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	8.800.000	100	2.599.846	100	9.372.147	100	9.647.125	100	30.419.118	Kec. Cigombong
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	962.315.370	100	284.303.619	100	1.024.881.922	100	1.054.951.945	100	3.326.452.856	Kec. Cigombong
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	520.099.750	100	153.656.738	100	553.914.910	100	570.166.767	100	1.797.838.165	Kec. Cigombong
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	922.577.983	80	1.973.232.900	85	825.624.125	90	779.027.266	90	4.500.462.274	Kec. Cigombong
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		
VII.39	KECAMATAN LEUWISADENG				1.942.974.300		2.184.482.759		2.184.482.759		2.184.482.759		8.496.422.576	
1	Program Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	14.113.000	100	90.112.958	100	82.229.241	100	75.010.544	100	261.465.743	Kec. Leuwisadeng
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	125.000.000	100	1.176.715.081	100	1.181.144.523	100	1.185.200.325	100	3.668.059.928	Kec. Leuwisadeng
3	Program Fasilitas Kegiatan PD	Presentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	534.868.600	100	229.519.490	100	230.383.457	100	231.174.545	100	1.225.946.091	Kec. Leuwisadeng

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2020		2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.268.992.700	80	688.135.230	85	690.725.538	95	693.097.345	95	3.340.950.813	Kec. Leuwisadeng
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		95		95		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		95		95		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		95		95		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		95		95		
VII.40	KECAMATAN TENJOLAYA				1.788.811.996		1.955.172.414		1.955.172.414		1.955.172.414		7.654.329.237	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	14.527.000	100	3.551.481	100	17.384.368	100	17.384.368	100	52.847.218	Kec. Tenjolaya
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	235.500.000	100	57.573.751	100	281.821.350	100	281.821.350	100	856.716.451	Kec. Tenjolaya
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	408.320.000	100	99.823.839	100	488.633.943	100	488.633.943	100	1.485.411.726	Kec. Tenjolaya
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.130.464.996	80	1.794.223.342	85	1.167.332.752	90	1.167.332.752	90	5.259.353.842	Kec. Tenjolaya
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		85		90		90		
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		85		90		90		
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		85		90		90		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor periode 2019-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu daerah adalah adanya peningkatan pencapaian indikator makro pembangunan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 8.1.

Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bogor yang memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 disajikan dalam tabel 8.2. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator kinerja sasaran (IKU) seluruh Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada Tabel 8.3.



Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Bogor
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2018)	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	PDRB	Trilyun (Rp)							
	Atas Harga Berlaku		221,55	241,86	256,90	273,00	290,24	308,70	308,70
	Atas Harga Konstan		148,96	158,25	167,73	177,83	188,58	200,05	200,05
2	PRDB Perkapita	Juta (Rp)							
	Atas Harga Berlaku		37,93	40,53	42,16	43,90	45,75	47,72	47,72
	Atas Harga Konstan		25,50	26,45	27,45	28,51	29,64	30,84	30,84
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,21	6,24	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08
4	Laju Inflasi	%	3,35	3,51	3,69	3,87	4,07	4,27	4,27
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	69,69	70,10	70,59	71,08	71,57	72,07	72,07
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,20	2,17	2,11	2,06	2,01	1,96	1,96
7	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	7,14	6,91	6,78	6,60	6,47	6,38	6,38
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,75	9,61	9,20	8,82	8,45	8,10	8,10
9	Indeks Gini	poin	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31
10	Indeks Ketimpangan Willioamson	poin	0,96	0,90	0,86	0,81	0,77	0,73	0,73

Sumber : Hasil Analisis



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2018)	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pendidikan	poin	61,44	61,5	61,89	62,31	62,73	63,14	63,14
2	Indeks Kesehatan	poin	77,82	78,8	79,2	79,6	80,02	80,42	80,42
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,20	2,17	2,11	2,06	2,01	1,96	1,96
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21	6,24	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08
5	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	48	60	63	66	68	70	70
6	Indeks Ketimpangan Williamson	poin	0,96	0,90	0,86	0,81	0,77	0,73	0,73
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	56,21	56,71	57,21	57,71	58,21	58,71	58,71
8	Indeks Kebahagiaan	poin	67,94	67,95	67,97	67,98	68	68,01	68,01
9	Indeks Pembangunan Gender	poin	88,69	88,87	89,16	89,63	90,09	90,56	90,56
10	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	tahun	7,88	8,14	8,3	8,47	8,64	8,8	8,8
11	HLS (Harapan Lama Sekolah)	tahun	12,44	12,60	12,68	12,77	12,85	12,94	12,94
12	Indeks Membaca	poin	52,69	52,81	53,01	53,2	53,39	53,58	53,58
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	70,86	71,22	71,48	71,74	72,01	72,27	72,27
14	Skor Pola Pangan Harapan	poin	86,18	86,73	87,28	87,83	88,38	88,93	88,93
15	Crude Birth Rate (CBR)	%	25,59	24,8	24,03	23,28	22,56	21,86	21,86
16	PDRB Perkapita (AHB)	Juta Rp.	37,93	40,53	42,16	43,90	45,75	47,72	47,72
17	Tingkat Kemiskinan	%	7,14	6,91	6,78	6,60	6,47	6,38	6,38
18	Tingkat pengangguran terbuka	%	9,75	9,61	9,20	8,82	8,45	8,10	8,10
19	PDRB atas dasar harga berlaku	Triliun (Rp)	221,55	241,86	256,90	273,00	290,24	308,70	308,70
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,57	79,05	80	81,05	81,75	82	82
21	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Nilai SAKIP	predikat	B	B	B	BB	BB	A	A
23	Indeks Inovasi Daerah	poin	4.280	6.420	9.630	14.445	21.667	32.500	32.500



No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2018)	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
24	Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	84,9	85	85,1	85,2	85,3	85,4	85,4
25	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	55	60	65	70	75	80	80
26	Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	%	46,2	13,45	28,15	42,02	85,43	100	100
27	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	28,205	36,181	52,599	64,727	70,799	81,526	81,526
28	Indeks risiko bencana	Poin	152	150	148	146	144	142	142
29	Indek kerukunan hidup beragama	poin	67,75	67,92	68,09	68,26	68,43	68,6	68,6
30	Persentase gangguan trantibum	%	NA	84,88	69,77	54,65	39,53	24,41	24,41
31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	57,1	57,57	58,04	58,5	58,9	59	59
32	Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	NA	20	23,33	26,67	30	33,33	33,33

Sumber : Hasil Analis

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	69,69	70,10	70,59	71,08	71,57	72,07	72,07	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,20	2,17	2,11	2,06	2,01	1,96	1,96	Indikator Makro
3	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	7,14	6,91	6,78	6,60	6,47	6,38	6,38	Indikator Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,08	8,62	8,20	7,79	7,40	7,03	7,03	Indikator Makro
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,21	6,24	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08	Indikator Makro
6	Indeks Gini	poin	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	Indikator Makro
7	Indeks Pendidikan	poin	61,44	61,50	61,89	62,31	62,73	63,14	63,14	IKU Pemda
8	Indeks Kesehatan	poin	77,82	78,80	79,20	79,60	80,02	80,42	80,42	IKU Pemda
9	Indeks Ketimpangan Williamson	poin	0,96	0,90	0,86	0,81	0,77	0,73	0,73	IKU Pemda
10	Indeks Pembangunan Gender	poin	88,69	88,87	89,16	89,63	90,09	90,56	90,56	IKU Pemda
11	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	tahun	7,88	8,14	8,30	8,47	8,64	8,8	8,8	IKU Pemda
12	HLS (Harapan Lama Sekolah)	tahun	12,44	12,60	12,68	12,77	12,85	12,94	12,94	IKU Pemda
13	Indeks Membaca	poin	52,69	52,81	53,01	53,20	53,39	53,58	53,58	IKU Pemda
14	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	70,86	71,22	71,48	71,74	72,01	72,27	72,27	IKU Pemda
15	Skor Pola Pangan Harapan	poin	86,18	86,73	87,28	87,83	88,38	88,93	88,93	IKU Pemda
16	Crude Birth Rate (CBR)	%	25,59	24,80	24,03	23,28	22,56	21,86	21,86	IKU Pemda
17	PDRB Perkapita	Juta Rp.	37,93	40,53	42,16	43,90	45,75	47,72	47,72	IKU Pemda
18	Tingkat Kemiskinan	%	7,14	6,91	6,78	6,60	6,47	6,38	6,38	IKU Pemda
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	9,75	9,61	9,20	8,82	8,45	8,10	8,10	IKU Pemda
20	PDRB atas dasar harga berlaku	Triliun (Rp)	221,55	241,86	256,90	273,00	290,24	308,70	308,70	IKU Pemda
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,57	79,05	80,00	81,05	81,75	82,00	82,00	IKU Pemda
22	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Pemda
23	Nilai SAKIP	predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	IKU Pemda
24	Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	84,90	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,40	IKU Pemda
25	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	IKU Pemda
26	Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	%	46,20	13,45	28,15	42,02	85,43	100	100	IKU Pemda
27	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	28,21	36,18	52,60	64,73	70,80	81,53	81,53	IKU Pemda
28	Persentase gangguan trantibum	%	NA	84,88	69,77	54,65	39,53	24,41	24,41	IKU Pemda
29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	57,10	57,57	58,04	58,50	58,90	59,00	59,00	IKU Pemda

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	NA	20,00	23,33	26,67	30,00	33,33	33,33	IKU Pemda
31	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun	poin	867	880	892	905	917	930	930	IKU Disdik
32	Nilai rata-rata UN dari SD	poin	74,6	77,98	81,36	84,74	88,12	91,50	91,50	IKU Disdik
33	Nilai rata-rata UN dari SMP	poin	49,98	55,08	60,19	65,29	70,40	75,50	75,50	IKU Disdik
34	Persentase sekolah dasar (SD) yang terakreditasi minimal B	%	78,17	82,53	86,90	91,24	95,64	100	100	IKU Disdik
35	Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang terakreditasi minimal B	%	63,72	68,97	74,21	79,57	84,92	90,62	90,62	IKU Disdik
36	Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4	%	82,97	85,39	87,83	90,26	92,70	95,13	95,13	IKU Disdik
37	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	poin	43,33	45,48	47,75	50,13	52,63	55,25	55,25	IKU Disdik
38	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	poin	97,45	97,46	97,47	97,48	97,49	97,50	97,50	IKU Disdik
39	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B	poin	92,69	92,7	92,72	93,16	93,17	93,18	93,18	IKU Disdik
40	Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	poin	0,098	0,094	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	IKU Disdik
41	Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	poin	0,273	0,263	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	IKU Disdik
42	Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	87,73	92,8	92,80	95,20	97,60	100	100	IKU Dinkes
43	Prevalensi stunting	%	0,329	0,329	0,296	0,262	0,229	0,196	0,20	IKU Dinkes
44	Cakupan keluarga bebas rokok	%	50,08	52,5	55,00	57,50	60,00	62,50	62,50	IKU Dinkes
45	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,22	70	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	IKU Dinkes
46	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	0,871	0,87	0,88	0,89	0,91	0,93	0,93	IKU Dinkes
47	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	86,41	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,40	IKU DPUPR
48	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan infrastruktur penyehatan lingkungan	%	NA	58,15	58,62	59,09	59,56	60,03	60,03	IKU DPUPR
49	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	67,74	68,20	68,65	69,10	69,55	70,00	70,00	IKU DPUPR
50	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	%	NA	45,00	70,00	80,00	90,00	100	100	IKU DPUPR
51	Persentase luasan RTH Publik sebesar 20% terhadap luas wilayah kawasan perkotaan	%	1,90	2,15	2,42	2,68	2,95	3,22	3,22	IKU DPUPR

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,61	94,15	94,79	95,56	96,29	96,97	96,97	IKU DPKPP
53	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,042	0,067	0,055	0,045	0,011	0	0	IKU DPKPP
54	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%	71,95	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00	IKU DPKPP
55	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	76,52	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	IKU Satpol PP
56	Persentase jumlah korban bencana yang selamat	%	NA	100	100	100	100	100	100	IKU BPBD
57	Persentase masyarakat yang mendapat Rehabilitasi Rekonstruksi	%	NA	100	100	100	100	100	100	IKU BPBD
58	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	%	NA	27,98	28,26	28,54	28,83	29,12	29,12	IKU Disdamkar
59	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota	%	NA	11,67	16,67	20,00	23,33	28,33	28,33	IKU Disdamkar
60	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%	NA	10	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	IKU Disdamkar
61	Persentase PMKS yang ditangani	%	NA	14,21	14,34	14,35	14,35	14,35	14,35	DINSOS
62	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS	%	16.729	28,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	DINSOS
63	Cakupan pembinaan kualitas kehidupan sosial	%	0,44	0,49	0,54	0,59	0,63	0,68	0,68	IKU Kesbangpol
64	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	NA	11,94	12,38	12,78	13,20	14,53	14,53	IKU Disnaker
65	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	49,2	27,80	27,80	27,85	27,90	27,95	27,95	IKU DP3AP2KB
66	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	25,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	IKU DP3AP2KB
67	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	NA	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	IKU DP3AP2KB
68	Cakupan Penyediaan data informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	NA	100	100	100	100	100	100	IKU DP3AP2KB
69	Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevalance Rate (CPR)	%	73,63	70,63	70,69	70,75	70,82	70,88	70,88	IKU DP3AP2KB
70	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	NA	16,578	16,486	16,394	16,302	16,21	16,21	IKU DP3AP2KB
71	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (DO)	%	NA	12,13	12,05	11,97	11,88	11,81	11,81	IKU DP3AP2KB

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Penanganan Desa Rawan Pangan	desa	NA	19	40	62	85	109	109	IKU DKP
73	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita									IKU DKP
	Energi	%	102,26	102,5	102,8	103,1	103,4	103,7	103,7	
	Protein	%	143,68	144	144,3	144,6	144,9	145,2	145,2	
74	Ketersediaan Pangan Utama	%	63,00	38,33	37,63	36,96	36,33	35,72	35,72	IKU DKP
75	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,80	105,60	105,00	104,40	103,80	103,20	103,20	IKU DKP
76	Skor Angka Kecukupan Protein	%	110,90	111,10	111,30	111,50	111,80	112,10	112,10	IKU DKP
77	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	93,50	IKU DKP
78	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	93,50	IKU DKP
79	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	95,02	100	100	100	100	100	100	IKU DKP
80	Keamanan Pangan Segar yang Diuji	%	NA	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00	IKU DKP
81	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	28,21	36,18	52,60	64,73	70,80	81,53	81,53	IKU DLH
82	Indeks Kualitas Udara	poin	72,42	72,92	73,42	73,92	74,42	74,92	74,92	IKU DLH
83	Indeks Kualitas Air	poin	47,55	48,05	48,51	49,05	49,55	59,05	59,05	IKU DLH
84	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	58,66	59,16	59,66	60,16	60,66	61,16	61,16	IKU DLH
85	cakupan penerbitan KTP	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU DISDUK
86	cakupan penerbitan akte kelahiran anak	%	92,23	92,77	92,90	94,12	95,30	96,43	96,43	IKU DISDUK
87	persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU DISDUK
88	Indek Desa Membangun (IDM)	poin	0,6336	0,6337	0,6338	0,6339	0,6340	0,6341	0,6341	IKU DPMD
89	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan keuangannya	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU DPMD
90	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU DPMD
91	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	IKU DPMD
92	Persentase lembaga desa aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU DPMD
93	Persentase program/kegiatan desa yang dilaksanakan melalui swadaya	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU DPMD
94	Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (V/C rasio)	%	0,82	0,80	0,78	0,77	0,75	0,70	0,70	IKU Dishub
95	Persentase layanan angkutan darat	%	0,58	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	IKU Dishub
96	Indeks SPBE	poin	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKU Diskominfo
97	Diseminasi Informasi melalui Media	%	70	70	70	75	80	85	85	IKU Diskominfo
98	Persentase Koperasi Aktif dan sehat	%	31,61	34,70	37,92	41,45	45,31	49,53	49,53	IKU DISKOPUKM

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	poin	NA	100	120	130	140	150	150	IKU DISKOPUKM
100	Jumlah Nilai Investasi PMA/ PMDN	Trilyun Rp.	8,69	9,1	9,60	10,10	10,60	11,20	11,20	IKU DPMPTSP
	PMA	Trilyun Rp.	5,05	5,29	5,58	5,87	6,16	6,50	6,50	IKU DPMPTSP
	PMDN	Trilyun Rp.	3,64	3,81	4,02	4,23	4,44	4,69	4,69	IKU DPMPTSP
101	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	perusahaan	331	340	350	360	370	380	380	IKU DPMPTSP
	PMA	perusahaan	173	177	181	185	189	193	193	IKU DPMPTSP
	PMDN	perusahaan	158	163	169	175	181	187	187	IKU DPMPTSP
102	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	rasio	20,00	30,00	35,00	38,00	41,00	45,00	45,00	IKU DPMPTSP
103	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN	%	98,4	4,70	5,50	5,20	4,90	5,60	5,60	IKU DPMPTSP
104	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan melalui OPTIMIS (Hari Kerja)	hari	3-10	7	6	6	5	5	5	IKU DPMPTSP
105	Perizinan Non OSS Berstandar ISO	izin	77	20	40	60	70	80	80	IKU DPMPTSP
106	Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha	%	NA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	IKU Dispora
107	Jumlah Atlet berpretasi	atlit	NA	291	318	187	226	217	217	IKU Dispora
108	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun	unit	NA	1	8	6	7	6	6	IKU Dispora
109	Jumlah Kunjungan Wisatawan	wisatawan	7.513.209	7.900.000	8.400.000	8.900.000	9.400.000	10.000.000	10.000.000	IKU Disbudpar
110	Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	unit	NA	58	66	73	80	87	87	IKU Disbudpar
111	Persentase Pengunjung perpustakaan	%	1,30	1,81	1,84	1,86	1,89	1,93	1,93	IKU DAP
112	Persentase Pengelolaan arsip secara baku berbasis TIK	%	3,13	15,63	31,25	46,88	62,50	78,13	78,13	IKU DAP
113	Produksi Perikanan	ton	143.456	146.681	148.985	151.319	153.679	156.070	156.070	IKU Diskanak
114	Produksi Peternakan	ton	248.177	254.500	261.017	267.733	274.657	281.793	281.793	IKU Diskanak
115	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan									IKU Distanhorbun
	Produksi padi	Ton GKG	545.418	417.839	418.884	419.931	420.981	422.033	422.033	
	Produksi Palawija (Ton)	Ton	162.190	151.715	151.867	152.019	152.171	152.323	152.323	
	Produksi sayuran (Ton)	Ton	95.252	92.487	92.950	92.996	93.043	93.089	93.089	
	Produksi buah-buahan (Ton)	Ton	131.369	59.972	60.572	60.602	60.633	60.663	60.663	
	Produksi tanaman hias bunga (tangcai)	Tangkai	4.389.308	4.150.786	4.192.294	4.194.390	4.196.487	4.198.586	4.198.586	
	Produksi tanaman hias daun indah (pohon)	Pohon	527.119	411.380	415.494	415.702	415.910	416.118	416.118	
	Produksi tanaman obat (Ton)	Ton	11.228	4.409	4.453	4.455	4.457	4.460	4.460	
	Produksi tanaman perkebunan (Ton)	Ton	7.939	7.993	8.032	8.073	8.116	8.160	8.160	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya:									IKU Distanhorbun
	- Produktivitas padi sawah (ku/ha)	ku/ha	63,25	55,20	55,78	56,36	56,94	57,52	57,52	
	- Produktivitas padi gogo (ku/ha)	ku/ha	32,58	33,62	33,64	33,66	33,69	33,73	33,73	
	- Produktivitas palawija (ku/ha)	ku/ha	172,02	171,83	171,92	172,05	172,22	172,44	172,44	
	- Produktivitas sayuran (ku/ha)	ku/ha	116,05	116,11	116,17	116,23	116,30	116,36	116,36	
117	Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	%	NA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IKU Distanhorbun
118	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang terbentuk (klpk)	klpk	0	8	8	8	8	8	40	IKU Distanhorbun
119	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Juta Rp.	29.721.902	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	41.000.000	41.000.000	IKU Disperdagin
120	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Juta Rp.	117.985.635	126.000.000	135.000.000	143.000.000	152.000.000	161.000.000	161.000.000	IKU Disperdagin
121	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%		100	100	100	100	100	100	IKU Bappedalitbang
122	Persentase Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKU Bappedalitbang
123	Persentase Inovasi di Kabupaten Bogor	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKU Bappedalitbang
124	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKU BPKAD
125	Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	IKU BPKAD
126	Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	100.00% (72 PD)	IKU BPKAD
127	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	38,28	34,19	36,22	37,54	38,68	39,75	39,75	IKU Bappenda
128	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	103,59	100	100	100	100	100	100	IKU Bappenda
129	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	70,47	68,32	67,50	67,91	67,95	68,21	68,21	IKU Bappenda
130	Persentase Penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan	%	NA	72,04	72,04	73,00	73,50	74,00	74,00	IKU BKPP
131	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	NA	11,00	9,68	10,64	11,71	12,88	12,88	IKU BKPP
132	Persentase ASN yang mempunyai penilaian prestasi kerja minimal baik	%	NA	85,01	85,01	85,01	85,01	85,01	85,01	IKU BKPP
133	Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah	%	NA	4,27	4,27	4,60	4,46	7,10	7,10	IKU Setda

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	NA	15,38	23,08	38,46	3,85	11,54	11,54	IKU Setda
135	Kualitas penyusunan LPPD	Nilai	3,06	3,40	3,40	3,45	3,50	3,55	3,55	IKU Setda
136	Persentase penyelesaian kasus tanah	%	70,00	70,25	79,07	83,72	88,37	93,02	93,02	IKU Setda
137	Jumlah DOB	DOB	0	1	2	2	2	0	2	IKU Setda
138	Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan	%	119,17	100	100	100	100	100	100	IKU Setda
139	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	%	13,46	100	100	100	100	100	100	IKU Setda
140	Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	rasio	100	100	100	100	100	100	100	IKU Setda
141	Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti	%	100	33,33	33,33	50,00	66,67	83,33	83,33	IKU Setda
142	Persentase kerjasama yang di implementasikan	%	161,11	100	100	100	100	100	100	IKU Setda
143	Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD	%	97,49	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	IKU Setda
144	Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76.61	%	65,00	80,00	80,00	81,05	81,75	82,00	82,00	IKU Setda
145	Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU Setda
146	Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60	%	NA	84,38	84,38	87,50	93,75	100	100	IKU Setda
147	Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif	%	NA	60	60	60	60	60	60	IKU Setda
148	Persentase lembaga keagamaan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU Setda
149	Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	IKU Setwan
150	Level Maturitas SPIP	level	2	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
151	Level Kapabilitas APIP	level	2	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
152	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cibinong
153	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Gunungputri
154	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Citeureup
155	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Sukaraja

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Babakanmadang
157	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Jonggol
158	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cileungsi
159	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cariu
160	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Sukamakmur
161	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Parung
162	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Gunungsindur
163	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Kemang
164	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Bojonggede
165	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Leuwiliang
166	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Ciampea
167	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cibungbulang
168	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Pamijahan
169	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Rumpin
170	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Jasinga
171	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Parungpanjang
172	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Nanggung
173	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cigudeg
174	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Tenjo

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Ciawi
176	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cisarua
177	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Megamendung
178	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Caringin
179	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cijeruk
180	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Ciomas
181	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Dramaga
182	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Taman Sari
183	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Klapanunggal
184	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Ciseeng
185	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Rancabungur
186	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Sukajaya
187	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Tanjungsari
188	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Tajurhalang
189	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Cigombong
190	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Leuwisadeng
191	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	NA	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Kecamatan Tenjolaya
B	ASPEK DAYA SAING									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	48,00	60,00	63,00	66,00	68,00	70,00	70,00	IKU Pemda
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	56,21	56,71	57,21	57,71	58,21	58,71	58,71	IKU Pemda
3	Indeks Kebahagiaan	poin	67,94	67,95	67,97	67,98	68	68,01	68,01	IKU Pemda

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Indeks risiko bencana	Poin	152	150	148	146	144	142	142	IKU Pemda
5	Indek kerukunan hidup beragama	poin	67,75	67,92	68,09	68,26	68,43	68,6	68,6	IKU Pemda
6	Indeks Inovasi Daerah	poin	4.280	6.420	9.630	14.445	21.667	32.500	32.500	IKU Pemda

BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam program-program pembangunan daerah, baik dalam bentuk program strategis/program prioritas pembangunan daerah maupun program pembangunan seluruh perangkat daerah. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 mengandung seluruh indikator kinerja utama (IKU) daerah serta seluruh perangkat daerah, dan mengandung seluruh indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dokumen ini penting untuk dipedomani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyinergikan seluruh target-target lintas sektoral yang bermuara pada terwujudnya **Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban**. Keberhasilan seluruh indikator dan target daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kesesuaian dengan pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah ini.

Untuk itu, merujuk pada tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ini, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut sebagai kaidah yang dipedomani bersama :

1. Seluruh Perangkat Daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2020 hingga 2023 mempedomani substansi dokumen ini. Adapun RKPD Tahun 2019 secara otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi dokumen RPJMD ini.
3. Dokumen ini dievaluasi setiap tahun berdasarkan hasil pelaksanaan IKU tahun rencana.
4. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappedalitbang selaku koordinator, menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028 pada tahun terakhir sebelum dokumen ini berakhir dengan mengacu kepada hasil pencapaian kinerja utama daerah dan kinerja

utama perangkat daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD dimaksud menjadi landasan penyusunan serta bersinergi dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.

5. Penyusunan RKPD Tahun 2024 merujuk pada permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, jika dikemudian hari terjadi kondisi yang menyebabkan RPJMD ini diubah, maka perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga bermanfaat.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN